

AKU DAN CITA-CITA KEINDONESIAAN
Bunga Rampai Gagasan Kebangsaan Anak Negeri

Cetakan I,

Diterbitkan oleh
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam

(PB HMI)

contact:

Hak cipta dilindungi undang-undang
Allright reserved

Penulis :

Awardee YIB Angkatan IV Tahun 2017

Editor :

Mawardin, Faiz Zawahir M, Serpian, Haikal

Layout Buku : *Sirajuddin*

Cover Buku : *Rahmat Syarif*

**Semoga karya ini dapat menjadi sumbangan yang
berguna bagi Khazanah Ilmu pengetahuan dan
Peradaban**

TESTIMONI

“Kami dari Yayasan Insancita Bangsa (YIB) merasa bangga atas karya Awardee YIB Angkatan IV 2017. Setelah menempuh training IELTS selama empat bulan sebagai tiket untuk melanjutkan ikhtiar studi ke luar negeri, kader-kader terpilih se-nusantara ini mentransformasikan ide-ide cemerlangnya melalui buku, untuk bangsa Indonesia yang lebih hebat di masa depan. Selamat berjuang. Yakin Usaha Sampai.”

Ir. Ismet Djafar, MM (Direktur Pelaksana YIB, Wakil Sekjen Majelis Nasional KAHMI 2012-2017)

“Buku ini adalah jawaban terhadap publik bahwa kader HMI bukan hanya memegang toa untuk berorasi di jalanan, tapi juga menulis. Dan memang sedari dulu kader hijau hitam telah mewarnai diskursus pemikiran di pentas nasional. Di tengah-tengah aktivitas kursus bahasa Inggris yang intensif atas asuhan Yayasan Insancita Bangsa (YIB), anak-anak muda penempuh jalan sunyi ini sukses menerbitkan buku. Hal itu juga pertanda bahwa santri YIB adalah pendekar siap tanding untuk menghadapi ombak zaman”.

Muhammad Arief Rosyid Hasan (Ketua Umum HMI Periode 2013-2015, Fungsionaris Pergerakan Indonesia Muda)

“Buku yang ditulis oleh para Awardee YIB Angkatan IV 2017 patut diapresiasi sebagai sumbangan yang berharga bagi pembangunan bangsa dan negara. Kontributor tulisan dari berbagai latar belakang ini benar-benar memperkaya wawasan keindonesiaan kita, sekaligus referensi yang aktual guna mengurai kompleksitas persoalan saat ini.”

Mulyadi P Tamsir (Ketua Umum HMI Periode 2016-2018)

KATA PENGANTAR

[WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA]

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih dapat berkarya untuk bangsa dan negara. Ketika saya menerima delegasi Yayasan Insancita Bangsa (YIB) yang terdiri dari 50 peserta Kursus Bahasa Inggris YIB Angkatan ke-4 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2017, saya mengatakan bahwa salah satu kelemahan aktivis adalah minimnya kemampuan berbahasa Inggris. Atas nama pemerintah maupun selaku Ketua Majelis Etik Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program Kursus Bahasa Inggris Intensif yang digagas oleh YIB untuk mendorong generasi muda, dalam hal ini kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi terutama ke luar negeri.

YIB sebagai yayasan yang didirikan oleh beberapa alumni HMI dengan perhatian utama pada pendidikan, adalah wahana yang tepat bagi para kader HMI untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selain kompetensi akademik, kepemimpinan dan integritas, kemampuan berbahasa Inggris adalah syarat utama yang harus dimiliki oleh generasi muda untuk melamar beasiswa ke luar negeri sehingga dapat menjadi pemimpin, tidak hanya tingkat nasional, tapi juga dunia internasional. Dengan demikian, maka anak-anak HMI betul-betul menjalankan tujuan HMI sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian. Lebih daripada itu, harus ada pimpinan-pimpinan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang serius mendalami spesifikasi akademiknya, lalu berupaya memajukan ilmunya demi kepentingan kemanusiaan.

Salah satu peluang yang dapat diraih oleh generasi muda adalah fasilitas beasiswa yang disediakan oleh pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemerintah sudah menyiapkan dana puluhan triliun rupiah untuk membiayai anak-anak muda yang ingin menjadi yang terbaik di universitas-universitas ternama di dunia dan juga (di) dalam negeri. Dengan kekuatan ilmu pengetahuan itulah, kita bisa bersaing dengan bangsa lain di dunia ini. Saya

berharap bahwa kader muda HMI dapat merebut masa depan melalui ilmu agar dapat menjadi insan akademis.

Saya mengapresiasi, di sela-sela Kursus Bahasa Inggris Intensif yang berlangsung sejak tanggal 25 Januari-22 Mei 2017 di YIB Training Center di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, para awardee angkatan ke-4 dapat menuliskan isi hati dan menuangkan pikirannya untuk kemajuan Indonesia. Judul buku “Aku dan Cita-Cita Keindonesiaan” ini sangat relevan sebagai bentuk ikhtiar bersama antar segenap komponen bangsa untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia yang bermartabat, adil dan makmur. Saya mengucapkan selamat kepada Awardee YIB, semoga karya tulis anak muda dari berbagai daerah dan latar belakang akademik ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.

Jakarta, Juni 2017

Drs. H.M. Jusuf Kalla

CATATAN EDITOR

“Indonesia” sebuah kata yang tidak hanya merujuk pada wilayah geografis sebuah negara. Namun lebih dari itu, Indonesia merupakan simbol harapan, perjuangan tapi juga keputusan jika kita melihat dinamika ironik yang terjadi pada saat ini. Berbagai kompleksitas permasalahan di hampir semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara seakan tak kunjung selesai. Laksana bunga mawar, Indonesia kadang menduri dan memekar.

Sebut saja, di bidang ekonomi – rupiah seakan tidak ada nilainya, menurunnya penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila begitu terlihat dalam proses interaksi setiap individu dan lembaga negara. Kelompok intoleran masih eksis, diperparah lagi dengan paras buruk terorisme sampai seteru Israel dengan Palestina yang tak pernah usai. Konflik antar elite politik hingga akar rumput juga memperkeruh suasana. Belum lagi jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin semakin parah, juga kerusakan lingkungan, hingga krisis air bersih.

Kata “aku” dalam judul buku ini sebagai manifestasi dari totalitas kehirupan yang dimiliki oleh setiap orang. Kata “aku” melingkupi segala realitas yang ada dalam diri dan dimiliki oleh diri beserta eksistensinya. Ketika kata “aku” dirangkaikan dalam *phrase* “cita-cita keindonesiaan”, maka segala hal yang dimiliki oleh diri si “Aku” dan wujud eksistensinya diperuntukkan untuk mencapai cita-cita keindonesiaan sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Anak negeri dari berbagai kutub nusantara ini, diharapkan menjadi aktor kepemimpinan nasional dan global di masa depan. Karena itu, pergolakan pemikiran kebangsaan, serta energi keteladanan para pendiri bangsa perlu dijiwai. Kelak, mereka dapat mentransformasikan pemikiran generasi pendahulu, lalu dikontekstualisasikan dengan perkembangan mutakhir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedari dulu sampai sekarang, para pendiri bangsa dan mereka yang mengisi ruang pembangunan di semua sektor telah mewariskan tradisi menulis buku. Karena itulah, kita sebagai generasi muda yang lahir di alam reformasi mesti menyadari, bahwa pemikiran yang lahir dari proses dialektika di mana pun kita berkiprah, selayaknya diabadikan dalam bentuk buku agar lintasan

pikiran yang berkecamuk di kepala tidak berlalu lalang begitu saja. Apalagi iklim intelektual di era demokratisasi ini sangat kondusif untuk mengekspresikan ide dan gagasan tanpa ketakutan untuk diadili.

Buku ini merupakan guratan kegelisahan anak negeri dari berbagai penjuru Indonesia yang berisi ragam gagasan serta cita-cita keindonesiaan. Anak muda yang dipersatukan oleh semangat untuk memperhebat Indonesia lewat pendidikan agar dapat bersaing di tingkat global. Karena itulah, melanjutkan studi ke kuliah di luar negeri adalah ikhtiar yang mesti dirawat. Mereka adalah Awardee Yayasan Insancita Bangsa (YIB) 2017 untuk mengikuti program *Intensive English Course, wabil khusus 'ngaji' IELTS (International English Language Testing System)* yang diadakan di Wisma Hafid Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. YIB yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan senior-senior Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) adalah wadah yang *concern* dengan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung para kader hijau hitam melintasi benua agar dapat mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara bermodalkan kekuatan intelektual.

Buku ini disusun dari kumpulan tulisan setiap peserta di tengah kesibukannya mengikuti pelatihan, kemudian menyempatkan diri untuk menuliskan gagasan serta pemikiran kebangsaannya. Awalnya teknis pengumpulan tulisan dilakukan melalui seleksi, tapi atas pertimbangan spirit sama-sama belajar, lalu ditampunglah semua tulisan yang ada betatapun warna-warni isinya, kendati tidak semua juga menulis. Ragam gagasan yang berisi 44 tulisan ini pun dikoleksi sebagai prasasti gagasan anak negeri. Kami bersyukur meski sumberdaya yang terbatas, ruang dan waktu yang terjepit dalam suatu kompleksitas, tak diduga mendapat sambutan yang hangat dari 'santri' YIB.

Para kontributor ini berasal dari latar belakang pendidikan, profesi dan peminatan yang cukup berwarna. Ada yang bergiat sebagai guru, wirausahawan/wati, aktivis mahasiswa dan pemuda, wartawan, peneliti, akuntan, budayawan, mubaligh, teknisi, tenaga medis, bankir, aktivis lingkungan, dan lainnya. Mereka dipersatukan pula oleh lingkungan HMI yang membentuk pola pikir dalam kerangka NDP. Dengan mengombinasikan latar akademik dan pengalaman profesional yang bermacam-macam, maka ritual

penulisan buku ini dimaksudkan sebagai wahana saling belajar yang seru sekaligus ngeri. Harap dimaklumi juga, bahwa sebagai buku bunga rampai, gagasan di dalamnya memang berpencar-pencar, berkeping-keping, bahkan saling bertabrakan. Namun benang merah yang mengikat rangkaian pemikiran itu adalah cita-cita untuk membangun Indonesia. Itu saja.

Setiap kontributor pun dibebaskan untuk meluncurkan gagasannya sesuai peminatan. Yang namanya juga sedang belajar. Ya tentu saja mungkin akan dianggap biasa-biasa saja oleh pembaca yang tinggi 'maqom' akademiknya. Akan tetapi, kami yakin bahwa menulis itu ibarat melamar sang kekasih untuk digiring ke altar pelaminan. Menegangkan. Jantung berdebar-debar, tapi *happy ending* dikala tercapai kesepakatan *nan* sakral. Sungguhpun diwarnai gejolak yang barangkali mencemaskan, hadir pula ketakutan untuk disidang calon mertua, namun kesabaran revolusioner untuk berani mengungkapkan 'suasana kebatinan' adalah metode sejuta umat yang dipakai para pelamar.

Begitu pula menulis, atau juga melamar beasiswa. Perlu keberanian dan energi ekstra, pantang menyerah dan terus mengasah 'pedang' untuk terjun di medan laga. Kami akan saling mendukung untuk sama-sama belajar. Setiap kontributor pun bebas menggunakan gayanya dalam menulis, entah itu bergaya struktur sistematika ilmiah, bergaya esai santai seperti air yang mengalir, gaya lucu-lucuan, gaya serius-serius amat disertai akrobatik istilah ilmiah yang melangit, membumi, menggunung, *no problem*. Yang penting menulis, menulis dan menulis dalam frame akademik. Harus diakui para kontributor tulisan dalam buku ini beragam coraknya. Ada yang memang penulis profesional, misalnya pernah ngirim tulisan di media massa, jurnal bahkan sudah menerbitkan buku. Tapi tak sedikit pula yang baru menulis, "terpaksa" menulis, atau 'terlanjur" menulis. Tapi buat kami tak masalah, yang penting semangat, berniat merenungi dan merenangi mata air gagasan, lalu menjadi tugas editor untuk mencukur 'bulu-bulu' tulisan yang penuh semak belukar, mencuci, menjemur, kemudian menyetriknya.

Dalam sejarah kronologis pengumpulan tulisan ini, ada yang berbulan-bulan baru mengirim tulisan, itupun setelah dipaksa, ada yang berminggu-minggu. Maksud daripada itu semua adalah bagaimana kita terbiasa menulis dalam masa 'kegentingan'. Akan

tetapi ada pula yang cuma beberapa hari, bahkan ada pula kontributor yang cukup beberapa jam saja mengirim tulisannya. Mungkin saja penulis yang disebutkan terakhir memang punya stok tulisan di bank data yang tersimpan laptopnya, lantas cukup dirapikan seperlunya, lantas kontributor inilah yang cepat-tepat mengirimkan tulisannya tanpa perlu dicukur, dicuci dan disetrika lagi. Tak pelak, kontributor yang disebutkan di bawah ini begitu amat segera mengirimkan tulisannya berdasarkan urutan bab sebagai berikut:

Sebut saja, pada Bab I Cita-Cita Keislaman dan Keindonesiaan, sdr. **Faiz Zawahir Muntaha** yang menulis “Menjadi Muslim yang Meng-Indonesia”. Latar belakang sebagai penstudi tarbiyah ikut melezatkan hidangan yang meneguhkan Islam berwajah keindonesiaan, bertautan dengan kupasan pegiat kajian hadits **Azizurrochim**, berupaya mengikat tali-temali keislaman-keindonesiaan, lalu disegarkan dengan tafsir yang berkarakter pembaharuan tulisan penstudi ilmu Al-Qur’an dan Hadits **Amylia Karunia AR**.

Kemudian pada Bab II Cita-Cita Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, sdr. **Rahmat Syarif** yang menulis “Social Entrepreneurship”, sangat didukung oleh latar belakangnya sebagai lulusan Sarjana Ekonomi sekaligus pegiat literasi di Philosophia Institute (Makassar) yang *concern* pada wacana dan praksis bisnis sosial. Juga **Khairul Umam H** yang menulis “Belajar dari yang ke-3”, mencerminkan keotentikannya sebagai ekonom (akuntan), lalu harapannya yang menyiratkan pesan agar kita memiliki kesadaran kewirausahaan yang berbasis teknokratik.

Kita bisa melihat juga pada Bab III Cita-Cita Hukum, Politik dan Kebijakan Pembangunan, sdr. **Dora Elkasih** yang terobsesi dengan reformasi birokrasi, lalu **Tri Puspita Ningrum** yang menggambarkan jejak pergundikan dalam lintasan sejarah kekuasaan Indonesia. Kemudian sdr. **Ferdian** yang menulis “Banten, Politik Jawara, dan Hijrahnya Para Putra Daerah”, sangat kritis membedah anatomi kebantenan dalam konteks politik dan kultural keindonesiaan yang menggelisahkannya selaku “Jawara Intelektual” masa depan. Juga tulisan **Faisyal** menyoal Bima dalam lanskap otonomi daerah.

Pada Bab IV Cita-Cita Peradaban, dan Perdamaian Dunia, sdr. **Desy Pratiwi Irma Suryani** yang menulis “Membangun Rumah: antara Kebijakan dan Investasi Peradaban”, di mana cita-citanya sangat visioner mengimajinasikan rumah sebagai sumber kebahagiaan holistik. Lihat juga ‘mata hati’ sdr. **Hady Nurjaya** yang meneropong “Pergulatan Parpol Islam di Panggung Politik Tanah Dewata”, mampu mengombinasikan antara kapasitasnya sebagai sejarawan dengan pergulatan rohaninya di Denpasar. Senada dengan tulisan sdr. **Sabil Mokodenseho** bertajuk “Membumikan Semangat Toleransi untuk Indonesia”, menggambarkan komitmen intelektualnya yang kuat untuk mengedepankan etos toleran di Bumi Nusantara yang terinspirasi dari kearifan lokal toleransi di Manado. Demikian pula dengan sdr. **Mawardin** yang mengurai “Signifikansi Peran Indonesia dalam Resolusi Konflik Israel-Palestina”, terpercik cita-cita dari penstudi Ilmu Hubungan Internasional ini untuk terus menyalakan cahaya perdamaian dunia.

Tengok pula pada Bab V Cita-Cita Sosial, Budaya, dan Pendidikan, sdr. **Serpian** menulis “Merayakan Nasionalisasi Primordialisme: dari Wacana menuju Aksi”, menggebu-gebu api nasionalisme, berkehendak mengajak pemirsa membaca ulang nasionalisme dalam konteks mikroskopik. Lalu sdr. **Hera Yulita Oesman** yang menulis “Semangat Revolusi Mental: Harapan menuju Indonesia yang Terdidik dan Tercerahkan”, sejurus nawacita Jokowi-JK untuk Indonesia Hebat. Juga sdr. **Sri Hardiyanti** yang menyoroti dunia pendidikan sebagai investasi masa depan yang perlu diperhebat.

Pada Bab VI. Cita-Cita Teknologi, Lingkungan, dan Media Massa, sdr. **Abdul Haris Ibrahim** yang menulis “Kesakitan Masyarakat, Kelangkaan Air (bersih) dan Komodifikasi Banjir, mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro alam, sekaligus menawarkan solusi konkret. Latar belakang sebagai penstudi kesehatan masyarakat (lingkungan) serta pengalamannya sebagai jurnalis ikut mempertajam ayunan penanya. Tak kalah nyentrik juga adalah tulisan sdr. **Adhi Nurseto** yang menulis “Sampah: dari warga, oleh warga, dan untuk warga“, sekalipun bergaya kocak namun serius, lagi-lagi pegiat kesehatan masyarakat ini menawarkan solusi yang ril tanpa basa-basi. Pun sdr. **Ita Septiani** yang fokus dengan dunia media menulis “New Media dan Gerakan Sosial”, adalah

temuannya yang mencengangkan bagaimana di era digital ini gerakan sosial bisa menggalang opini publik yang massif untuk mempengaruhi sebuah konstelasi.

Namun demikian, setiap tulisan tentu saja punya sisi kekhasan tersendiri, siapa tahu bisa menjadi inspirasi kecil bagi pembaca. Harap maklum pula, buku ini masih jauh dari kata sempurna namun sekecil apapun butir-butir pemikiran ini, semoga menjadi sumbangan pengetahuan yang berguna bagi peningkatan kualitas literasi bangsa Indonesia. Kami selaku editor merasa bangga dengan antusiasme teman-teman YIB, sehingga kerjasamanya melezatkan renungan kami yang sudah mewakafkan ruang dan waktu untuk mengedit seadanya tulisan yang tersedia. Beberapa tata kalimat dan substansi sedikit dipermak sana-sini, tanpa mereduksi keapaan dan keadaan tulisan teman-teman. Pertanggung jawaban akademik tentu berpulang kepada masing-masing kontributor, kami sekadar menata menu yang ada, hingga siap hidang di meja sidang pembaca.

Terima kasih yang tiada terhingga kami ucapkan kepada Bapak Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang telah mendukung kami untuk terus belajar, terkhusus atas kata pengantarnya yang kami sarikan dari pidato “tokoh kebanggaan alumni HMI” tersebut ketika menerima delegasi YIB di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pada saat itu pula kami menyerahkan buku (waktu itu masih dalam bentuk draft) yang tanpa diduga mendapat sambutan hangat dari Pak Jusuf Kalla. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kanda Ismet Djafar, selaku Direktur Pelaksana YIB, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar di Cileungsi, Bogor. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Hafid Abbas, dan Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, MSc., MEng atas dukungannya kepada kami guna melanjutkan ikhtiar untuk studi ke luar negeri. Terima kasih pula kepada Prof. Dr. Ismail Suardi Wekke atas bimbingannya. Juga terima kasih kepada Kanda Muhammad Arief Rosyid Hasan (Ketua Umum HMI Periode 2013-2015), dan Mulyadi P Tamsir (Ketua Umum HMI Periode 2016-2018). Yakin Usaha Sampai !

Tim Editor

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Catatan Editor v

Daftar Isi x

Bab I Cita-Cita Keislaman dan Keindonesiaan

- A. Menjadi Muslim yang Meng-Indonesia / FAIZ ZAWAHIR MUNTAHA1
- B. Menafsir Indonesia dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika / AZIZURROCHIM8
- C. Modernisasi Metode Pembelajaran Tradisional di Pesantren /SITI FATIMAH TUZAHRO14
- D. Serambi Mekkah: Dari dan Untuk Indonesia / SYAIFUL ALAMSYAH20
- E. Pesona Pulau Lombok sebagai Sentrum Wisata Halal Dunia / SYAMSUL ADNAN.....26
- F. Pengarus-utamaan Islam Kultural /AKHMAD YUSUF32
- G. Tafsir yang Berkarakter Pembaharuan: Belajar dari Thantawi Jauhari/AMYLIA KARUNIA AR.....40

Bab II Cita-Cita Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

- A. *Social Entrepreneurship*: Sebuah Pendekatan Bisnis dalam Menyelesaikan Permasalahan Sosial /RAHMAT SYARIF48
- B. Belajar dari yang ke-3 / KHOIRUL UMAM H56
- C. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Berjiwa Entrepreneurship untuk Menyongsong 100 Tahun Indonesia Emas / RIANDA RIDHO62
- D. Dompot Pemerintah menuju Negara Kesejahteraan / HAIKAL66
- E. Mengedepankan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan / FREDY HANDOKO.....71

| | |
|--|----|
| F. Membangun Sistem Ekonomi Islam / NASRULLOH ALI MUNIF | 78 |
| G. Menggapai Kedaulatan Ekonomi Bangsa / AHMAD JAZULI | 87 |

Bab III Cita-Cita Hukum, Politik dan Kebijakan Pembangunan

| | |
|---|-----|
| A. Pembaharuan Mahkamah Partai Politik sebagai Desain Alternatif dalam Penyelesaian Perselisihan Partai Politik / ADI PRAKOSO..... | 92 |
| B. Reformasi Birokrasi: “Menyembuhkan dan Merawat Bangsa” / DORA ELIA KASIH | 99 |
| C. Asal Usul Praktek Pergundikan di Nusantara / TRI LESTARI PUSPITANINGRUM | 106 |
| D. Membanding Kepemimpinan Sipil Militer di Pentas Politik Indonesia / MUHAMMAD ANIS SUMADI | 112 |
| E. Banten, Politik Jawara, dan Hijrahnya Para Putra Daerah / FERDIAN ANANTA..... | 119 |
| F. Kabupaten Bima dalam Bayang-Bayang Otonomi Daerah / FAISYAL | 125 |
| G. Saat Indonesia Timur Teriak ‘Merdeka’ / MUH. SYAINU L ARIFIN TORA | 135 |
| H. Peran Partai Politik dalam Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia / ANDIK SURYANSYAH..... | 142 |
| I. Aceh Pasca Damai: Riwayatmu Kini / DEDY MUZLAHINUR | 150 |

Bab IV Cita-Cita Peradaban, dan Perdamaian Dunia

| | |
|--|-----|
| A. Membangun Rumah: antara Kebijakan dan Investasi Peradaban / DESY PRATIWI IRMA SURYANI | 156 |
| B. Diaspora untuk Indonesia / ZAINURI..... | 161 |
| C. Pergulatan Parpol Islam di Panggung Politik Tanah Dewata / NURJAYA..... | 167 |

| | |
|---|-----|
| D. Perdamaian Aceh: Pesan Damai dari Bumi Tanah Rencong / RAHMADI M. ALI..... | 173 |
| E. Pro Kontra Penghapusan Peraturan Pendirian Rumah Ibadat / SIRAJUDDIN | 180 |
| F. Membumikan Semangat Toleransi untuk Indonesia: Potret Kearifan Lokal Toleransi antar Umat Beragama di Manado / SABIL MOKODENSEHO..... | 189 |
| G. Signifikansi Peran Indonesia dalam Resolusi Konflik Israel-Palestina / MAWARDIN | 196 |

Bab V. Cita-Cita Sosial, Budaya, dan Pendidikan

| | |
|---|-----|
| A. Merayakan Nasionalisasi Primordialisme: dari Wacana menuju Aksi / SERPIAN..... | 202 |
| B. Semangat Revolusi Mental: Harapan menuju Indonesia yang Terdidik dan Tercerahkan / HERA YULITA | 211 |
| C. Urgensi Pendidikan untuk Mewujudkan Cita-cita Bangsa / ADHA ANGGRAINI..... | 216 |
| D. Pendidikan yang Memerdekakan / SRI HARDIYANTI | 223 |
| E. Menggali Sumber Daya Alam, Mencetak Sumber Daya Manusia / ANAS ABDUL KADIR | 232 |
| F. Pendidikan sebagai Investasi menuju SDM Siap Tempur / SINTA FEBRIA NINGSIH | 236 |
| G. Harapan Baru untuk Indonesia Sehat / FATMA FARICHA..... | 241 |

Bab VI. Cita-Cita Teknologi, Lingkungan, dan Media

Massa

| | |
|--|-----|
| A. Kesakitan Masyarakat, Kelangkaan Air (bersih) dan Komodifikasi Banjir: Sebuah Penghianatan Intelektual “Plat Merah” / ABDUL HARIS IBRAHIM | 249 |
|--|-----|

| | |
|--|------------|
| B. Sampah: dari warga, oleh warga, dan untuk warga / ADHI NURSETO..... | 255 |
| C. Teknologi Usaha Tani Konservasi Terpadu pada Lahan Marginal di Indonesia / BIMA FIKRI..... | 260 |
| D. Pemanfaatan Teknologi Kelautan untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim / MAHMUD Hidayaturohmat..... | 267 |
| E. <i>New Media</i> dan <i>social movement</i> / ITA SEPTIYANI | 275 |
| F. Menuju Ketahanan Energi Di Tahun Emas Indonesia / YOKI AL MAHIR | 281 |
| G. Menengok Energi Terpendam dari Ranah Minang / ROBI CANDRA..... | 287 |
| Profil Kontributor | 292 |

BAB I
Cita-Cita Keislaman dan Keindonesiaan

FAIZ ZAWAHIR MUNTAHA

AZIZURROCHIM

FATIMAH TUZAHRO

ALAMSYAH

SYAMSUL ADNAN

AKHMAD YUSUF

AMYLIA KARUNIA AR

A. Menjadi Muslim yang Meng-Indonesia

[Oleh : Faiz Zawahir Muntaha]

Bangsa Indonesia lebih dahulu diikrarkan yang 17 tahun kemudian disusul dengan deklarasi pembentukan negara Indonesia. Ketika Sumpah Pemuda dicetuskan pada 28 Oktober 1928, nama Indonesia sebagai identitas pemersatu sebuah bangsa modern di Asia menjadi perekat lintas suku bangsa, agama, dan sekat-sekat primordial. Sedangkan negara Indonesia didklarasikan pada 17 Agustus 1945 oleh dwiputra terbaik bangsa. Tentunya hal ini merupakan hal yang unik dan satu-satunya di dunia. Kata "Indonesia" menjadi pemersatu dari sabang sampai marauke dengan lebih dari lima ratus suku dan 60 akar bahasa.

Dalam *Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia*. JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel *On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations* ("Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia"). Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (*a distinctive name*), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: *Indonesia* atau *Malayunesia* ("*nesos*" dalam bahasa Yunani berarti "pulau"). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris):

"... Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi 'Orang Indonesia' atau 'Orang Malayunesia'."

Lebih dari setengah abad kemudian, ketika "virus nation" yang direkayasa oleh Revolusi Perancis menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia, nama "Indonesia" pun disusupi oleh virus nation dan kemudian memperoleh makna politik. Tokoh dan peristiwa yang berjasa dalam hal ini adalah Suwardi Suryaningrat (1913), Moh. Hatta (1922), Sutomo (1924), PKI (1924), kepanduan Natipij Jong Islamieten Bond (1925), hingga Kongres Pemuda (1928). Konsep nation dan politik ini kemudian sempurna pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), dan akhirnya menjelma menjadi konsep geopolitik Republik "Indonesia" sejak 1945.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya;

"*Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut "Hindia Belanda". Juga*

tidak "Hindia" saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesiër) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya."

Dalam kaitan ini, apa yang direkam oleh Furnivall tentang *plural society* dapat dijadikan rujukan penting yang menjelaskan kondisi sosial-politis dan ekonomi masyarakat Indonesia sampai dengan akhir tahun 1940-an. Dari hasil studinya, Furnivall memperoleh gambaran tentang *plural society*, dan kemudian memaknainya sebagai masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tak membaaur, dalam satu unit politik; dan ciri politik yang dianggapnya paling meng gelisahkan dalam realitas masyarakat demikian adalah tidak terlihatnya kehendak sosial umum di antara mereka.¹

Orang indonesia yang tidak meng indonesia

"menjadi Indonesia". Ini lebih sederhana dan lebih menyederhanakan. Istilah "Indonesia" awalnya hanya berhubungan dengan konsep etnografis dan konsep geografis, tapi kemudian berkembang dan puncaknya menjadi konsep nation, konsep politik, konsep geopolitis, konsep lebensraum, hingga konsep mentalitas dan budaya. Akhirnya, untuk periode terakhir, istilah "Indonesia" mengalami gejala penyakit degeneratif kronis, karena kemudian nyatanya istilah "Indonesia" mengalami denasionalisasi, depolitisasi, degeopolitis, delebensraum, dementalitas dan debudaya.

Kemunculan geopolitik Republik "Indonesia" ini memberi dampak pada batas lebensraum, mentalitas dan budaya, bagi manusia-manusia pendukungnya. Itulah mengapa Indonesia menjadi berbeda dengan Malaysia, Brunei Darussalam atau Singapura. Itulah mengapa Timor Leste "enggan" berintegrasi dengan Indonesia. Penjajahan Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, dan PKN melalui sekolah-sekolah sejak generasi awal pendirian Republik "Indonesia", menampakkan hasilnya sejak generasi 1970-an. Generasi itu telah tercerabut dari akar-akar kedaerahannya: berpikir menggunakan bahasa Indonesia, tidak lagi memiliki sopan-santun seperti generasi sebelumnya, atau mencomot satu seni pertunjukan (dari manapun asalnya) sebagai identitas budayanya.

¹(Hefner [ed.], 2007; Worsley, 1991).

Sementara, eksponen pendukung mentalitas dan budaya lokal, telah tergerus dimakan zaman: bayangkanlah bahwa sejumlah bahasa daerah kini mengalami kondisi sekarat (ini istilah filologi!), atau bayangkanlah bahwa cantrik-cantrik kesenian daerah adalah orang-orang luar Indonesia.

Sementara proses “menjadi Indonesia” belum sempurna terbentuk, “Indonesia” sudah dijangkiti gejala penyakit degeneratif kronis. Kita saksikan sekarang “Indonesia” mengalami denasionalisasi, depolitisasi, degeopolitis, delebensraum, dementalitas dan debudayaisasi. Begitu rendahnya harga nation dan geopolitik “Indonesia” di mata Malaysia, dan kita diam saja ketika dihinakan: sejengkal tanah Indonesia sudah disita, sejumlah kesenian Indonesia sudah dijarah, sejumlah intelektual Indonesia sudah terbeli, sejumlah aset Indonesia sudah dimiliki, sejumlah warga Indonesiadianiaya. Telah pudar sekat-sekat administratif geopolitik Indonesia, karena tunduk pada kapitalisme global. Bahasa Indonesia telah tergeser oleh bahasa Inggris dan Mandarin, bahkan di lembaga pendidikan sekalipun yang seharusnya menjadi benteng terdepan dalam memelihara pemakaian bahasa nasional dan bahasa negara.

Penyakit degeneratif kronis ini baru menampakkan gejalanya. Kita belum terlambat apabila mau mengobatinya. Kita perlu melakukan pemaknaan kembali atas definisi nasionalisasi, politisasi, geopolitik, lebensraum, mentalitas dan budaya “Indonesia”, sebelum benar-benar kita kehilangan keindonesiaan kita. Strategi frontal yang dapat dilakukan generasi muda mestinya adalah melawan agar kita menjadi imun (kebal), bukan menghindar. Caranya adalah merebut, mempelajari, memelihara, dan kelak mewariskan keindonesiaan. Bentuknya dapat berupa, dari masing-masing diri kita menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kita. Bukan mencampakkannya. Melakukan perlawanan ini sudah sangat mendesak, karena menunda perlawanan berarti membiarkan gejala penyakit degeneratif menjangkit dan membunuh keindonesiaan kita.

Islam dan kemajemukan di Indonesia

Dalam membicarakan masalah Islam dan kemajemukan di Indonesia, sangat mengecewakan sekali penilaian tokoh Kristen Protestan Indonesia, mendiang Dr. Walter Bonar Sidjabat, yang melihat Islam sebagai halangan pluralisme di negeri ini. Sidjabat memandang bahwa ajaran Islam pada tabiatnya berlawanan dengan dasar negara Pancasila. Dengan mengabaikan sama sekali bagaimana sejarah Pancasila itu dicetuskan dan dirumuskan, Sidjabat mengatakan, “Yang ditemukan dalam penelitian ialah bahwa perbedaan dalam hakikat ‘*Weltanschauung*’ Islam dan ‘*Weltanschauung*’ yang disajikan oleh Pancasila telah

menyebabkan ketidaksesuaian yang menyatakan dirinya dalam hubungan antara Islam dan negara. Ketidaksesuaian itu terutama diperbesar oleh kenetralan prinsip Kemahakuasaan Tuhan dalam konstitusi dan watak dasar yang eksklusif dari kepercayaan Islam.”²

keuniversalan dan kekekalan Islam terletak pada doktrin dan ajarannya yang sesuai dan sejalan dengan fitrah manusia, sehingga tidak terjadi kebimbangan dan keraguan bagi orang yang telah percaya dan meyakini agama tersebut, lain halnya dengan agama-agama yang lainnya, misalnya agama Kristen, dimana doktrin dan ajaran serta keyakinan yang terdapat di dalamnya, antara satu dengan yang lainnya terdapat pertentangan sehingga tidak membuat pemeluknya tenang dan mantap, malah sebaliknya membuat mereka bimbang dan ragu dengan apa yang mereka yakini. Pun dengan ajaran agama yang lain baik agama *samawi* ataupun agama *ardy* selain dari islam pada saat ini memiliki *ilat* atau kejanggalan ajaran yang tidak sesuai dengan *fitrah* manusia.³

Ketika islam masuk keindonesia tidak menjadikan peperangan sebagai jalan dakwahnya. Melainkan mengedepankan cara kompromi dengan terjadinya proses akulturasi atau perkawinan islam dengan budaya lokal. Hal itu sejalan dengan pendapat gusdur yang menyatakan bahwa “Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi *ana*, sampeyan jadi *antum*, sedelur jadi *akh*. Kita pertahankan milik kita, kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya...”⁴. sejalan dengan pendapat gusdur ini pada kesempatan lain KH.Mustofha Bisri atau yang lebih akrab dipanggil “Gusmus” menyatakan ““Kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kita bukan orang Islam yang kebetulan dilahirkan di Indonesia,” ujar Gus Mus di acara Pra Muktamar NU ke-33 Zona Sumatra, Ahad (18/5).”⁵

Kedua kalimat tersebut memiliki konsekuensi berbeda. Kalimat pertama, ‘orang Indonesia yang beragama Islam’ mengharuskan umat Islam di Indonesia untuk mencintai Indonesia. Maka, membela negara merupakan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia. “Kalau tuan rumah tidak cinta sama rumah kita Indonesia, kan aneh,” ujar Gus Mus.

Sementara itu, kalimat kedua; ‘orang Islam yang kebetulan dilahirkan di Indonesia’ cenderung tidak memiliki kewajiban untuk

² Lihat ensiklopedi nurcholis madjid buku ke 2 halaman 1171

³ Lihat caknur dalam islam doktrin peradaban halaman 435

⁴ Gusdur dalam buku Islamku, Islam anda, Islam kita: agama masyarakat negara demokrasi: wahid institute 2006

⁵ Lihat <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/05/18/nojony-gus-mus-kita-orang-indonesia-yang-beragama-islam>

menjaga tanah air. Kelompok islam yang mengikuti paham tersebut, cenderung menggampangkan kecintaan terhadap Indonesia sebagai tanah air. “Orang kayak gini, seperti turis. Dia tidak peduli mau rumahnya rusak bahkan hancur. Wong mereka cuma turis,” ujarnya. Kalimat sederhana Gus Mus dilontarkan menyindir gerakan Islam yang cenderung keras dan abai terhadap nilai-nilai keberagaman di Indonesia. Kelompok ini, kerap mengatas namakan agama Islam untuk melakukan kerusakan

Cita-Cita Islam Dan Keindonesian

Pancasila telah menjadi representasi dari islam indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak pancasila disepakati oleh para pendiri bangsa indonesia sebagai ideologi negara maka bersamaan dengan itu pula islam telah berbaur dan *berinkarnasi* dalam wujud pancasila. Nilai-nilai islam telah diterjemahkan dalam wujud pancasila sebagai pijakan bernegara. Pancasila sebagai *common value* dan *common consensus*, sejatinya bukan lahir dari semangat yang statis dan mistis. Pancasila lahir sebagai proses yang natural terhadap dialektika masyarakat Indonesia yang plural secara ideologi, suku, dan agama. Tidak berlebihan apa yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, seperti yang diringkaskan oleh Buya Maarif:

Artinya, sebuah bangunan kekuasaan di luar Pancasila, menurut CN (Cak Nur—ed.), menjadi tidak sah. Tetapi harus diingat bahwa Pancasila tidak boleh terpasung oleh kekakuan penafsiran. Pancasila harus menjadi “ideologi terbuka... dan tidak mungkin dibuatkan penjabarannya sekali untuk selama-lamanya.” Saya rasa, bukan saja Pancasila yang harus membuka diri bagi penafiran baru: agama pun, yang diyakini berasal dari Allah, harus membuka diri untuk ditafsir ulang. Penafsiran ulang inilah sebenarnya hakikat dari kerja ijtihad, demi menjawab masalah-masalah zaman yang terus berubah.”⁶

Tujuan dari risalah keislaman dengan diutusnya nabi Muhammad SAW ke bumi ini senapas dengan cita-cita keindonesiaan yang dengan jelas termaktub dalam traktat kebangsaan pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu maka Keislaman seseorang haruslah menjadi pijakan dalam berperilaku dan bersosialisasi. Sebagaimana bahasa simbolik dalam sholat kala mengucapkan salam sebagai rukun terakhir sholat orang muslim disyariatkan untuk melirik ke sisi kiri dan kanan. Hal ini mengandung makna bahwa sesudah kita melakukan hubungan

⁶Maarif, ”Politik Identitas,” hal. 20□21.

dengan Tuhan kita harus menginterpretasikan keimanan dan sholat kita pada kerja sosial di masyarakat sekeliling kita. Karena manusia berbuat baik untuk dirinya sendiri dan manusia berbuat baik bukan untuk Tuhan karena Tuhan tidak membutuhkan amal baik manusia, yang membutuhkannya adalah semua makhluk disemesta. Sejalan dengan ini Taufik Abdullah berpendapat “Islam sebagai dasar keprihatinan moral dan ikatan solidaritas sosial dalam kehidupan ditengah masyarakat.”⁷

Bung Karno sendiri sudah terang-terangan menegaskan bahwa nasionalisme dan identitas kebangsaan kita justru akan makin kuat dan dikokohkan manakala kita berhasil mengukuhkan persatuan dalam perbedaan, demokrasi dan rasa solidaritas kebangsaan. Tanpa ketiganya, Indonesia yang bersatu tidak akan mungkin tercapai hingga saat ini. Inilah yang kemudian dikokohkan menjadi sendi pondasi republik modern hingga sekarang.⁸

Dalam situasi dan kondisi kekinian Indonesia, yang menjadi titik sentral untuk menjawab tantangan zaman tidak hanya restorasi nilai-nilai luhur Pancasila, namun juga komitmen besar kalangan masyarakat politik, masyarakat sipil, alim ulama, tokoh masyarakat, dan elemenelemen bangsa lainnya untuk mendukung terus *common interest* sebagai *rule of the game*. Tendensi politik aliran sejatinya merupakan suatu keniscayaan sejauh eksistensi politik aliran itu tidak melemahkan bangunan dasar demokrasi, Pancasila dan pluralisme. Ia justru menjadi suatu kekayaan dan keniscayaan untuk memperkaya Pancasila. Ia juga memajukan peradaban manusia Indonesia yang ditakdirkan bersukukuku, beragam agama dan berbeda pandangan politik. Akhirnya, peradaban dunia kita tidak pernah didirikan di atas tumpukan batu bata persetujuan yang bulat. Yakinlah, itu tidak pernah terjadi.

Daftar Pustaka

- Abdurahman Wahid (2006) *Islamku, Islam anda, Islam kita: agama masyarakat negara demokrasi*: wahid institute
- Ahmad Syafi'i Maarif (2010) , *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme kita*. Yayasan Paramadina
- Budi Munawarman (2006) *Ensiklopedi nurcholis madjid buku 2* . Bandung MIZAN,

⁷ Lihat Taufik Abdulah Dalam Bukunya *Islam Dan Masyarakat* Halaman 5

⁸ Imran Hasibuan, *Pancasila dan Masalah Kita Hari Ini* (Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2009). Dapat diunduh lewat situs www.fpdiperjuangan.or.id

Imran Hasibuan, *Pancasila dan Masalah Kita Hari Ini* (Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2009)

Muhammad Hatta (1996). Dalam buku kumpulan tulisan *Kebebasan Cendekiawan; Refleksi Kaum Muda*. Yogyakarta. Bentang Budaya

Nurcholish Madjid (1994), *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina,
_____ (2005), *Islam Doktrin Peradaban*, Jakarta, Paramadina
cetakan ke V

Taufik Abdullah, (1987) *Islam Dan Masyarakat; Sebuah Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta, PT. Pustakan LP3ES.

Lihat <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/05/18/nojony-gus-mus-kita-orang-indonesia-yang-beragama-islam>

B. Menafsir Indonesia dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika

[Oleh: Azizurrochim]

Memaknai Indonesia sama halnya dengan memaknai besarnya dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman (*pluralitas*)⁹ yang sangat luar biasa dan tidak dimiliki negara lain. Mulai dari budaya, bahasa, ras, suku, kepercayaan, agama dan lain-lainnya. Semua ini terangkum dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dimana mereka telah berkomitmen untuk tetap memegang teguh kesatuan sejak awal berdirinya negara ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Dari fakta sosial masyarakat Indonesia tersebut, maka kemudian muncullah semboyan yang dapat mensinergikan masyarakat yang plural tersebut. Konsep ini bermula dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular sekitar abad 14-an. Konsep ini tentunya berangkat dari fakte keberagaman yang ada dengan semangat nasionalisme untuk membangun negeri dari Sabang sampai Merauke tanpa memandang sisi perbedaan. Karena perbedaan itu akan menjadi sumber kekuatan bangsa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menggerus nasionalisme dengan jalan yang bertentangan atas apa yang telah disepakati bersama.

Bermula dari konsep ini, bukan berarti masyarakat Indonesia secara keseluruhan sudah mampu menyesuainya. Namun, masyarakat Indonesia ternyata masih perlu untuk melihat lebih jauh dan tidak bisa menghindari munculnya permasalahan disekitarnya yang akan mengancam kesatuan bangsa. Permasalahan yang dimaksud misalnya konflik sosial akibat adanya sensitifitas dan rasismeyang tinggi antar kelompok atau perseorangan. Dimana konflik tersebut membawa dampak isu yang luar biasa di tengah masyarakat. Sehingga akan sedikit menjadi penutup bagi jalan persatuan bangsa ini.

Konflik sosial sering terjadi di tengah masyarakat yang berujung pada disintegrasi bangsa. Sekecil apapun penyebab konflik, jika dihembuskan secara cantik ditengah-tengah masyarakat akan menjadi sangat *seksi* dalam kacamata beberapa pengamat. Inilah yang kemudian meresahkan saya maupun mayoritas masyarakat Indonesia tentang prinsip negara ini.

Untuk menjadi negeri yang dewasa, bukan hanya dalam hal usia namun juga dalam bingkai pemikiran masyarakat. Maka Indonesia sudah seharusnya memiliki kedewasaan dalam berfikir. Kedewasaan berfikir

⁹Mengutip pendapat dari Abdul Muqsit Ghozali dalam dialog “Belajar Islam” di TPI; bahwa pluralitas adalah sebuah keniscayaan “*sunnatullah*” yang tidak bisa kita hindarkan dalam masyarakat.

bukan hanya sekedar dewasa secara pribadi namun tidak dalam hal bernegara. Bangsa ini terlalu kuat untuk menghalau isu-isu yang mengacaukan sistem negara ini. Kita harus dewasa menghadapi problem dalam berbagai sektor minimal dilingkungan sekitar. Baik problem ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, agama dan yang lainnya. Bukan kita malah menjadi provokator yang menghancurkan keutuhan bangsanya sendiri.

Misalnya ketika melihat beberapa konflik¹⁰ yang terjadi dengan mengatasnamakan SARA. Konflik di Ambon 1998, Poso 1998, Maluku Utara 2000. Konflik serupa juga terjadi di DKI dalam ajang pencalonan Ahok sebagai Gubernur. Dalam banyak sisi Ahok sebagai etnis yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Indonesia dan memiliki agama yang berbeda seolah menjadi bulian yang tidak ada habisnya oleh kelompok yang berseberangan. Apalagi ditambah dengan viralnya isu ini dikalangan masyarakat awam. Seolah-olah menjadi momen untuk perang dingin antarsaudara. Bagaimana tidak dikatakan saudara? Bukankah kita masih dalam satu tubuh “Bhineka tunggal ika”? Atau ingin membuat jalan sejarah yang baru?.

Secara umum umat islam Indonesia masih menganggap bahwasanya hanya ada satu dari kelompok agama yang berhak memegang tampuk kepemimpinan diberbagai wilayah Indonesia tidak terkecuali Jakarta sebagai Ibu kota negara ini. Apalah dikata jika sentral pemerintahan dipimpin oleh etnis keturunan China dan beragama Non-Muslim. Sehingga problem ini semakin merebak kemana-mana dengan berbagai bahan tambahan yang siap untuk diramu oleh berbagai pihak.

Main point yang diangkat dipublik ketika calon gubernur petahana (Ahok) ini terekam dalam sebuah video di Kepulauan Seribu dalam sebuah acara. Ia mengujarkan tentang surat al-Maidah: 51 yang menurutnya dijadikan alat untuk menjatuhkan dirinya sebagai calon gubernur atas masyarakat yang mayoritas Muslim. Ia mengatakan pada audien bahwa kita telah dibohongi dengan surat al-Maidah: 51, dengan topik pembahasan penghujatan terhadap dirinya. Kemudian video ini menjadi *viral* dan mengacaukan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Permasalahan sesungguhnya bukanlah mengenai penghinaan karena

¹⁰Heru Nurrohman, dalam “Program Bimbingan dan Konseling Berbasis Nilai-nilai Budaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri Peserta Didik SMAN Kota Palangkaraya”, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), h. 4-5. Memberikan catatan dalam skripsinya bahwa Kementerian Dalam Negeri pernah mencatat ada 93 kasus yang ditangani selama 2010, 77 kasus pada 2011, dan 89 kasus pada tahun 2012. Menteri dalam negeri memberikan ulasan bahwa hanya gara-gara masalah spele menjadi besar.

tidak ada kata penghinaan sedikitpun, namun dalam kaca mata penulis, permasalahannya adalah mengenai kekuasaan yang akan dihadapi kedepan. Inilah yang kemudian meningkatkan sensitifitas masyarakat muslim.

Kenapa kemudian kata-kata yang diungkapkan Ahok ini menjadi salah atau pun benar?. Dengan semangat nasionalisme dan semangat membangun Jakarta menjadi lebih baik ada banyak keresahan dari isu SARA yang sedang diolah atas dirinya. Etnis china¹¹ dan agamanya seolah menjadi sesuatu yang sangat dibenci. Tidak hanya sekedar itu, bahkan juga dimunculkan berbagai asumsi miring atas keberadaan etnis China yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasus ini.

Selain itu, karena problemnya adalah berawal dari ujaran yang cukup kontroversial. Maka, memaksa beberapa komunitas muslim mengkritik keras atas apa yang dilakukan oleh Ahok. Misalnya FPI (Front Pembela Islam), salah satu komunitas muslim yang cukup terkenal dengan ciri khasnya yang sangat fundamental¹² keras, menjadi garda terdepan dalam mengawal kasus ini. Kemudian diikuti oleh komunitas pengkaji Islam lainnya yang ikut meramaikan kasus ini tak terkecuali MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Melihat kondisi ini, saya mengamati bahwa pemahaman keagamaan dan kenegaraan di masyarakat cukup meresahkan. Bagaimana tingkat interpretasi atas korelasi persatuan dan keagamaan yang tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia. Komitmen persatuan menjadi terusik atas ketidakdewasaan berfikir terhadap kasus ini. Dari sini bisa disimpulkan bahwa masih banyak problem interpretasi dari masyarakat yang belum tuntas untuk diaplikasikan.

Polemik penafsiran dalam surat al-Maidah: 51 haruslah dipahami secara *komprensif* oleh kita sebagai muslim.

¹¹Dalam pandangan penulis, kita tidaklah patut untuk membenci etnis China yang sekarang tinggal di negara kita. Namun poin yang harus kita hindari dari mereka adalah sistem ekonomi yang mereka terapkan. Karena hal tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip ekonomi yang sedang digunakan oleh bangsa ini.

¹²Inti dari ideologi ini adalah anti-Westernisme. Ini cukuplah ironis karena pendukung dari kaum ini adalah berasal dari orang yang berpendidikan Barat. Menurut Fazlur Rahman, pengetahuan fundamentalis Islam belakangan ini adalah dangkal. Ini yang menyebabkan pemiskinan intelektual pada Islam yang menghadapi zaman modern. Lihat pada Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 107-108.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Dari ayat di atas yang menjadi perdebatan panjang adalah kata diartikan dengan *“Pemimpin”*. Karena al-Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita harus memahami secara bahasa terlebih dahulu.¹³ Kata tersebut telah mengalami beberapa pergeseran makna. Ia berasal dari kata *الولي ج اولياء* memiliki arti dasar *“yang mencintai”* atau *“sahabat dekat”*.¹⁴ Dari kata sahabat dekat ini, pemimpin menjadi salah satu bagian dari mereka, sebab pemimpin dekat dengan rakyatnya dan selalu melayani keluhan rakyatnya. Namun yang harus diketahui, masih adasahabat-sahabat dekat lain yang bisa menjadi interpretasi dari kata ini.

Ketika kita mengaflikasikan ayat ini dalam konteks keindonesiaan, maka tampaknya akan lebih tepat jika diartikan sesuai dengan *lisanul ‘arab* yakni sahabat dekat. Indonesia adalah negara yang dibentuk dengan semangat perjuangan seluruh rakyat yang ketika itu berjuang melawan penjajah tanpa melihat suku, agama, ras, dan antar golongan. Secara umum lebih banyak muslim yang berjuang ketika itu, namun apakah kita menafikan orang yang beragama selain muslim. Nurcholis Madjid bahkan menyebutnya ini sangat keji jika terjadi.¹⁵

Selanjutnya ia menjelaskan bahwasanya Islam tidak perlu menuntut Indonesia menjadi negara Islam. Menurutnya substansi atau

¹³Dalam konteks pemahaman al-Qur’an, tidak bisa diduga bahwa karena kebanyakan ayat-ayat al-Qur’an bersifat *Muhkam* (jelas maknanya), atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur’an *Umm al-Kitab*, bahwa al-Qur’an bisa ditangkap maknanya oleh seorang tanpa harus berfikir atau tanpa menggunakan perangkat yang dibutuhkan. Maka dari itu seseorang tidak dapat hanya mengandalkan pengetahuan terbatas atau sekedar melihat terjemahan ayat. Padahal ia memerlukan banyak alat keilmuan. Lebih lanjut lihat pada M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 27-28.

¹⁴Dalam istilah *lisanul ‘arab* (penduduk asli orang Arab) juga dikatakan demikian. Kamus Bahasa Arab Offline V. 2.0 ... Dr. Phil Syahiron Syamsudin di Kampus IAIN Tulungagung dalam Kuliah Umum Pasca Sarjana Program Studi Tafsir Hadits.

¹⁵Nur Cholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010)

esensi-esensinya, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis. Pembentukan negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun Islam tidak mengharuskan untuk membentuk negara Islam, karena membentuk negara itu dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat dimaksud, yaitu: *Pertama*, pemerintahan yang adil dan demokratis (*musy-awarah*), *kedua*, organisasi pemerintah yang dinamis, *ketiga*, kedaulatan.¹⁶

Ketiga prinsip di atas adalah untuk memperkuat semangat keberagaman dalam satu kesatuan dan kesejahteraan. Dengan adanya polemik tersebut mengindikasikan bahwa kekuatan prinsip tersebut telah dikacaukan dengan pemahaman yang tidak benar dan perlu untuk diluruskan. Apalagi menyangkut pemahaman keagamaan dan kenegaraan yang cukup sensitif. Masyarakat Islam harus lebih cerdas lagi dalam melihat fakta dilapangan, apalagi memahami kitab sucinya sendiri.

Perlu diketahui bahwa dalam menyerap ajaran-ajaran al-Qur'an, memahami konteks akan jauh lebih penting dari pada hanya memahami teks yang sudah lama terdoku-mentasikan dengan ruang yang berbeda pada hari ini. Jika kita hanya terpaku pada teks yang ada tanpa melihat kondisi sekitar. Bagaimana ayat-ayat al-Qur'an mampu memberikan solusi dalam berbagai kasus. Al-Qur'an itu bagaikan aquarium besar yang siap untuk dijadikan sebagai acuan dalam berbagai kondisi karena ia adalah *shalihun likulli zaman wa makan*. Ke-*shalihan* al-Qur'an tidak stagnan hanya sebatas berangkat dari teks, namun kondisi sekitar yang melingkupinya adalah menjadi objek baginya untuk mendapatkan solusi. Bukan malah dengan posisinya akan menjadi sesuatu yang kaku untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat.

Ali bin Abi Thalib RA mengatakan bahwasanya "*al-Qur'an merupakan teks bisu dan yang dapat membahasakannya adalah manusia.*" Dari ujaran sahabat rasul ini jika kita melihat tidak adanya spesifikasi dan pembatasan atas penafsiran al-Qur'an dalam kurun waktu tertentu. Karena yang hanya bisa membatasi adalah ketujuh persyaratan¹⁷ menjadi penafsir yang telah disepakati para ulama' salaf. Penafsiran al-Qur'an tidaklah berhenti pada zaman para Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, namun bisa terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan

¹⁶M. Tahir, dalam jurnal Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Pandangan Nur Cholis Madjid, Vol. XV, No. 1, (Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan, 2012), h. 37-53.

¹⁷Tujuh persyaratan tersebut adalah memiliki akidah yang bersih, tidak mengikuti hawa nafsu, memahami *ushu al-tafsir*, cerdas dalam ilmu riwayat dan dirayat hadits, memahami ilmu *ushuluddin*, memahami ilmu *ushul fiqh*, menguasai bahasa Arab dan ilmunya.

zaman agar al-Qur'an terus memiliki kontribusi dalam kehidupan manusia di bumi.¹⁸

Umat Islam dituntut untuk selalu menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan konteks sosio-historis yang dihadapinya. Maka wajar, tafsir merupakan salah satu ilmu keislaman yang belum matang. Oleh sebab itu, kegiatan penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun.¹⁹ Jadi janganlah hanya beranggapan bahwa kebenaran tafsir itu hanya berasal dari kajian masa lalu karena kita harus pandai membaca situasi modern.

Harapan kedepan untuk bangsa ini, semoga masyarakat semakin cerdas membaca lingkungan agar tidak mudah tercerai berai. Jika masih mengedepankan ego dengan mengatakan bahwa kelompok saya yang paling benar, maka ini sangat tidak absah di masa demokrasi hari ini. Tentunya ini tidak sesuai dengan semangat ke-bhinekaa-an yang bertahun-tahun kita jaga.

Jangan sampai ada lagi ilusi tentang kenyataan bahwa, orientasi dan emosi keagamaan kerap menampilkan kekacauan yang mengganggu, suatu arus bahwa ketidakpuasan dan suatu bahaya potensial. Ini harus menjadi perhatian lebih bagi para pemimpin masa depan yang memiliki tanggung jawab dalam proses modernisasi ini. Kepemimpinan politik yang bijaksana dan bertanggung jawab harus ditampilkan oleh pemerintah. Meski harus ada disiplin dalam masyarakat, yang di dalamnya semua orang tidak sepenuhnya mengikuti kecenderungan-kecenderungan mereka.²⁰

¹⁸Setiap Muslim wajib mempelajari dan memahami al-Qur'an. Tetapi bukan berarti bahwa ia harus memahaminya sesuai dengan pemahaman orang-orang dahulu kala. Karena seorang muslim diperintahkan oleh al-Qur'an untuk mempergunakan akal pikirannya serta mencemoohkan mereka yang hanya mengikuti orang-orang tua dan nenek-nenek moyang tanpa memperhatikan apa yang yang sebenarnya mereka lakukan, adakah mereka '*ala hudan* (dalam kebenaran) atau '*ala dhalal* (dalam kesesatan). Lebih lanjut lihat pada M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Ed. Kedua* (Bandung; Mizan, 2013) Cet. I, h. 83-84.

¹⁹M. Yusron, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2006), h. x.

²⁰Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*,... h. 119-120.

C. Modernisasi Metode Pembelajaran Tradisional di Pesantren

[Oleh: Fatima Tuzohra]

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia. Pesantren sebagai komunitas dan lembaga pendidikan yang besar jumlahnya serta luas penyebarannya diberbagai pelosok tanah air telah banyak memberikan kontribusi dalam pembentukan manusia Indonesia yang religius. Pesantren diartikan sebagai suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Pernyataan ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri pesantren sebagai sebuah lingkungan pendidikan integral. Sebagai mana Abdurrahman Wahid mengumpamakan layaknya sebuah akademi militer, yang didalamnya terdapat komponen dan sistem yang saling berkaitan namun memiliki satu tujuan yang sama. Pesantren merupakan tempat para santri untuk belajar atau tempat mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji, biasanya tempat didalam pesantren disebut sebagai asrama dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan kesederhanaan.

Pesantren jika dilihat dari bentuk kegiatan yang diselenggarakannya, dalam proses pengelolaannya mengan-dung unsur manajemen walaupun sebagian besar masih bersifat tradisional yakni dalam perencanaan, pengorga-nisasian maupun pengawasan serta pelaksanaan kegiatannya tidak dilandasi sistem manajemen modern dan akurat sebagaimana yang dilaksanakan dilembaga-lembaga pendi-dikan sekolah umum. Namun progres pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dalam setiap kegiatan dan sistem pembelajarannya sangat terlihat, meskipun tidak secara besar-besaran pergeserannya.

Layaknya lembaga pendidikan pada umumnya, pesantren dalam setiap kegiatannya terdapat sistem pelak-sanaan kegiatan, sebagai unsur utama penyelenggara kegiatan dan beberapa unsur penunjang sebagai unsur pendukung. Beberapa komponen yang terkait yaitu diantaranya tujuan, pendidik, peserta didik dan alat pendidik, dari situlah sistem pendidikan akan berjalanselaras sesuai dengan kehendak pendidikan yang ingin dicapai.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, dalam penyelenggaraannya pesantren terdapat komponen yang menunjang seperti sistem pembelajaran, administrasi, keorganisasian dan kegiatan-kegiatan yang lain yang terdapat dalam pesantren. Bergesernya sistem tradisi pondok pesantren, mulai tampak dibeberapa pondok pesantren besar dan terkenal yang mulai melakukan perubahan sistem secara besar-besaran. Perubahan itu meliputi tiga hal yaitu: perkembangan kurikulum, perkembangan penggunaan metode pembelajaran, dan perkembangan kelembagaan.

Modernisasi

Betapa banyak makna bernuansa yang diberikan kepada terma “Modern”, yang berkisar dari kontemporer sampai sekedar inovatif, kreatif, atau selaras dengan perjalanan waktu. Persoalan tentang prinsip-prinsip, dan dalam kenyataannya kebenaran itu sendiri, hampir tidak dipertimbangkan ketika modernisme diperbincangkan. Orang hampir tidak pernah mempersoalkan apakah gagasan, bentuk atau pranata ini atau itu sesuai dengan kebenaran tertentu. Satu-satunya persoalan adalah apakah ia modern atau tidak.

Sedangkan modernisasi bisa disebut juga reformasi yaitu membentuk kembali atau mengadakan perubahan kepada yang lebih baik, atau dapat pula di artikan dalam perbaikan. Sayyed Hossein Nasr (1994:98) mengemukakan bahwa modern berarti sesuatu yang terpisah dari yang transenden, dari prinsip-prinsip langgeng yang dalam realitas mengatur materi dan yang diberitakan kepada manusia melalui wahyu dalam pengertiannya yang paling universal. Adapun modernisasi yang dilaksanakan dalam proses pembangunan di Indonesia dengan menggunakan unsur-unsur kebudayaan barat telah membawa kemajuan cukup pesat dibidang sains dan teknologi pendidikan dan ekonomi sehingga tingkat kecerdasan taraf hidup masyarakat meningkat, budaya modern atas pandangan dan kepentingan praktis, pragmatis, sekularistik telah menggeser nilai-nilai kerohanian dan moral sehingga aspirasi agama dan moral tidak menjiwai proses pembangunan dan modernisasi.

Wilbert E More yang menyebutkan bahwa modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktifitas dan mendorong untuk berfikir lebih maju, perkembangan pengetahuan dan teknologi pula yang membentuk masa modernisasi yang terus maju dan berkembang sampai saat ini.

Metode Pembelajaran di Pesantren Tradisional

Pesantren dalam hal ini mempunyai metode pembelajaran yang berbeda dari sistem lembaga pendidikan pada umumnya. Ada dua macam metode pembelajaran tradisional yang di gunakan dalam pesantren yaitu metode bandongan dan sorogan, akan tetapi tidak setiap pesantren di negara kita ini menggunakan dua metode tersebut. Pesantren yang memakai metode bandongan dan sorogan hanya di pesantren salafi.

Adapun pengertian dari metode pembelajaran sorogan menurut Mujamil Qamar (2002: 142) adalah merupakan suatu metode yang ditempuh dengan cara guru menyampaikan pelajaran kepada santri secara individual, selain dipesantren juga dilangsungkan dilanggar,

masjid atau terkadang malah dirumah-rumah. Di pesantren, sasaran metode ini adalah kelompok santri pada tingkat rendah yaitu mereka yang baru menguasai pembacaan Al-Qur'an. Melalui sorogan, perkembangan intelektual santri dapat ditangkap kiai secara utuh. Dia dapat memberikan bimbingan penuh kejiwaan sehingga dapat memberikan tekanan pengajaran kepada santri-santri tertentu atas dasar observasi langsung terhadap tingkat kemampuan dasar dan kapasitas mereka.

Penerapan metode sorogan menuntut kesabaran dan keuletan pengajar, Santri dituntut memiliki disiplin yang tinggi. Disamping itu aplikasi metode ini membutuhkan waktu yang lama, yang berarti kurang efektif dan efisien. akan tetapi jika untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik, metode ini sangat efisien untuk di gunakan karena guru bisa langsung menilai tingkat kemampuan peserta didik secara individu.

Metode yang kedua yaitu menggunakan metode bandongan, metode yang paling utama di gunakan dalam pesantren salafi. Suatu metode kuliah dimana para santri mengikuti pelaksanaannya dengan duduk mengelilingi kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. Pelajaran diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum atau sesudah melaksanakan shalat fardhu. Setiap murid menyimak bukunya sendiri dan membuat catatan (baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Kelompok kelas sistem bandongan ini disebut *Halaqah* yang arti bahasanya lingkaran murid, atau kelompok siswa yang belajar dibawah bimbingan seorang guru.

Penerapan sistem bandongan bagi seorang murid tidak harus menunjukkan bahwa ia mengerti pelajaran yang sedang di hadapi. Para kiai biasanya membaca dan menterjemahkan kalimat-kalimat secara cepat dan tidak menterjemahkan kata-kata yang mudah. Melalui cara ini kiai dapat menyelesaikan kitab-kitab pendek dalam waktu yang lebih singkat. Sistem bandongan memang dimaksudkan untuk murid-murid tingkat menengah dan tingkat tinggi. Hanya efektif bagi murid-murid yang telah mengikuti sistem sorogan secara intensif.

Sitem Pembelajaran di Pesantren Siti Fatimah

Pondok pesantren Siti Fatimah didirikan oleh kiai H. Sholihin saemari pada tahun 1987 M. Kiai H. Sholihin saemari sendiri merupakan anak dari Kiai H. Saemari dan Hj. Siti Fatimah yang keduanya merupakan warga asli Cirebon. K.H. Sholihin Saemari adalah putra terakhir dari sebelas bersaudara. Beliau dilahirkan pada hari kamis, 4 Juni 1942 di Jawa Barat, tepatnya di kota Cirebon.

Pada umumnya metode pembelajaran di pesantren mengikuti pola tradisional yaitu dengan menggunakan metode sorogan dan metode bandongan sebagai ciri khas pembelajaran di pesantren. Pondok pesan

tren Siti Fatimah merupakan salah satu dari beberapa pesantren di wilayah Cirebon yang masih mengikuti sistem tradisional seperti kurikulum, metode pembelajaran dan kelebagaannya. Kurikulum yang dipakai masih menggunakan kurikulum kitab kuning sebagai acuannya, sehingga dalam pembagian kelas terpaku dengan penyelesaian kitab kuning.

Metode pembelajaran yang digunakan di pondok pesantren Siti Fatimah menggunakan metode sorogan dan bandongan. Metode sorogan dipakai saat mengaji Al-Qur'an sore hari dimulai pukul 16.30 sampai menjelang sholat maghrib kepada nyai atau santri senior. Metode ini juga digunakan saat hafalan nadzoman ketika mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah pada pukul 18.45 sampai pukul 21.00 akan tetapi metode sorogan nadzoman ini dilakukan hanya ketika ustadz berhalangan hadir dan santri mengisi dengan sorogan nadzoman kepada santri yang senior. Pelaksanaan metode ini yaitu santri membacakan kitab kuning dihadapan kiai atau ustadz dengan langsung menyaksikan keabsahan bacaan santri baik dalam konteks bahasa maupun makna (nahwu sorofnya).

Problem dalam metode sorogan terletak pada alokasi waktu, metode ini memerlukan alokasi waktu yang relatif lama, karena santri harus membaca kitab satu persatu, sehingga santri harus sabar menunggu giliran membaca, apalagi kalau jumlah santri yang diajar sangat banyak, memerlukan banyak waktu, tenaga, dan menuntut kesabaran, kerajinan, ketekunan dan juga kedisiplinan pribadi seorang kiai. Kelemahan lain dalam metode ini adalah tidak adanya dialog antara kiai atau ustadz dengan santri dan lebih cenderung bersifat berpusat pada murid.

Sejak didirikan pesantren ini merupakan pesantren salaf yang sistem pembelajarannya masih menggunakan madrasai. Setelah memasuki era milenium mulai adanya pergeseran sistem pembelajaran mengikuti perkembangan zaman. Adapun Perubahan-perubahan yang terjadi di pondok pesantren Siti Fatimah yaitu terlihat sejak tahun 2012 dengan mulai diberlakukannya evaluasi pembelajaran, dengan adanya *post tes (UAS)* dan *free test (UTS)* pada akhir tahun pembelajaran. Sistem pelaksanaannya yaitu dengan tes lisan dan tes tulisan, tes lisan dengan menghafal nadzoman dan pembacaan kitab kuning dihadapan kiai atau ustadz, sedangkan tes tertulis sistem pelaksanaannya serempak pada hari dan waktu yang sudah ditentukan dari kiai. Adanya evaluasi ini Sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan prestasi santri, kemajuan ustadz atau kiai dan peningkatan materi pelajaran berikutnya.

Pemakaian media pembelajaran seperti laptop dan infocus sudah mulai diberlakukan, sebagai penunjang agar memudahkan tingkat pemahaman santri dalam menerima materi ajar yang disampaikan kiai

atau ustadz. Pemakaian media tersebut dilaksanakan saat ada pembelajaran bahasa Arab, untuk mendengarkan percakapan dalam bahasa Arab dan ketika sorogan nadzoman. Biasanya ustadz memerintahkan kepada santri untuk mendengarkan nadzoman yang hendak dihafal tersebut melalui media laptop dan speaker. Adanya media pembelajaran ini sebagai penunjang pemakaian metode pembelajaran lainnya.

Sementara dalam beberapa tahun kebelakang dari mulai tahun 2012 dipondok Siti Fatimah melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pembelajarannya, perubahan ini sangat terlihat ketika dalam proses pembelajaran yaitu dengan adanya metode diskusi dan tanya jawab setelah pemakaian metode pembelajaran bandongan. Dimana santri diperkenankan untuk bertanya setelah ustadz menjelaskan salah satu kitab yang diajarkan, dan pemakaian metode diskusi, meskipun hanya dipakai saat senin malam, dengan teknis bergilir persantri untuk menjelaskan salah satu materi dari kitab yang dipilih, setelah itu baru didiskusikan bersama. Ustadz hanya memperhatikan proses diskusi dan ketika selesai diskusi ustadz menerangkan lalu menarik kesimpulan dari diskusi tersebut.

Metode bandongan dipakai saat pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yaitu dilaksanakannya dari pukul 18.45 sampai 21.00. Metode bandongan atau juga yang disebut wetonan ialah dimana seorang kiai dan ustadz membaca, menterjemahkan dan mengupas pengertian kitab tertentu seperti fiqih, tauhid atau lain sebagainya, sementara santri duduk bergerombil mengelilingi kiai atau ustadz kemudian masing-masing santri mendengarkan sambil memberi syakal dan menterjemahkan kitab tersebut. Problem dalam metode ini adalah tidak adanya dialog antara kiai atau ustadz dengan santri, sehingga masalah yang dihadapi santri tidak dapat sepenuhnya dapat diselesaikan. Selain itu metode ini lebih berpusat pada guru sehingga santri cenderung lebih pasif.

Adanya metode pembelajaran sangatlah menentukan bagi keberhasilan proses pembelajaran, sebagai mana kita tahu bahwa dengan metode, peserta didik dapat memahami materi ajar yang disampaikan dan dengan metode pula kita dapat mengukur tingkat keberhasilan peserta didik. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan menghantarkan keberhasilan peserta didik dalam menempuh pendidikan sesuai dengan target yang hendak dicapai.

Kesimpulan

Dalam proses modernisasi metode pembelajaran tradisional di pesantren Siti Fatimah yaitu dengan cara merevisi kembali sistem yang ada. Sistem tersebut di antaranya yaitu dengan merekonstruksi administrasi, kurikulum, struktur organisasi, ekstrakurikuler, sarana

dan prasarana dan metode pembelajaran. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak meninggalkan sistem pembelajaran tradisional yang menjadi ciri khas pesantren salaf.

Modernisasi sistem pembelajaran sangat berguna sekali dalam pencapaian tujuan pembelajaran agar santri tidak merasa bosan dan monoton dalam menerima materi ajar. Pesantren hendaknya lebih berbenah lagi mengenai pengembangan bidang keterampilan dan pelatihan untuk menyalurkan potensi dan bakat yang dimiliki peserta didik atau santri seperti perlu diadakannya pelatihan komputer, publik speaking, keterampilan menjahit, pelatihan jurnalistik dan sejenisnya. Serta lebih tanggap dan membuka diri terhadap pengetahuan formal dalam kurikulumnya dan pengembangan dalam bidang manajerial dan pengajarannya, agar dapat lebih baik dan tangguh dalam bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Dalam era globalisasi ini sebaiknya pondok pesantren dalam proses pembelajarannya mulai menerapkan metode-metode yang baru yang inovatif sehingga peserta didik lebih aman dan nyaman dalam menerima mata pelajaran yang disampaikan.

D. Serambi Mekkah: Dari dan Untuk Indonesia

[Oleh: Syariful Alamsyah]

Ketika mendengar kata aceh mungkin yang terbayang di pikiran kita adalah, Tsunami, konflik, dan juga serambi Mekah. Ia semua itu adalah gambaran umum tentang aceh yang telah di ketahui oleh seluruh rakyat Indonesia atau bahkan penduduk dunia. Namun pada tulisan ini penulis ingin memberikan informasi tambahan yang bersifat umum dan ringan tentang sumbangsih rakyat Aceh terhadap Negara kita yang tercinta ini serta gambaran umum perasaan masyarakat aceh selama pemerintahan orde lama, orde baru, serta pemerintahan Megawati Soekarno putri.

Selama masa kolonialisme aceh tidak hanya salah satu dari wilayah Indonesia yang paling sulit di kuasai oleh belanda, namun juga sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang melatar belakang berdirinya NKRI. Jika kebanyakan orang mendengar kata-kata “aceh” kemungkinan besar yang terbayang adalah kelompok separatis GAM, bahkan mungkin ada penduduk Indonesia menganggap orang Aceh adalah orang yang tidak nasionalis, atau perusak persatuan NKRI, namun tahukah bahwa pada dasarnya rakyat aceh adalah rakyat yang paling pro dan mendukung Republik Indonesia untuk Merdeka dari Belanda, berikut ini adalah sebagian kecil bukti sejarah tentang sumbangsih rakyat Aceh untuk NKRI.

Aceh jadi donator Indonesia saat masa perjuangan.

Mungkin tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya ketika Belanda menjajah Indonesia, Aceh selalu dalam kondisi merdeka. Rakyat Aceh berjuang dengan gigih sehingga belanda tidak bisa menguasai aceh, bahkan menurut catatan sejarah, Rakyat aceh tidak pernah berhenti berperang dengan belanda selama 50 tahun, dan total korban jiwa serta korban harta di pihak belanda lebih banyak dari kerugian yang mereka derita saat berpelang melawan Napoleon Bonaparte dari perancis. Salah satu bukti kekalahan belanda di aceh adalah KERKHOF atau makam belanda yang terletak di banda Aceh, makam ini adalah pemakaman terbesar orang belanda selain di negeri mereka sendiri. Alhasil, orang-orang Aceh cenderung lebih makmur secara ekonomi karena tidak terjerat sistem kolonial.

Sebenarnya pada saat itu bangsa Aceh bisa memilih untuk tidak peduli dengan nasib Indonesia. Namun, terlahir di tanah Indonesia, orang-orang Aceh merasa punya kewajiban moral untuk membantu saudara sebangsa. Akhirnya mengalirlah bantuan-bantuan dana dari orang-orang Aceh kepada Indonesia. Bantuan ini pun dipakai untuk operasional pemerintah Indonesia. Salah satunya untuk membiayai H.

Agus Salim agar bisa mengikuti Konferensi Asia di New Delhi. Tanpa bantuan ini, perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan akan semakin susah.

Rakyat Aceh patungan beli pesawat untuk Indonesia

Dakota RI-001 Seulawah adalah pesawat angkut yang merupakan pesawat ke-2 milik Republik Indonesia. Pesawat jenis Dakota dengan nomor sayap RI-001 yang diberi nama Seulawah ini dibeli dari uang sumbangan rakyat Aceh. Pesawat Dakota RI-001 Seulawah ini adalah cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama, Indonesian Airways. Pesawat ini sangat besar jasanya dalam perjuangan awal pembentukan negara Indonesia

Pesawat ini dibeli dari hasil sumbangan rakyat Aceh atas permintaan Soekarno yang datang khusus ke Aceh, medio Juni 1948. Dalam pertemuannya dengan Gubernur Militer, Abu Daud Beureueh di Hotel Aceh, samping Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Presiden RI pertama itu menangis, mengiba agar rakyat Aceh membantu dana pembelian pesawat.

Tujuannya untuk memperkuat pertahanan negara dan hubungan antar pulau, menembus blokade Belanda yang mulai menguasai sebagian besar nusantara menyusul agresi militer ke II Belanda. Pusat pemerintah Indonesia di Yogyakarta sendiri kala itu mulai dikuasai lagi Belanda. *“Saya tidak akan makan malam ini, kalau dana untuk itu tidak terkumpul,”* kata Soekarno dalam pertemuan diselenggarakan Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) itu.

Ketua GASIDA, Muhammad Djuned Yusus yang hadir dalam forum, langsung menyanggupinya. Bersama Said Muhammad Daud Alhabsyi, ia memimpin Dakota Found, panitia penggalangan dana. Para saudagar menyumbangkan uang dan emas. Sementara rakyat biasa ikut mengumpulkan hasil pertanian dan peternakannya untuk disumbang ke panitia. Alhasil dalam dua hari terkumpul dana setara 20 kilogram emas atau 130 ribu dolar Singapura.

Versi lain menyebutkan, saat itu Daud Beureueh yang iba dengan Soekarno langsung memerintahkan langsung Abu Mansor, sekretarisnya untuk mengumpulkan sumbangan. Menurut Pemerhati Sejarah Aceh, Abdurrahman Kaoy, saat itu Abu Mansor datang ke Pasar Atjeh memungut sumbangan dari warga yang berada di pasar tradisional samping Masjid Baiturrahman itu. *“Mereka dengan ikhlas memberikan perhiasan, emas, dan segala barang berharganya untuk disumbangkan,”* ujarnya.

Aceh menyumbang Kapal laut untuk Indonesia

Perlengkapan tempur pejuang Indonesia di masa perjuangan sangatlah minim. Pada saat itu Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia. Kali ini berupa kapal laut dengan kode PPB 58 LB. Kapal ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada saat itu kapal ini di kemudikan oleh seorang Laksamana Muda bernama John Lie. Di tangannya, kapal ini berguna banyak, terutama perannya dalam mendistribusikan senjata-senjata. Ini adalah salah satu bukti sumbangan nyata rakyat aceh terhadap saudara mereka dalam menghadapi kolonialisme belanda.²¹

Peran penting Radio rimba raya

Dulu, media untuk menyebarkan semangat perjuangan sangat terbatas. Lewat tulisan-tulisan juga sama sekali susah lantaran distribusinya pasti diawasi penjajah serta tulisannya akan banyak diplintir. Radio jadi satu-satunya alat orang-orang dulu untuk saling berbagai kabar perjuangan Meskipun demikian, tak banyak radio yang berdiri dan kemudian melakukan siaran berharga itu. Hanya beberapa gelintir saja termasuk salah satunya adalah Radio Rimba Raya yang ada di Aceh Tengah. Peran radio ini benar-benar vital. Para penyiarnya selalu tak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Misalnya dengan menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri ketika radio Belanda tak bosan-bosannya mengingatkan dunia jika mereka sudah menghapuskan bangsa ini.

“Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin republik masih ada, tentera republik masih ada, pemerintah republik masih ada, wilayah republik masih ada dan di sini adalah Aceh”.

siaran itu disampaikan dalam berita singkat dari Radio Rimba Raya pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Berita itu disiarkan melalui stasion radio berkekuatan satu kilowatt pada frekwensi 19,25 dan 61 meter. Berita kemerdekaan Indonesia pun tersebar ke berbagai negara tetangga waktu itu.²²

Radio Rimba Raya yang monumennya diresmikan oleh Menteri Koperasi/Kepala Bulog, Bustanil Arifin pada 27 Oktober 1987 pukul 10.30 WIB itu, terletak di desa Rimba Raya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Radio Rimba Raya berjasa sangat besar dalam menyebarkan berita tentang kemerdekaan RI. Sejak Agresi Belanda kedua, 19 Desember 1948, peranan radio sebagai penyampai berita di

²¹ www.seputarAceh.com/5sumbangan aceh untuk indonesia

²² www.infoaceh.com / sejarah radio rimba raya.

tanah air sudah dilakukan oleh Radio Rimba Raya yang beroperasi di tengah hutan raya Gayo.

Keterangan beberapa tokoh yang berjasa mendirikan Radio Rimba Raya yang kemudian dihimpun dalam buku berjudul "Peranan Radio Rimba Raya" terbitan Kanwil Depdikbud Aceh, menyebutkan, begitu besarnya kiprah radio perjuangan tersebut. Dalam buku itu diceritakan, saat menyampaikan berita tentang Kemerdekaan Republik Indonesia itu dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio di Semenanjung Melayu (Malaysia), Singapura, Saigon (Vietnam), Manila (Filipina) bahkan Australia dan Eropa.

Pada awalnya, selain mengudara untuk kepentingan umum, para awak radio ini juga melakukan monitor, mengirim berbagai pengumuman dan instruksi penting bagi kegiatan angkatan bersenjata. Siaran Radio Rimba Raya di tengah hutan belantara Aceh Tengah itu, menampilkan lima bahasa, yakni bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu dan Arab. Dalam tempo enam bulan mengudara, radio ini telah mampu membentuk opini dunia serta "membakar" semangat perjuangan di tanah air, bahkan keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 diakui oleh beberapa negara manapun di dunia. Selain berita kemerdekaan Republik Indonesia yang diinformasikan, Radio Rimba Raya juga menyiarkan berita tentang kenduri akbar di Aceh.

Waktu itu Radio Rimba Raya setiap hari juga melakukan kontak dengan perwakilan RI di New Delhi. Berita-berita itu selain diterima langsung oleh petugas sandi perwakilan RI di New Delhi, juga dikutip oleh All India Radio dan seterusnya disampaikan ke alamat yang dituju. Ketika Konferensi Asia tentang Indonesia digelar tanggal 20-23 Januari 1949 di New Delhi, jam kerja Radio Rimba Raya diperpanjang karena banyaknya berita yang harus dikirim ke wakil-wakil Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut.

Sebagai pemancar gerilya, Radio Rimba Raya juga menyajikan acara pilihan pendengar dengan menghadirkan nyanyian-nyanyian rakyat yang dapat membakar semangat pejuang, bahkan merupakan satu-satunya sarana diplomasi politik Indonesia. Radio ini terus berperan sampai saat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Pemerintahan Belanda pada 27 Desember 1949 di Jakarta sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

Menyumbang Emas Monas

Orang yang menyumbang emas untuk Monas bernama Teuku Markam, pria ini menyumbang 28 kilogram dari 38 kilogram emas di ujung monas. Kalau dikonversi menjadi uang saat ini dengan harga emas

per-gram Rp 500 ribu, maka Teuku Markam mengeluarkan sekitar Rp 14 triliun. Benar-benar jumlah yang tidak main-main. Sayangnya, jasa Markam sudah jarang diingat lagi hari ini. Wajar kalau Aceh dilabeli sebagai daerah istimewa. Pasalnya, apa yang dilakukan penduduknya benar-benar besar perannya bagi eksistensi Indonesia. Seandainya dulu ceritanya orang Aceh tak peduli dengan Indonesia, mungkin negara ini akan mengalami perjuangan yang lebih berat lagi.

Fakta diatas adalah segelintir contoh rasa cinta bangsa aceh dan juga sumbangsih mereka terhadap Republic Indonesia, namu sayangnya setelah Indonesia merdeka dan aceh memilih untuk bergabung dalam bingkai NKRI tiga diantara presiden Indonesia memberikan rasa sakit yang mendalam terhadap rakyat Aceh. Ketika mereka berkuasa Aceh menjadi ladang pertumpahan darah, padahal bannyak pengamat militer mengatakan bahwa konflik di aceh pasca kemerdekaan bisa di hindari dan di selesaikan secara diplomasi. Tetapi kesalahan pengambilan kebijakan dalam menangani konflik di Aceh menyebabkan kesengsaraan yang panjang bagi masyarakat sipil, kita tentu sepakat untuk tidak mempermasalahkan korban jiwa dari pihak tentara dan pemberontak, namu dalam kasaus Aceh, rakyat sipillah yang menjadi korban utama bukan tentara atau pemberontak bahkan laporan media internasional menyebutkan bahwa total rakyat sipil yang tewas berkali-kali lipat dari jumlah tentara atau pemberontak yang tewas.

Penutup

Tulisan ini diikhtiarkan untuk menggambarkan bagaimana perasaan rakyat aceh yang dilanda konflik berkepanjangan selama lebih kurang satu decade yang telah merenggut nyawa 30.000 warga sipil. Penulis tidak mengkritisi korban jiwa dari pihak yang bertikai selam konflik berlangsung, dan penulis bukanlah orang yang ingin memisahkan diri dari bingkai NKRI, penulis adalah seorang anak yang lahir di tanah Indonesia dan seorang bangsa Indonesia. penulis hanya menyayangkan bahwa jumlah rakyat yang tewas selama konflik jauh berlipat jumlahnya daripada pihak yang bertikai baik Aparat atau GAM, ketika terjadi konflik rakyatlah yang paling menderita bukan TNI, Polri, atau GAM.

Selanjutnya penulis ingin agar pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat aceh, membantu mereka dalam menghadapi kesulitan hidup sebagai mana orangtua mereka membantu berdirinya Negara kita yang tercinta ini. Sekarang Aceh adalah wilayah yang tertinggal, SDM nya salalah satu yang terendah diantara provinsi lain di Indonesia, angka pengangguran tinggi, korupsi meraja lela, narkoba bahkan menjadi konsumsi anak kecil, ini adalah wajah aceh

sekarang, beda dengan wajah Aceh yang dulu. Penulis mengharapkan pemerintah mampu menyelesaikan masalah-malah di atas.

Yang terakhir penulis ingin menggaris bawahi bahwa tidak hanya Masyarakat Aceh saja yang turut berjasa bagi Negara ini tetapi setiap wilayah di Indonesia memiliki andil yang besar untuk NKRI. Sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada rakyatnya terutama di wilayah yang masih sangat tertinggal agar mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa Indonesia, jangan sampai timbul pemikiran bahwa Indonesia hanya di pulau Jawa saja.

Daftar Pustaka

Conflict and Peacemaking in Aceh: A Chronology | Worldwatch Institute".

Rizal Sukma (26 February 2004). *Security operations in Aceh: goals, consequences, and lessons*. East-West Center Washington. ISBN 978-1-932728-04-0.

Harriet Martin (15 August 2006). *Kings of Peace Pawns of War: The Untold Story of Peacemaking*. Continuum International Publishing Group. ISBN 978-0-8264-9057-5.

"INDONESIA: "SHOCK THERAPY": RESTORING ORDER IN ACEH 1989-1993". *Amnesty International*. 27 July 1993.

www.seputarAceh.com/5sumbangan aceh untuk indonesia

www.infoaceh.com / sejarah radio rimba raya.

www.Wikipedia.com/DOM di Aceh.

www.Indonesia:RefugeesRevealWidespreadAbusesinAceh

<https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/2267/2015/en/TuduhanPelanggaranHAMdiAceh>

E. Pulau Lombok sebagai Destinasi Wisata Halal

[Oleh: Syamsul Adnan]

Dalam dunia kepariwisataan, terdapat wisata konvensional, dan wisata halal yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Wisata halal merupakan konsep pariwisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Populasi muslim dunia diprediksi akan mencapai 26,5% pada tahun 2030. Sedangkan jumlah wisatawan muslim diprediksikan akan mencapai 200 milyar US dollar pada tahun 2020. Saat ini, hampir seluruh negara-negara di dunia mulai menjaring wisatawan Timur Tengah, selain wisatawan dari Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Thailand, dan lain-lain. Lalu bagaimana Indonesia melihat peluang tren pariwisata dunia tersebut?

Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga sangat berpotensi untuk mengembangkan wisata halal. Objek-objek wisata unggulan di Indonesia sangat banyak, tersebar di seluruh titik-titik di Bumi Nusantara. Penghargaan bergengsi atas pesona wisata Indonesia pun membanggakan. Sebut saja, pada tahun 2015, Indonesia meraih penghargaan dari *The World Halal Travel Summit and Exhibition 2015* di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pulau Lombok yang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid terpilih sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, bahkan mengalahkan Malaysia, Abu Dhabi, Turki, Qatar, dan beberapa negara nominasi lainnya.

Apa keistimewaan dan keunikan Lombok dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya? Lalu apa yang dimaksud sebagai wisata halal itu? “Halal” tak sekedar menjadi pertanda ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi Muslim tapi juga menjadi gaya hidup dalam koridor syar’i tentunya. Halal melekat bukan hanya pada perkara makanan tapi juga ke semua aspek kehidupan, termasuk juga ke dunia pariwisata. Halal pun menjadi istilah yang mendunia beriringan dengan semarak wisata halal.

Dalam mendefinisikan wisata halal merupakan hal yang tidak gampang. Menurut Sapta Nirwanda, pencetus wisata halal di Indonesia, wisata halal disebut sebagai wisata religi. Namun orang kemudian hanya menanggap sekedar sebagai wisata yang berkaitan dengan ziarah ke makam para pemuka agama terdahulu. Padahal semestinya wisata halal lebih luas dari itu. “Ada pula yang menyebut sebagai wisata syariah. Namun ini pun dianggap menakutkan. Sampai-sampai kami ketika meluncurkannya pada 2012 di Surabaya hanya disebut sebagai *soft launching*. Lalu diganti sebagai *Muslim-friendly tourism*. Ada pula yang menyebut sebagai *universal tourism*,” kata Sapta pada seminar yang diselenggarakan Pusat Halal Salman dan Pusat Perencanaan dan

Pengembangan Kepariwisata ITB di Aula Barat ITB Jl. Ganesha No. 10 Bandung.

Setelah melalui berbagai diskusi akhirnya dipilih istilah wisata halal. Meski menimbulkan pertanyaan apakah berarti ada wisata yang haram, namun akhirnya dipilih karena secara global, istilah ini sudah diterima bahkan pada saat yang bersamaan pula Organization of Islamic Cooperation (OIC) pada tahun 2014 membuat OIC *Forum on Islamic Tourism* dan menunjuk Indonesia sebagai *Focal Point* wisata halal. Dengan munculnya istilah *halal tourism* ini tidak kemudian mengubah diri. Misalnya dimulai dari penyediaan tempat beribadah, penghapusan tempat hiburan yang tidak family-friendly, baru kemudian tanpa minum beralkohol sama sekali.

Adapun tentang wisata ziarah, ada yang menganggap syirik dan bid'ah. Padahal tidak, tergantung niat dan caranya. Bahkan ziarah justru bermanfaat. Misalnya sebagai tempat refleksi bagi kita untuk mengingat track record semasa hidup agar terus bermakna. Untuk mengarahkan semua ini perlu ada travel guide book tentang wisata halal di Indonesia. Dari buku semacam ini kita tahu destinasi wisata yang mana sekiranya sesuai dengan minat wisata kita sendiri.

Persaingan di bisnis halal akhirnya tak terhindarkan. Banyak negara non-muslim yang serta merta mengklaim memproduksi barang-barang halal. Misalnya makanan dan kosmetik yang bisa saja mengantarkan sekitar 1,4 triliun. Selain itu pun akan banyak negara yang memproduksi kosmetik-kosmetik terkenal mengekspor hasil produksinya ke Indonesia yang konon katanya berlabelkan halal. Halal juga merambah ke pendidikan, layanan kesehatan, finansial dan sebagainya. Dengan keberagaman produk halal ini mendorong diselenggarakannya berbagai expo yang saat ini agendanya sudah penuh dalam setahun di berbagai negara.

Dari Wisata Konvensional ke Wisata Syari'ah

Sebelum memenangkan penghargaan World's Best Halal di Dubai tahun 2015, Lombok selama bertahun-tahun sudah lebih dahulu dikenal karena memiliki banyak sekali pantai yang indah dan eksotis. Salah satunya adalah tiga gili (pulau karang kecil) yang berada di kawasan kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Ketiga gili tersebut adalah Gili Terawangan, Gili Meno dan Gili Air, biasa disingkat Gili TraMenA.

Gili TraMenA termasuk salah satu destinasi pariwisata nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)

terdapat 2 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) di Nusa Tenggara Barat, yaitu Lombok Gili TraMenA (Terawangan-Meno-Air) dan Moyo Tambora.

Ketiga Gili yang masih bersih dari populasi dan terpisah dari Pulau Lombok itu dikelilingi pasir putih dan menyimpan terumbu karang yang sangat indah. Dari ketiga gili itu, wisatawan dapat menikmati matahari terbit (sunrise) dari balik Gunung Rinjani, juga matahari terbenam (sunset) dari Gunung Agung di Bali. Ketiga gili di Lombok ini menjadi surga bagi para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara (wisnus) untuk menikmati wisata bahari, seperti berenang, berjemur, berselancar, diving, maupun snorkeling.

Begitu indahnya ketiga gili itu sehingga sering dijuluki mutiara-mutiara di tengah samudra. Lonely Planet Travel Guide yang sangat populer telah menempatkan Triple Gili tersebut pada urutan kedua sebagai lokasi kunjungan wisata terbesar di dunia pada tahun 2011. Jangan heran kalau anda datang ke Triple Gili ini, anda akan menjumpai banyak sekali turis asing, selain turis domestik tentunya. Para Wisman itu umumnya didominasi oleh turis muda. Disini anda bisa mendengarkan percakapan dalam berbagai bahasa asing, seperti Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol dan Jepang. Karena itu Triple Gili sering juga disebut sebagai “Desa Dunia” setelah Bali. Wisman dari berbagai negara tersebut sangat menikmati wisata bahari di ketiga gili tersebut. Triple Gili merupakan primadona bagi Wisman dari berbagai negara. Dalam sehari, mereka betah berjam-jam berenang, berjemur, berselancar, menyelam dan snorkeling.

Dari ketiga gili tersebut yang terbesar adalah Gili Terawangan seluas 340 hektare. Gili terawangan termasuk yang paling ramai, paling terkenal dan paling lengkap fasilitasnya, baik penginapan, hiburan malam, sarana komunikasi dan transportasi. Jangan harap menemukan mobil atau sepeda motor di Gili Terawangan, sebab kendaraan bermesin tidak diizinkan di sana. Sebagai gantinya, para pengunjung bisa menggunakan cidomo (kendaraan khas), kuda dan sepeda untuk mengitari pulau tersebut. Gili Terawangan dikelilingi dengan bersepeda santai sekitar 1,5 jam. Gili Air memiliki luas 188 hektare. Tempatnya dikenal tenang dan indah dengan nuansa pedesaan yang kental. Sedangkan Gili Meno yang berada di antara tiga gili tersebut, luasnya hanya 150 hektare. Daya tarik utamanya adalah lautnya yang bersih, hamparan pantai berpasir putih dan air laut yang biru jernih, sehingga dasar pantai bisa terlihat dengan jelas. Juga adanya taman burung dan danau air asin.

Selain kawasan Triple Gili yang sangat terkenal, Lombok juga memiliki banyak sekali pantai yang tak kalah indah dan mempesona. Misalnya kawasan Kuta dan Tanjung Aan dengan pasir pantainya yang bulat (berbutir). Contoh lainnya, di wilayah Lombok Timur, ada kawasan

Kaliantan yang mempunyai deretan pantai sebagai berikut: pantai Cemara (di teluk Seriwe), pantai Kaliantan, pantai Sungkun (yang belakangan ini sering disebut pantai kura-kura), dan pantai surga. Di Lombok Timur juga ada kawasan Tanjung Ringgit yang memiliki rangkaian objek wisata. Sebut saja pantai Pink yang namanya semakin kesohor, pantai temeak, Gili Sunut, Tanjung Beloam, situs sejarah peniggalan Jepang, dan hutan Lindung Sekaroh.

Berbicara destinasi halal di Indonesia, sontak pikiran kita memang akan mengarah pada Pulau Lombok, Bumi Para Tuan Guru. **Pertama:** visi dan misi Pemerintah Daerah yang sejalan dengan pengembangan pariwisata halal yakni “Mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera”. Lantas menjadi arah Pemerintah Daerah dalam menetapkan langkah pembangunan daerahnya “Beriman” dimaknai dengan masyarakat yang agamais, yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berakhlak mulia dan saling menghargai satu sama lain.

Dalam hal ini pemerintah daerah membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana ke arah sana. Setiap wisatawan muslim yang datang ke Lombok, tidak akan kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Seperti sarana mushala atau masjid yang ada di setiap tempat wisata. Termasuk ketersediaan makanan halal di café atau restoran. Dibuat senyaman mungkin bagi wisatawan dalam melaksanakan ibadah ketika berwisata

Begitu juga dengan ketentuan syariah yang harus dipatuhi pebisnis yang bergerak di bidang pariwisata. Ini menjadi prasyarat mereka berperan memajukan pariwisata di Lombok. Namun demikian bukan berarti Lombok hanya untuk wisatawan muslim saja. Lombok terbuka untuk wisatawan mana saja dan dari mana saja. Kekhasan pariwisata halal yang disuguhkan Lombok adalah sensasi kearifan lokal masyarakat yang mengajak para wisatawan memahami nilai-nilai syariah Islam

Jati diri masyarakat Lombok yang kental dengan penerapan nilai-nilai agama Islam menjadi **alasan kedua**. Kultur masyarakat seperti ini sebagai pendukung kuat dalam pengembangan pariwisata halal. Tingginya semangat beragama masyarakat Lombok mendorong implementasi program-program yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat Lombok yang dari awalnya telah terbiasa dengan penerapan syariat Islam, menjadi tidak sulit lagi ketika aturan pariwisata syariah ditetapkan. Peran masyarakat menjadi kunci dalam program pariwisata yang ditetapkan pemerintah. Kontrol dan dukungan masyarakat menjadi faktor kesuksesannya. Ditambah lagi dukungan para tuan guru atau ulama yang senantiasa memberikan pencerahan bagi masyarakat Lombok.

Alasan ketiga adalah profit. Tentu saja hasilnya akan berefek pada perekonomian daerah. Karena itu kepala daerah sangat bergiat promosi wisata yang sejalan dengan pengembangan pariwisata halal. Termasuk upaya kepala daerah dalam mendorong terbitnya peraturan mengenai destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini ternyata signifikan dengan peningkatan jumlah produk bersertifikat halal di Lombok.

Tantangan Pulau Lombok Sebagai Daerah Wisata Halal

Hambatan utama yang jelas dalam dalam pencarian makna dan potensi pengembangan wisata halal adalah ketidaktersediaan resmi terkait panduan wisata halal. Hal ini juga akan mempengaruhi pengelolaan industri kreatif sebagai penopang wisata halal itu sendiri karena belum jelasnya definisi dan panduan wisata halal. Pemerintah dan lembaga wisata halal terkait seperti Majelis Ulama Indonesia dan Asosiasi Hotel dan Restoran Halal Indonesia, dapat mengembangkan pedoman ini supaya dalam pelaksanaan wisata halal menjadi jelas. Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber (literature, dan surat kabar serta media online, juga website) terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan wisata halal. Adapun rekomendasi pedoman wisata halal sebagai berikut

1. Tujuan dan manfaat wisata halal, yaitu untuk meningkatkan keamanan seseorang meskipun tidak melakukan umrah dan haji. Selain menikmati keindahan alam sekitar juga dapat menambah keislaman seseorang.
2. Syariat dalam melakukan perjalanan pariwisata terdapat dua hal penting yang disyariatkan untuk muslim, pertama, seseorang muslim harus mampu menampakkan keislamannya, kedua, tidak berpartisipasi dalam perkumpulan maksiat dan acara yang diharamkan.
3. Hukum pariwisata
 - a. Mustabahah (dianjurkan); tujuan diadakannya untuk keperluan da'wah, merenungkan tanda-tanda alam yang merefleksikan kebesaran Allah, dan untuk mengatasi nasib bangsa-bangsa terdahulu.
 - b. Mubah; mendapatkan hiburan, kegembiraan, dan kesenangan jiwa. Namun, tidak berpotensi membuat kerusakan.
 - c. Makruh; hiburan semata tidak memiliki tujuan syariat.
 - d. Haram; bertujuan maksiat, mempersempit hak-hak Allah, dan berpartisipasi dalam perayaan keagamaan lain.

4. Adab perjalanan
 - a. Doa selama kegiatan merupakan salah satu bentuk peningkatan iman bagi wisatawan sehingga nilai-nilai Islam dapat terus berjalan.
 - b. Etika, kegiatan wisata memiliki tujuan untuk mencari ridho Allah SWT.
 - c. Pramuwisata sebagai pemimpin wisatawan dalam perjalanan.
 - d. Pakaian yang dikenakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Aktivitas wisatawan
 - a. Ibadah bagi wisatawan; shalat wajib bagi setiap muslim dan fiqih shalat dalam perjalanan serta ibadah lainnya.
 - b. Arena bermain dan tempat hiburan; boleh selama tidak membuat lalai dan bersinggungan dengan yang haram.
 - c. Kuliner; memperhatikan kehalalan dan kethayiban makanan yang dikonsumsi.
6. Fasilitas wisata halal
 - a. Menjamin ketersediaan makanan halal
 - b. Tidak mengabaikan perangkat shalat
 - c. Tour guide yang bersahabat dan ramah
 - d. Pelayanan yang diberikan mengikuti standar halal yang berlaku
 - e. Penginapan atau tempat minum

Dengan ketentuan wisata halal di atas maka dalam hal ini masih banyak yang harus perlu dibenahi oleh Pulau Lombok dalam menyambut kedatangan wisatawan halal ke depannya. Karena itu, perlu strategi percepatan untuk meningkatkan pariwisata berbasis halal untuk meningkatkan wisata halal pulau Lombok bukan hanya sekedar membuat kebijakan tanpa adanya tindak lanjut yang berkaitan dengan wisata halal tetapi juga peningkatan infrastruktur, dan pengembangan atraksi dan amenities wisata halal kelas dunia.

Di sisi lain, meskipun telah memenuhi syarat tersebut, akan tidak berarti jika tidak dipromosikan. Untuk itu, perlu adanya sinergitas dalam menjalankan misi kepariwisataan dari semua kalangan antara lain pengelola tempat wisata, hotel dan restoran serta pemerintah untuk membuat program dan mensubsidikan langsung ke daerah prioritas wisata halal. Sehingga nantinya berdampak pada ekonomi kreatif, peluang kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga penuntasan kemiskinan di daerah.

F. Pengarusutamaan Islam Kultural

[Oleh: Akhmad Yusuf]

Islam Kultural sebenarnya adalah sebuah kategori yang kemunculannya di Indonesia terjadi kira-kira pada dasawarsa 80-an, namun sebagai *gejala sosiologis* dan *keagamaan*, Islam Kultural sudah muncul sejak awal perkembangan Islam di Indonesia, bahkan sejak awal perkembangan Islam itu sendiri. Islam Kultural bisa ditafsirkan sebagai suatu *gejala sosiologis*, bisa pula sebagai *aliran keagamaan*. Lebih sering ditafsirkan sebagai kedua-duanya, *gejala sosiologis dan teologis* sekaligus.

Sebagai istilah, Islam Kultural sering dijelaskan dengan menyebut lawannya, yaitu Islam Politik. Kategori tersebut sering dipakai untuk menyebut orang atau sekelompok orang lain, daripada untuk menyatakan jati dirinya sendiri. Pembicaraan tentang Islam Kultural sulit dipisahkan dari Islam Politik, bahkan sering dijelaskan dengan membicarakan Islam Politik. Dalam kenyataannya, istilah Islam Politik mendahului penyebutan Islam Kultural. Sedangkan Islam Kultural merupakan wacana tandingan atau pengertiannya dilawankan dengan Islam Politik. Jadi, Islam Kultural adalah Islam yang mewujudkan dirinya secara substantif dalam lembaga-lembaga kebudayaan dan peradaban Islam lainnya; pendeknya *Islam minus Politik* atau dalam pemahaman umum, “Islam Kultural” adalah *Islam dakwah, Islam pendidikan, Islam seni, dan lain sebagainya*. Intinya, “Islam Kultural”, seperti yang dikatakan Snouck Hurgronje, identik dengan “Islam ibadah” atau “Islam masjid”, yang tidak ada hubungannya dengan politik atau kekuasaan. Dalam bahasa Arab, Islam Kultural disebut sebagai *al-Islam al-Siyasi* dan dalam bahasa Inggris menjadi *Political-Islam*.

Politik Dalam Arus Sejarah Pemikiran Islam

Sejumlah persamaan menarik antara pandangan Ibn Khaldun dan Machiavelli mengenai peran agama dan pengaruhnya terhadap peruntungan politik suatu kelompok dan negara ini²³. Dalam pandangan hukum Islam, pada dasarnya negara bertanggung jawab penuh atas

²³ Kemiripan ini dikecap—meski tidak diuraikan—sebelumnya. Bandingkan misalnya dengan pernyataan E. Rosenthal bahwa gagasan-gagasan Ibn Khaldun mengenai keperluan mutlak terhadap agama bagi sebuah negara yang bersatu dan efektif itu “sangat jelas mengingatkan gagasan Machiavelli”. E. Rosenthal, “Ibn Khaldun, seorang Pemikir Islam Afrika Utara Abad Keempat belas”, *John Ryland's Library Bulletin*, 1940, seperti dikutip dalam C. Issawi, *An Arrab Philosophy of Hitory* (London: John Murray, 1964), hlm. 291.

kekuasaan kenegaraan dan pemerintahan. Ia memegang kekuasaan membuat undang-undang (legislatif, *al-sultah al-tasyri'iyah*), kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif, *al-sultah al-tanfiziyah*) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif, *al-sultah al-qada'iyah*).

Pada umumnya, para ulama membagi Negara-/Pemerintahan Islam menjadi dua macam: *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb*. *Dar al-Islam*, yang pertama ialah negara yang memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara, dengan arti kata kekuatan dan kekuasaan negara berada pada umat Islam, baik penduduknya muslim maupun non-muslim ataupun terdiri atas keduanya. Kedua, negara atau pemerintahan yang penduduknya mayoritas beragama Islam sekalipun kekuatan dan kekuasaan negara berada ditangan non-muslim. Ketiga, negara atau pemerintahan di mana umat Islam merupakan minoritas, tetapi mereka diberi kebebasan untuk menegakkan syiar Islam, sekalipun kekuasaan negara berada ditangan non-muslim. Sedangkan *Dar al-Harb*, adalah negara yang di dalamnya tidak ada kekuasaan Islam. Negara di mana kekuasaan negara/pemerintahan tidak pada umat Islam dan mereka tidak dilindungi hak-haknya serta tidak diberi kebebasan mengamalkan dan mengembangkan ajaran agamanya.

Pencarian konsep tentang negara merupakan salah satu isu sentral dalam sejarah pemikiran politik, tak terkecuali pemikiran politik Islam.²⁴ Negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Dalam pemikiran politik Islam terdapat paling tidak tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara. Paradigma pertama mengajukan konsep *bersatunya* agama dan negara, dalam hal ini agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan wilayah agama juga meliputi politik atau negara dengan kata lain negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara *simbiotik* satu sama lain saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ketiga bersifat *sekularistik*, paradigma ini menolak hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya sekularistik mengajukan *pemisahan* antara

²⁴ Konsep tentang negara telah menjadi pusat perhatian para pemikir dan filsuf sejak masa klasik hingga masa modern dalam proses pencarian mereka akan bentuk ideal masyarakat manusia. Lihat, umpamanya, Leo Straus dan Hoseph Cropsey (ed.), *History of Political Philosophy* (Chicago dan London: 1987).

agama dan negara. Dalam konteks Islam menolak pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu daripada negara.

Dalam krisis eksternal dan internal yang dihadapi masyarakat muslim, Islam dipercayai menawarkan alternatif terbaik, seperti dikemukakan Bassam Tibi, alternatif Islam mempunyai ajaran-ajaran atau simbol-simbol yang berfungsi ganda: *Pertama*, simbol-simbol kultural Islam menawarkan suatu kerangka indigenous bagi artikulasi kandungan politik di dalam suatu situasi, di mana dunia non-muslim dipandang sebagai ancaman terhadap identitas kaum muslim. *Kedua*, kandungan politik yang diartikulasikan lebih mampu menjangkau lapisan massa lebih luas. Karena itulah Islam politik lebih mempunyai daya tarik ketimbang ideologi sekular kemana pun yang dalam banyak kasus didukung terutama oleh lapisan elit.²⁵

Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia: Antara Interpretasi, Aksi dan Reaksi

Perjalanan panjang pemikiran Islam kaum pembaharu masa Orde Baru mengalihkan perhatian dari “Islam politik” ke “Islam kultural”, yang mana berupa gerakan pemikiran yang bersifat kebudayaan. Tokoh-tokoh pembaharu ini adalah Nurcholish Madjid sebagai pelopor, Utomo Dananjaya, Usep Fathuddien, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, M. Dawam Raharjo, dan Adi Santoso. Selanjutnya ada pula Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Jalaluddin Rakhmat, Syafi’i Ma’arif, M. Amien Rais, Kuntowijoyo, dan yang lainnya. Mereka semua boleh disebut sebagai kalangan “neo-modernis Islam” yang mempunyai paradigma berbeda dengan kaum modernis lama²⁶.

Secara epistemologis boleh dihipotesiskan ada tiga bentuk pemikiran sosial-keislaman kaum pembaharu ini yang akan disebut disini dengan memakai istilah mereka sendiri yakni “Islam Rasional”, “Islam Peradaban” dan “Islam Transformatif”.²⁷

²⁵ Bassam Tibi, *Islam and the Cultureal Accomodation of Social Change*, 1991, 122-6.

²⁶ Perbedaan mendasar antara kaum “modernis” dan “neo-modernis” terletak dalam perhatiannya pada tradisi. Kaum “neo-modernis”, berusaha membangun visi Islam di masa modern dengan sama sekali tak meninggalkan warisan intelektual Islam.

²⁷ Kategori “Islam Rasional”, “Islam Peradaban” dan “Islam Transformatif” disini mengikuti istilah yang dipakai oleh mereka sendiri—yaitu Harun Nasution, Nurcholish Madjid dan M. Dawam Rahardjo.

Islam Rasional: seperti yang diungkapkan oleh Harun Nasution dan Djohan Effendi, dalam penelitian keislaman yang mereka lakukan dengan memenuhi fungsi menetapkan pendapat, menghilangkan kesangsian dan akhirnya memperoleh kepercayaan tentang Islam yang kokoh. Yang dicari dalam Islam Rasional ini adalah ditemukannya pengetahuan yang mendasar mengenai Islam (Ilmu keislaman yang rasional) untuk mendapatkan keyakinan/kepercayaan rasional (iman yang rasional), dan selanjutnya tingkah laku yang bisa dipertanggungjawabkan secara epistemologis (amal yang rasional). Ketiga hal itu (*ilmu, iman dan amal yang rasional*) penting, untuk mendapatkan suatu orientasi keislaman.

Islam Peradaban istilah ini merupakan istilah yang dikembangkan Nurcholish Madjid dan Kuntowijoyo, kepentingan dari Islam Peradaban adalah “praktis” untuk mendapatkan “makna” dari perwujudan kongkrit Alquran. Karena itu disamping analisis *hermenetis* dari konsep-konsep kunci Alquran, mereka pun memberi perhatian besar kepada Islam kaum salafi. Metode yang dipakai untuk mengerti bagaimana “Islam sejati” ini dalam istilah filsafat sosial disebut *verstehen* (empati) mencoba memahami bagaimana kalangan salaf itu menghayati dan menjalankan Islam. Mereka dengan metode empati/fenomenologis ini tidak mencari “hukum-hukum rasional”, seperti kalangan Islam Rasional, tetapi ingin menemukan *makna* dari proses pembentukan Islam sebagai sebuah dorongan sejarah, yang menghasilkan sebuah peradaban Islam.

Terakhir, *Islam Transformatif* dari kalangan Transformis semacam Adi Sasono, M. Dawam Rahardjo dan kalangan Transformis lainnya, melihat kepentingan dari kalangan ini adalah “*emansipatoris*”, mainstream yang selalu menjadi dasar dalam menafsirkan Alquran mereka adalah visi Alquran tentang transformasi. Karena mereka dilatarbelakangi oleh ilmu sosial radikal, maka sejak awal mereka sudah yakin bahwa ada proses yang bersifat empiris dan struktural yang telah menyebabkan suatu penindasan. Dalam tafsiran Islam ini kemodernan sebenarnya identik dengan Barat atau *Westernisasi*. Sedangkan Barat identik dengan kapitalisme, sementara kapitalisme adalah orang tua dan ideologi dari imperialisme yang belakangan ini langsung atau tidak dalam bentuk kekerasan atau “damai” yang telah mendominasi dan membuat dunia Islam serta dunia Ketiga umumnya menjadi miskin dan terbelakang. Membebaskan masyarakat muslim yang miskin dan terbelakang dari belenggu dominasi struktural inilah yang menjadi agenda dari kalangan Transformis.

Landasan Teologis Gerakan Pembaharuan Islam, landasan dasar ide *tajdid* sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari ciri dasar ajaran Islam sebagai bentuk impikasi ajaran Islam setelah nabi meninggal. Ciri ini diformulasikan dalam bentuk keyakinan bahwa *pertama*, Islam adalah

agama yang *universal*, yang misinya adalah rahmat bagi semua penghuni alam. Dalam ciri ajaran yang khusus Islam menekankan keseimbangan antara persoalan duniawi dan yang non-duniawi, kehidupan spiritual dan material, serta ritual dan sosial. *Kedua*, adanya keyakinan bahwa Islam adalah agama terkhir yang diturunkan Allah yang memuat semua prinsip moral dan agama untuk semua umat manusia. Tajdid mengemban misi ganda yakni, mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan kepada kehidupan keagamaan seperti zaman awal Islam. dan, dengan landasan universalitas ajaran Islam itu sendiri, maka tajdid disini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan tantangan perkembangan kehidupan. Aspek metodologi tajdid adalah *ijtihad*.

Bagi Nurcholish Madjid, kemodernan atau modernitas disamping merupakan hal yang tak terelakkan juga merupakan keharusan sejarah. Sementara itu, dengan konsep *integrasi keislaman dan keindonesiaan*, Cak Nur mendeskripsikannya bahwa sekali pun nilai-nilai dan ajaran Islam itu bersifat universal, pelaksanaannya itu sendiri menuntut lingkungan sosio-kultural masyarakat Indonesia secara keseluruhan, termasuk di dalamnya lingkungan politik dalam kerangka konsep negara-bangsa.

Gagasan Cak Nur ini dapat dikatakan sejalan dengan konsep "*pribumisasi Islam*" nya Gus Dur. Dengan pribumisasi Islam menurutnya tidaklah dimaksudkan sebagai "jawanisasi" atau "sinkretisasi" ajaran Islam, tapi suatu usaha yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Secara sosiologis konsep "*integrasi keislaman dan keindonesiaan*" dan "*pribumisasi Islam*" yang ditawarkan Cak Nur dan Gus Dur merupakan bentuk *akulturasi* Islam terhadap budaya lokal memulai semacam proses internalisasi yang memang tidak mudah.

Pola pemikiran neo-modernis berusaha menggabungkan dua faktor *tradisionalisme* dan *modernisme*. Dalam rangka menjelaskan hubungan antara doktrin dan umat Islam, Cak Nur sangat konsisten dengan gagasan atau idenya yang banyak menggunakan sejarah peradaban Islam dan teori-teori sosial modernisasi terutama yang dikembangkan Weber dan Parson.²⁸ Yang mana ia mengelaborasi ajaran-ajaran Islam (Alquran dan Sunnah) dan reaktualisasi tradisi Islam itu sendiri. Modernisasi dan rasionalisasi semacam itu terkait erat dengan gagasan sekularisasi dan desakralisasi. Namun yang dimaksud Cak Nur dengan sekularisasi istilah yang sangat "menghebohkan" ini penerapan sekularisme, melainkan setiap "perkembangan yang "membebaskan", atau "menduniawikan" nilai-nilai yang sudah bersifat duniawi dan

²⁸ Saiful Muzani, "Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi: Telaah Kasus Awal", Prisma No. 1, Tahun XXII, 1993, hlm. 74-8.

melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk “mengukh rowikan”nya. Dalam kehidupan politik, ia pun lebih memikirkan segi nilai-nilai perpolitikan, bukan tingkat kelembagaan seperti partai atau negara. Ia banyak bicara tentang nilai-nilai yang dipandang universal seperti demokrasi, pluralisme, egalitarianisme, keadilan dan sebagainya. Semua itu dielaborasi dengan berpijak pada doktrin dan sejarah politik umat. Dalam konteks Indonesia ia menerjemahkan dengan ungkapan: “*Islam Yes, Partai Islam, No*”. Sehingga wajar apabila ia menolak konsep “*Negara Islam*”.

Kesimpulan

Islam kultural pada dasarnya akan menguatkan dan mengem bangkan Indonesia untuk bersaing dalam dunia global. Hal ini sepatutnya dipahami sebagai sebuah bentuk ujian terhadap resistensi Islam Kultural sebagai Islam *indigenouse* yang dirumuskan oleh walisongo. Jika Islam Kultural ini benar-benar dimanifestasikan dalam kehidupan Muslim Indonesia, maka setidaknya tentu akan ada dua implikasi positif, baik itu secara kultural maupun sosial.

Tugas kita sebagai generasi muda Islam yang hidup ditengah heterogenitas ke-indonesiaan harus menggali untuk menemukannya dan menggarapnya agar sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, Islam menjadi sesuatu yang menyatu dengan tradisi, sehingga tak ada yang perlu dipermasalahkan dalam konteks keberagaman budaya. Disamping itu, Islam juga dapat ditampilkan sebagai suatu tradisi budaya yang membawa arah baru dengan material yang sebetulnya sudah dikenal, tidak membawa keterasingan, sehingga mudah diterima. Atas dasar itulah, setiap kebaikan yang dilakukan seorang muslim sesungguhnya merupakan hasil kreasi dari buah iman dan Islam yang dimilikinya. Sikap tersebut diaktualisasikan dalam budaya tutur, sikap dan perilaku yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan li al-alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet; I Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006.

Abdulgani, Roeslan, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1983.

- Anies, Afif Nadjih, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press. 2005.
- Arif, Syaiful. *Deradikalisasi Islam; Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Cet. I; Jakarta: Koekoesan, 2010.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Azra, Azyumardi. *Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Darmawan, Hendro dkk., *Kamus Imiah Populer*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010.
- Hidayat, Komaruddin dan M. Wahyudi Nafis, *Agama Masa Depan, Perspektif Filsafat Perennial*, Jakarta; Paramadina. 2003.
- Hodgson , Marshall G. S., *The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization*, Jilid I. Diterjemahkan oleh Mulyadhi Kartanegara dengan judul *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia*, Cet; II, Jakarta; Paramadina, 2002.
- Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, di terjemahkan oleh M. Sadat Ismail dengan judul, *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Cet, XI, Yogyakarta; Qalam, 2005.
- Madjid, Nurcholish, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia*, Cet, I; Jakarta; Paramadina, 1997.
- _____, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- _____, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Cet;V, Jakarta; Paramadina, 2005.
- _____, Budhy Munawar-Rachman (penyunting), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di kanvas Peradaban*, Cet. 1, Jakarta; Mizan, 2006.
- _____, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Cet, XI , Bandung; Mizan, 2008.
- M. Syafi'i Anwar, "Sosiologi Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid", dalam Azra, Azyumardi, (et al.,) Asep Gunawan (Penyunting), *Artikulasi Islam Kultural Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2004.
- Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2011.

- Nata, Abudin, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*. Cet. V; Bandung: Mizan, 1998.
- Rais. M. Amin (ed.). *Islam di Indonesia; Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*. Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Cet. I; Yogyakarta: LkiS Group, 2005.
- _____. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia; dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Jurnal dan Makalah :

- M. Mukhsin Jamil, *Revitalisasi Islam Kultural, Walisongo, Volume 21, Nomor 2, November 2013*.
- M. Mukhsin Jamil, *Multikulturalisme Dalam Perspektif Agama dan Kepercayaan (Menimbang Islam Kultural)*, Makalah disampaikan dalam seminar Nasional Pelaksanaan Multikulturalisme Dalam Pembangun Kebudayaan dan Pariwisata, diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Kebon Raja Ungaran Semarang, tanggal 7 Juli 2011.

G. Tafsir Yang Berkarakter Pembaharuan, Belajar Dari Thantawi Jauhari

[Oleh: Amylia Karunia AR]

Sejarah telah membuktikan bahwa Islam pernah menjadi sebuah kekuatan besar dalam segala aspek kehidupan. Dan itu masih sangat segar dalam ingatan kita semua. Saatnya kita menjadi pelopor Kebangkitan Islam guna mewarnai kembali roda kehidupan di muka bumi. Dan energi kebangkitan itu akan terbit kembali dari bumi nusantara.

-Amylia Karunia AR-

Tinta Emas Sejarah Islam

Berbicara tentang pembaharuan kita tidak akan pernah melupakan bagaimana peradaban Islam ini mulai dibangun. Karena sebuah peradaban yang memiliki gagasan revolusioner tidak akan pernah lepas dari hukum alam bagaimana peradaban itu bermula, maka dari itu mengutip kata-kata dari Ibn Khaldun mengatakan bahwa sebuah peradaban tak lepas dari 3 hal; pertama adalah masa awal (merintis), kedua. Masa kejayaan dan ketiga adalah kemunduran. Itu merupakan sebuah fenomena yang sunnatullah terjadi adanya. Dan begitupun yang terjadi pada dunia Islam, pada masa awal Islam merintis hingga pada puncak kejayaannya yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang mana pada masa perkembangan ilmu pengetahuan saat itu, umat Islam berada pada puncak keemasan yang berhasil memimpin peradaban dunia khususnya pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid (169-194 H/ 785-809 M) dan Al-Makmun (198H/813 M). Sehingga lahirlah tokoh-tokoh yang mampu menginspirasi dunia hingga saat ini, contohnya; dalam bidang Filsafat, lahir tokoh seperti Alkindi, AlFarabi, Ibnu Tufail, Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Bidang kedokteran, Jabir Ibnu Hayan, Hunain Bin Ishaq, dll. Masih banyak sekali kemajuan dunia Islam pada masa Dinasti Abbasiyah dalam bidang lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu-satu disini. Dan itu sedikit banyaknya sangat mempengaruhi perkembangan peradaban dunia tidak terkecuali Negara Barat. Jasa besar Ilmuwan Muslim atau umat Islam secara keseluruhan itulah maka penulis mengutip pernyataan dari Marshall G. S. Hodgson menyebutkan bahwa seseorang tidak bisa memahami sejarah peradaban dunia, terutama sejarah peradaban modern ini, kalau tidak memahami sejarah peradaban Islam. Karena sejarah Islam adalah sejarah peletakan pertama ilmu pengetahuan yang bersumber pada Al-Quran dan Assunnah. Sehingga, muncullah pula beberapa model penafsiran Alquran untuk memudahkan umat memahami AlQur'an.

Pada dasarnya perkembangan sebuah model penafsiran Al-Qur'an juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, ini

terbukti dengan hadirnya corak tafsir *ilmi*. Tafsir *ilmi* sebenarnya sudah muncul sejak abad ke 4 H, tepatnya pada masa Daulah Bani Abbasiyah, seperti yang sudah penulis paparkan diatas, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bertumbuh sangat pesat pada masa itu, tak terkecuali embrio penafsiran bercorak *ilmi*'. Kecenderungan tafsir *ilmi* saat itu terjadi karena akibat efek dari tranformasi ilmu pengetahuan dan keinginan para ulama untuk melakukan kompromi antara ajaran Islam yakni Al-Qur'an dengan perkembangan peradaban dunia luar, sebagai akibat dan gerakan penerjemahan buku-buku asing kedalam dunia Islam dan perkembangan yang terjadi didunia Islam itu sendiri.²⁹ Pada intinya munculnya kecenderungan ini sebagai akibat pada penerjemahan kitab-kitab ilmiah yang pada mulanya dimaksudkan untuk mencoba mencari hubungan dan kecocokan antara pernyataan yang diungkapkan di dalam Al-Qur'an dengan hasil penemuan ilmiah (sains). Sebelumnya akan penulis paparkan terlebih dulu apa itu tafsir bil *ilmi*. Tafsir *Ilmi* adalah tafsir yang mengangkat terminologi ilmiah di dalam statemen-statement Al-Qur'an dan penulisnya berusaha menggali berbagai disiplin keilmuan dan pandangan-pandangan filsafat.³⁰ Sedangkan dalam definisi lain dikemukakan bahwa Tafsir *Ilmi* sebagai penafsiran ayat-ayat *kauniyyah* yang terdapat di dalam Al-Qur'an dengan mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan modern yang timbul saat sekarang.³¹ Serta ada juga sebagian ulama mengartikan Tafsir *Ilmi* sebagai sebuah penafsiran terhadap ayat-ayat *kauniyyah* yang sesuai dengan tuntutan dasar-dasar bahasa, ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian alam. Lain halnya dengan definisi yang ditulis M. Quraish Shihab dkk dalam buku Sejarah dan Ulum Al-Qur'an, Tafsir *Ilmi* ialah penafsiran Al-Qur'an dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan.³² Perintah untuk menggali pengetahuan berkenaan dengan tanda-tanda Allah pada alam semesta memang banyak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Inilah alasan yang mendorong para mufassir corak ini untuk menulis tafsirnya.

Kajian terhadap penafsiran Alqur'an oleh sebagian orang kadang dianggap sebagai ilmu yang telah "matang", sehingga seolah tertutup kemungkinan untuk berkembang. Padahal kenyataan sejarah membuktikan bahwa tafsir itu selalu berkembang seiring dengan derap

²⁹ Abd Al-Majid Abd al-Salam Al-Muhtasib, *Ittijahatu Al-Tafsir Al-Asr Al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 245.

³⁰ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssiruun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003) vol. II , 474.

³¹ Sayyid Agil Husin Al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 72.

³² M.Quraish Shihab, dkk. *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 183.

langkah perkembangan peradaban dan budaya manusia.³³ Tafsir merupakan bentuk produk buatan manusia yang mencoba untuk menginterpretasikan ayat alQuran untuk bisa di implementasikan dalam kehidupan. Oleh karena tafsir itu merupakan buatan manusia, maka selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman, yang serba dinamis, tidak seperti alQuran. Untuk itulah inovasi dalam penafsiran itu diperlukan, karena disesuaikan dengan dinamika yang ada.

Tafsir sebagai sebuah hasil dari dialektika antara teks yang statis dan konteks yang dinamis memang mau tidak mau harus mengalami perkembangan dan bahkan perubahan. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari dictum yang dianut oleh umat Islam bahwa Qur'an itu *shālih li kulli zamān wa makān* (layak untuk setiap waktu dan tempat).³⁴ Sebuah pemikiran tidak pernah terlepas dari dua hal, yang pertama adalah kondisi sosio kultur dan bayground kehidupan kita, dan yang kedua ialah pendidikan yang diberikan keluarga khususnya kedua orang tua di dalam kehidupan kita, yang mana itu bisa membentuk sebuah kerangka karakter seorang anak. Karena berangkat dari pengalaman hidup dan beberapa hal yang kita pelajari sedikit banyaknya akan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir yang membentuk sebuah aksi, dan aksi yang memberikan dampak pada kehidupan sosial. Dan itu sudah merupakan siklus kehidupan yang terus menerus terjadi hingga sampai pada titik pembaharuan.

Pada Abad ke-19 dunia Islam mengalami masa suram, terus menerus merosot, terbelakang dan banyak negara muslimin yang sedang menghadapi pendudukan asing. Pada masa itulah muncul seorang pemimpin Islam bernama Jamaluddin Al-Afghani, mengumandangkan seruan untuk membangkitkan Muslimin. Muridnya yang pertama yang mengikuti jejaknya ialah Muhammad Abduh. Dia yang mengajar pembaharuan dalam berbagai prinsip dan pengertian Islam. Ia menghubungkan ajaran-ajaran agama dengan kehidupan modern, dan membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan dengan peradaban.³⁵

Sebenarnya *Tajdid* atau *Pembaharuan* dapat ditelusuri latar belakangnya yang dapat dilihat dalam beberapa faktor, yaitu faktor politik, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah pembaharuan terdapat beberapa tokoh yang cukup terkenal yaitu, *Muhammad Abduh*. Dimana pikiran-pikirannya cukup besar pengaruhnya

³³ Abdul Mustaqim, *DINAMIKA SEJARAH TAFSIR AL-QURAN*, (Yogyakarta: Adab Press 2014), V

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ahmad Asy-Syirbashi, Terj. *Sejarah Tafsir Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdous, 1985), 161.

terhadap pembaharuan di dalam Islam dan Dunia Islam³⁶, termasuk Indonesia juga. Dalam pembaharuan Islam konteks Indonesia, dikenal juga, Gus Dur, Nur Cholish Madjid, dll. Seorang pembaharu yang revolusioner, dan itupun terjadi tak lepas dari semangat memberdayakan khazanah Islam. Dan hingga saat inipun gagasannya masih sangat segar dan menginspirasi setiap orang yang membaca karyanya ataupun hanya dengan mendengar namanya saja.

Percikan Tafsir Thantawi Jauhari

Embrio lahirnya tafsir *bil ilmi* memang bisa kita lihat sejak pada masa dinasti Abasiyah yang mana Gagasan ini selanjutnya ditekuni oleh imam Al-Ghazali dan ulama-ulama lain yang sependapat dengan dia. Fenomena ini antara lain dituangkan oleh Fakhruddin Al-Razi dalam kitabnya *Mafatih Al-Ghaib*.³⁷ Bisa dikatakan, Fakhruddin Al-Razi (w. 606 H) patut untuk dikedepankan ketika membahas munculnya penafsiran secara ilmiah. Hal ini diakui oleh seluruh Ahlusunnah dan riset lapangan juga membuktikan hal itu. Lantas kemudian tafsir ini belum berhasil untuk ditaklukkan oleh al-Ghazali sebagai salah satu pemercik hadirnya tafsir ini, tetapi, Al-Razi mencoba merealisasikan metode penafsiran yang sempat dibawa oleh Al-Ghazali. Walaupun yang terjadi Al-Razi pun belum mampu mengemas metode tafsir ini dengan sangat apik. Sehingga yang terjadi lambat laun tafsir bercorak *bil ilmi* ini tak diminati dan lenyap begitu saja. Kemungkinan lainnya adalah, bahwa pada saat itu larangannya lebih dominan daripada pembolehnya. Hingga pada akhirnya pada abad ke 19, Eropa mulai menduduki negara-negara Islam, Ilmu-ilmu Sains tentang alam pun sedikit demi sedikit diperkenalkan. Dari situ umat Islam mulai menyadari akan pentingnya adanya tafsir Ilmi karena banyak kesesuaian antara nash Al-Qur'an dengan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan.³⁸

Tantawi jauhari yang telah menyaksikan, lewat pengalamannya secara langsung, betapa mundurnya umat Islam itu, mencoba mengarahkan seluruh tenaganya dan pikirannya demi mempertahankan eksistensi umat Islam dalam merespon perubahan modern yang terjadi. Kepada tiga seruan. Pertama, menyerukan kepada umat Islam agar menolak taqlid (*unvestioning* dan *uncritical adopting*), kepengikutan

³⁶*Ibid.*

³⁷Sayid Musa Husaini, *Metode Penafsiran Sainis di Dalam Buku-buku Tafsir Modern*, (<http://quran.al-shia.com/id/metode/01.htm> di akses: 14 Oktober 2015 Jam 05.15).

³⁸ Abdul Mustaqim, *Kontroversi tentang corak Tafsir Ilmi*, (Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadist, Vol VII, Oktober 2006, 26-27).

terhadap produk pemikiran para pendahulu. Kedua, mendorong umat Islam agar melakukan kerja intelektual (ijtihad) dengan menggunakan nalar bebas dan melakukan kritik atas segala sesuatu berdasarkan metode ilmiah. Ketiga, menganjurkan umat Islam secara sungguh-sungguh menyerap semua yang dianggap baik dari Barat termasuk gagasan politik, terutama ekonominya, system pendidikan dan teknologi sambil tetap memelihara dan melestraikan Islam terutama dalam bentuk ritual dan kaedah-kaedah perilaku personal dengan satu keyakinan bahwa al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci yang memotivasi perkembangan ilmu pengetahuan.³⁹ Inilah salah satu gagasan sang Revolusioner dalam membangun pembaharuan. Beriman, berilmu, beramal.

Jika penulis gambarkan bahwa, sejatinya abad ke 19 adalah abad kebangkitan, karena dari abad itu lahirlah tokoh-tokoh hebat yang mampu menjadi obor pembaharuan, tak ada dan tak bukan salah satu tokoh tersebut adalah Tantawi Jauhari seorang murid dari Muhammad Abduh. Tantawi Jauhari adalah seorang Mufassir yang mengembangkan pemikiran metode tafsir bercorak *bil ilmi* yang sampai saat ini masih diperdebatkan baik dari kalangan mufassir ataupun akademisi.

Tantawi Jauhari menyerukan kebangkitan, terutama di Mesir dengan para pendukungnya. Karena melihat kenyataan umat Islam yang demikian itu Tantawi Jauhari merasa terpanggil untuk mengambil bagian menyumbangkan segenap kemampuannya baik pemikiran maupun aksi demi mempertahankan eksistensi umat Islam dalam rangka merespon perubahan modern yang terjadi. Ada tiga hal yang layak dicermati, sehingga gagasan dan pemikiran Tantawi Jauhari diperhitungkan dalam jajaran pemikiran Islam, yakni: Pertama, Obsesinya untuk memajukan daya piker umat Islam, Kedua, pentingnya ilmu bahasa dalam menguasai idom-idiom modern, dan Ketiga, pengkajiannya terhadap Al-quran sebagai satu-satunya kitab suci motivasi pengembangan ilmu.⁴⁰

Sebagai seorang cendiakiawan, Tantawi Jauhari selalu aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baik melalau buku-buku maupun melalui majalah dan surat kabar. Disamping itu ia selalu aktif menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang lebih menarik perhatian adalah ilmu tafsir. Ia juga Nampak menonjolkan ajaran gurunya tentang Sunnatullah, yang pada gilirannya membuat ia sangat peuli dengan ilmu fisiska, ilmu yang dipandangnyanya dapat menjadi suatu studi untuk mengantisipasi kesalahpahaman orang yang mengklaim bahwa Islam menentang ilmu

³⁹ Kafrawi Ridwan, *Ensiklopedi Islam*, Tantawi Jawhari, *al- Jawahir fi Tafsir al-Quran al-Karim*, (Mesir: Mustofa al-Babil al-Halabi, 1350), 90-97.

⁴⁰Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994), 307.

dan teknologi modern. Sebagaimana Abduh, Tantawi Jauhari sangat menentang bid'ah dan taklid, yang menurutnya dapat menyeret umat menjadi terbelakang dan jumud.⁴¹

Menurut Tantawi secara garis besar ilmu pengetahuan itu dapat di bagi menjadi dua, yakni ilmu bahasa dan selain bahasa. Ilmu bahasa memegang peranan yang amat penting dalam sebuah studi, sebab bahasa merupakan alat untuk menguasai dan memahami berbagai ilmu. Oleh karena itu, Tantawi mendorong masyarakat Mesir untuk memperbanyak pembangunan sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pemikiran yang sangat mendorong kegiatannya adalah karena keyakinannya bahwa Alquran memang menganjurkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu dalam arti yang seluas-luasnya.

Ketika menafsirkan ayat-ayat tentang alam semesta beliau menyusun pembahasan-pembahasannya dengan mengkompromikan pemikiran Islam dengan kemajuan studi ilmu fisika, karena menurut beliau ilmu fisika dapat menjadi suatu studi untuk menanggulangi kesalahpahaman orang yang menuduh Islam menentang ilmu pengetahuan dan teknologi modern.⁴² Seorang mufassir al-Quran perlu memiliki kualifikasi (syarat-syarat) dan berbagai bidang ilmu pengetahuan secara mendalam. Untuk menjadi seorang mufassir yang diakui, maka ia harus memiliki kemampuan dalam segala bidang. Para ahli telah menformulasikan tentang syarat-syarat dasar tertentu yang sangat diperlukan bagi seorang mufassir.⁴³

Untuk dapat menafsirkan Al-Quran, maka diperlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir. Orang yang dapat menafsirkan al-Quran hanya seorang yang memiliki keahlian dan menguasai ilmu tafsir (ilmu pengetahuan tentang al-Quran), sedang orang yang belum banyak mengerti tentang ayat dan tata cara menafsirkan al-Quran dan tidak menguasai ilmu tafsir tidak diperbolehkan menafsirkan al-Quran, hal ini dimaksudkan agar jangan sampai kitab suci ditafsirkan hanya sesuai dengan hawa nafsu keinginan mufassir, sehingga tidak sesuai dengan maksud yang dikehendaki Allah dalam merumuskan firman-Nya.⁴⁴

Ghiroh perjuangan dalam memperkaya khazanah Islam mengalir deras dan tidak dapat dibendung, layaknya air bah, meluas meluap. Hingga sampai ke bumi nusantara Indonesia. Di Indonesia pemikiran

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Department Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 1187

⁴³ Abd. Kholid, *Kuliah Sejarah Perkembangan Tafsir* (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2007), 6.

⁴⁴ *Ibid.*

untuk memperdalam khazanah Islam sangat berkembang pesat, tak terkecuali penafsiran, di antara tokoh-tokohnya adalah Buya Hamka, Quraish Shihab, Nawawi Al-Bantani, dll. Itu merupakan salah satu bentuk kebangkitan peradaban Islam ke-2. Semangat pembaharuan yang dikumandangkan Tantawi Jauhari itu menghiasi dinding perjuangan para pemikir di era sekarang.

BAB II
Cita-Cita Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

RAHMAT SYARIF

KHOIRUL UMAM H

RIANDA RIDHO

HAIKAL

FREDY HANDOKO

NASRULLOH ALI MUNIF

AHMAD JAZULI

A. *Social Entrepreneurship*: Sebuah Pendekatan Bisnis dalam Menyelesaikan Permasalahan Sosial

Oleh: Rahmat Syarif

Kewirausahaan Sosial

Studi tentang kewirausahaan berkembang sangat signifikan pada beberapa dekade terakhir. Banyak orang akhirnya mulai menyadari bahwa kontribusi dan peran penting sektor ini sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pemahaman terhadap pentingnya posisi prinsip dan praktek dari kewirausahaan ini jugalah yang membuat kajian kewirausahaan menjadi sangat luas dan berlangsung dinamis. Bahkan, banyak ahli dan praktisi kewirausahaan telah memulai penjelajahan lebih jauh dan melampaui isu profit yang sering kali menjadi isu sentral pada kajian ini dan mulai menekankan nilai dan tujuan sosial ke dalam organisasi mereka.

Hal ini dilakukan karena mereka menemukan banyak permasalahan sosial yang tersisa dan belum terpecahkan bahkan cenderung diabaikan oleh para pelaku bisnis, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (Zahra, et al., 2009). Beberapa orang kreatif yang mulai mencoba untuk mengembangkan model bisnis baru yang komprehensif untuk memecahkan permasalahan sosial akhirnya dikenal dengan sebutan *social entrepreneurs* (Pebisnis Sosial). Oleh karena itu, *social entrepreneurship* (Kewirausahaan Sosial) melibatkan penggunaan dan evaluasi segala peluang untuk menghasilkan *social value* (Austin, et al., 2006).

Pada awalnya konsep kewirausahaan sosial diterapkan dalam bentuk program-program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang dimana program ini dikembangkan oleh perusahaan atau pebisnis untuk merespon permasalahan sosial yang ada disekeliling mereka. Namun pada akhirnya isu ini menjadi sebuah perdebatan penting karena seiring perkembangan masyarakat, dirasa sangat penting untuk menggunakan pendekatan yang mendalam pada beberapa permasalahan sosial yang ada saat ini. Akhirnya, isu ini berkembang ke usaha untuk membuat kajian kewirausahaan sosial menjadi bagian yang berdiri sendiri ketika dibandingkan dengan wacana tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial memang sesuatu yang signifikansinya tidak dapat dipungkiri, namun hal tersebut berbeda dengan kewirausahaan sosial (Rostiani, et al., 2014).

Usaha untuk mendefinisikan kewirausahaan sosial telah mengkonseptualisasikan kewirausahaan sosial itu sendiri berdasarkan karakteristiknya, prosesnya, dan tentu saja efek yang ia hasilkan (Trivedi, 2010). Dees (1998), dikenal sebagai orang pertama yang mendefinisikan

kewirausahaan sosial, berpendapat bahwa terma kewirausahaan sosial mungkin adalah sesuatu yang baru, namun fenomenanya sudah berlangsung sejak lama. Kewirausahaan sosial bisa mencakup *social purpose business ventures*, misalnya organisasi hibrida yang menggabungkan elemen *not-for-profit* dan *for-profit*. Sebagai contoh, penampungan tunawisma yang memulai bisnis dengan melatih dan mempekerjakan tunawisma yang terdapat disana. Lebih jauh lagi, dengan mengkombinasikan konsep agen inovasi dan perubahan dari Schumpeter, konsep memperoleh peluang dari Drucker, dan juga konsep kemampuan pengambilan keputusan dari Stevenson, Dees, merumuskan sebuah definisi kewirausahaan sosial yang dimana pelaku kewirausahaan sosial memainkan peran penting sebagai agen perubahan sosial, dengan cara sebagai berikut:

- a) Memilih sebuah misi untuk membuat dan menopang kepentingan sosial (bukan sekedar kepentingan pribadi)
- b) Terus mengenali dan menemukan peluang-peluang baru untuk mewujudkan misinya
- c) Terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan
- d) Bertindak dengan berani tanpa terbatas oleh sumber daya yang saat ini dimiliki, dan
- e) Menunjukkan sikap akuntabilitas yang tinggi atas pihak-pihak yang dilayaninya dan juga atas hasil yang dicapai.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kewirausahaan sosial memainkan peran penting pada masa depan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi, permasalahan lingkungan dan kekurangan sumber daya bagi bisnis dalam memaksimalkan profitnya tidak bisa dihindari. Sedangkan pada sisi yang lain, karena keterbatasan finansial, pemerintah kadang terpaksa untuk membiarkan atau meninggalkan kesenjangan sosial yang parah, terutama pemerintah yang berkonsentrasi dalam pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang.

Ketika pemerintah terlibat dalam aktivitas ekonomi, mereka bahkan cenderung membiarkan semua model bisnis tetap berjalan selama hal tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, dalam upaya pemaksimalan keuntungan, pemerintah lokal mungkin gagal untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang terus memberikan pemasukan besar, namun ternyata memproduksi polusi. Mereka juga mungkin memberikan toleransi kepada fenomena yang bisa saja menghancurkan tatanan, stabilitas, dan keamanan masyarakat, seperti polarisasi antara si kaya dan si miskin atau kompetisi yang tidak seimbang dan mereka mungkin juga secara diam-diam bekerja sama dengan perilaku bisnis yang mendegradasi nilai kemanusiaan dan bahkan merusak standar etika dan moral (Lundstrom, et al., 2014).

Dengan adanya persoalan krisis ekonomi global yang kemudian semakin mempertanyakan sifat dan permasalahan mendasar dari sistem kapital, akan kemanakah masa depan itu? Kapitalisme-kah, Sosialisme-kah, atau jalan ketiga-kah? Pada akhirnya, dengan kombinasi antara tujuan sosial dan jalan komersial, kewirausahaan sosial akhirnya dikenal dan dipercayai sebagai pendekatan yang tepat untuk menciptakan ide-ide baru terhadap perubahan sistem sosial yang ada (Lundstrom, et al., 2014).

Perkembangan Kewirausahaan Sosial dalam Tinjauan Global

Perhatian kewirausahaan sosial secara global mendapatkan momentumnya ketika Muhammad Yunus mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian 2006 karena memelopori pengembangan kredit mikro dan bisnis sosial (Grameen Bank) (Palesangi, 2012). Dengan keyakinan bahwa pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan sosial karena perilaku yang tidak efisien, ketidakmampuan mengeksekusi kebijakan dengan baik, dan tidak bisa terlepas dari kepentingan politik, Muhammad Yunus mendirikan *Grameen Bank* pada tahun 1976 dan oleh legalitas pemerintah pada tahun 1983 bertransformasi menjadi lembaga perbankan yang independen, yang mana lembaga ini merupakan lembaga kredit mikro dan bank pembangunan masyarakat yang memberikan pinjaman kecil (*grameencredit*) pada masyarakat yang sangat miskin tanpa membutuhkan jaminan.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, Inggris adalah negara pertama di dunia yang mengakui pentingnya sector sosial secara ekonomi dan pelibatan masyarakat dengan cara mendirikan *'Third Sector'* yang melibatkan sektor volunter dan kelompok masyarakat, kewirausahaan sosial, kegiatan amal, koperasi dan organisasi kepemilikan masyarakat yang memiliki karakteristik umum dengan menjadi organisasi non-pemerintah dan pendorong nilai dengan penginvestasian ulang semua keuntungan pada kepentingan sosial, lingkungan, dan budaya sebagai prinsip utama (Trivedi, 2010). Pada tahun 2009 sektor ini telah menyerap sebanyak 650.000 orang pekerja dan menyumbangkan 8,4 Milliar Poundsterling bagi perekonomian Inggris (Haryanti, et al., 2015). Di Amerika sendiri, pada tahun 2009 Presiden Obama telah membuat *The Office of Social Innovation and Civic Participation*, dibantu dengan dana inovasi sosial (The White House, 2009), yang bertugas untuk mengidentifikasi dan mereplikasi dampak yang sosial yang besar (Trivedi, 2010).

Di Asia sendiri, Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang telah mengatur dan menuangkan kewirausahaan sosial ke dalam bentuk undang-undang yang sudah berlaku sejak tahun 2007 dan diamandemen pada tahun 2010. Undang-undang ini menjadi kerangka

dalam mengembangkan kebijakan dan memberikan status resmi bagi *social enterprise* di Korea Selatan. Undang – undang ini pula yang memberikan definisi bagi *social enterprise* sebagai “sebuah perusahaan atau organisasi yang menjalankan aktivitas bisnis sekaligus memberikan prioritas dalam pencapaian misi/tujuan sosial”. Disamping itu pula pemerintah Korea Selatan mendorong perusahaan swasta untuk mendukung kewirausahaan sosial dengan berbagai cara seperti dukungan finansial, pembelian barang dan jasa, dan lain-lain, dan menyebut perusahaan swasta pendukung kewirausahaan sosial sebagai “*Connected Companies*” atau perusahaan yang terkoneksi (Haryanti, et al., 2015). Pada intinya, pemerintah Korea Selatan berusaha menciptakan iklim yang positif dan mendukung bagi kewirausahaan sosial di negaranya.

Selain itu, kewirausahaan sosial juga telah menarik perhatian dukungan banyak institusi. Telah banyak investasi besar yang diberikan kepada kewirausahaan sosial oleh yayasan yang dikenal sebagai ‘*venture philanthropy*’ seperti Ashoka, The Schwab Foundation dan The Skool Foundation, The Canadian Social Entrepreneurship Foundation, dan The Agastya International Foundation. Sebagai contoh, saat ini Ashoka telah membuka kantor di 37 negara dan membantu lebih dari 3.000 pengusaha sosial yang melakukan perubahan sosial di lebih dari 70 negara (Haryanti, et al., 2015). Ashoka juga mengembangkan program pengukuran efektivitas (*The Measuring Effectiveness (ME) Program*) pada tahun 1997. Program ini didesain untuk menilai kemajuan *Ashoka Fellows* dari waktu ke waktu (Leviner, et al., 2006). Selain itu, saat ini telah banyak bentuk organisasi publik seperti organisasi nonprofit, organisasi nonpemerintah, organisasi amal, dan juga organisasi profit yang mulai mengidentifikasi dirinya sebagai sebuah kewirausahaan sosial yang dimana menurut Defourny dan Nyssens (2010) bahwa hal tersebut tidak hanya menunjukkan ketertarikan banyak pihak terhadap konsep ini, tapi juga menunjukkan ketidakjelasan definisi yang mengelilingi konsep kewirausahaan sosial ini.

Kewirausahaan Sosial di Indonesia

Di Indonesia sendiri, menurut Aida dan Hijrah Hati (2013) konsep modern dari kewirausahaan sosial pertama kali diperkenalkan oleh Ashoka Foundation pada tahun 1983 ketika meluncurkan program awalnya untuk mengidentifikasi, melatih dan mendanai pengusaha lokal. Namun, beberapa organisasi yang memiliki karakteristik dan bisa dilabeli sebagai kewirausahaan sosial bisa dilacak jejak dan perannya pada periode pra-kemerdekaan sekitar akhir 1800 dan awal 1900. Ada tujuh organisasi utama yang terlibat dalam pergerakan sosial untuk kemerdekaan seperti Sekolah Kartini, Sarekat Dagang Islam, Sjarikat Oesaha, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Taman Siswa dan Himpunan

Saudagar Indonesia. Organisasi ini memilih edukasi maupun perdagangan sebagai corak dari perjuangannya, tapi mereka disatukan oleh visi politik, agama, dan kebebasan ekonomi. Ada empat karakteristik utama kenapa organisasi-organisasi tersebut dapat digolongkan sebagai kewirausahaan sosial, pertama adalah tujuan dan dampak sosial yang mereka miliki, inovasi, aktivitas perdagangan dan cenderung bersifat otonomi dari pengawasan pemerintah. Dengan kata lain, organisasi tersebut menjalankan kewirausahaan sosial untuk merealisasikan tujuan pergerakan sosialnya.

Meskipun belum ada studi yang komprehensif tentang bagaimana dampak sosial dari kehadiran kewirausahaan sosial di Indonesia, namun secara sederhana perkembangan organisasi-organisasi yang dapat digolongkan sebagai kewirausahaan sosial, jika dilihat dari tujuan atau nilai sosial yang ingin dicapai, sangatlah berkembang sampai saat ini.

Du'Anyam adalah salah satu kewirausahaan sosial yang berbasis di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bisnis ini berangkat dari dua masalah utama, yaitu permasalahan kesehatan ibu dan pertanian. Dalam segi kesehatan ibu, seperti yang dikutip pada website resmi bisnis ini, 75% wanita di NTT tidak mempunyai cukup uang untuk berpartisipasi dalam program perencanaan kehamilan yang disponsori oleh pemerintah Indonesia. 25% ibu-ibu yang disurvei, bahkan memiliki sejarah melahirkan bayi yang telah meninggal dan juga keguguran. Dari segi pertanian, perempuan di desa harus turun ke ladang-ladang karena suami mereka bekerja di provinsi yang lain, sedangkan ladang tersebut tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tapi juga menjadi sumber utama makanan. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi ibu-ibu untuk mengolah lahan, yang disatu sisi juga meningkatkan resiko pada ibu yang sedang dalam masa kehamilan. Hal inilah yang dijawab oleh Du'Anyam dengan penerapan skema Koperasi Kelompok Tenun. Dalam masa normal, kelompok ini akan bekerja sama dalam mengelolah ladang pertanian dengan pembagian waktu kerja yang jelas. Diwaktu yang sama, para ibu-ibu tersebut akan menganyam kerajinan tangan dengan bantuan Du'Anyam untuk meningkatkan kualitas dan desain untuk pasar yang lebih luas. Namun, ketika ada anggota yang sedang dalam masa kehamilan, dia tidak akan bekerja di ladang dan tugasnya akan diambil alih oleh anggota kelompok yang lain, namun ibu yang hamil tersebut akan mengerjakan anyaman dalam waktu sehari penuh untuk menggantikan tugas anyaman anggota kelompok yang lain. Dampaknya, usaha kerajinan yang berkelanjutan ini menjadi sumber pendapatan alternatif bagi perempuan, yang sedikit mengurangi beban kerjanya pada pertanian dan juga memudahkan mereka dalam menghadapi gangguan iklim dan juga hal ini menjadi sebuah langkah untuk menekan angka bayi

yang lahir mati atau keguguran karena beban kerja di sektor pertanian yang berat.

Di tempat lain, Makassar, Sulawesi Selatan, berangkat dari per soalannya kelangkaan bahan bakar solar yang menjadi pilihan utama para nelayan di Makassar, minyak goreng bekas (jelantah) yang terkadang terus dipakai oleh penjual, dan juga banyaknya pengangguran yang berprofesi menjadi preman, membuat perusahaan yang bernama Garuda Energi Nusantara (GenOil) untuk menyelesaikan masalah ini dengan bergerak di wilayah pengembangan energi alternatif. Dengan menerapkan model kerja yang sederhana, akhirnya semua masalah bisa teratasi. Penjual akan menjual minyak bekasnya seharga Rp.1000-Rp.1500 per liter kepada pengumpul (mantan preman) dan kemudian GenOil akan membeli minyak tersebut seharga Rp.2000 rupiah dan kemudian mengolahnya menjadi biodiesel yang akan dijual ke nelayan seharga Rp.5000 rupiah, lebih murah dibandingkan harga eceran solar di pasaran. Saat ini, melalui pekerjanya (mantan preman), perusahaan ini sudah mengirimkan biodiesel yang dihasilkannya ke 300 nelayan yang ada di kawasan Pelabuhan Paotere Makassar.

Perkembangan kewirausahaan sosial di Indonesia juga disebabkan oleh beberapa institusi non-pemerintah (LSM) yang aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendukung, antara lain adalah British Council Indonesia, Ashoka Indonesia, Rumah Perubahan, Sinergi Indonesia, dan Unlimited Indonesia. Untuk institusi perusahaan, Bank DBS secara global memiliki fokus kegiatan CSR untuk mendukung *social entrepreneurship*. Selain itu, perusahaan konsultan terkemuka Ernst and Young juga menaruh perhatian secara konsisten selama satu dekade terakhir ini. Untuk institusi perguruan tinggi, Universitas Atmajaya, Universitas Indonesia (khususnya melalui UKM Center FEB UI), dan Universitas Padjadjaran tergolong yang paling aktif dalam mempelajari dan mendukung kewirausahaan sosial di Indonesia (Haryanti, et al., 2015). Beberapa organisasi di atas juga aktif menjadi pendamping dan inkubator bagi bisnis-bisnis sosial yang sedang berkembang di Indonesia.

Tidak seperti berbagai Negara yang telah memberikan perhatian khusus terhadap kewirausahaan sosial, sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian khusus terhadap kewirausahaan sosial. Namun, perhatian terhadap isu kewirausahaan secara umum telah ada. Misalnya RUU tentang keirausahaan telah masuk ke daftar 37 RUU Prioritas dari total 158 RUU dalam program legislative Nasional (Prolegnas). Regulasi lainnya seperti UU No.40/2007 tentang perseroan terbatas dan UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang mewajibkan perusahaan dan penanam modal untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial dan beberapa kewirausahaan sosial telah memperoleh bantuan dana program ini. Selain

itu pemerintah juga mendorong kewirausahaan dengan cara memasukkan tema wirausaha dalam kurikulum tingkat sekolah menengah atas dan meluncurkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) sejak tahun 2011 yang menawarkan pelatihan teknis, manajerial dan bantuan dana bagi wirausahawan muda. Berbagai model kebijakan ini pada umumnya bertujuan untuk melahirkan wirausaha baru dan mendukung perkembangan bisnis agar mampu berkompetisi secara global. Meskipun paket kebijakan tersebut ditujukan bagi kegiatan wirausaha secara umum, namun para *social entrepreneur* juga dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan organisasinya (Haryanti, et al., 2015).

Daftar Pustaka

- Austin, J., Stevenson, H., & Wei Skiller, J., 2006. *Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?*. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 1, No.30, pp. 1-22.
- Dees, Gregory. J. 1998. *The Meaning of "Social Entrepreneurship"*. Kansas City, MO and Palo Alto, CA: Kauffman Foundation and Stanford University.
- Defourny, J., & Nyssens, M. 2010. *Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and United States: Convergences and Divergences*. Journal of Social Entrepreneurship, Vol. 1, No. 1. Pp 32-53.
- Haryanti, Dewi M., Hijrah Hati, Sri R., Wirastuti, Astari., Susanto, Kumala., 2015. DBS Foundation.
- Idris, Aida., & Hijrah Hati, Sri R. 2013. *Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past*. Journal of Social Entrepreneurship
- Leviner, Noga., Leslie R. Crutshfield., & Diana, Wells. 2006. *Understanding the Impact of Social Entrepreneurs: Asokha's Answer to the challenge of Measuring Effectiveness*. Paper prepared for the 34th annual conference of the Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action, Washington, D.C., November 17-18, 2005. Reprinted in Research on Social Entrepreneurship: Understanding and Contributing to an Emerging Field, edited by Rachel Mosher-William, pp.89-104. Occasional Paper Series, Vol 1, no. 3 (Indianapolis: ARNOVA).
- Lundstrom, A., Friedrichs, Yvonne. V., Zhou, C., & Sundin, Elisabeth., 2014. *Social Entrepreneurship, Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions*. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.
- Palesangi, Muliadi. 2012. *Pemuda dan Kewirausahaan Sosial*. Seminas Competitive Advantage II, Vol. 1, No. 2.

- Rostiani, R., Paramita, W., Audita, H., Virgosita, R., Budiarto, T., & Purnomo, B.R., 2014/ *Understanding Social Enterprises in Indonesia: Drivers and Challenges*. Journal of Indonesian Economy and Business. Vol 2, No.2, pp. 183-191.
- The White House. 2009. *'President Obama to request \$50 million identify and expand effective, innovative non-profits*, Press Release, 4 May.
- Trivedi, C. 2010. Towards a Social Ecological Framework for Social Entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship, Vol 1, No. 19, pp. 63-80.
- Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O. & Shulman, J. M., 2009. *A Typology of Social Entrepreneurs: Motives, Search Processes, and Ethical Challenges*. Journal of Business Venturing, pp. 519-532.

B. Belajar dari yang ke-3

[Oleh: Khoirul Umam H]

Perusahaan ke 3 Dunia

Seorang pemuda dirasa kurang pantas disebut pemuda jika tanpa mengenal teknologi terbaru dan kekinian. Banyak sekali pilihan untuk memilih teknologi apa untuk membantu serta memudahkan kita dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Berkaca dari beberapa tulisan, ada beberapa hal yang mungkin bisa topik yang sangat sensasional bagi visi Indonesia kedepan. Sudah banyak produk bangsa ini yang patut di support penuh oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, terlepas dari *deal-deal* politik yang kadang menguntungkan produk dari perusahaan raksasa.

Sebagian orang mengenal produk Indonesia masih berupa *prototype* belum ada usaha lebih untuk membuatnya secara massal dan riset lebih lanjut guna memenuhi standart yang berlaku di Indonesia. Ambil contoh mobil ESEMKA yang luar biasa menggugah perasaan khalayak pelajar di Indonesia untuk berkreasi dan membuat terobosan terobosan yang lagi lagi mengharapkan tindakan serius dari investor maupun pemerintah untuk mewujudkannya.

Tidak sedikit pula produk yang sangat luar biasa dari hasil karya tulis ilmiah dari mahasiswa di Malang. Teringat dengan produk pemerah susu sapi elektrik yang mampu membunuh bakteri berbahaya agar layak di konsumsi langsung melalui alat tersebut tanpa dimasak pada suhu tertentu. Sekian banyak hasil karya tersebut juga masih “menunggu” keberanian dan ketidaktakutan para *risk taker*. Sangat amat disayangkan apabila teknologi tersebut negara lain yang berhasrat untuk mematenkan dan memasarkan secara massal. Bisa dibayangkan betapa mudahnya peternak Sapi, Kambing, atau bahkan kuda di Indonesia yang mampu menghasilkan produk yang susu dan bisa untuk dipasarkan. Telah diyakini oleh beberapa ahli bahwa kandungan baik seperti mineral dan vitamin yang terkandung di susu tersebut tidak ikut hancur dan rusak seperti yang dialami oleh produk hewani yang di masak pada suhu tinggi.

Tulisan kali ini menelisik bagaimana negara Indonesia yang dikatakan sebagai negara berkembang tidak selalu menunjukkan perkembangan yang stagnan, dengan kata lain produknya itu-itu aja tidak ada peningkatan kualitas dan dampak ekonomis lainnya yang bisa dirasakan oleh produsen. Meskipun dalam hati agak kurang sepatat bahwa masih ada karya-karya dari anak bangsa negeri ini yang patut dibanggakan di level yang lebih tinggi.

Sebuah sejarah yang menarik untuk diulas tatkala sebuah perusahaan asal Tiongkok yang mampu menjadi perusahaan ketiga terbesar di dunia. Bisa dibalang di usia yang cukup muda, produk yang dihasilkan mampu meraih simpati dari berbagai pihak. Tidak hanya menawarkan produk dengan murah, namun juga mampu menghasilkan kualitas diatas rata-rata. Sebutlah perusahaan Xiaomi yang sebagian orang meyakini bahwa Xiaomi vs Apple sudah bisa dikategorikan sebagai bisnis yang *apple to apple*.

Berawal dari nama Xiaomi Inc (Tionghoa: 小米科技; pinyin: Xiǎomǐ Kējì), secara harfiah "Teknologi Beras Kecil" atau "Teknologi Xiaomi"). Nama Xiaomi berasal dari Bahasa Mandarin, yaitu "beras kecil". Pada tahun 2011, CEO Lei Jun mengungkapkan bahwa terdapat makna yang lebih besar dari nama Xiaomi. Dia menghubungkan "Xiao" sebagai konsep Buddha yang berarti "sebutir beras dari Buddha yang sama besarnya seperti gunung", dan mengatakan bahwa Xiaomi ingin bekerja dari hal-hal yang kecil, bukan memulai dari hal-hal yang besar. Sementara "mi" merupakan singkatan dari "Mobile Internet" dan juga "Mission Impossible" karena setelah mendirikan Xiaomi, terdapat banyak hambatan yang terlihat mustahil untuk dihadapi pada saat itu. Tetapi lagi lagi *"as long as you trying at best, Nothing is Impossible"*.

Perusahaan Elektronik swasta dari Tiongkok ini didirikan pada tahun 6 Juni 2010 berkantor pusat di China, Beijing yang mempunyai misi dan visi menciptakan pengalaman pengguna dari segala aspek. perusahaan ini dengan mudah telah menjadi salah satu perusahaan teknologi tercepat & terkemuka di Cina.

Xiaomi juga merupakan distributor Smartphone terbesar ke-3 di Dunia yang merancang, mengembangkan, dan menjual Telepon cerdas, Aplikasi seluler, dan Elektronik konsumen. Xiaomi merilis smartphone pertamanya di bulan Agustus 2011. Pendiri serta CEO Xiaomi adalah Lei Jun, yang merupakan orang terkaya ke-23 di Tiongkok menurut Forbes (sebuah majalah bisnis dan finansial Amerika Serikat). Dan perusahaan ini kini bernilai lebih dari \$10 miliar USD dan sudah mempunyai lebih dari 5000 karyawan dari Tiongkok bahkan Malaysia, Singapura, India, Filipina dan Indonesia.

Pada tahun 2014, Xiaomi mengumumkan akan memperluas pasarnya ke luar Tiongkok. Xiaomi memulai debut internasionalnya diawali oleh negara Singapura. yang akan mengkoordinasikan semua kegiatan termasuk peluncuran produk di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Redmi dan Mi 3 adalah telepon cerdas yang pertama kali dijual di Singapura masing-masing pada tanggal 7 Maret dan 21 Februari.

Pada 7 Maret, Mi 3 habis terjual dalam waktu 2 menit di Singapura. Setelah Singapura, Xiaomi juga masuk ke Malaysia, Filipina,

dan India. Kemudian, pada bulan-bulan berikutnya Xiaomi juga masuk ke Indonesia, dan akan melakukan ekspansi ke Thailand, Rusia, Turki, Brasil, dan Meksiko.

Pada bulan April 2014, Awal mula dengan nama domain *Xiaomi.com* dan akhirnya mengganti menjadi *Mi.com* yang merupakan situs resmi Xiaomi. Xiaomi membeli domain baru dengan nama *Mi.com* dengan harga \$3,6 juta AS, atau sekitar Rp. 44,5 miliar. dan menjadi nama domain termahal yang pernah dibeli di Tiongkok, seperti yang dikatakan oleh seorang eksekutif senior Xiaomi.

Dalam setengah tahun 2014, Xiaomi telah mengirim 15 juta perangkat atau 14% dari pangsa pasar Tiongkok dan telah mengalahkan Samsung yang hanya mengirim kurang dari 13 juta perangkat. Pada bulan Juli 2014, Xiaomi telah menjual 57.360.000 ponsel. Pada bulan November 2014, Xiaomi mengatakan akan menginvestasikan 1 miliar dolar AS atau sekitar 12,3 triliun rupiah untuk membangun konten televisi.

Bahkan kuartal pertama tahun 2017, perusahaan ini berinisiasi untuk membuat *mi environment* mulai dari *stecker* untuk listrik, *hoover board*, sepeda listrik, lampu yang bisa di kontrol melalui koneksi wireless di smartphone, sepatu yang mampu mendeteksi langkah, denyut jantung, bahkan kalori yang dibakar saat sepatu tersebut digunakan.

Defisiensi Eco-Technology

Tidak habis-habisnya *demand* atas teknologi yang ramah lingkungan, bukan karena ada titik jenuh dalam teknologi konvensional, namun lebih pada kebutuhan akan lingkungan yang lebih bersahabat untuk ditinggali. Bisa dibayangkan fenomena terkini tentang sampah yang tidak bisa terurai akan mengendap dan memberikan dampak negatif seperti banjir dan rusaknya organisme hidup karena memakan sisa makanan seperti plastic

Masih terlintas di pikiran, betapa viral nya seekor penyu yang diselamatkan oleh wisatawan. Menurut video tersebut seekor penyu memakan plastik dan terdapat benda asing di hidung yang membuat penyu akan menderita dan meninggal apabila tetap dibiarkan bersarang di tubuh hewan tersebut. Dengan perlahan sang wisatawan mengambil sampah yang tertancap di hidungnya, ya kurang lebih 7 cm sampah plastik ada di dalam salah satu lubang hidung sang penyu. *As we know*, penyu adalah salah satu hewan yang mengurangi jumlah populasi ubur-ubur. Ubur-ubur yang terlalu banyak di lautan dapat mengganggu ekosistem ikan.

Selanjutnya, penemuan terkini mengenai penemuan pengganti botol air minum yakni semacam kantung air yang bisa dimakan yang

terdiri dari klorida dan ekstrak alga coklat. Sangat viral dan membuat pengguna media sosial berkali-kali men-*share* betapa menariknya ide tersebut. Tak hanya itu, dengan mudah kantung air tersebut bisa diberi rasa-rasa sehingga lebih menarik. Ide dalam uji coba akan digunakan dalam lomba lari marathon kedepan.

Bisa dibayangkan berapa jumlah botol plastik yang bisa di substitusi dengan teknologi tersebut. Tentu saja mampu menekan dampak buruk pada organisme yang ada di bumi tercinta ini. Disisi lain, temuan energy solar belum teraplikasikan di berbagai macam teknologi, dapat mudah ditemukan teknologi solar di kota dan itupun hanya untuk memenuhi kebutuhan akan air panas di rumah-rumah. Padahal dengan teknologi tepat guna mampu memberikan energy listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik rumahan.

Penemuan terbaru berkuat dengan ketersediaan energy juga sudah dilakukan oleh para ilmuwan belanda dan jerman yang sedang mengembangkan turbin di dalam lautan. Beberapa pakar meyakini arus di lautan mampu memberikan gerakan yang berimplikasi terhadap gerakan roda turbin sehingga mampu menciptakan arus listrik. Bahkan tidak disangka energi juga bisa di ciptakan dari alat yang di pasang diatas permukaan laut, seperti yang kita ketahui bahwa permukaan laut mampu memberikan gelombang yang kontinyu sehingga alat yang memiliki penampang seperti jemari kaki bebek mampu bergerak seiring perubahan naik turunnya gelombang laut, dari gerakan alat tersebut diubah menjadi energy. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa energy seperti ini mampu mengungguli teknologi nuklir karena memang lebih ramah lingkungan.

Namun kesemuanya itu masih belum bisa diproduksi dan digunakan karena perlu ada kajian lebih lanjut supaya mampu mengurangi dampak dan posibilitas yang akan terjadi apabila alat-alat tersebut digunakan dan dimanfaatkan oleh khalayak umum. *At least*, sudah ada usaha yang serius untuk mengurangi dampak buruk sejumlah aktivitas manusia terhadap lingkungan.

Babak baru pemuda Indonesia

Keprihatinan muncul dari sejumlah kalangan di tanah air ini. Penghargaan yang minim terhadap prestasi dan karya anak bangsa memaksa mereka untuk “menjual” idenya untuk negara tetangga. Sebagai introspeksi antara diri sendiri dan orang lain bahwa perlu adanya kesadaran atas setiap prestasi yang muncul. Kembali mencontohkan negara dengan penghargaan terhadap insinyur dan tenaga ahli terbaik di jerman, tidak lupa di ingatan bahwa anak terbaik negeri ini di sanjungkan dan dipuja di negeri tersebut. Namun kurang diperhatikan oleh negara sendiri. Ironis.

Tidak hanya itu, animator asal Indonesia juga lebih “laku” dan dihargai di luar negeri ini daripada negara itu sendiri. Lagi-lagi pencipta teknologi 5G yang mulai dikembangkan oleh Jepang sebagai riset untuk meningkatkan kapasitas transfer data di internet yang mencapai sekitar 30Gb/s. dan perlu diketahui hal tersebut juga dilakukan oleh anak negeri ini. Seluruh masyarakat perlu *aware* terhadap sebuah karya, besar kecil, bukanlah sebuah masalah, bisa jadi produk tersebut bisa jadi role model dalam memulai sesuatu yang besar. Seperti munculnya pesawat terbang yang tidak langsung dimulai mesin super yang mampu menerbangkan kapal besi, namun dimulai dari seorang ilmuwan yang memulai percobaan dengan menggunakan sayap di sela-sela ketiaknyanya dan tentu saja tidak bisa dikatakan terbang karena tidak bisa melawan gravitasi.

Negeri ini membutuhkan sebuah penemuan yang mampu mengubah cara pandang dunia luar di negara yang berpenduduk 225 juta jiwa ini. Indonesia membutuhkan mobil sendiri diproduksi oleh orang-orang sendiri, bisa dibayangkan kemudahan yang akan dapat dinikmati ketika ingin membeli *spare part* tidak perlu *indent* terlebih dahulu. Selain itu tenaga penggeraknyanya harus sudah mengurangi ketergantungannya terhadap bahan bakar minyak. Negara ini juga membutuhkan teknologi *smartphone* karya anak negeri yang bisa di gunakan secara massiv dan bisa bersaing di kancah internasional. Faktanya pengguna *smartphone* di Indonesia merupakan target pasar yang empuk bagi perusahaan seperti Apple, Samsung, Xiaomi dan lain sebagainya.

Masih banyak karya yang bisa diwujudkan, dibuat oleh anak negeri, digunakan oleh masyarakat luas di NKRI, dan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mulai dari tulisan ini mengajak khalayak ramai dan pembaca agar senantiasa memberikan yang terbaik untuk negeri ini melalui karya-karya dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit.

Jika Aku Menjadi.....

Ketua RT

Menjadikan bisnis kecil menengah sebagai bisnis yang dapat membantu kebutuhan rumah tangga sehari-hari

Ketua RW

*Membuat kelompok bisnis berdasarkan kelompok segmen yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga muncul *chains supply* yang mampu menintegrasikan antar unit bisnis satu dengan yang lain*

Pak Lurah

Mengakomodir kebutuhan usaha dari desa, memaksimalkan potensi yang ada di desa serta meningkatkan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan workshop.

Pak Camat

Membuat iklim entrepreneur dan mendorong terciptanya green technology yang ramah lingkungan

Bupati

Membuat Perda yang mendorong terciptanya iklim yang ramah bisnis dan mempromosikan produk unggulan ke level nasional

Gubernur

Pergub tentunya harus sinergis dengan iklim bisnis yang berbeda-beda di tiap daerah, namun tetap memberikan ruang selebar-lebarnya untuk startup bisnis dan inovasi produk unggulan masing-masing daerah.

Presiden

Mencontoh gaya kepresidenan presiden ke 3 di bangsa ini dan tetap memberikan support produk bangsa di kancah internasional.

C. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Berjiwa Entrepreneurship untuk Menyongsong 100 Tahun Indonesia Emas

[Oleh: Rianda Ridho]

Sumber Daya Manusia di Indonesia

Indonesia mempunyai peran yang kuat dalam persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Indonesia juga sangat banyak memiliki sumber daya manusia yang begitu terampil dan berbakat. Keikutsertaan para pelajar dalam sebuah olimpiade dan tidak jarang menjadi juara dari kompetisi tersebut adalah salah satu bukti bahwa warga negara Indonesia mampu bersaing dengan ketatnya kompetisi antar bangsa di dunia. Tetapi timbul pertanyaan, akan dibawa kemana para potensi harapan bangsa ini di masa depan. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah signifikan dalam mengelola dan mengembangkan potensi muda yang kita miliki kearah yang lebih baik agar di masa yang akan datang potensi ini tidak dieksploitasi oleh bangsa lain. Memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa sudah menjadi keniscayaan yang manusiawi bahwa individu akan berusaha memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin di sini pemerintah dapat memainkan peranannya. Pemerintah yang berkomitmen tinggi dan sadar akan masa depan mereka tentunya akan menjaga potensi individual ini agar tidak di klaim oleh bangsa lain.

Keunggulan kompetitif dapat diciptakan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik dengan memperhatikan factor eksternal dan internal dalam diri potensi-potensi tersebut. Menanggapi perkembangan lingkungan eksternal baik perkembangan ekonomi, teknologi, maupun sosial setiap individu yang berpotensi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan di masa kini agar semakin kompetitif. Satu hal yang mutlak diperlukan adalah melaksanakan proses perubahan mental yang lebih kuat dari individu-individu yang berpotensi ini agar dapat bertahan di lingkungan modern yang bersifat sangat dinamis, turbulen dan bahkan sulit diprediksi.

Sumber daya manusia merupakan penopang kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang maju secara ekonomi dan pendidikan akan meningkatkan indeks SDM-nya. Jika negara secara ekonomi maju, tetapi pendidikannya rendah, maka pemanfaatan potensi SDM belum dapat dilakukan dengan efektif. Namun, jika kedua hal tersebut dapat dikembangkan dengan seimbang, maka memanfaatkan potensi SDM yang begitu banyak di negeri ini akan sangat mudah untuk dilakukan. Tidaklah salah jika disebut bahwa target Indonesia emas yang dicanangkan di 100 tahun Indonesia bukanlah mimpi dan sekedar wacana.

Karena itu upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas SDM telah menjadi kebijakan strategis nasional di mana semua unsur bangsa dan daerah yang ada di Indonesia harus turut serta terlibat dalam mencapai rencana brilian tersebut. Upaya secara nasional tersebut dilakukan untuk wawasan nasional dan global demi merespon perkembangan dan perubahan kearah perbaikan dan restorasi.

Permasalahan Sdm di Indonesia

Tantangan berat dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia adalah permasalahan tentang potensi yang akan dikembangkan itu sendiri dan yang harus kita ketahui terlebih dahulu, berikut kurang lebih permasalahan SDM di Indonesia:

1. Masih kurangnya tingkat pendidikan di Indonesia

Perhatian pemerintah kita masih sangat minim ketika berbicara tentang pendidikan. Penyediaan fasilitas pendidikan yang masih sangat kurang, pengajar yang masih kurang profesional menjadi masalah signifikan. Alokasi anggaran untuk pendidikan dimana jumlah 39,82 triliun pada tahun 2017 nyatanya belum cukup memperbaiki pendidikan di Indonesia.

2. Lemahnya perguruan tinggi dalam menciptakan SDM yang handal profesional dan punya daya saing tinggi

Fenomena pengangguran adalah bukti lemahnya perguruan tinggi dalam menghasilkan potensi yang siap bersaing dalam dunia kerja. Ini adalah bentuk kritikan terhadap perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas.

3. Jumlah angkatan kerja yang berpendidikan rendah

Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 jumlah angkat kerja mencapai 126,7 juta, dimana 47,3% didominasi oleh lulusan SD kebawah Sementara lulusan D3 atau S1 hanya berjumlah 8,96%. Jumlah angka tentunya masih memperlihatkan sulitnya SDM Indonesia bersaing secara global.

4. Lesunya dunia usaha

Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi.

Strategi Manajemen SDM

Dalam menghadapi persaingan global, pendidikan berperan besar dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Maka perlu ditingkatkan mutu pendidikan secara kuantitas maupun kualitas. Tak

hanya kurikulum yang perlu ditinjau maupun ditingkatkan, pelatihan yang efektif perlu dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.. Aset sumber daya manusia yang perlu dievaluasi adalah kualitas dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki saat ini, kebijakan - kebijakan sumber daya manusia, sistem pengadaan, pemeliharaan, pelatihan dan pengembangan nilai-nilai yang positif maupun negatif serta kemampuan mengelola keragaman sumber daya manusia. Juga perlu dirancang suatu alat ukur untuk mengetahui mutu dan kualitas sumber daya manusia dan potensinya agar keterkaitan strategi SDM dapat diimplementasikan di lapangan.

Agar kemajuan berjalan secara berkesinambungan, ini haruslah didukung oleh kemauan dari individu itu sendiri agar daya kreasi meningkat dan dapat memajukan diri. Manusia memiliki *achieve motivations* atau tenaga dorong untuk Bergeraknya manusia.

Tugas utama manajemen sebagai strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah menentukan evaluasi situasi internal dan eksternal, mendefinisikan dan mengembangkan misi, menerjemahkan misi kedalam tujuan strategi, dan merangkai strategi itu sendiri atau arahan tindakan. Dari keempat tugas ini, semua memiliki tujuan yang sama yaitu membangun kemandirian individu yang mempunyai potensi, komitmen, terutama dalam persaingan di masa yang akan datang.

Membangun Kualitas SDM yang Berjiwa Entrepreneurship

Dalam dunia manajemen sumber daya manusia, karakteristik dari seorang entrepreneurship adalah mempunyai pribadi yang unggul, besarnya pekerjaan yang dituntaskan oleh individu maka semakin besar pula kualitas pribadi unggul tersebut. Dari sisi agama ini bisa dijadikan ukuran sebagai ketakwaan seorang ummat dalam pengabdianya kepada Allah untuk mejadi manusia yang sempurna. Ada beberapa keahlian khusus yang perlu di kelola dan dikembangkan melalui perbaikan kualitas entrepreneur itu sendiri.

1. Membuka peluang

Jiwa entrepreneurship adalah membuka peluang yang ada..Individu ini sangatlah perlu untuk terus mencoba menciptakan peluang tetapi tidak juga menunggu peluang yang sangat tidak jelas kapan datangnya.

2. Mengembangkan wawasan jauh ke depan

Seorang entrepreneur perlu menanam ide dan gagasan sejak dini meskipun hasilnya baru terlihat esok atau lusa dan bahkan mungkin bukain dia yang menikmati hasilnya. Karena

tantangan terbesarnya adalah mengubah kerugian menjadi keuntungan.

3. Mengembangkan jiwa pemenang yang bermoral

Segala persaingan yang ada bukanlah sesuatu hal yang harus dihindari oleh setiap start up entrepreneurship. Justru rivalitas adalah sebuah seni persaingan yang membawa diri lebih terpacu untuk memperbaiki yang salah. Menjalankan kompetisi dengan ikhlas adalah sebuah eksistensi keunggulan dari para entrepreneur.

4. Membangun sikap-sikap kejujuran dalam diri

Menikmati hasil secara bersama-sama dengan rekan bisnis adalah contoh praktik bisnis yang berbasis pada kepercayaan. Karena kejujuran seorang individu dapat dipercaya. Maka dari intergritas seseorang dinilai dari kejujuran dan dapat dipercaya.

Menyiapkan Generasi Emas Indonesia

Memasuki Indonesia emas pada tahun 2045, perekonomian Indonesia diharapkan banyak ditopang oleh banyaknya entrepreneur dalam negara. Pasalnya entrepreneur sangat dibutuhkan dalam persaingan pasar global. Potensi – potensi dengan jiwa entrepreneur perlu dibina dan ditantang untuk untuk mengembangkan jiwa entrepreneur mereka. Meskipun pada masa sekarang belum terlihat dan masih sebagai kiasan wacana tetapi ada keyakinan dari pemerintah bahwa program ini akan berhasil. Tantangannya adalah bagaimana para calon entrepreneur handal ini dapat keluar dari zona nyaman mereka itu sendiri.

D. Dompot Pemerintah menuju Negara Kesejahteraan

[Oleh: Haikal]

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, meski kaya dengan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan. Di Singapura sumber daya alam yang dimiliki negara tersebut tidak begitu melimpah, namun masyarakatnya bisa memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. Itulah mengapa Singapura bisa mejadi negara maju meskipun ia hanya sebuah negara kecil kesadaran akan hak dan kewajiban itulah yang menjadi tiang dalam membangun suatu negara. Jika dikatakan miskin, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Namun jika dikatakan kaya, masyarakatnya masih belum mampu memenuhi hak dan kewajibannya untuk bisa membangun negeri ini untuk lebih baik. Hak dan kewajiban itu tak lain adalah membayar pajak, jika masih banyak yang menganggap pajak sebagai sebuah kewajiban maka akan sulit bagi masyarakat untuk mengerti bahwa pajak merupakan suatu kesadaran.

Pajak tak ubahnya dengan iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara untuk membiayai pemerintahan dan membangun negerinya. Pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional. Dengan pajak negara bisa menggaji pegawai mulai dari pegawai kantor, guru, polisi, tentara dan sejenisnya. Dengan pajak pula sebuah negara bisa membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, gedung olahraga dan fasilitas publik lainnya.

Itu semua ada di dompet pemerintah, dompet pemerintah sekarang berapa? Anggaran pemerintah berapa? 1350 triliun. 1350 triliun itu hanya berdasarkan berapa orang yang membayar pajak, yang bayar pajak di Indonesia itu cuma sekitar 20 juta padahal pekerjanya 120 juta, padahal populasinya 250 juta. Sementara itu kita semua tahu bahwa pajak merupakan bensin mesin negara meski ia bukan satu-satunya, di Indonesia dari 1350 triliun APBN 76% nya berasal dari pajak sehingga menjadi sumber pendapatan negara terbesar, selebihnya dari sumber alam, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun pinjaman luar negeri. Angka tersebut tergolong masih rendah ketika dibandingkan dengan jumlah dari wajib pajak.

Data world bank menunjukkan populasi penduduk Indonesia di tahun 2016 berjumlah 250 juta jiwa, dari jumlah tersebut minimal 25% atau sekitar 61,5 juta jiwa dikatakan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Namun kenyataannya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) berjumlah

30 juta, artinya masih terdapat kurang lebih 32 juta penduduk yang belum berNPWP. Hal ini juga berarti telah terjadi ketidakadilan terhadap wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula dengan badan usaha dimana terjadi ketidakadilan terhadap 2,2 juta wajib pajak badan yang telah terdaftar, sedangkan jumlah badan usaha diseluruh negeri ini sebanyak 22,3 juta. Sungguh ironis...!

Ada banyak hal yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak, pertama ketidakmampuan pemerintah dalam mendata dan memungut pajak. Kedua, penyelewengan pajak yang dilakukan oleh oknum pemerintahan, ketiga rendahnya kesadaran warga dalam membayar pajak. Keempat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan penggunaan pajak.

Rendahnya penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah dalam memungut pajak. Di negeri ini ada banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, tapi juga banyak wajib pajak yang sudah membayar pajak meski tidak memenuhi jumlah semestinya. Ada banyak pengemblang pajak dinegeri ini yang dimungkinkan oleh adanya orang-orang seperti Gayus Tambunan. Hal ini yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Terlepas dari itu, hingga saat ini juga kebijakan pajak kita hanya mengedepankan sisi penerimaan dan kurang memperhatikan sisi pembelanjaan. Ini bisa mengakibatkan warga negara merasa dikejar-kejar pajak tapi tak mendapat layanan dan fasilitas yang memadai sebagai balasannya. Pajak kita juga masih dikelola oleh birokrasi yang tertutup, korup, dan teknokratis. Kebijakan pajak kita juga timpang karena mereka yang miskin membayar pajak lebih besar dari pada mereka yang kaya.

Dari penerimaan tahun 2010 pajak penghasilan pegawai dan karyawan menyumbang 5,5 triliun, sedangkan pajak penghasilan non pegawai yang didominasi oleh orang-orang super kaya hanya menyumbang 3,6 triliun. Dengan kondisi demikian mesti ada upaya reformasi perpajakan. Tata kelola pajak mesti harus lebih transparan dan bertanggungjawab, pajak juga mesti dikelola dengan cara yang lebih demokratis dan partisipatif. Mendengar dan melibatkan lebih banyak komponen warga, tidak ditentukan secara elitis demokratis

Padahal kewajiban perpajakan setiap warga negara telah diatur dalam UU dan peraturan-peraturan pemerintah, pungutan pajak didasarkan pada equality (adil) dan merata. Adil dan merata bukan berarti biaya yang dikeluarkan setiap orang sama, mereka yang kaya seharusnya membayar pajak lebih banyak dari pada yang miskin. Sampai

sekarang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa masih sama dengan upeti, memberatkan pembayarannya mengalami kesulitan ketidaktahuan masyarakat apa dan bagaimana pajak serta ribet menghitung dan melaporkannya.

Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan, ketika kesadaran membayar pajak secara sukarela telah dirasakan oleh masyarakat diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat tajam. Pembayaran pajak secara sukarela tentunya akan meningkatkan tanggungjawab dalam pengawasan uang pajak, masyarakat yang sukarela membayar pajak akan lebih menuntut efektifitas dalam pemanfaatan uang pajak sehingga terwujud kemakmuran bersama.

Metode kesejahteraan negara maju

Sekarang kita sedikit bergeser dalam melihat sistem perpajakan pada negara-negara maju dan distribusi penggunaannya. Beberapa negara berusaha menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Aturan dan tarif pajak di setiap negara-negara didunia berbeda-beda. Menurut data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Belgia memiliki penerimaan pajak tertinggi di kelompok negara maju dunia. Rata-rata pekerja di Belgia membayar 42 persen gajinya sebagai pajak penghasilan dan jaminan sosial pada tahun 2015. Belgia menempatkan penerimaan pajaknya untuk membiayai program pelayanan kesehatan yang kuat, serta program pendidikan dan jaminan sosial. Banyak mahasiswa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tanpa harus membayar.

Lain halnya dengan india, di negara ini rata-rata pekerja tidak membayar pajak penghasilan atau kontribusi sosial melihat dari pendapatan per kapita yang sangat rendah. Walaupun para pekerja di india tidak membayar pajak, namun hal ini bukan lah suatu yang meringankan karena pendapatan perkapita setiap pekerja menerima upah sekitar 85.000 rupee atau 1.281 dolar AS yang setara dengan Rp.16,8 juta per tahun namun juga harus membayar pajak lainnya seperti pajak penjualan.

Sedangkan di negara lain seperti Swedia yang merupakan negara di Uni Eropa. Masyarakatnya mendapatkan pelayanan edukasi dan kesehatan gratis dari pemerintah. Dampak dari kebijakan ini tak lain

adalah tingginya pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap masyarakat Swedia yang berpenghasilan tahunan US\$85.841 mencapai 56,6%. Selain itu, pemerintah Swedia juga mengenakan pajak yang tinggi atas pendapatan investasi masyarakat, yaitu sebesar 30%. Selanjutnya ada Austria yang masuk dalam daftar tempat terbaik untuk hidup. Namun, di balik itu, masyarakatnya ternyata harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Indikator pertama adalah pajak penghasilan yang tinggi, yaitu sebesar 50% bagi masyarakatnya yang berpenghasilan US\$74.442 per tahun.

Strategi pengenaan tarif pajak yang tinggi pada negara-negara maju tersebut diatas sangat jelas dimanfaatkan penggunaannya untuk membiayai program pelayanan kesehatan yang kuat, serta program pendidikan dan jaminan sosial menuju welfare state yang kokoh dan makmur.

Metode kesejahteraan negara masyoritas muslim / timur tengah

Di Saudi Arabia, zakat di kelolah satu atap dengan pajak di bawah kementerian keuangan dengan nama Maslahatuz Zakat wad Dakhil. Zakat diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang dimiliki oleh warga negara Saudi Arabia. Untuk zakat individu, kerajaan mempersilahkan kepada warga negara untuk meyalurkan kepada mustahik langsung atau melalui yayasan sosial. Tetapi, zakat perusahaan, harus dibayarkan kepada Maslahatuz Zakat yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi zakat dibayarkan oleh perusahaan muslim, sementara pajak dibayarkan oleh perusahaan milik non muslim.

Sistem penerimaan zakat yang dikembangkan Maslahatuz Zakat seperti penerimaan pajak di Indonesia, dihimpun kemudian disalurkan ke Kementerian Sosial untuk disalurkan kepada mustahik. Saat ini jumlah perusahaan Saudi Arabia yang membayar zakat mencapai lebih dari 400.000 perusahaan. Total dana yang dihimpun adalah lebih dari 1000 triliun rupiah pertahun. Angka ini mencapai lebih dari 70% APBN Indonesia.

Dengan jumlah zakat yang terhimpun sangat besar, maka di Saudi Arabia memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan warganya secara memadai. Bahkan memiliki peluang untuk dapat didistribusikan ke negara-negara muslim lainnya yang kekurangan atau kelaparan. Banyak negara yang masih mengalami masalah kemiskinan, tetapi dinegara kaya Timur Tengah justru kesulitan mencari orang miskin. Alhasil, para warganya kesulitan mencari penerimaan zakat, seperti juga yang terjadi Kuwait.

Di tengah upaya pemerintah menggali sumber pajak baru, negara muslim di belahan lain justru semakin tersohor sebagai surga

pajak. Tak hanya itu, Uni Emirat Arab dan Qatar ini terkenal memiliki aturan pajak termudah dengan waktu pengurusan pajak paling cepat. Yang membuat status UEA semakin kuat sebagai surga pajak dikarenakan tidak adanya pajak penghasilan pribadi. Selain tidak ada pajak penghasilan pribadi, UEA juga tidak mengenal pajak atas keuntungan modal, pajak pertambahan nilai, maupun pajak penghasilan korporasi. Namun, bank asing dikenakan pajak 20 persen dari penghasilan kena pajak. Sementara perusahaan-perusahaan minyak juga dikenakan pajak atas penghasilan di samping royalti.

Jadi diatas kita telah menjelaskan bagaimana negara-negara lain termasuk negara maju dan negara mayoritas muslim melakukan metode-metode dalam meningkatkan dompet pemerintah menuju welfare state. Disini saya tidak memaksakan metode apa yang harus dilakukan oleh negara karena akan memberikan banyak pertimbangan dan pribadi hanya memberikan gambaran realitas hari ini dalam mensejahterakan rakyat.

Harapannya kita semua ingin pemasukan pajak kita tinggi kerena dengan itu sebuah negara bisa memiliki pembiayaan yang membuatnya lebih mudah mencapai tujuan-tujuannya seperti yang diidamkan bersama yaitu masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Namun untuk itu kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pengelolaan pajak wajib untuk ditingkatkan.

Maka pajak bukan hanya harus menjadi instrumen pertumbuhan tapi harus menjadi instrumen keadilan. Target penerimaan juga harus diimbangi dengan akuntabilitas distribusi dan pengelolaan. Dengan optimalisasi penerimaan pajak mulai dari perbaikan perdataan, perluasan target, peningkatan penerimaan, akuntabilitas pengelolaan dan keadilan distribusi. Indonesia bisa diharap memperoleh penerimaan pajak yang signifikan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Mari kita bangun Indonesia menuju welfire state, karena dompet pemerintah bukanlah kewajiban namun kesadaran akan kebutuhan kita bersama, mari awasi penggunaannya karena uang itu adalah milik kita bersama.

E. Mengedepankan Pembangunan Ekonomi di Daerah Perbatasan

[Oleh: Fredi Handoko]

Kabupaten Sambas bisa dibilang permata di beranda depannya Indonesia. Ada 2 kecamatan yang langsung berbatasan dengan negara luar, lebih tepatnya negara jiran Malaysia. Dua kecamatan itu ialah Kecamatan Paloh yang sangat terkenal dengan keindahan pantai yang sangat indah, dan Kecamatan Sajingan Besar yang memiliki panorama alam yang mempesona. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kelebihan yang luar biasa baik sumber daya alam, adat istiadat, dan juga kearifan lokal yang jika dimanfaatkan dengan maksimal sudah barang tentu akan sangat bermanfaat bagi Kabupaten Sambas khususnya masyarakat setempat.

Kecamatan Paloh

Hidup di daerah yang perbatasan langsung dengan Negara tetangga tidak semudah yang dibayangkan. Belum lagi, daerah tersebut kerap menjadi objek sengketa patok batas antara kedua Negara. Itulah yang selama ini dialami Desa Temajuk, desa di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Desa ini berada pada posisi paling barat Kalimantan Barat. Dari Desa Temajuk ke Malaysia hanya ditempuh sekitar 15 menit. Nama desa ini mulai mencuat ke permukaan semenjak lima tahun lalu ketika terjadi sengketa patok batas antara Indonesia – Malaysia. Patok batas yang disengketakan pada 2011 itu adalah patok A-104 di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk. Kemudian disusul pembangunan rambu suar oleh pemerintah Malaysia di perairan Tanjung Datuk yang notabene berada dalam teritorial Indonesia. “Setidaknya sudah empat kali pemerintah Malaysia mengganggu ketenteraman masyarakat di sini (Temajuk),” ujar Usman, Camat setempat . Sejak itu, desa ini menjadi perhatian publik. Pemerintah pusat silih berganti datang ke desa yang berseberangan darat dan laut dengan Kampung Teluk Melano, Sarawak, Malaysia Timur itu. Tahun 2012 lalu mulai dilakukan pembukaan jalan sepanjang 47 kilometer yang menghubungkan ibu kota kecamatan ke desa ini. Jalan penghubung itu dibuka sejajar dengan garis pantai, dan hanya berjarak sekitar 100 hingga 200 meter dari bibir pantai. Masyarakat Temajuk kini tak lagi repot-repot melintasi bibir pantai untuk bepergian ke kota kecamatan. Waktu tempuhnya pun relatif singkat, hanya sekitar 2 jam. Namun sayang, meski telah dibangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk menghubungkan desa-desa di sana, kondisinya cukup memprihatinkan. Proses pengerasan dan pembangunan jembatan masih berlangsung hingga sekarang. Akibatnya, jalan tersebut justru mengalami

kerusakan yang cukup parah. Berdebu dan bergelombang. Tak jarang jembatan yang digunakan merupakan jembatan darurat yang tidak layak, jika tidak berhati-hati dikhawatirkan akan terperosok. Belum lagi persoalan telekomunikasi dan kelistrikan. Dua hal itu, menurut Usman menjadi bagian yang vital di Desa Temajuk. Minimnya sarana telekomunikasi dan listrik, membuat desa tersebut terkesan terisolir.

Dari Desa Temajuk ke Malaysia hanya ditempuh sekitar 15 menit. Selain persoalan sengketa batas dengan negara tetangga, konflik Laut Cina Selatan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Temajuk. Meskipun hingga saat ini dampaknya belum terasa secara langsung. Temajuk adalah daerah yang paling dekat dengan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, yang diklaim oleh Tiongkok. Untuk itu pemerintah pusat untuk menyiapkan tim khusus di perbatasan, khususnya di Temajuk dibuat landasan pesawat tempur yang saat ini sudah diresmikan oleh Bupati Sambas.

Andi Fachrizal, wartawan senior Kalimantan Barat mencatat setidaknya ada tiga persoalan penting yang patut dijadikan *trigger* bagi pemerintah untuk memulai memacu pembangunan, khususnya di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

Pertama, kata Rizal adalah infrastruktur jalan. Menurut Rizal, jalan yang menghubungkan ibu kota kecamatan Paloh, sampai ke Desa Temajuk, kondisi jalannya masih seperti lima tahun terakhir. “Artinya tidak ada kemajuan yang terlihat. Masih berdebu dan jembatannya juga ala kadarnya. Saya fikir ini patut untuk menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat untuk memulai yang lebih tajam lagi di perbatasan,” katanya.

Kedua, lanjut Rizal, berkaitan dengan dua Negara. Dimana pada tahun 2011 lalu, Desa Temajuk, khususnya Camar Bulan memiliki catatan sejarah penting yang belum terselesaikan. Yakni penyelesaian Zona Outstanding Boundary Problems. “Jadi pemerintah harus mengumumkan bahwa lahan seluas 1449 hektare yang ada di kawasan Camar Bulan itu seperti apa? Supaya masyarakat tahu, apakah wilayah ini masih disengketakan atau tidak. Saya rasa ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah Malaysia, karena berkaitan dengan tapal batas,” bebarnya.

Ketiga, lanjutnya, berkaitan dengan perdagangan satwa dilindungi dan turunannya. Menurut Rizal, di Kecamatan Paloh terdapat 63 Km garis pantai yang menjadi tempat peneluran penyu. Menurutnya, sampai saat ini penanganannya juga belum maksimal. “Kenapa? Perdagangan penyu terutama telurnya masih beredar dan masih ditemukan hingga saat ini. Baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Ini butuh penyelesaian yang cukup konverhensif,” katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Sambas, Hairiah mengatakan, untuk pembangunan perbatasan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

Perbedaan sangat jelas terasa ketika kita berada di pintu batas antara Indonesia dan Malaysia, itu mulai terlihat ketika kita melihat post keamanan masing-masing kedua negara. Bangunan Post Keamanan Indonesia hanya bangunan biasa yang terbuat dari bahan kayu yang ukurannya relative kecil dan tidak layak untuk di diami, sedangkan kondisi yang sangat berbeda dengan post keamanan perbatasan di negara Malaysia yang permanen terbuat dari betton dan ukurannya terhitung besar, sangat layak dan nyaman untuk dihuni oleh Tentara Diraja Malaysia.

Kondisi semakin jelas terlihat sangat berbeda ketika kita memasuki kawasan pemukiman penduduk setempat, yang tertata rapi, dilengkapi dengan beberapa fasilitas umum yang sangat memadai yang keberadaannya sangat menunjang keberlangsungan aktivitas warga setempat, padahal itu adalah daerah terluar dari negara Malaysia yang satu daratan dengan Indoneisa dan terpisah oleh laut dengan pusat pemerintahan negara tersebut.

Kegiatan ekonomi disana juga didominasi oleh produk negara tetangga, yang mengakui dua mata uang sebagai alat transaksi yaitu Rupiah dan Ringgit Malaysia padahal jelas daerah tersebut lebih dekat dengan Indonesia. Fakta ini jelas menggambarkan bahwa perlakuan yang berbeda dari kedua pemerintahan terhadap daerah perbatasan. Padahal potensi sumber daya alam yang bisa dikelola di Temajuk sangat potensial untuk dikembangkan. Pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata sangat cocok untuk dikembangkan untuk menjadi daya tarik dan produk unggulan yang bernilai ekonomis sehingga mampu memberdayakan masyarakat sekitar sehingga akan medatangkan perbaikan kualitas hidup, peningkatan penghasilan, dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Meskipun demikian pemerintah daerah Kabupaten Sambas terus fokus terhadap pengembangan daerah tersebut, baru-baru ini satu-satunya bandara di Kabupaten Sambas tepatnya di Kecamatan Paloh baru saja diresmikan oleh Bupati Sambas, namun sampai saat in belum terdengar informasi mengenai kapan bandara tersebut difungsikan. Masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan infrastruktur jika ingin mengejar pembangunan seperti dinegara tetangga.

Kecamatan Sajingan Besar

Kecamatan Sajingan Besar adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas yang langsung berbatasan dengan negara luar yang

memiliki potensi alam dan kearifan lokal yang luar biasa menarik. Namun disisilain, ditengah kondisi tersebut masih banyak permasalahan yang terjadi sehingga menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan seperti perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang jasa (*Smuggling*), pembalakan liar (*Illegal Lodging*), perdagangan manusia anak-anak dan wanita (*Human Trafficking*) menjadi fenomena kontemporer kejahatan lintas Negara yang tidak mudah ditanggulangi. Fenomena tersebut secara khusus terlihat jelas ketika melihat kenyataan di perbatasan wilayah Kalimantan Barat. Di satu pihak, kondisi wilayah perbatasan Indonesia tampaknya stagnan. Sementara pembangunan di wilayah perbatasan Malaysia semakin memperlihatkan kemajuan begitu pesat. Dari perspektif sejarah, stagnasi pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia yang berimplikasi terhadap kemiskinan masal pada masyarakat perbatasan, dipicu oleh pembangunan yang mengutamakan pendekatan keamanan (*Security Approach*). Imbasnya masih dirasakan oleh karena wilayah perbatasan perlu diawasi secara ketat. Dalam konteks perbatasan, seperti Kalimantan Barat dan Serawak, kesenjangan sarana dan pra-sarana wilayah antara kedua wilayah Negara, telah menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat perbatasan ke Negara tetangga. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya, jalan menuju ke Malaysia ternyata jauh lebih mudah bilamana dibandingkan dengan Ibukota Kecamatan/Kabupaten di wilayah. Dalam penelitian, Lahnasafitra, dikemukakan bahwa ada tiga persoalan di wilayah perbatasan.

Pertama, dimensi lokal dapat dilihat dari adanya kesenjangan pendapatan yang begitu jauh antara penduduk di kawasan perbatasan dengan Negara tetangga. Kedua, permasalahan berdimensi nasional. Sepanjang jalur perbatasan, misalnya di Kalimantan Barat saja, diperkirakan melebihi cakupan wilayah daratan dari 2000 km, dengan sekitar 53 titik pos pengawasan, melintas antara Entekong, Paloh Sajingan, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Suatu rentang luas wilayah darat yang sukar di tempuh untuk berbagai kepentingan secara sosial, ekonomi dan juga pertahanan dan keamanan. Karena itu, jika setiap hari PASE, "Pasukan Semut", sebutan sepeda motor pengangkut gula pasir di Malaysia, dan melalui Pos Malindo di Kecamatan Sajingan Besar, mereka berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sambas merupakan aktifitas sehari-hari. Meskipun berbagai hambatan seperti pos keamanan dan pungutan liar dilakukan oknum dijumpainya, mereka yakin tidak akan pernah berhenti. Selain harga murah dan bagus kualitasnya sehingga mereka dapat keuntungan besar, juga sesungguhnya membarikan barokah bagi oknum petugas di wilayah perbatasan. Suatu lingkaran setan yang tidak mudah dicari jalan keluarnya. Masyarakat perbatasan yang tertinggal secara social dan ekonomi tersebut tidak jauh berbeda dengan nasib petugas keamanan,

polisi dan tentara bertugas menjaga kedaulatan Negara begitu panjang dan luas. Tanpa tunjangan khusus, gaji mereka perbulannya hanya akan cukup untuk beberapa minggu oleh karena standar harga barang-barang yang untuk dikonsumsi begitu mahal harganya. Tidak mengherankan penerapan kedaulatan di wilayah perbatasan menjadi bagian yang tidak terawasi. Masyarakat perbatasan mudah terprovokasi untuk melakukan kegiatan illegal seperti mengeksploitasi sumber daya hutan, penyelundupan barang-barang jasa dengan pemasaran di Kucing, Serawak, Malaysia. Tidak mengherankan jika isu lokal menjadi isu politik internasional ketika dijumpai sebagian masyarakat Indonesia menjadi lasykar wathoniah untuk kerajaan Malaysia. Bagi masyarakat di wilayah perbatasan, di beberapa wilayah kabupaten Sambas kenyataan tersebut bukan merupakan persoalan indikator rendah tingginya rasa nasionalisme, melainkan lebih merupakan kebutuhan akan kebutuhan ekonomi, bekerja untuk memperoleh pendapatan dan kehidupan layak bagi keluarga.

Sebagai pintu gerbang batas internasional, Pusat Pengembangan Perbatasan, atau *Border Development Center*, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. DBC dibangun di Kecamatan Sajingan Besar, Sebagai kebijakan nasional yang hampir sama dengan pintu gerbang internasional di Entekong, dengan maksud dapat mengubah citra masyarakat terbelakang (*Marginalized Society*) menjadi halaman terdepan masyarakat internasional lebih terbuka (*Front Gate of International Society*). Akan lebih sulit manakala dihadapkan pada perjuangan untuk menyesuaikan diri dengan faktor-faktor cultural. Suatu masyarakat yang sudah harus siap meninggalkan nilai-nilai budaya feodalistik yang biasanya mengalami benturan dengan tuntutan masyarakat modern. Berfikir rasional, kritis dan obyektif. Menerima nilai-nilai pembaruan dan siap bersaing berbasis kompetensi dan profesionalisme.

Integritas moral yang luhur, disiplin dan kerja keras, serta menjunjung tinggi kesadaran hukum adalah perangkat lunak yang hendaknya dipersiapkan. Agar ketimpangan potensi penduduk perbatasan Kecamatan Sajingan Besar, Kalimantan Barat, Indonesia dengan Biayawak dan Lundu, negeri tetangga Malaysia dapat segera disejajarkan. Letak DBC sekitar 7 Km dari kantor Kecamatan Sajingan Besar dan sekitar 87 km dari Ibukota Kabupaten Sambas. Dengan dibukanya DBC di Kecamatan Sajingan Besar yang baru saja di resmikan langsung Presiden RI Bapak Ir. H Jokowi pada bulan Maret lalu, akan berarti bahwa arus transportasi dan komunikasi secara internasional langsung dari kota Kecamatan Lundu, Malaysia, ke Sambas Kalimantan Barat dapat ditempuh secara langsung. Sarana-prasarana jalan-jalan besar, telekomunikasi, kendaraan roda empat, dan berbagai fasilitas

modern telah mulai menyambungkan batas wilayah kedua Negara dalam suatu *gentlemen agreement* antara kedua Negara. Penduduk disekitar, yang umumnya mata pencaharian mereka sebagai petani peladang berpindah dapat berkomunikasi untuk menukarkan hasil produksi pertanian dan perkebunan mereka dengan kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan pokok yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Sajingan lebih banyak diperoleh dari kota Biayawak. Sebagai kota sejenis Kecamatan, telah member peluang kedua masyarakat sama suku berbeda kebangsaan ini berinteraksi. Dari segi keamanan dan pertahanan masing-masing Negara, PLB menjadi sangat penting. Bukan saja karena PLB merupakan dokumen hukum yang murah dan sederhana. Akan tetapi, lebih dari itu memiliki nilai fungsional yang hampir mirip dengan dokumen paspor. Selagi mereka melakukan aktifitas di sekitar Aruk dan Biayawak, pada umumnya PLB menjadi sangat sakti untuk memberikan kemudahan untuk melakukan aktifitas social, keluarga, kemasyarakatan dan perekonomian bersifat tradisional. Sebagian besar pemuda-pemudi yang ada di wilayah kecamatan Sajingan bermaksud untuk dapat bekerja di Malaysia dengan harapan memperoleh gaji yang lebih besar. Namun, jika SDM lokal masyarakat Sajingan tidak dipersiapkan ke arah perbaikan SDM local, maka tidak mustahil mereka akan menjadi penonton dalam pembangunan di Sajingan. Kenyataan bahwa yang mengisi berbagai jabatan dan posisi penting di tingkat aparat Pemerintahan Kecamatan adalah umumnya diduduki oleh orang-orang dari luar. Dalam aspek SDM local, bidang pendidikan umumnya dipegang jabatan penentu baik untuk Sekolah Dasar, SMP, SMK, (belum ada SMA) oleh pihak luar. Posisi pemerintah Kecamatan merupakan aparat pemerintah tingkat Kabupaten yang ada di berbagai daerah dengan harapan jarak rentang pelayanan public dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat dan efisien. Adapun kewenangan yang selama diperankan adalah bidang pemerintahan, pelayanan segala kebutuhan masyarakat yang dapat didelegasikan kepada kepala-kepala desa. Kemudian kewenangan pembinaan pemerintah desa, urusan sosial dan ekonomi serta hal-hal yang terkait dengan kewenangan koordinatif. Misalnya ada yang disebut Urusan Pokok dan Tugas (UPT), Kantor Urusan Agama, UPT Kantor Pendidikan Nasional. Selain itu, dalam pemerintahan kecamatan dilengkapi dengan koordinasi antara aparat keamanan dan ketertiban seperti polisi (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil). Model pelayanan publik semacam ini pada umumnya tidak dijumpai perbedaan fundamental. Saat ini, di Sajingan Besar keadaan wilayah perbatasan, dimana kelengkapan aparat pemerintah juga disertai dengan adanya aparat Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Quarantina, dan bahkan satuan Militer untuk menjaga dan memelihara keamanan dan pertahanan, ketuhanan dan kedaulatan Negara. Karena itu, tidak berlebihan sekiranya kewenangan Camat dalam hal ini sebagai pimpinan wilayah yang

mewakili Bupati memiliki kewenangan khusus yang tidak dapat dimiliki oleh camat-camat di berbagai tempat di luar wilayah perbatasan. Kewenangan khusus tersebut masih berkaitan dengan urusan pelayanan publik, tetapi memiliki ranah yang berada di luar koordinasi Departemen Dalam Negeri. Kebebasan masyarakat meskipun belum operasional secara penuh kantor imigrasi dan kantor penjagaan telah berjalan secara efektif. Situasi ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga atas dasar MoU antara kedua Negara, tidak dapat ditunda untuk diberlakukan. Misalnya, setiap pelintas batas WNI penduduk Sajingan begitu pula WNM, penduduk Biayawak diwajibkan memperlihatkan SLB. Kewajiban tersebut diberlakukan untuk urusan keluarga, kemasyarakatan, bisnis dan juga kewajiban-kewajiban bersifat formal antara aparat pemerintah kedua Negara.

Beban dirasakan masyarakat justru berbuah menjadi pola hubungan ekonomi masyarakat kedua wilayah menjadi lebih membebani masyarakat dan sekaligus juga, secara nilai ekonomis, antara pemasukan dan pengeluaran menjadi tidak berimbang. Misalnya, sebelum ada Pos LIBAS semua transaksi hasil pertanian dan perkebunan dapat dilakukan di wilayah perbatasan Tengkulak dari Malaysia atau Biayawak dapat pergi ke wilayah Aruk desa Sabunga. Kelancaran komunikasi bisnis seperti itu memang saling menguntungkan kedua pihak oleh karena dengan transaksi langsung harga dan penggunaan nilai tukar dapat dilakukan dengan kesepakatan atau cara-cara yang sudah lazim. Penggunaan uang rupiah atau ringgit Malaysia tidak menjadi hambatan.

Kedepannya diharapkan ada program khusus untuk percepatan pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia mengingat begitu banyak potensi, seperti pariwisata, kearifan lokal, produk lokal, dan adat istiadat yang sangat menarik untuk menjadi magnet bagi orang-orang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan memprioritaskan pembangunan diperbatasan diharapkan kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, dan perbaikan yang akan terjadi pada masyarakat dan daerah tersebut.

F. Membangun Sistem Ekonomi Islam

[Oleh: Nasrulloh Ali Munif]

Islam sebagai agama universal menjadikan Al Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup manusia (*way of life*). Kedua sumber hukum tersebut tidak hanya memberikan aspek parsial atas kebutuhan dasar batiniah, lebih dari itu, kedua instrumen tersebut juga mengakomodir semua aspek kehidupan manusia bahkan hingga masalah keduniawiaan. Islam juga memandang keseluruhan aktifitas manusia sebagai *sunnatullah* termasuk didalamnya aktivitas ekonomi (*muammalah*⁴⁵). Selain itu, Islam juga menempatkan aktifitas ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan. Oleh kerennya kegiatan yang bersifat muammalah dirasa perlu untuk mendapatkan kontrol serta aturan agar sejalan dengan tujuan syari'at.⁴⁶ *Starting point* ini jelas menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berkuat pada pertanyaan bagaimana cara untuk menyelamatkan manusia dari api neraka, akan tetapi Islam juga membahas bagaimana menciptakan tatanan hidup yang sejahtera termasuk didalamnya bagaimana cara manusia untuk mempertahankan hidup, memanfaatkan *resource*, masalah ketenaga kerjaan (*labour*), dsb.

Konsekuensi logis atas nilai keuniversalan Islam membuat kajian *muammalah* memiliki konsentrasi tersendiri serta memunculkan istilah baru dalam kajian ilmu ekonomi. Namun hadirnya istilah baru tersebut justru menjadi polemik tersendiri dikalangan para pemikir ekonomi. Sebagian besar dari mereka meragukan landasan konseptual yang diusung oleh Sistem Ekonomi Islam. Hal ini wajar mengingat wacana Sistem Ekonomi Islam hadir setelah lahirnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang kita ketahui keduanya memiliki landasan epistemologi

⁴⁵ Penulis menggunakan pendapat mayoritas ulama yang mengkategorikan ekonomi termasuk kedalam kajian *fiqh muammalah*. Berbeda dengan madzhab *Baqir al Shadr*, mereka menolak pendapat yang menyamakan antara ekonomi Islam dengan *fiqh muammalah*. Menurut mereka ekonomi Islam adalah sebuah doktrin sementara *fiqh muammalah* adalah perangkat hukum perdata Islam. Oleh karena itu ekonomi Islam tidak dapat dikategorikan sebagai *muammalah* dan sebagai solusinya Baqir al Shadr menawarkan terminologi baru untuk menyebut ekonomi Islam yaitu dengan istilah "*iqtishaduna*". Lihat, Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna*, (Beirut: Dar al Ta'aruf al Mathbu'at, 1981), hal. 304.

⁴⁶ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonom Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal. 1-2.

yang cukup kuat. Bahkan jauh lebih ekstrim, ada yang beranggapan bahwa Sistem Ekonomi Islam hanya sebatas kombinasi yang dideterminasi dari kedua sistem tersebut.

Konsep Ekonomi Islam yang tidak diakui keberadaannya juga terlihat jelas ketika seorang sejarawan ekonomi terkemuka yakni *Joseph Schumpeter* dengan sengaja tidak mengapresiasi masa perkembangan pemikiran ekonomi Islam ke dalam periodisasi sejarah pemikiran ekonomi yang ia tulis di dalam bukunya. Ia menggambarkan ada sebuah loncatan besar yang dikenal dengan istilah *Great Gap* dimulai dari masa berakhirnya peradaban Yunani Kuno hingga pada masa *St. Thomas Aquinas* di abad ke-13 M. Tentu menjadi hal yang sangat sulit dipahami mengapa ilmuwan Barat sekaliber *Joseph Schumpeter* tidak menyadari sejarah pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan (*dealektika*) serta dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh para ilmuwan generasi sebelumnya. Apabila proses evolusi ini disadari dengan sepenuhnya, menurut Umar Chapra, Schumpeter mungkin tidak akan mengasumsikan adanya *Great Gap* dan mencoba untuk menemukan fondasi apa yang di gunakan ilmuwan masa *scholastic* untuk mendirikan gagasan bangunan sistem ekonominya.

Al Maqrisi dan Ibnu Khaldun merupakan segelintir tokoh pemikir ekonomi Islam yang kurang mendapat apresiasi atas perkembangan pemikiran ekonomi. Sejatinya, masih banyak tokoh pemikir ekonomi Islam yang pantas mendapatkan apresiasi serta bersanding sejajar dengan para pemikir ekonomi Barat. Oleh karenanya itu butuh sebuah penegasan secara mutlak baik secara historis maupun filosofis untuk mengidentifikasi apakah Sistem Ekonomi Islam termasuk kedalam terminologi *Thesis*, *Antithesis*, atau *Plagiatis* dari berbagai macam sistem ekonomi yang ada terutama terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Sistem Ekonomi Sebagai Proses Dialektika

Sama halnya dengan objek kajian ilmu pada umumnya, diskursus pemikiran ekonomi juga tidak muncul dengan sendirinya. Terdapat proses *dialektika*⁴⁷ yang bersifat *continue* dari masa kemasa hingga

⁴⁷ Cara berfikir *dealektik* sering digunakan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel sebagai pisau analisis dalam setiap tulisannya. Metode *dealektika* sendiri terdiri dari tiga tahap. Pertama, *thesis* yaitu membangun suatu pernyataan tertentu. Kedua, *antithesis* yaitu suatu pernyataan yang menolak *thesis*. Ketiga, *synthesis* yaitu upaya untuk mendamaikan ketegangan antara *thesis* dan *antithesis*. Lihat dan bandingkan, Henry Aiken, *Abad Idiologi*, ter. *The Age of Idiologi*, oleh Sigit Djadmiko,

akhirnya muncul berbagai macam sistem ekonomi yang kita kenal. Didalam literatur perkembangan pemikiran ekonomi modern, secara garis besar perkembangan pemikiran ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 5 fase yakni masa *Yunani Kuno* (abad 400 SM), *Skolastik* (abad 15 M), *Merkantilisme* (abad 18 M), *Fisiokrat* (abad 18 M), *Kapitalis* (abad 18 M), dan *Sosialis* (abad 19 M).

Apabila kita mengacu pada angka masa perodesasi perkembangan pemikiran ekonomi diatas, tergambar sangat jelas munculnya sistem ekonomi terbentuk melalui proses dealektika yang cukup panjang. Secara substansial isi pokok pemikiran dari masing-masing madzhab juga mengarah keproses dealiktika. Ambil contoh, tumbuh suburnya saudagar yang memonopoli perdagangan internasional pada masa *merkantilisme* (awal abad ke-18 M) tidak dapat di nafikan sebagai bentuk *antithesa* dari paham ekonomi masa *scolastic* (abad ke-15 m) yang jelas-jelas para pakarnya mengharamkan riba dan monopoli. Konsep ekonomi yang di usung oleh para tokoh ekonomi *fisiokrat* (pertengahan abad ke-18 M) juga merupakan bentuk antitesa dari konsep ekonomi *merkantilesme* yang menolak perdangan international dan lebih memaksimalkan kekayaan alam (*wealth*) yang dimiliki masing-masing negara. Sementara itu, sudah sangat jelas bagi kita apabila sistem ekonomi sosialis (abad ke-19) merupakan *antithesa* dari sistem ekonomi kapitalis (akhir abad ke-18) yang tumbuh subur sebagian falsafah ekonomi di negera-negara Eropa pada awal abad ke-19 an.

Secara implisit, selain sistem ekonomi *merkantilis*, *fisiokrat*, *kapitalis* dan *sosialis*, memiliki hubungan perlawanan (*antithesis*) mereka juga memiliki hubungan yang bersifat *correlation of synthesis* (hubungan sintesis). Paham *merkantilis* yang lebih mengutamakan peran negara untuk mengatur perekonomian sangat identik dengan konsep disiplin kettat dan penguasaan sumber/alat produksi oleh pemerintah. Sementara itu, paham penganut seharusnya pemerintah memperhatikan sumber kekayaan negara (*national wealth*) yang dikonsepsikan oleh para pemikir *fisiokrat* sedikit banyak juga diadopsi oleh para pemikir ekonomi *kapitalis*. Hal ini semakin membuktikan bahwa, sistem ekonomi memang lahir dan tumbuh seiring dengan proses dealiktika dari para pemikir lintas generasi.

Bagaimana Dengan Sistem Ekonomi Islam??

Pertanyaan yang cukup menggelitik ketika kita kaitkan dengan perkembangan pemikiran ekonomi modern. Karena hampir dipastikan semua literatur perkembangan pemikiran ekonomi modern tidak

Menter Books, The New America Library of World Literature, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2002), hal. 85.

melibatkan Sistem Ekonomi Islam sebagai sub kajian dan seakan para pemikir ekonomi Islam tidak memberikan kontribusi real terhadap perkembangan pemikiran ekonomi.

Pada hal kita tahu bahwa, pada kisaran abad ke ke-6 hingga akhir abad ke-14 merupakan masa dimana peradaban Islam terbentuk dan berkembang serta tidak sedikit dari para pemikir muslim melahirkan fondasi dasar terhadap objek kajian ilmu, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Sebut saja As Syaibani mengemukakan teori *al kasb* (kerja) yang hidup pada masa abad ke-8 M. Sementara pada abad ke-9 M seorang ulama terkemuka Yahya bin Umar mengarang kitab *ahkam al suq* (hukum pasar). Adiwarwan Azwar Karim menyebut, kitab *ahkam al suq* merupakan kitab pertama di dunia Islam yang khusus membahas *hisbah* dan berbagai macam persoalan hukum pasar. Dilihat dari susunannya, kitab *ahkam al suq* juga lebih sistematis jika dibandingkan dengan kitab-kitab *fiqh* pada umumnya.⁴⁸

Islam memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pemikiran ekonomi sekaligus pioner pencetus beberapa teori ekonomi juga dapat dibuktikan melalui salah satu tokoh ekonominya yang terkenal yaitu al Maqrizi (1364-1442 M). Pasalnya, jauh sebelum Keynes, Adam Smith atau Milton Friedman membicarakan teori inflasi, al Maqrizi dengan kitabnya *Ightisah Al Ummah bi Kasyf Al Ghummah* telah meletakkan konsep dasar teori inflasi⁴⁹ sejak abad ke-14. Sementara itu, Ibnu Khaldun yang kita kenal sebagai bidanya subjek kajian ilmu pengetahuan juga telah membahas teori pembagian kerja jauh sebelum Adam Smith, prinsip nilai tenaga kerja sebelum David Ricardo, teori populasi dalam kajian ekonomi sebelum Malthus atau peran negara didalam sistem ekonomi sebelum Keynes. Masih dalam periode yang sama, pada Dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad Al Kamil ibn Al Adil Al Ayyubi telah menciptakan *fulus* yakni uang campuran antara logam dan *dirham* (uang perak). Dengan adanya *fulus*, nilai *intrinsik* dari uang menjadi lebih kecil dari nilai tukarnya dan pada perkembangan berikutnya muncullah uang kertas yang memiliki karakteristik yang

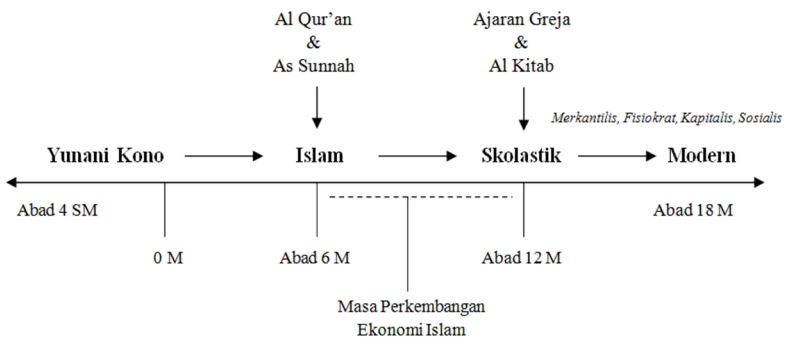
⁴⁸Lihat, Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). 263.

⁴⁹ Didalam teori inflasi yang dikemukakan oleh Al Maqrizi terdapat dua penyebab utama dari inflasi yakni faktor alamiah (*Natural Inflation*) dan faktor kesalahan manusia (*Human Error inflation*). Lihat, Al Maqrizi, *Ightisah Al Ummah bi Kasyf Al Ghummah* (Kairo: t.p.t), hal. 74-79. Sementara para pakar ekonomi barat juga menyebut penyebab dari iflasi ada dua yakni *cost push inflation* dan *demand-pull inflation*. Meski indikator yang digunakan berbeda namun konsep inflasi yang dikemukakan oleh al Maqrizi menyebabkan kondisi yang sama yakni sama-sama terjadi naiknya harga-harga. lihat, Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, hal. 234 dan 395.

sama dengan *fulus*.⁵⁰ Hal ini semakin membuktikan bahwa kontribusi para pemikir ekonomi Islam tidak dapat dipandang sebelah mata sehingga layak mendapatkan apresiasi baik dari sarjana Barat maupun dari kalangan sarjana muslim sendiri.

Mengacu dari periodisasi perkembangan pemikiran ekonomi dan berbagai macam teori yang telah digagas oleh para pemikir ekonomi Islam di abad klasik, maka secara historis sistem ekonomi Islam memiliki legitimasi yang jelas karena pernah tumbuh dan berkembang pada suatu masa tertentu. Selain itu, apabila kita mengacu kepada falsafah ilmu bahwa ilmu/pengetahuan bersifat *dealiktika* maka juga akan semakin memperkuat atas legitimasi sistem ekonomi Islam. Meski hanya sebagai peletak fondasi dasar, tanpa kita sadari beberapa teori ekonomi modern yang ada pada saat ini telah menjadi objek kajian para pemikir ekonomi Islam jauh sebelum abad pertengahan. Untuk lebih jelasnya, berikut skema lengkap sekaligus *new perspective* (pandangan baru) atas periodisasi perkembangan pemikiran sistem ekonomi:

Gambar 1.1⁵¹



Secara konseptual sistem ekonomi Islam juga memiliki *distinguish* (perbedaan) dengan dua sistem ekonomi yang dituduhkan sebagai sumber plagiasi atasnya yaitu sistem ekonomi

⁵⁰ Pencapaian para pemikir ekonomi Islam diuraikan secara jelas oleh Adiwarmanto Karim dalam bukunya “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”. Lihat, Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

⁵¹ Skema merupakan hasil penelaahan penulis dari beberapa referensi terkait. Lihat dan bandingkan, Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), dan Deliarov, Deliarov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis memiliki orientasi *materialis*, sementara dalam sistem ekonomi Islam terdapat dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu dimensi *materialis* dan *ukhrawi*.⁵² Kedua elemen ini sangat penting dan akan selalu berkaitan satu sama lainnya baik itu dalam kegiatan produksi, konsumsi atau distribusi. Sehingga praktek monopoli, kartel, penimbunan dan praktek-praktek lain yang mengarah keserakahannya seperti yang ada pada sistem kapitalis tidak akan pernah terjadi di dalam sistem ekonomi Islam.⁵³

Sementara itu, hak milik juga menjadi permasalahan yang cukup pelik dalam kajian sistem ekonomi. Didalam konsep kepemilikan sistem kapitalis, kepemilikan seseorang (individu) terhadap suatu harta/barang bersifat *absolut*, sementara dalam sistem ekonomi sosialis tidak mengenal hak milik. Penguasaan atas barang sumber kekayaan mutlak dikuasai oleh negara.⁵⁴ Apabila konsep kepemilikan antara sistem kapitalis dan sosialis saling bertolak belakang, Islam justru mengambil jalan tengah. Didalam konsep kepemilikan, Islam mengakui hak milik individu. Akan tetapi seorang muslim dituntut untuk selalu sadar bahwa harta/kapital yang ia miliki hanya sebuah titipan (amanat) dari Allah dan hanya Dia pemilik mutlak atas segala sesuatunya dimuka bumi ini.⁵⁵ Selain itu Islam juga mengajarkan harta/kapital yang kita miliki, didalamnya terdapat hak atas orang lain⁵⁶ terutama hak orang miskin dan anak yatim yang harus disalurkan melalui mekanisme zakat, infaq atau sadaqah. Inilah tindakan nyata praktik sistem ekonomi Islam atas kepedulianya terhadap orang-orang yang kurang mampu. oleh karenanya dari segi sosialnya Islam tidak kalah dengan paham sosialis yang selalu memperjuangkan rakyat kecil.

Intervensi negara juga menjadi bahasan khusus dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis menolak secara mutlak intervensi negara terhadap perekonomian negara. Berbeda dengan sistem sosialis, mereka menganggap peran negara yang dominan untuk mengatur perekonomian negara dianggap sangat diperlukan.

⁵² QS. Al Qhasas : 77.

⁵³ QS. Al Hasyr :7 dan QS. Al Hud : 85

⁵⁴ Bahkan digambarkan oleh Kal Marx ketika fase komunis manusia tidak akan lagi berharap imbalan/ upah dari apa yang mereka kerjakan. Semuanya akan didistribusikan oleh negara dengan adil. Lihat, Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi.....*hal. 27-30 dan 59-67.

⁵⁵ QS. Al Baqarah : 284.

⁵⁶ QS. Adz Dzariat : 19.

Bagaimana dengan peran negara menurut sistem ekonomi Islam? Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Abu Dawud, At Tirmidzi, Ibnu Majah dan As Syaukani, ketika Rasulullah diminta untuk menurunkan harga, beliau menolak dan mengatakan “*Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga..*”. Dari hadits tersebut jelas bahwa dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal intervensi harga oleh pemerintah secara mutlak dan sewena-wena.

Mengacu interpretasi dari kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa intervensi negara, sejatinya seorang muslim diberi kebebasan untuk berbuat dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun kebebasan yang dimaksud disini tentu berbeda dengan kebebasan individu yang dianut paham kapitalis. Kebebasan manusia dalam *frame* sistem ekonomi Islam lebih di dasarkan pada nilai-nilai ketauhidan. Karena dengan nilai-nilai luhur tersebut akan membentuk pribadi manusia yang berani dengan kepercayaan yang tinggi akan tetapi masih tetap memiliki tanggung jawab untuk berbuat sesuai dengan koridor tuntunan agama. Karena di dalam Islam setiap perbuatan yang dilakukan manusia pasti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.⁵⁷

Jadi cukup jelas kiranya sistem ekonomi Islam memiliki landasan historis dan bangunan konseptual yang kokoh yang didasarkan pada Al Qur'an dan Al Hadits. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai *thesis* (bangunan konseptual yang berdiri sendiri) atas sistem ekonomi yang ada saat ini terutama sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Meski secara konseptual bangunan sistem ekonomi Islam memiliki paham moderat diantara paham kapitalis dan sosialis, namun bukan berarti sistem ekonomi Islam merupakan hasil plagiasi atas keduanya. Justru keberadaan teori-teori ekonomi modern yang ada dewasa ini sedikit banyak mendapat insprasi pemikiran dari para pemikir ekonomi Islam klasik yang telah meletakkan dasar-dasar ilmu ekonomi jauh sebelum Adam Smith atau Karl Mark mencetuskan teori-teori ekonominya.

Kesimpulan

Sistem ekonomi Islam merupakan bangunan sistem ekonomi yang memiliki landasan historis dan filosofis yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Secara historis pemikiran ekonomi Islam tumbuh dan berkembang sejak abad ke-7 M jauh sebelum masa *scolastic* yang di gadang-gadang Barat sebagai awal *renaissance* pemikiran ekonomi. Tidak cukup sampai disitu, secara konseptual

⁵⁷ QS. Al Muddatsir : 38.

sistem ekonomi Islam juga memiliki orientasi yang berbeda jika dibandingkan dengan sistem ekonomi yang ada saat ini terutama terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Jika kedua sistem tersebut hanya berorientasi pada *materialis*, sistem ekonomi Islam memiliki dua dimensi yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kedua dimensi yang dimaksud adalah dimensi *materialis* dan *ukhrawi*. Kombinasi kedua dimensi ini akan menjaga praktik ekonomi Islam dari monopoli, penimbunan atau kartel yang sering kita temui dalam sistem kapitalis. Islam juga percaya bahwa didalam setiap harta yang kita miliki terdapat bagian dari hak orang lain yang lebih membutuhkan. Mengacu dari fakta ilmiah yang ada, maka dengan lantang dan tegas kita berani menyebut bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sebuah *thesis* (bangunan konseptual yang mampu berdiri sendiri) sehingga pantas disejajarkan derajat eksistensinya dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis.

Sebagai penutup dari tulisan ini, kita sebagai umat Islam penting kiranya untuk mempelajari setiap buah pikiran para ulama' pendahulu kita. Karena dengan mempelajari setiap karya monumentalnya, secara tidak langsung kita juga ikut menjaga dan melestarikan tradisi cara berfikir umat Islam yang *multi-dimensional*. Corak pemikiran yang unik ini berhak kita jaga dan pertahankan dari segala bentuk ancaman yang bersifat *eliminate* (penyisihan/pelenyapan). Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus siap untuk menggugat setiap klaim-klaim yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk mengkerdilkan Islam dari peradaban dunia. Tentu dengan argumen dan landasan filosofis yang dapat dipertanggungjawabkan pula.

SUMBER BACAAN

- Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Aiken, Henry, *Abad Idiologi*, ter. *The Age of Idiologi*, oleh Sigit Djadmiko, Menter Books, The New America Library of World Literature, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Eidem, R. and S. Viotti, *Economic System*, Martin Robertson: 1978.
- Gregory, Paul R and Robert C Stuart, *Competitive Economic System*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1981.

- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah: Mujamma' Malik Fahid Li Thiba'at al Mush Haf Asyysarif, 2008.
- Maqrizi, Al, *Ightisah Al Ummah bi Kasyf Al Ghummah*, Kairo: t.p.t.t.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonom Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.
- Munif, Nasrulloh Ali, *Sistem Ekonomi Islam (Dealiktika Antara Tesis, Antitesis, dan Plagiatis*, IAIN Tulungagung: Jurnal Ekonomi Syariah An Nisbah, Vol, 2, 2015.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Ethics and Economic an Islamic Synthesis*, London: The Islamic Fondations, 1981.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Ter. Zainal Arifin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Sadr, Muhammad Baqir al, *Iqtishaduna*, Beirut: Dar al Ta'aruf al Mathbu'at, 1981.
- Schumpeter, J. A, *History of Economic Anaysis*, Oxford: 1995.

G. Meretas Problematika untuk Menggapai Kedaulatan Ekonomi Bangsa

[Oleh: Ahmad Jazuli]

Ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait kondisi perekonomian nasional ke depan. Pertama, ketahanan pangan dan energi yang seharusnya sebagai faktor utama dalam mendukung proses transformasi menuju industrialisasi. Saat ini permasalahan distribusi pangan masih menjadi masalah yang kompleks dan mendasar yang seharusnya dapat diatasi dengan berbagai kebijakan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, masih tertinggalnya Indonesia dalam rantai nilai global di negara kawasan wilayah kapabean, dimana struktur industri yang tidak berimbang dan rendahnya produktivitas menjadi penyebab daya saing produk Indonesia masih relatif rendah. Ketiga, pentingnya investasi sebagai penggerak roda perekonomian yang berkelanjutan. Yang terakhir sekaligus menjadi faktor terpenting adalah menciptakan pemerataan bagi masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi dalam memperoleh manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Ketahanan pangan dan energi sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan permasalahan mendasar yang perlu dibenahi. Pertumbuhan penduduk yang terus menerus merangkak naik menyebabkan meningkatnya permintaan akan pangan dan energi dalam jumlah cukup besar. Ketersediaan serta kestabilan harga pangan dan energi sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Tren harga pangan, energi, dan air yang terus meningkat dalam jangka panjang, perubahan iklim dan demografi, alih fungsi lahan, serta perubahan pola konsumsi menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam mendorong produksi pangan dan energi nasional.

Saat ini, ketahanan pangan Indonesia dapat dikatakan relatif masih rendah, terutama dari sisi kualitas dan daya beli masyarakatnya. Kemudian dari sisi produksi, jumlah dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas dan jauh dari angka harapan pemenuhan kebutuhan setiap warga negara, keterbatasan faktor internal dan eksternal merupakan hal yang utama perlu dibenahi dari berbagai sektor yang berkontribusi pada Pendapatan nasional. Sebagai contoh dari sektor agriculture terkait dengan berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas pertanian dan teknologi sehingga hal tersebut akan berdampak besar pada konsumsi pangan yang terus meningkat dan belum diimbangi dengan peningkatan produksi pangan.

Selanjutnya Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar dan melimpah ruah seharusnya menjadi potensi sumber daya energi yang besar serta dapat memenuhi jumlah kebutuhan dari setiap warganya, namun pada kenyataannya Indonesia masih menghadapi risiko ketahanan energi yang cukup riskan. salah satu yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah terus meningkatnya kebutuhan bahan bakar belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produksi energi domestik. Beberapa masalah yang menghambat produksi energi domestik terutama adalah kendala pembangunan infrastruktur pembuatan energi baru hal ini tercemin pada banyaknya program pembangunan energi yang masih terhambat dikarenakan berbagai permasalahan administratif dan atau bahkan anggaran ideal tersebut menjadi deficit dengan tidak wajar karena dikorupsi oleh pihak yang terkait dalam proyek pembangunan tersebut sehingga hal ini menghambat proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Selain itu pengembangan diversifikasi energi baru dan terbarukan juga menjadi sesuatu yang tidak kalah penting dan harus mampu dikembangkan guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Penggunaan ini perlu diwaspadai, karena akan berdampak pada semakin langkanya ketersediaan energi fosil. Meskipun Pemerintah telah melakukan reformasi energi antara lain dengan mengurangi subsidi BBM, tingginya impor migas dan terbatasnya cadangan minyak Indonesia masih membebani proses pemenuhan tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi sebagai Tujuan Utama

Retorika yang terus diutarakan dalam berbagai platform masyarakat oleh pemerintah tentang bagaimana indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi seolah itu menjadi kebanggaan bagi siapa saja menyatakan akan hal tersebut, namun mirisnya pertumbuhan yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan dengan pemerataan pembangunan yang baik seperti distribusi pendapatan, tenaga kerja dan lain sebagainya. Memang benar bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dalam sepuluh tahun terakhir namun permasalahan struktural yang sifatnya sangat penting masih menjadi pokok permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Indonesia kedepan.

Dari sejumlah tantangan struktural dimaksud, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional saat ini, terdapat beberapa pilar yang menjadi prioritas untuk dibenahi. diantaranya adalah ketahanan pangan dan energi daya saing industri serta pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Upaya pembenahan yang ditempuh memerlukan dukungan sejumlah modal dasar pembangunan, berupa jaringan infrastruktur yang berkualitas dan komprehensif serta sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai spirit berwirausaha

dan mempunyai mindset yang kompetitif untuk dapat bersaing pada tingkat wilayah kapabean maupun internasional.

Sebagai penjabaran dari faktor yang menunjang untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan tersebut diantaranya adalah pembangunan infrastruktur yang mampu mengakomodir distribusi barang dan jasa di masing masing wilayah khususnya wilayah yang selama ini bukan menjadi prioritas. dengan dibangunnya infrastruktur yang baik dan komprehensif serta *acesable* diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah untuk pemerataan khususnya dalam hal distribusi ketahanan pangan.

Hal lain yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan pembnagunan sumberdaya manusianya, terlebih saat ini Indonesia sudah masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berarti bahwa kedepan persaingan antar negara akan semakin kompetitif. Mengacu pada teori ekonomi kaum neo klasik seperti Malthus dan Ricardian dengan teori komparatifnya. Menyatakan bahwa masing-masing negara mempunyai nilai dan keunggulan dalam sektor tertentu sehingga proses perdagangan antar negara dapat terjadi.

Masuknya Indonesia kedalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi alarm yang sangat serius dan akan menciptakan tantangan dan peluang ke depan yang semakin beragam. Peluang Indonesia cukup besar untuk menjadi basis produksi untuk menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global. Dengan dihapuskannya tarif (perdagangan bebas) maka total potensi pasar akan membesar dan produk domestik harus mampu bersaing dengan produk dari negara pesaing. Akan tetapi, jika peluang ini tidak dipersiapkan dengan baik maka negara kita hanya akan menjadi target pasar dari negara anggota yang mempunyai nilai produktivitas yang lebih tinggi.

Menciptakan industri yang dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan berstandar internasional sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut yang dapat dimulai dari pada sektor teknologi menengah dan tinggi dan pentingnya inkubator bisnis yang masif pada kelompok-kelompok tertentu dengan menjunjung spirit kewirausahaan yang berasaskan kekeluargaan. Untuk itu, dukungan kualitas tenaga kerja yang memadai juga memegang faktor kunci. Disamping itu, penguatan daya saing pada sektor-sektor tersebut juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan Indonesia dalam bertransisi menjadi negara.

Peran intelektual muda yang berdaya saing sangat diperlukan dalam mengembangkan teknologi pada sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh pada sektor agriculture dengan banyaknya hasil penelitian mahasiswa terhadap teknologi pertanian yang mampu mengembangkan

dan efisiensi produksi, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan sebagai langkah awal untuk pengembangan pada sektor pertanian, begitu juga pada hal energi terbarukan yang dapat menjamin permintaan terhadap energi di masa yang akan datang.

BAB III
Cita-Cita Hukum, Politik dan Kebijakan Pembangunan

ADI PRAKOSO

DORA ELIA KASIH

TRI PUSPITA NINGRUM

MUHAMMAD ANIS SUMADI

FERDIAN ANANTA FAISYAL

MUH. SYAINU L ARIFIN TORA

ANDIK SURYANSYAH

DEDY MUZLAHINUR

A. Pembaharuan Mahkamah Partai Politik sebagai Desain Alternatif dalam Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

[Oleh: Adi Prakoso]

Partai politik merupakan salah satu elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Partai politik dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Partai politik adalah suatu organisasi yang karakter utamanya adalah kekuasaan. Agar mampu menjalankan fungsi-fungsinya, partai politik bertujuan memegang kekuasaan karena dengan mempunyai kekuasaan politik, partai dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya.⁵⁸ Reformasi menjadikan partai politik secara bebas, mandiri untuk mengembangkan dan membangun di lingkungan partai politik. Namun setelah reformasi banyak partai politik yang dilanda konflik dan perselisihan partai politiknya. Penyebabnya juga beragam misalnya perselisihan kepengurusan partai politik, kebijakan pengurus partai politik, pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik, pemecatan anggota partai politik, dan juga yang lainnya.

Seperti yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pada tahun 2005 terjadi dualisme kepengurusan partai politik dari Kongres II di Bali, yang dalam keputusan kongres tersebut digugat oleh kader-kader PDIP baik ditingkat pusat maupun daerah. Perselisihan yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya menimbulkan perpecahan, sehingga beberapa kelompok yang tidak menyepakati hasil kongres mendeklarasikan Gerakan Pembaharuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (GPPDIP) yang dipelopori oleh Roy B.B. Janis yang ditunjuk sebagai ketua Didik Supriyanto, dan Tjandra Widjaya ditunjuk sebagai sekretaris dan bendahara.

Disisi lain perselisihan partai politik juga terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dimulai pada muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Semarang. Perselisihan tersebut menimbulkan dualisme kepemimpinan yaitu antara Abdurahman Wahid (Gus Dur) – Muhaimin Iskandar berhadapan dengan Alwi Shibah dan Saifullah Yusuf yang didukung oleh poros Kiai langitan – Lirboyo. Pada saat ini perselisihan juga terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu berkaitan dengan dualisme kepengurusan antara kubu

⁵⁸ Abdul Hayyik, Agung Mozin, dkk, *Konsolidasi Demokrasi: Kompilasi Hasil Workshop, Pertemuan Kerja Rutin dan Pertemuan Nasional Forum Politisi*, Jakarta, Forum Politisi d/a Friedrich Naumann Stiftung, 2006, hlm.3

Rohmahurmuziy yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam muktamar yang diadakan di Empire Place Surabaya dan dengan kubu Surya Dharma Ali yang mengadakan Muktamar di Jakarta dengan terpilihnya Dian Faridz sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Perselisihan yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan bukanlah hal yang baru dan sebelumnya perselisihan partai juga terjadi antara elit DPP pro silaturahmi nasional (Silatnas) yang anti Hamzah Haz dengan yang anti silaturahmi nasional (Silatnas) yang pro Hamzah - Haz. Hal seperti itu juga terjadi dalam partai Golkar dengan muncul istilah Musyawarah Nasional (Munas) tandingan di dalam tubuh partai Golkar. Pada tanggal 30 November - 4 Desember 2014 Munas Golkar ke IX diadakan di Nusa Dua, Bali oleh kubu Aburizal Bakrie. Sedangkan pada tanggal 6 - 8 Desember 2014 Munas Golkar ke IX diadakan di Ancol, Jakarta oleh kubu Agung Laksono.

Terjadinya konflik dan perselisihan partai politik memiliki dampak besar terutama akan memunculkan fenomena krisis kepercayaan terhadap partai politik. Sebagaimana disimak dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh litbang *Kompas* yang dirilis tanggal 11 Maret 2011 terhadap 1.127 responden yang berusia minimal 17 tahun yang dilakukan secara acak pada 57 kota di Indonesia, terdapat 82,1% responden berpendapat bahwa partai politik tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.⁵⁹ Kepercayaan dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh partai politik terutama dalam proses partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi dan sosialisasi politik. Untuk itu perselisihan di lingkungan partai politik harus diselesaikan secara efektif dan demokratis.

Berdasarkan perselisihan-perselisihan partai politik tersebut yang terjadi sebelum tahun 2011, perselisihan partai politik tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik. Hal tersebut dikarenakan gagasan Mahkamah Partai Politik baru muncul penormaannya dalam Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang partai politik. Sedangkan pada Undang-Undang No.31 tahun 2002 dan Undang-Undang No.2 tahun 2008 belum mengatur berkaitan dengan Mahkamah Partai Politik.

Sehingga pada perselisihan partai politik yang terjadi sebelum tahun 2011, diselesaikan secara internal oleh partai politik. Hal tersebut dapat dijadikan landasan bahwa penyelesaian perselisihan partai politik secara internal juga tidak secara tegas dapat menyelesaikan perselisihan partai politik. Menurut pendapat penulis Mahkamah Partai Politik dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penyelesaian perselisihan partai politik. Akan tetapi kelembagaan Mahkamah Partai Politik juga harus

⁵⁹ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 99

diperbarui dengan desain kelembagaan yang berbeda. Oleh karena itu menurut pendapat penulis pembaharuan partai politik dapat menjadi rujukan dan solusi dalam desain alternative sebagai usaha penegakan dan menciptakan keutuhan partai politik yang berkehidupan demokratis.

Analisis Yuridis Mahkamah Partai Politik pada UU No.2 Tahun 2011

Seperti yang telah dijelaskan dimuka berdasarkan pada Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik, ada beberapa penormaan Mahkamah Partai Politik yang melemahkan kedudukan dan fungsi Mahkamah Partai Politik dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik yang berbunyi sebagai berikut, *“Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik”*. Berdasarkan penormaan pasal tersebut, tidak menyebutkan dalam norma-nya tentang kedudukan Mahkamah Partai politik berada di internal partai politik. Tidak jelasnya kedudukan Mahkamah Partai akan berdampak pada lemahnya kelembagaan Mahkamah Partai Politik di internal partainya terutama ketika Mahkamah Partai Politik mengeluarkan putusannya. Selain itu, dibentuknya Mahkamah Partai Politik oleh partai politik dalam penormaan pasal tersebut juga tidak bisa dijadikan dasar bahwa kedudukan Mahkamah Partai Politik ada di internal Partai Politik. Sehingga masih menjadi hal yang aneh jika pada saat ini perselisihan-perselisihan di internal partai politik menjadi sulit untuk diselesaikan meskipun telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Partai.

Selain itu Undang-undang No.2 tahun 2011 tentang partai politik tidak memberikan definisi mengenai Mahkamah Partai Politik. Pengertian atau definisi menjadi suatu hal yang penting dalam terbentuknya lembaga atau institusi, karena berkaitan dengan identitas dari lembaga tersebut. Tidak dijelaskan definisi juga akan menciptakan beragam penafsiran tentang identitas lembaga. Partai politik yang membentuk Mahkamah Partai Politik juga akan berbeda-beda dalam memberi penafsiran. Sehingga tujuan dan fungsi terbentuknya Mahkamah Partai Politik sangat mungkin untuk disalah artikan.

Disamping itu terdapat penormaan yang bersifat kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Penormaan tersebut juga tidak secara jelas dalam mengatur komposisi dan komponen-komponen pendukung untuk memperkuat Mahkamah Partai Politik. Misalnya Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) menyatakan, *“dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian*

perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri".⁶⁰ Menurut pendapat penulis proses upaya hukum ke pengadilan negeri tidaklah tepat, hal tersebut dikarenakan perselisihan internal partai politik adalah perkara administrasi dan bukanlah kewenangannya.

Kemudian jika melihat penormaam dalam Pasal 32 Ayat (5) menyebutkan "*Putusan mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*".⁶¹ Sehingga tidak dapat dibenarkan jika masih ada upaya hukum setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Partai Politik. Tetapi berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) menyatakan, "*dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*".⁶² Berdasarkan perbandingan tersebut telah terjadi kontradiksi penormaam, di satu sisi menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat sehingga tidak boleh ada upaya hukum diluar dari itu. Sedangkan disisi yang lain menyebutkan upaya hukum melalui pengadilan negeri dapat dilakukan meskipun setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Partai. Kontradiksi yang terjadi pada penormaam tersebut akan berdampak pada kekuatan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai. Kekuatan putusan Mahkamah Partai Politik tidak akan memiliki dasar keterikatan yang kuat terhadap para pihak yang berselisih di dalam internal partai politik. Sehingga konflik dan perselisihan yang terjadi di partai politik akan menjadi semakin sulit dan rumit untuk diselesaikan.

Selain itu pada pasal 33 Ayat (2) menyatakan "*putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung*".⁶³ Sedangkan pada penormaam sebelumnya berdasarkan pada Pasal 32 Ayat (5) menyebutkan "*Putusan mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*". Redaksi final dan mengikat pada penormaam tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada proses atau upaya hukum lagi setelah dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Partai. Sedangkan pada penormaam yang lain masih menyediakan upaya hukum setelah dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Partai. Terjadinya kontradiksi

⁶⁰Lihat Pasal 33 Ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang selanjutnya diubah menjadi UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik

⁶¹Lihat Pasal 32 Ayat (5) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang selanjutnya diubah menjadi UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik

⁶²Lihat Pasal 33 Ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang selanjutnya diubah menjadi UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik

⁶³Lihat Pasal 33 Ayat (2) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang selanjutnya diubah menjadi UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik

diantara penormaam dapat menimbulkan ke-tidaktegasan dalam menjalankan kewenangan Mahkamah Partai. Fungsi Mahkamah Partai akan menjadi lemah secara kelembagaan. Pada problematika hukum yang lain juga terjadi pada perselisihan partai politik GOLKAR yaitu tanggal 18 Mei 2015 PTUN berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Aburizal Bakrie membatalkan SK Menteri Hukum dan Ham. Dalam hal ini perkara tersebut tidaklah tepat jika kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena keputusan partai politik bukanlah keputusan tata usaha negara.

Mahkamah Partai Politik berdasarkan UU No. 2 tahun 2011 tidak menjelaskan susunan dan komponen - komponen kelembagaannya. Sehingga Mahkamah Partai Politik dalam kelembagaannya terdapat berbagai model dan desain susunan yang berbeda disetiap partai politik. Menurut pendapat penulis akan menjadi lebih baik jika susunan dan komponen-komponennya dituangkan kedalam penormaam diregulasi tersebut. Sehingga kelembagaan Mahkamah Partai Politik akan menjadi semakin jelas dan teratur. Selain itu, proses hukum acara yang digunakan dalam Mahkamah Partai Politik juga tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Tanpa hukum acara yang jelas Mahkamah Partai Politik dalam menjalankan kewenangannya tidak akan berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu menjadi hal yang wajar jika Mahkamah Partai Politik tidak bisa menyelesaikan perselisihan partai politik dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian perbaikan instrument-instrumen kelembagaan Mahkamah Partai Politik sebagaimana dalam UU No.2 Tahun 2011 menjadi hal yang penting. Terutama dengan memperjelas identitas, struktur kelembagaan,

Desain Pembaharuan Mahkamah Partai Politik

Partai politik memiliki peranan penting dalam system ketatanegaraan Indonesia. Partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (legitimate) dan damai⁶⁴.

Demi terwujudnya partai politik yang berkualitas, Mahkamah Partai Politik memiliki peran penting terutama dalam menciptakan stabilitas politik yang teratur dan ideal pada partai politik. Ukuran Negara

⁶⁴ Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Setara Press, 2013, hlm. 13

demokrasi adalah sejauhmana kualitas dan peran dari partai politik pada suatu Negara. Partai politik pada dasarnya menurut James Rosnau adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai institusi yang berfungsi penetrative (penetrative linkage), dalam arti sebagai lembaga yang ikut memainkan peranan dalam proses pembentukan kebijakan Negara.
- b. Sebagai reactive linkage, yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara.⁶⁵

Dalam perkembangannya, banyak partai politik dilanda konflik dan perselisihan di lingkungan internalnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya perselisihan yang terjadi pada partai politik menjadi rumit dan sulit untuk diselesaikan. Mahkamah Partai Politik sebagai inovasi baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya pada partai politik tidak secara tegas dapat menyelesaikan perselisihan dengan efisien dan efektif. Perselisihan-perselisihan juga tetap berlangsung meskipun telah dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Partai Politik. Hal itu menunjukkan bahwa peran dan fungsi Mahkamah Partai Politik tidak begitu signifikan. Oleh karena itu dibut-uhkan sebuah gagasan baru terutama untuk memperkuat desain kelembagaan Mahkamah Partai Politik.

Menurut pendapat penulis ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja dari Mahkamah Partai Politik. Memperbarui Mahkamah Partai Politik dapat dilakukan dengan memperkuat kelemb-agaannya. Seperti memperjelas susunan dan komponen kelembagaan. Memperjelas fungsi, tugas, dan kewenangannya. Memperjelas hukum acara yang digunakan dalam menyel-esaikan perselisihan. Memperbaiki kontradiksi penormaan di UU No. 2 tahun 2011 dan juga memperjelas penormaan final dan mengikat pada putusan Mahkamah Partai Politik.

Penulis juga berpendapat bahwa akan lebih baik jika kedudukan Mahkamah Partai Politik tidak lagi di internal partai politik melainkan diluar partai politik menjadi lembaga Negara. Semua partai politik yang berselisih dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai Politik. Mahkamah Partai Politik dapat menjadi lembaga peradilan pertama dan terakhir serta sebagai peradilan khusus dalam system ketatanegaraan Indonesia. Status khusus Mahkamah Partai politik dalam desain-nya terpisah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu tidak berada dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Desain dari Mahkamah Partai Politik ini bukanlah merupakan

⁶⁵Ibid, hlm. 18

instrument politik melainkan sebagai lembaga dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik.

Dalam konsep yang baru Mahkamah Partai Politik dalam perkembangannya tidak dapat dipungkiri terdapat intervensi dari eksekutif dan legislative serta lembaga-lembaga yang lain. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya tidak dapat secara mandiri, merdeka, dan adil dalam memutus perselisihan internal partai politik. Menghindari intervensi dapat dilakukan dengan memberikan batasan secara kelembagaan misalnya dalam Pengisian komponen-komponen kelembagaan. Untuk pengisian komposisi internal Mahkamah Partai Politik tidak diambil dari partai politik yang berselisih dan secara keseluruhan tidak melibatkan partai – partai politik yang lain.

Mahkamah Partai Politik dengan kedudukan dan kelembagaan sebagai peradilan khusus dibawah dalam kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menjadi lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik yang efektif dan professional serta dapat mengurangi intensitas perselisihan dilingkungan internal partai politik.

B. Reformasi Birokrasi: “Menyembuhkan dan Merawat Bangsa”

[Oleh: Dora Elia Kasih]

Reformasi Birokrasi

Setelah terjadinya Orde Baru, di dalam reformasi birokrasi Indonesia berada di tahap pertama yakni pada tahun 2010-2014 terlihat Indonesia melakukan transisi dari model birokrasi sebelumnya yaitu menggunakan model Webberian, namun pada kenyataannya model yang digunakan lebih mendekati model patronase. Patronase adalah semangat perkawanan dimana individu yang memiliki status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patro) menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk melindungi dan memberikan keuntungan bagi yang berkedudukan lebih rendah (client) sementara sang client memberikan dukungan dan bantuan termasuk pelayanan personal bagi sang patron. Pemahaman ini memberikan definisi bahwa ada hubungan antara element birokrat yang ada di Indonesia, dimana mereka yang memiliki posisi yang lebih tinggi dan Isquo, mengayomi yang lebih rendah dan yang dibawah memberikan pelayanan untuk mereka yang di atas.

Namun, pada saat pemerintahan masa Orde Baru kemudian muncul dengan tiga pilar kekuatan utamanya seperti yang dijelaskan oleh M. Harun Alrasyid dalam Reformasi Birokrasi (ruang utama), bahwa ketiga hal itu merupakan militer, Golkar dan birokrasi pemerintahan. Berbagai kebijakan yang kemudian dirumuskan oleh kekuatan tiga pilar utama ini dan posisi yang paling stratgis dimiliki oleh birokrasi. Dikatakan strategis karena birokrasi sebagai regulator, perumus kebijakan, pelaksana kebijakan yang dibuat bahkan sekaligus bisa menjadi pihak yang mengevaluasi kebijakan tersebut. Hal ini tentu akan menjadi landasan dan faktor utama untuk mendukung suksesnya tujuan mereformasi birokrasi. Pada masa ini, birokrasi menjelma menjadi kekuatan politik yang mendominasi perumusan kebijakan khususnya dalam segi pembangunan. Dari birokrasi seperti ini kemudian membentuk pola hubungan yang disebut dengan patrimonial, dimana ini merupakan warisan dari birokrasi tradisional yang bercampur dengan birokrasi kolonial. Bisa dikatakan bahwa perkembangan birokrasi di Indonesia diwarnai oleh warisan tradisional terdahulu.

Melihat keadaan seperti ini, nampaknya model Webber yang memberikan penekanan kepada impersonal, profesionalisme, serta legal formal sampai hari ini masih belum terlihat di dalam tubuh birokrasi Indonesia. Model birokrasi patrimonial ini senantiasa setia bertahan dan berlangsung dalam kesehariannya di dalam pemerintaha, tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, tetapi juga di pemerintahan provinsi, pemerintahan kota bahkan pemerintahan daerah serta menurun kepada sistem paling rendah yakni di RT (rukun tetangga) dan RW (rukun

warga). Ketika model Webberian masih belum bisa dijalankan di dalam sistem birokrasi dan tetap mempertahankan sistem patrimonial maka hal seperti ini akan menghambat proses demokrasi yang ada di Indonesia dan proses pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Serta upaya untuk mempercepat penyuksesan mereformasi birokrasi kita tidak akan pernah sesuai dengan harapan dan ini akan berdampak hingga beberapa generasi birokrasi yang akan datang. Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk membuat kebijakan sebisa mungkin membuat kebijakan yang tepat, cepat dan memberikan dampak positif, karena sejatinya kehidupan manusia akan terus berlangsung sehingga jika tidak segera memperbaiki yang ada sekarang maka ini tentu akan menjadi budaya yang tidak baik untuk diturunkan kepada kehidupan berbirokrasi di masa depan. Serta menimbulkan berbagai macam permasalahan pada beberapa bagian yang akan diperbaiki yakni pelayanan publik, cita-cita untuk mencapai *good governance* dan *good government*. Sedarmayanti (2009, h.71) mengemukakan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Menurut Sedarmayanti (2009, h.74), aspek utama dalam membangun birokrasi adalah: (a) Membangun visi birokrasi, (b) Membangun manusia birokrasi, (c) Membangun sistem birokrasi, dibagi menjadi tiga yaitu: (1) Pembenahan struktur, (2) Menerapkan strategi yang tepat dan (3) Pembenahan budaya organisasi, dan (d) Membangun lingkungan birokrasi⁶⁶.

Indonesia sudah mempunyai cukup banyak permasalahan yang semakin bertambahnya waktu semakin bertumbuh menjadi isu publik. Isu-isu yang ada hari ini bukanlah isu yang baru muncul di permukaan dalam birokrasi pemerintahan yang kita ketahui. Namun hal inilah lantas membuat perubahan paradigma baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dari sentralistis menuju desentralistis yang kemudian ditandai dengan kebijakan otonomi daerah dengan tujuan agar bisa menjadi lebih mandiri dan fokus dalam melakukan perbaikan sistem pemerintahan dan upaya memberdayakan sumber daya manusia yang tersedia. Reformasi birokrasi adalah salah satu cara yang dapat di tempuh untuk mewujudkan "*good public governance*". Upaya ini dapat dilihat pada pelayanan yang terbukti belum baik yang dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan yang berkualitas akan menjadi salah satu tolak ukur bahwa sudah terjadi reformasi birokrasi pada sektor pemerintahan.

Reformasi birokrasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem

⁶⁶ Sedarmatanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Refika Aditama, 2009

pemerintahan dari mulai dasar hingga masalah yang paling mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat. Upaya untuk mereformasi birokrasi ini sudah dicanangkan sejak Era Reformasi. Sudah banyak kebijakan dan sistem yang disiapkan dan direalisasikan, namun yang terjadi adalah segenap pemerintah masih belum mampu mewujudkan kinerja yang optimal, seperti masih banyak pejabat pemerintah yang korupsi, ini merupakan perilaku buruk yang sampai hari ini masih bertahan dalam sistem birokrasi Negara Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak birokrat yang berkedudukan di pusat maupun daerah yang menjalankan kinerja jauh dari kebenaran etika sebagai aparatur Negara yang dipercaya oleh masyarakat yang sepenuhnya mendukung mereka ketika ingin berada di posisi tersebut. Baru-baru ini dilangsir di Washington DC melalui badan anti-korupsi dunia, *Transparency Internatioanl*, mengeluarkan laporan bahwa persepsi korupsi ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke 90 dengan skor 37. Dari sisi skor ada kenaikan satu poin, namun dari sisi ratin terjadi penurunan dua tingkat. Hal ini terjadi akibat belum maksimalnya reformasi hukum di bidang perizinan. Beralih sedikit ke daerah, Bengkulu adalah satu provinsi “miskin” yang berada di pulau Sumatera, akan tetapi pada tahun 2012 menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Bengkulu berada di posisi 10 teratas dengan total dana Rp. 123 miliar. Kasus ini hampir 90% dilakukan oleh para birokrat.

Berbicara masalah reformasi birokrasi, seperti yang disebutkan di atas berarti kita berbicara masalah pelayanan public, *good governance* dan *clear government*. Berangkat dari permasalahan inilah penulis akan membahas beberapa sebab, akibat dan mini solusi yang bertujuan untuk perbaikan sistem birokrasi pada pemerintahan khususnya pemerintah daerah. Pandangan ini diberikan dari sudut pandang penulis sebagai generasi muda yang melihat permasalahan daerahnya adalah masalah bersama yang harus sama-sama diselesaikan dan merupakan bentuk kontribusi pemikiran dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang bersangkutan, dalam hal ini pejabat daerah beserta perangkatnya.

Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Publik

Menurut UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Efektifitas pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara tepat guna dan tepat sasaran dengan menggunakan

fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah yang berbentuk kebijakan ataupun sistem yang disediakan untuk masyarakat, sehingga terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan efisiensi pelayanan publik merupakan titik beratnya kepada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.

Dalam upaya pemberdayaan dibutuhkan semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ("*a spirit of public services*"), dan menjadi mitra masyarakat ("*partner of society*"); atau melakukan kerja sama dengan masyarakat ("*co production atau partnership*")⁶⁷. Ketiga hal ini akan sangat membantu dalam menciptakan sinergisitas pelayanan untuk masyarakat, juga mempermudah perealisasi tujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan pelayanan publik. Hal yang sederhana yang dapat dilakukan oleh birokrasi (aparatur pemerintah) adalah dengan mematuhi dan menjalankan peraturan yang ada, sehingga pelayanan yang sekecil apapun dapan dirasakan oleh masyarakat. Contoh kecilnya adalah ketika masyarakat ingin mengurus administrasi pembuatan SIM (surat izin mengemudi), petugas publik seharusnya memberi pelayanan dengan tidak berbelit-belit, tidak melakukan pungli (pungutan liar), menyelesaikan permintaan masyarakat dengan cepat dan tepat waktu. Hal ini uga memberikan keuntungan kepada petugas bahwa tugas-tugas mereka tidak akan menumpuk dan masyarakatnya akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Pada era pemerintahan Jokowi-JK, mereka mencanangkan bahwa akan mewujudkan pemerintahan yang terbuka, pentingnya perubahan karakter, mentalitas serta pola fikir dalam pekerjaan kalangan birokrasi yang ada di pemerintahan serta badan-badan publik lainnya. Upaya untuk menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, sampai cash flow management system. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik akhir tahun 2015. Dalam sistem pemerintahan yang serba elektronik, rakyat dengan mudah dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. E-government yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan melalui internet (on line). Manfaat yang bisa dirasakan langsung dari layanan online ini adalah memangkas biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Ada pula beberapa contoh seperti Sipemdes Panggungharjo, e-government Pemerintah DKI

⁶⁷ Rumzi Yamin, *Reformasi Birokrasi, Jurnal FISIP Umrah Vol. 2, No. 2, 2011*, hlm. 174

dan Sistem Perda Elektronik yang merupakan bentuk-bentuk nyata mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi yang harus diperjuangkan oleh seluruh jajaran birokrasi baik dalam skala pusat, provinsi, kota bahkan daerah. Sebenarnya inilah makna dari kontekstual Kebangkitan Nasional, yaitu membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan berwibawa melalui e-government. Sistem pemerintahan seperti inilah yang dapat membantu mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

Namun hari ini yang terjadi adalah kualitas pelayanan publik yang rendah, seperti tidak transparannya biaya dalam pengurusan perizinan, berbelit-belitnya pelayanan bahkan tidak jarang membuat masyarakat menjadi frustrasi, bahkan waktu pelayanan yang tidak jelas⁶⁸. Masyarakat banyak mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dikarenakan kinerja aparatur yang belum optimal dan belum sepenuhnya merasa sesuai dengan harapan atas apa yang masyarakat butuhkan. Kualitas pelayanan menurut Crosby, Lehtinen dan Wyckoff, merupakan penyesuaian terhadap perincian-perincian (*conformance of specification*), dimana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya kontrol secara terus menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa⁶⁹. Dengan demikian, sektor pemerintahan dalam bidang perizinan diharapkan agar dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat yang berkeinginan mengajukan perizinan mendapatkan banyak kemudahan dan hal ini secara tidak langsung dapat membantu pemerintah yang mempunyai visi untuk reformasi birokrasi.

Good Governance dan Masa Depan Indonesia

Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa⁷⁰. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang sudah menjadi wacana Indonesia saat ini. Konsep *good governance* lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi

⁶⁸ Suwari Akhmadhian, *Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah*, 2012 (465)

⁶⁹ Riyadi Soeprapto, *Pengembangan Model Citizen Character Dalam Meningkatkan Pelayanan Public Di Indonesia*, Delegasi, No. 2 Agustus 2005, Banjarmasin: Pusat Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, hlm. 123-150

⁷⁰ Sofian Effendi, *Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama*, Yogyakarta, 2005, 1

manusia, pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep pada *good governance* yang memberi penekanan kepada bagaimana peranan manajer publik agar mereka mampu memberi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan pengontrolan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan penciptaan manajerial yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance adalah cita-cita bangsa Indonesia dimana suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society, dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta (Taschereau dan Compos;UNDP,1997 dalam Thoha, Miftah,2004,63). Dalam hal ini ketiga komponen inilah yang mempunyai definisi tentang kesamaan dan sederajat. Selanjutnya kesamaan atas derajat ini juga nantinya akan memberikan pengaruh terhadap upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. Jika kesamaan derajat itu tidak seimbang maka yang akan terjadi adalah pembiasaan dari tata pemerintahan yang baik tersebut. Sejumlah rangkaian dari apa yang menjadi upaya ini nantinya akan membentuk sebuah hasil yang sangat diidamkan oleh semua masyarakat yang berbangsa dan bernegara yakni *clean government*. *Clean government* adalah sebuah istilah dimana keadaan suatu pemerintahan yang memiliki sistem yang jelas dan terstruktur, tidak terdapat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), setiap aparat pemerintah memiliki moral dan perilaku yang baik karena mereka merupakan panutan bagi masyarakat yang mengukung mereka untuk sampai di titik tersebut, pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab serta masyarakat tidak pernah merasakan ketidakadilan dalam segala hal seperti penyelesaian perizinan, kejujuran pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Hal ini bisa diwujudkan jika pemerintah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan di negara ini siap untuk memiliki sikap jujur dan siap untuk bekerja keras membangun bangsa ini dengan segenap jiwa dan raga.

Namun, apa yang terjadi dengan bangsa kita hari ini? Secara umum masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pecegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal, penataan kelembagaan yang masih belum efektif, manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik, inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran, dan

manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar dan masih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama.

Hal yang pertama harus disadari adalah bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam bisa dikelola dengan baik dan bisa mensejahterakan sebanyak 257,9 juta jiwa rakyat Indonesia dengan catatan negara ini harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hal tersebut dengan memiliki kualitas dan kapabilitas di semua bidang pembangunan. Yang menjadi fokus utama jangan pada pembangunan fisik melainkan pada pembangunan manusia itu sendiri. Dengan sendirinya *great human and human capability* inilah yang akan menyelamatkan negara ini dari kehancuran.

C. Asal Usul Praktek Pergundikan di Nusantara

[Oleh: Tri Lestari Puspitaningrum]

Asal Usul Praktek Pergundikan di Nusantara

Seksualitas sebenarnya merupakan landasan kehidupan sosial yang seringkali lebih menentukan kondisi masyarakat yang akan datang daripada sejarah politik atau peristiwa besar yang telah kita kenal selama ini. Pandangan, pendirian, dan sikap mengenai seksualitas tentu berbeda dari zaman ke zaman atau dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lainnya. Variasi tentang norma dan tata cara seksual sama beragamnya dengan perbedaan pandangan mengenai masalah korupsi, kekuasaan, kapitalisme atau sosialisme. Dengan memahami landasan kekuasaan dan basis material dari seksualias pada masa kolonialisme diharapkan wacana seksualitas bertambah luas dan kaya.

Kedatangan Wanita Belanda di Nusantara

Masa kolonialisme Hindia Belanda dimulai pada awal abad ke-19 dengan Pulau Jawa sebagai penetrasi kekuatan kolonial Hindia Belanda. Eva Ment adalah wanita pertama yang mendarat di Nusantara pada 27 September 1627 di Batavia dari negeri Belanda yang merupakan istri dari Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen. Kemudian J.P.Coen dikenal sebagai pendiri kota Batavia setelah berhasil mengalahkan orang-orang Banten dan Inggris pada tahun 1619. Eva Ment sengaja didatangkan bersama adik perempuannya dengan maksud sebagai contoh dari kehidupan keluarga yang baik. Karena dengan berkembangnya kota Batavia, perlu untuk mendatangkan orang-orang Belanda, lelaki dengan kemampuan dan keahlian tertentu, agar mereka dapat melengkapi serta membangun sarana-sarana yang diperlukan bagi sebuah kota dan memenuhi semua unsur bagi suatu kehidupan madani yang layak.

Perjalanan panjang orang-orang Belanda menggunakan kapal laut menyebabkan banyak dari mereka meninggal dalam perjalanan, kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya orang-orang ahli yang dibutuhkan di kota Batavia. Di kapal-kapal dagang VOC ada undang-undang yang sangat ketat terhadap homoseksualitas. Meskipun perjalanan kapal VOC ke Asia memakan waktu satu tahun namun larangan keras terhadap homoseksualitas tetap diberlakukan. Orang-orang yang terbukti melakukan hubungan sejenis dikapal-kapal tersebut dihukum mati secara kejam, sebagai contoh Gubernur Jenderal J.P.Coen terkenal sangat keras terhadap pelanggaran seksual. Untuk memenuhi kekurangan ini, para pendiri VOC terdahulu mendatangkan budak-budak

belian. Sedangkan kebanyakan pria Belanda hidup liar dan mempunyai peliharaan wanita Asia. Menghadapi fenomena kekurangan wanita di tahun 1609, VOC kemudian mendatangkan 36 wanita Belanda sebagai calon pengantin-pengantin bagi para pegawai VOC di Ambon dan daerah Maluku. Karena itu, wanita-wanita ini dinamakan anak-anak gadis Kompeni, suatu nama yang merendahkan disamping juga menyatakan rendahnya asal-usul keturunan mereka. Selain itu, sebutan tersebut juga menyatakan kurangnya relasi mereka di Eropa, sehingga walaupun tidak membayar ongkos perjalanan, cukup disertai pakaian dan upah yang rendah serta mahar kawin seadanya, dapat dipaksakan oleh VOC untuk melakukan pernikahan di Nusantara dengan seorang pria yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Akibatnya terbukti bahwa ternyata setelah perkawinan mereka, para wanita ini hidupnya menyeleweng dan gemar minum-minuman keras.

J.P.Coen kemudian memohon dengan sangat kepada pimpinan VOC di Belanda, agar jangan mengirim perempuan-perempuan sejenis demikian. Sebaliknya meminta agar dapat mengirim wanita-wanita Belanda terhormat yang berasal dari keluarga Belanda yang baik-baik. Atau bila tidak ada yang bersedia, sebagai gantinya mengirim anak-anak gadis dari rumah yatim piatu yang mendapat pendidikan yang keras didalamnya. Ternyata kamar dagang VOC mendengar dan mengabulkan permohonannya. Berbagai kelompok anak-anak gadis dicari dan dikumpulkan, dan sesudahnya diikutkan berlayar dengan kapal-kapal VOC ke Nusantara. Selama pelayaran mereka berada dibawah pengawasan istri-istri dari para pegawai rendahan VOC yang menyertai suaminya ke Nusantara. Disamping wanita-wanita resmi atas ijin VOC, juga terdapat wanita-wanita lainnya yang tertarik dengan kekayaan Nusantara.

Segala hal dilakukan untuk membuat keadaan di Nusantara sama dengan di Holland, akhirnya segala bentuk kebiasaan ini dikalahkan dengan kebiasaan yang sangat berlainan dengan di negeri Belanda, yaitu melakukan perbudakan dan mempunyai istri sampingan atau 'gundik'.

Politik Seksualitas Kaum Elit terhadap Negeri Jajahan

Demi membangun sebuah koloni yang mantap, para penguasa VOC melarang emigrasi dari keluarga campuran ke negeri Belanda. Seorang pria Belanda tidak diperkenankan kembali ke negerinya selama anaknya yang tidak sah masih hidup. Disamping itu, para pemimpin VOC juga ingin loyalitas dari para pegawainya yang ditempatkan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Karena itu, untuk posisi yang tinggi

hanya diperuntukan bagi pria yang lahir di Holland. Untuk pria yang lahir di daerah Nusantara hanya akan menjadi krani atau asisten saja.

Hukum Belanda yang berlaku di Asia menentukan bahwa istri atau tunangan dapat ditentukan menjadi ahli waris satu-satunya sehingga semua harta milik suaminya yang meninggal akan jatuh kepada seorang istri. Para janda-janda muda ini akan selalu dicari. Karena perbedaan umur antara wanita dan pria dan angka kematian yang tinggi mengakibatkan pergantian dari pasangan terjadi dengan cepat. Pria VOC yang menikah berkali-kali mungkin disebabkan angka kematian-kelahiran yang tinggi. Telah terjadi kebiasaan, bahwa keluarga pertama dari seorang pria yang baru datang dari Belanda adalah gundik dan anak-anaknya. Bila ia telah naik tingkatan sosialnya, maka ia akan memperbesar kemungkinan karirnya dan memperluas hubungan dengan menikahi seorang wanita Belanda. Pilihan pertama biasanya adalah teman sekerja dengan menikahi anak gadisnya, bila ini terjadi, maka para gundik serta anak-anak tidak sahnya disuruh keluar dari rumah. Biarlah mereka masuk kampung.

Secara umum, wanita-wanita dengan darah separuh Belanda ini dilukiskan sebagai orang yang pemalas, pesolek, buta huruf dan mempunyai kebiasaan gemar makan sirih. Disamping itu mereka mempunyai sifat cemburu dan kejam terhadap budak-budak mereka. Bila ia merupakan anak perempuan dari seorang pejabat VOC, maka dirinya akan tumbuh di kehidupan rumah tangga yang dipengaruhi oleh orang-orang Asia yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Bahasa pergaulan di rumah mungkin terdiri dari bahasa blasteran Portugis atau bahasa Melayu. Tidak selalu anak yang berasal dari hasil hubungan tuan rumah dengan budak wanitanya diterima sebagai anggota keluarga. Anak-anak dari golongan elite mungkin tidak masuk ke sekolah untuk anak-anak yatim, miskin dan para jemaat Portugis. Pelajaran yang mereka peroleh adalah dari ibu dan para budaknya. Mereka juga diperkirakan sedikit menggunakan bahasa Belanda dan buta sama sekali terhadap kultur Belanda.

Munculnya Nyai sebagai Pengganti Wanita Belanda

VOC sesudah masa Jan Pieterzoen Coen, jelas-jelas melonggarkan sanksi terhadap hubungan diluar pernikahan. Para pejabat tinggi VOC yang berhasil mengumpulkan harta memang ingin menikah. Dan seorang pria Belanda yang masih bujang bukanlah banci atau pastor. Karena itu, kehidupan rumah tangga memang ia perlukan. Karena kebijaksanaan VOC dikemudian hari tidak membantu emigrasi wanita dari negeri Belanda seperti yang dilakukan sebelumnya dan jumlah perempuan Eropa yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah prianya pada

masa itu menjadi pemicu logis bagi makin menggilanya satu bentuk pergundikan yang telah dirintis sebelumnya. Maka, terpaksa mereka pergi mencari wanita-wanita Asia atau berdarah campuran antara Asia dan Belanda. Wanita-wanita campuran Asia dengan status Eropa ini tidak diketahui secara langsung yang mempunyai kedudukan tinggi disebabkan eratnya hubungan mereka dengan pria-pria Belanda tertentu yang mempunyai pengaruh. Akibatnya adalah adat-istiadat, selera dan nilai dalam kehidupan di Nusantara tidak lagi ditentukan oleh wanita-wanita Belanda, tetapi lebih banyak ditentukan oleh wanita-wanita yang lahir dan dibesarkan di Asia.

Institusi selir antara orang Belanda dengan pribumi cenderung dibiarkan. Salah satu alasannya, karena sangat sedikit wanita Belanda yang datang ke Asia sehingga terpaksa diadakan pelanggaran bahkan anjuran kearah hubungan seksual antara lelaki Belanda dengan selir bukan Belanda. Selir-selir yang bukan Belanda ini status atau posisinya lebih mirip "budak" yang jarang menuju ke jenjang perkawinan tetapi lebih kepada pergundikan. Pada tahun 1816 perbudakan di Nusantara dihapuskan. Budak wanita menghilang dan tempatnya digantioleh *nyai*.

Karena itu, timbul pranata "*nyai*" (*indegenuous housekeeper*), yaitu wanita yang dipelihara oleh pejabat kolonial maupun swasta-swasta Belanda yang kaya yang kini lebih dikenal sebagai *Indisch Literatuur* di Nederland. Bahkan sebelum Belanda datang, pedagang Asia dan Portugis sudah terbiasa memelihara *nyai*. *Nyai* merupakan lambang romantisme seksual yang memberi kunci bagi suksesnya kolonialisme. Seorang wanita pribumi Asia akan mengganti posisi seorang istri Eropa untuk memenuhi kebutuhan pria Eropa dalam berumah tangga dan keperluan seksualnya. Kebutuhan seksualnya akan tambah dirangsang karena iklim di daerah tropis dan adanya makanan-makanan yang berbumbu pedas. Karena itu, setiap pria Belanda yang memelihara gundik harus terpaksa mendirikan sebuah rumah tangga sendiri. Terlepas dari para bujangan yang hidup di kamar-kamar atau menginap di pension atau penginapan.

Budaya Penyaian dan Moral Kolonial

Kebanyakan perempuan yang menjadi *nyai* berasal dari keluarga petani maupun keluarga kelas bawah lainnya yang dijual orang tua mereka untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Ada juga diantara *nyai* itu yang berasal dari keluarga priyayi. *Nyai* yang berasal dari keluarga priyayi ini biasanya diserahkan ayahnya kepada orang Belanda ataupun orang Eropa lainnya untuk mengamankan kedudukan dan jabatan sang ayah.

Pada masa feodal, perempuan-perempuan kelas bawah tersebut menjadi korban pelampiasan seksual dan alat perluasan kekuasaan kaum

bangsawan. Setelah sistem masyarakat feodal terserap ke dalam sistem masyarakat kolonial, perempuan Bumiputera yang dahulu dipergundik kaum bangsawan kini menjadi gundik pejabat kolonial, yakni yang disebut *nyai*. Namun, selanjutnya penyaian tidak hanya menyangkut pemenuhan biologis seorang laki-laki terhadap perempuan semata, melainkan harus dilihat pula implikasi ekonomi politik yang bersembunyi dibelakangnya. Menurut dongeng pejabat-pejabat Belanda yang menetap atau bertugas di Hindia Belanda dinasihatkan secepat mungkin memelihara *nyai* sehingga sang tuan dapat mempelajari bahasa adat-istiadat dan misteri “Timur” dengan cepat. Hal ini dapat digunakan juga untuk melenyapkan ras *inlander* itu sendiri, sebab anak-anak yang lahir ditetapkan sebagai orang Eropa. Disamping itu, hubungan kebudayaan yang pertama justru berlangsung melalui perkawinan antarras.

Ajaran Kristen yang mengharamkan perzinahan dan menempatkan perkawinan sebagai perwujudan yang sakral dalam hubungan lelaki-perempuan tidak berlaku bagi orang Belanda di Hindia. Pemerintah kolonial bekerja sama dengan gereja untuk mengeluarkan hukum perkawinan baru, yang mengatur hak-hak *nyai* serta anak-anak yang dilahirkan. Campur tangan pemerintah terhadap gereja memang sudah berlangsung sejak masa VOC. Gereja di Hindia Timur harus tunduk kepada kekuasaan duniawi Gubernur Jenderal berikut Dewannya.

Pada masa VOC, orang Belanda yang beristrikan perempuan Bumiputera tidak boleh membawa istri beserta anak-anaknya dari perkawinan itu ke negeri asalnya. Perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh gereja di sana. Peristiwa ini mendorong orang-orang Kompeni untuk memelihara *nyai-nyai* saja yang dapat setiap saat mereka tinggalkan. Ketika masa Kompeni berganti dengan masa Hindia Belanda, penyaian makin meningkat. Kedatangan laki-laki Eropa dalam jumlah besar telah memperpanjang sejarah penyaian di Hindia Belanda, karena mereka telah belajar dari para pendahulu yaitu “guru-guru” Kompeni mereka bahwa memelihara *nyai* lebih menguntungkan daripada mengawini secara sah seorang perempuan Bumiputera.

Penyaian ini sudah dimulai pada awal pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu awal abad ke-19. Sampai dipergantian abad ke-20, hubungan antara pria Eropa dan wanita Asia oleh perusahaan dan oleh masyarakat biasa dipandang sebagai hal yang lumrah. Bahwa kegundikan sampai tahun 1940 masih banyak terdapat, dikalangan pengusaha perkebunan dianggap sebagai hal yang biasa. Para wanita yang oleh pria Eropa dipilih menjadi “nyainya” kebanyakan adalah wanita Jepang atau wanita Jawa dari perkebunan. Wanita-wanita Jepang kebanyakan ditebus dari rumah-rumah pelacuran di Jawa atau

didatangkan langsung dari Jepang. Para wanita Jawa dikontrakkan, hanya ditugaskan untuk bekerja sebagai pengurus dalam rumah.

Seorang *nyai* adalah pengurus rumah tangga yang bergerak antara batas pembantu, ibu rumah tangga, istri dan pelacur. Kehidupan antara dua budaya yang waktu itu sangat jauh berbeda mengakibatkan bahwa wanita itu hanya dianggap sebagai pemuas nafsu, selain pengurus rumah tangga. Dari sifat kedua pasangan dan kedudukan dari pria dimana dari salah satu ke-empat unsur ini menonjol. Bila si pria lebih berpendidikan atau menjadi lebih makmur maka *nyai* ini menjadi lebih kurang fungsinya sebagai istri, pembantu dan mungkin lebih banyak sebagai budak. Bila si pria lebih kurang peduli terhadap hubungan ini maka *nyai* akan lebih banyak jatuh ke arah kedudukan pelacur. Yang utama dalam posisinya adalah bahwa ia setiap waktu dapat dikirim kembali kerumahnya di kampung apakah dengan atau tanpa anak yang terjadi sewaktu mereka masih hidup bersama. Bila dalam hubungan ini terjadi anak maka wanita Jawa ini dapat dituduh memang dilakukan dengan sengaja.

Namun demikian, pengurus rumah tangga atau gundiknya tetap bertindak sebagai kepala rumah tangga. Pembantu yang lain akan menghormatinya dan kuli-kuli kontrak lainnya tidak akan berani membantahnya. Tetapi anak-anak yang oleh orang Eropa dinamakan *kyoorkinderen* atau 'anak-anak sebelumnya' akhirnya dapat terjadi juga. Bila hal ini terjadi dapat saja si *Nyai* dengan anak-anaknya dikirim keluar dari rumah. Dapat juga terjadi bahwa pria Eropa mensyahkan anak-anak itu.

Nyai-nyai itu juga memiliki selera dan gaya hidup Eropa sebagaimana tuan mereka. Akan tetapi, posisi *nyai* adalah posisi yang rawan. Keberuntungan para *nyai* dalam mengecap kesenangan hidup pun bersifat semu dan sementara. Setiap saat ia dapat terancam ditinggalkan oleh tuannya, kembali ke negeri leluhur. Tak jarang orang-orang Eropa itu sudah beranak-istri di negeri asal. Perlop ke Eropa yang seorang asisten muda mendapat setelah bekerja keras selama 6 tahun akan banyak dipergunakan untuk mencari seorang istri yang syah di negeri Belanda. Bila wanita Belanda ini datang maka si gundik beserta anak-anaknya harus pergi.

Referensi:

Hadiz, Liza (ed). 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta : Pustaka LP3ES

Suyono. 2005. *Seks dan Kekerasan Zaman Kolonial*. Jakarta: Grasindo

D. Membanding Kepemimpinan Sipil Militer di Pentas Politik Indonesia

[Oleh: Mohammad Anis Sumadi]

Di Indonesia, negara ini sudah melalui tujuh kali proses pergantian presiden. Mulai dari Presiden yang pertama sampai sekarang yakni Pak Jokowi. Ada perbedaan tipologi kepemimpinan. Dalam setiap periode masyarakat Indonesia selalu berhadapan dengan pemimpin yang berbeda latar baik sipil maupun militer. Tulisan ini untuk memperkaya khazanah keilmuan manajerial kepemimpinan antara sipil dan militer. Supaya pemimpin Negara Indonesia yang dari pihak masyarakat sipil agar tetap stabil dalam menjaga pertahanan dan keamanan bangsa ini, maka dibutuhkan tip dan trik khusus untuk menjaga stabilitasi roda perjuangan Negara Indonesia. Begitu juga dengan militer agar selalu meningkatkan kualitas strateginya, demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Kepemimpinan Sipil dan Militer

Kekuasaan sipil atas militer adalah sebuah doktrin dalam hubungan sipil-militer dan ilmu kemiliteran serta ilmu politik yang menempatkan tanggung jawab pembuat keputusan tertinggi strategis suatu negara berada pada tangan warga sipil pemimpin politik, bukan pada perwira militer. Definisi: Seorang penulis Samuel.P Hangtington dalam tulisannya *The Soldier And The State*, menyimpulkan kekuasaan sipil yang ideal adalah pemberian kekuasaan secukupnya pada profesional militer yang kompeten pada kebijakan akhir yang ditentukan oleh penguasa sipil. Kepentingan kekuasaan sipil sering kali dilihat sebagai sebuah syarat yang dibutuhkan untuk terbentuknya sebuah demokrasi liberal yang sangat baik ; Penggunaan istilah ini pada analisa akademik umumnya berhubungan dengan negara barat yang diperintah oleh pejabat yang terpilih secara demokratis, Pada kenyataannya subordinasi militer dibawah kekuasaan sipil tidak hanya terjadi pada masyarakat tersebut. Contohnya terdapat pada kalimat Mao Zedong yang menyebutkan "Prinsip kita adalah partai memerintah senjata, dan senjata jangan pernah diizinkan memerintah partai", mencerminkan keunggulan partai komunis sebagai pembuat keputusan dalam teori marxisme-leninisme dan Maosime.

Perkataan Militer merupakan pengertian yang bersangkutan dengan kekuatan bersenjata. Secara kongkrit perkataan Sipil di Indonesia adalah seluruh masyarakat, sedangkan perkataan Militer berarti Tentara Nasional Indonesia, yaitu organisasi yang merupakan kekuatan bersenjata dan yang harus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Karena Sipil berarti masyarakat, maka sebenarnya Militer pun

bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu di Indonesia sebelum terpengaruh oleh pandangan Barat dipahami bahwa TNI adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Bahkan yang menjadi TNI adalah seluruh Rakyat yang sedang bertugas sebagai kekuatan bersenjata untuk membela Negara.

Karakteristik Kepemerintahan Sipil dan Militer

Eric Nordlinger dalam bukunya “Militer dalam Politik” dikemukakan ada 3 bentuk pemerintahan sipil :

1. Pemerintahan sipil Tradisional: Bentuk pemerintahan sipil ini terjadi karena tidak adanya perbedaan antara sipil dan militer, tanpa perbedaan maka tidak akan timbul konflik yang serius diantara mereka. dengan demikian tidak terjadi campur tangan militer.
2. Pemerintahan sipil Liberal: Model pemerintahan liberal didasarkan pada pemisahan para elit berkenaan keahlian dan tanggung jawab masing-masing pemegang jabatan tinggi di dalam pemerintahan. Tapi sejalan Model liberal akan menutup kemungkinan militer untuk menekuni arena dan kegiatan politik. Didalam tindakan dan pelaksanaannya, pemerintah menghargai kedudukan, kepakaran, dan netralitas pihak militer.
3. Pemerintahan sipil Serapan: Dalam sejarahnya, pemerintahan sipil ini banyak dianut oleh negara-negara barat, karena kebanyakan dari mereka berideologi liberal yang memunculkan supremasi sipil atas militer (civilian supremacy upon the military). Dalam kata lain militer adalah subordinat dari pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia yang berideologikan Pancasila, sipil dan militer adalah satu bagian, tidak ada supremasi di antara keduanya. Yang harus dimunculkan adalah bagaimana hubungan keduanya dapat menjamin kerukunan hidup rakyat Indonesia itu sendiri. Sehingga tercipta kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.

Dalam hal ini muncul karakteristik pemerintahan sipil yang berpijak atas hubungannya dengan militer, antara lain pemerintahan sipil adalah sebuah bentuk pemerintahan yang bergaya sipil, semua keputusan pemerintah dapat menjadi perintah apabila telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dan diambil keputusannya dalam suatu pemungutan suara (referendum). Dan telah mendapat pengesahan dari lembaga negara yang berwenang.

Pemerintahan militer lebih merujuk ke arah gaya pemimpin suatu organisasi/ institusi/ negara. Dimana kepemimpinan itu sendiri memiliki hubungan yang erat antara seorang dan sekelompok manusia, karena adanya kepentingan bersama; hubungan itu ditandai tingkah laku

yang tertuju dan terbimbing daripada manusia yang seorang itu. Gaya kepemimpinan pemerintahan militer ini memiliki karakteristik, sebagaimana dikemukakan Ninik Widiyanti, adalah sebagai berikut:

Dalam pemerintahan militer, untuk menggerakkan bawahannya digunakan sistem perintah yang biasa digunakan dalam ketentaraan, gerak geriknya senantiasa tergantung kepada pangkat dan jabatannya senang akan formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin keras dan kaku dari bawahannya, senang akan upacara-upacara untuk berbagai-bagai keadaan dan tidak menerima kritik dari bawahannya dan lain sebagainya.

Strategi Masyarakat Sipil Dalam Memimpin Negara Indonesia

Pada deklarasi Ciganjur ide pertama Abdurrahman Wahid tentang militer muncul, ia bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Megawati, Amien Rais dan Sri Sultan Hamengkubowono X menyatakan sikap bahwa peran militer di Indonesia harus dikurangi secara bertahap. Setelah menjadi presiden, maka cita-cita untuk melakukan reposisi militer dan supremasi sipil benar-benar mendapatkan peluang yang sangat besar. Ide besar Abdurrahman Wahid adalah bukan hanya menciptakan supremasi sipil yang tangguh, tapi bagaimana mampu menciptakan control sipil atas militer yang benar-benar ampuh. Namun perlu disadari bahwa supremasi sipil yang dimaksud bukan kemudian untuk menjatuhkan militer dari segala kewenangannya bagi sebuah aset bangsa. Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak itu, apalagi menurutnya Indonesia tidak mengenal dominasi sipil atas militer.

Dari sini bisa dimengerti bahwa ide Abdurrahman Wahid tentang supremasi sipil, reposisi militer dan peneguhan profesionalisme adalah ide-ide segar yang sesungguhnya sangat tepat diajukan ketika Indonesia barulepas dari otoritarianisme. Abdurrahman Wahid bisa melihat kapan saat yang tepat untuk melepas ide-ide itu ke luar, baik ke dalam tubuh TNI itu sendiri maupun ke publik.

Ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden menghadapi menghadapi medan yang sangat keras di Negara ini. Salah satu contoh kasus seperti aspirasi masyarakat, baik domestik maupun internasional agar ada tindakan terhadap oknum TNI yang melakukan pelanggaran HAM di masa lalu. Pelanggaran HAM di Timtim paska jajak pendapat adalah salah satu isu panas yang menjadi sorotan luas masyarakat. Aspirasi seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditanggapi. Tindakan hukum terhadap TNI saat itu adalah salah satu simbol reformasi karena di masa Soeharto kelompok ini untouchable secara hukum. Dimensi politik lain dari tindakan hukum terhadap anggota TNI terutama yang berstatus perira tinggi adalah bentuk supremasi sipil.

Bahwa tentara di era reformasi tunduk pada otoritas sipil. Dua dimensi inilah yang ditunjukkan Gus Dur dalam kasus pencopotan Jenderal Wiranto dari posisinya sebagai menteri Koordinator bidang politik dan Keamanan.

Sejak pertama kali mengutarakan niatnya pada tanggal 31 Januari 2000 di Davos, Swiss, untuk memberhentikan Jenderal Wiranto dari jabatannya sebagai Menko Polkam, baru minggu malam Presiden Abdurrahman Wahid mewujudkannya. Namun kesan kontroversial masih melekat pada keputusan tersebut. Mengingat siang sebelumnya, pada hari yang sama, Gus Dur justru mengadakan pertemuan dengan Wapres Megawati Soekarno Putri, Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Wiranto sendiri. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang disampaikan sekretaris Kabinet Mursilam Simanjatak dan konferensi pers. Kesepakatan itu, tidak ada keputusan apapun terhadap Wiranto sebelum tim baru yang dibentuk Jaksa Agung Marzuki Darusman melaporkan hasil pemeriksaannya.

Pada saat Bung Karno memimpin Republik Indonesia, terlihat jelas bahwa Republik

menolak segala bentuk yang berbau liberalisme, kapitalisme, dan imperialisme. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Konferensi Asia Afrika dan pembentukan aliansi Ganefo dan Oldefo yang membelah negara-negara berkembang/ yang masih terjajah dengan negara maju. Intinya adalah keseimbangan dunia. Perimbangan kekuatan dunia di mata Bung Karno merupakan kebangkitan negara-negara terjajah.

Strategi Militer dalam Konteks Kepemimpinan Di Indonesia

Jenderal Achmad Yani menghambat perkembangan pengaruh PKI ia melakukannya pada semua bidang dan tingkatan. Bukan saja hanya melalui lembaga politik formal, tapi juga melalui lembaga-lembaga politik lainnya. Seperti organisasi Soksi yang dipimpin oleh Suhardiman. Suhardiman mengenal Jenderal Achmad Yani pada waktu lebaran 1963 siang hari di Jalan Lembang Terusan, yang sekarang menjadi Musium Sasmita Loka. Waktu itu Suhardiman berpangkat Mayor berkesempatan berbicara dengan Jenderal Achmad Yani secara panjang lebar mengenai masalah- masalah Soksi pada khususnya, maupun masalah politik pada umumnya.

Identitas ABRI sebagai pejuang dan kemanunggalannya dengan rakyat, secara otomatis mendorong serta menjadikan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator dalam kehidupan bangsa dan Negara. Sangat relevan dengan janjinya yakni mendukung serta membela Pancasila dan UUD 1945, menjunjung Demokrasi Pancasila. Fakta dalam sejarah telah membuktikan hal itu. ABRI selalu mensejahterakan rakyat dalam

memberi motivasi untuk mendorong masyarakat melakukan partisipasi pembangunan, kemampuan mereka membantu masyarakat dalam kehidupan bernegara. Agar dapat meningkatkan kesadaran nasional demi kesuksesan pembangunan termasuk juga diperlukan suatu disiplin sosial dan disiplin nasional yang mantap.

Salah satu fenomena yang terjadi di Jakarta adalah tawuran pelajar yang tak berkesudahan telah banyak membuat orang resah. Namun setelah melihat perkembangan semakin kacau, maka Jenderal TNI AM Hedropriyono cepat mengambil langkah terobosan yaitu mendirikan “sekolah khusus” untuk siswa-siswa yang tertangkap basah terlibat tawuran. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, dia bukan hanya saja sekedar serdadu atau kaum elite TNI melainkan intelektual yang berwawasan luas.

Pada tahun 1998 menjelang sidang umum MPR Pak Harto selalu ditimpa kewajaran yakni mencari orang yang pantas untuk menjadi wapres, dalam satu tahun terakhir sejumlah “kriteria tak resmi” bahkan juga sejumlah nama berlontaran dari pejabat Negara dan petinggi partai politik sampai akademisi, aktivis LSM dan ulama. Memang tak banyak yang mampu menahan godaan untuk tak “berpolitik” di pentas Indonesia.

Kekuatan militer sebagai tulang punggung suatu Negara atau kerajaan atau pun suatu kelompok untuk menegakkan, memperluas wilayah kekuasaan atau mengontrol bawahannya. Nonsense perjuangan menegakkan kekuasaan tanpa dukungan unsur-unsur militer. Bagaimana perjuangan Trunajaya lewat militer? Oleh karena perjuangan Trunajaya terjadi pada masa keberadaan Kerajaan Mataram (1575-1755) terlebih dahulu perlu diketahui bagaimana kondisi dan struktur kemiliteran pada zaman itu. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diperlukan karena cara-cara pengerahan, kepemimpinan, strategi peperangan di medan, logistik persenjataan, penggajian antara kekuatan militer Trunajaya dan kekuatan militer Mataram tidak jauh berbeda, atau dapat dikatakan sebanding.

Satu hal yang unik dari kepemimpinan Pak SBY yakni kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian tugas, sifat ini timbul dari karir militernya dimana seorang perwira ditempa untuk selalu berhasil mencapai misi militernya. Pak SBY selalu berbicara kepada para pembantunya mengenai semboyan Kopassus: “Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas.” Namun tidak lupa juga selalu menambahkan bahwa semboyan itu harus diterapkan dalam konteks yang benar, tidak berarti menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, apalagi cara yang melanggar hukum.

Konflik yang terjadi di tubuh sipil dan militer atau bisa disebut dengan Supremasi sipil dan reposisi militer akan bisa dilakukan

manakaladi militer terdapat prinsip-prinsip profesionalisme yang baik. Prinsip profesionalisme adalah tidak membiarkan TNI selalu berada dalam jeratan politik, atau proses politisasi tas TNI itu sendiri. Mengapa demikian? Sebab selama ini TNI hanya menjadi pengabdikan kekuasaan, dan bukan pengabdikan dan masyarakat. Profesionalisme itulah, demikian Abdurrahman Wahid, satu-satunya jalan untuk menciptakan keseimbangan peran yang proporsional. Selama ini karena prinsip-prinsip profesionalisme ditinggalkan maka yang berlaku adalah prinsip politik dan berebut jabatan antara satu dan lainnya.

ABRI harus sadar akan tanggung jawab yang diembannya yakni sebagai dinamisator dan stabilisator sesuai akan peranan dan fungsinya pengabdikan terhadap keummatan dan kebangsaan. Bapak TNI Panglima Besar Jenderal Soedirman berwasiat : "Satu-satunya hak milik nasional yang masih utuh tidak berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan, adalah TNI".

Analisa

1). Bagaimanakah strategi masyarakat sipil dalam memimpin Negara Indonesia?

Sebenarnya Gus Dur sudah lama mengetahui tentang peranan militer di Indonesia sebelum beliau menjabat presiden, pada waktu itu ia masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU atau menjadi Ketua Forum Demokrasi (Fordem). Abdurrahman Wahid yang dikenal luas sebagai pembela demokrasi, pada intinya juga sepakat dengan tuntutan reformasi bahwa peran militer hanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan, dan bukan pada peran politik. Peranan Abdurrahman Wahid untuk menumbuhkan kekuatan masyarakat sipil yang berdaya di masa sebelum menjadi presiden, adalah kehendak tak langsung yang ia ungkapkan kepada peran militer terutama di masa Orde Baru. Bagi Abdurrahman Wahid, militer seharusnya menjaga tiga pilar pendukung Negara, yakni teritorial, rakyat dan pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, tidak mungkin hanya dengan kontrol sipil yang kuat saja bisa melakukan reposisi militer yang dikehendaki, namun diperlukan adanya kebijakan dari sebuah pemerintahan yang demokratis untuk menciptakan tatanan militer yang demokratis pula.

Dalam teorinya Gus Dur terkait masalah Supremasi sipil dan reposisi militer ini merupakan gagasan yang sangat bagus serta relevan dengan posisi masing-masing keduanya, hanya saja untuk melakukan rekonstruksi terhadap sistem yang ada di Indonesia harus dilakukan secara bertahap. Sebab melihat situasi kedudukan militer masih sangat kuat dan tidak mungkin langsung sekaligus merubahnya. Gagasan

cemerlang dari Presiden Abdrrahman Wahid perlu di support khususnya bagi masyarakat sipil.

2) Bagaimanakah strategi militer dalam konteks kepemimpinan di Indonesia?

Satu hal yang unik dari kepemimpinan Pak SBY yakni kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian tugas, sifat ini timbul dari karir militernya dimana seorang perwira ditempa untuk selalu berhasil mencapai mision militernya. Pak SBY selalu berbicara kepada para pembantunya mengenai semboyan Kopassus: "Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas." Namun tidak lupa juga selalu menambahkan bahwa semboyan itu harus diterapkan dalam konteks yang benar, tidak berarti menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, apalagi cara yang melanggar hukum. Selain dari itu sesuai dengan perannya sebagai abdi Negara dan bangsa. Akan lebih baik lagi jika militer mampu mengkombinasikan antara tipologi kepemimpinan sipil dan militer itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Haramain, A. Malik. 2004. Gus Dur Militer dan Politik. Yogyakarta: LKiS
- Iskandar, A. Muhaimin. 2004. Gus Dur Yang Saya Kenal Sebuah Catatan Tentang Transisi Kita. Yogyakarta: LKiS
- Zakki, H. Muhammad. 2010. Gus Dur Presiden Republik Akhirat. Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka
- Yani, Amelia. 1990. Profil Seorang Prajurit TNI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Notosusanto, Nugroho. 1991. Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Anshori Saleh, Imam. 2004. TAWURAN PELAJAR Fakta Sosial Yang Tak Berkesudahan di Jakarta. Yogyakarta: IRCiSoD

E. Banten, Politik Jawa, dan Hijrahnya Para Putra Daerah

[Oleh: Ferdian Ananta]

Ketika menyusun tulisan ini, perasaan saya sebetulnya sedang carut-marut mendengar kemenangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumi menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur Banten. Menerka-nerka apa kiranya yang akan terjadi lima tahun kedepan. Sebab, walaupun yang menjadi gubernur adalah Wahidin, tapi Andika—sebagai anak dari Ratu Atut Chosiah, gubernur dua periode yang tersandung kasus korupsi—sejatinya adalah pemegang gerbong kekuasaan di Banten. Kroni-kroni Atut memang masih kuat mengakar di setiap badan-badan pemerintahan di Banten. Sepertinya memang terlalu subjektif, tapi demikianlah mosi ketidakpercayaan ini tumbuh dengan subur mengingat Banten selama bertahun-tahun tidak mengalami kemajuan yang signifikan dibawah pimpinan Ratu Atut Chosiah, putri Chasan Sohib yang digadang-gadang sebagai orang yang berpengaruh dalam pendirian provinsi Banten.

Enam belas tahun sudah usia provinsi Banten, namun pertumbuhannya ternyata prematur bahkan cacat mental; pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masih jauh dari kata wajar. Saya selalu percaya bahwa tidak ada sebetulnya daerah miskin, yang ada hanyalah daerah salah urus, dan sejak pertama berdiri, Banten jatuh di tangan yang tak becus.

Banten sejatinya didirikan oleh orang-orang yang hebat. Tokoh-tokoh yang dipercaya masyarakat untuk membawa Banten lebih baik. Namun, setelah Banten tegak berdiri menjadi sebuah provinsi, orang-orang itu tiba-tiba menghilang dan tidak ikut andil dalam pembangunan provinsi. Banten jatuh di keluarga besar Chasan Sohib bahkan hingga hari ini. Ini tidak sekedar opini, hampir di setiap kabupaten dan kota di Banten dikuasa oleh satu garis keturunan yang sama. Orang-orang yang memiliki peranan penting dalam membangun Banten seperti tidak diberi kesempatan untuk ikut andil dalam membangun Banten. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini saya mencoba mengurai siapa dan bagaimana sebetulnya; Banten, politik jawa, dan hijrahnya para putra daerah.

Perang Politik

Sejak dahulu, orang-orang Banten adalah personal-personal yang dikenal memiliki karakter yang kuat dan keras. Ketika kolonialisasi Belanda masuk ke tanah Banten, perlawanan adalah hal yang mutlak. Sifat Wong Banten yang tidak mau jadi tamu di tanah sendiri memaksa Belanda untuk menaruh konsentrasi yang lebih dibanding daerah lain. Hal ini terbukti dengan peristiwa diruntuhkannya keranton surosoan abad ke-18.

Patut kita pertanyakan mengapa keraton lain semisal Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo masih tegak berdiri hingga kini sementara Keraton Kesultanan Banten tinggal puing-puing. Indikasinya adalah sikap Banten yang enggan mengambil sikap tunduk kepada penjajah. Tidak ada kesepakatan atau kompromi dengan para kolonial Belanda. Siapa pun penjajah harus pergi dari bumi Banten. Hal ini yang membuat Belanda mengambil cara ekstrim: jalur keras meski hasilnya adalah penghancuran keraton. Ini sejarah yang layak dibanggakan. Biar saja keraton hancur asalkan sejarah tersebut mengajarkan bagaimana caranya berjuang hingga titik penghabisan—tidak ada kompromi bagi orang-orang lalim.

Pasca kesultanan, Banten tetap menjadi sorotan Belanda. Pada awal abad ke-20, Banten diblokade oleh Pemerintah Kolonial Belanda sehingga terisolasi dengan dunia luar. Hal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan mata uang sendiri sebagai alat penukaran khusus di Banten.

Mengingat keadaan-keadaan genting dan darurat yang terjadi di Banten, menjadi hal yang wajar jika pasca kemerdekaan, rakyat Banten mengharapkan Banten dapat meningkatkan statusnya dari keresidenan menjadi provinsi dan menjadi daerah otonom yang berdiri sendiri. Terlebih ketika tahun 50-an, pemerintah memberikan status Daerah Istimewa kepada Yogyakarta, disusul tuntutan serupa dari Aceh. Maka, Banten—yang merasa istimewa karena tidak pernah menyerah terhadap Belanda—mengajukan diri ke pemerintah pusat untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat.

Banyak sekali orang yang terlibat dalam proses mewujudkan kemandirian provinsi Banten tersebut. Bahkan mungkin ratusan orang. Namun ketika provinsi ini berdiri, orang-orang yang banyak berkecimpung dalam proses ini seperti menghilang dan melepaskan diri dari Banten. Bahkan sebagian dari mereka memilih berhijrah ke daerah lain, dan menjadi orang yang cukup berpengaruh pada daerah tersebut. Mirisnya, Banten saat ini seolah-olah dikuasai oleh satu keluarga yang mengaku sebagai *founder* Banten.

Klaim-klaim mengenai pendiri utama Banten yang dilakukan memang berhasil dan keberhasilan tersebut tidak lain tidak bukan lantaran begitu banyak yang memilih melarikan diri dari arus keras perpolitikan Banten di awal-awal berdirinya. Lantaran klaim yang dilakukan, banyak masyarakat yang mengamini bahwa memang satu kelompok itu saja yang paling berjasa mendirikan provinsi Banten.

Pada mulanya, ada beberapa kelompok yang tidak sepakat dengan pendirian provinsi Banten, sebab beberapa kelompok tersebut mempunyai tender dengan Jawa Barat yang menguntungkan secara

pribadi. Namun, ketika keinginan masyarakat untuk menjadikan Banten sebagai provinsi tidak terbendung lagi, sekelompok orang itu pun ikut berkecimpung. Mereka mempunyai sumber ekonomi yang besar sehingga mampu masuk dan mempengaruhi masyarakat Banten, terutama kalangan jawara. Lalu memulai hegemoni.

Penguasa Banten hari ini, bukan berarti lantaran yang paling berjasa atas berdirinya Banten, bahkan mungkin lebih serakah. Masalahnya hanya pada sifat. Para pendiri Banten yang lain (yang sudah tidak bergerak sebagaimana perjuangan awal) lebih *low profile*, dalam artian mereka lebih tulus dalam memperjuangkan kemandirian Banten. Mereka tidak berambisi untuk mengajukan keluarganya untuk menjadi pemimpin. Sementara kelompok penguasa Banten sekarang lebih *high profile*. Bahkan ada statement yang terkenal sekali di kalangan masyarakat Banten yang dikeluarkan oleh kelompok yang sekarang berkuasa; “*Urang anu nyiaran lauk, urang anu meuleum, urang anu maes, moal eunya manehna anu hakan* (saya yang mencari ikan, saya yang membakar, saya yang memepes, masa iya kalian yang makan)”, jelas ini adalah klaimisasi bahwa hanya keluarga dialah yang berjasa, padahal, banyak orang yang juga ikut dalam pencarian ikan tersebut.

Inilah mungkin yang menyebabkan para pendiri Banten tidak lagi berkecimpung dalam pembenahan provinsi Banten. Sebagian besar mereka memilih kembali kepada rutinitas seperti sebelumnya. Bahkan ada juga yang hijrah ke luar Banten. Mereka enggan berlumpur-lumpur dalam arus perpolitikan Banten.

Di sisi lain, sosialisasi mengenai sejarah Banten pada waktu itu tidak begitu masif. Sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu bagaimana Banten berdiri. Akibatnya, ketidaktahuan rakyat dijadikan tanah empuk untuk menanam cerita bohong, klaim-klaim, cari nama, dan ajang mengaku-akukan diri sebagai pendiri Banten paling berpengaruh sehingga sangat layak menguasai Banten dengan cara yang baik maupun dengan cara paling buruk sekali pun. Rakyat tidak boleh mengajukan interupsi apa lagi protes keras. Ini persoalan hutang budi rakyat kepada pendiri Banten dan kerja keras pendiri Banten harus dibayar dengan kemandirian, begitu sepertinya paham yang dianut. Sehingga tidak jadi soal penguasa makin kaya raya dan rakyat kian jelata, namanya juga hutang budi.

Selebihnya, rakyat hanya tahu bahwa Banten dipimpin oleh Hakamuddin Djamal sebagai pemegang pemerintahan sementara, yang kemudian digantikan oleh Djoko Munandar melalui pemilihan yang disandungkan dengan kasus korupsi untuk menaikkan sang Ratu Atut Chosiyah sebagai pelaksana tugas ke gubernuran, kemudian selama dua periode terpilih sebagai gubernur Banten yang menarik perhatian publik. Tidak saja di Banten, di seluruh Indonesia ia begitu dikenal, terlebih

setelah ia diminta menjadi penghuni kamar pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu saja masyarakat belum tahu pasti posisi benar dan salah dalam persoalan itu, sama halnya dengan kasus Djoko Munandar yang dibiarkan menguap begitu saja.

Meski demikian, ada fenomena menarik yang dapat ditarik mengenai perkara tersebut, para jawara berdiri di garda depan untuk membela mati-matian dan menyatakan bahwa Ratu Atut tidak bersalah. Tuntutannya tentu saja meminta pembebasan. Kehadiran jawara ini menarik untuk diperhatikan. Bukan memperhatikan benar atau tidaknya tuntutan yang diajukan serta pembelaan yang dilakukan sudah pada porsinya atau tidak. Ini mengenai keberadaan jawara di Banten serta paham khalayak dalam menanggapi peranannya di tanah kasultanan Islam ini.

Pengertian jawara di Banten masa kini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan kanuragan yang hebat, memiliki ilmu hijib yang mumpuni, dan tidak mudah dikalahkan. Lagi, jawara dikesankan pada tindakan yang cenderung semaunya sendiri, lantaran tidak banyak orang yang berani melawan, mengingat kemampuan bela diri yang di atas rata-rata. Selebihnya, ciri fisik yang dapat dilihat dari jawara adalah pakaian serba hitam (tidak diketahui, apakah memang pakaian hitam sudah diidentikkan kepada jawara sejak dahulu kala atau berkembang di masa modern saja), sarung diselempangkan di punggung, dan tidak ketinggalan golok diselipkan di sabuk hijau yang besar di pinggangnya. Dilihat dari penilaian masyarakat umum, jawara masa kini tidak dinilai sebagai sekelompok orang yang arif lagi bijaksana, malah sebaliknya. Tidak heran, jika kemudian konotasi masyarakat luas mengenai kejawara-an Banten menjadi tendensius pada kekerasan dan gerakan radikal.

Di luar itu, masih ada (untuk tidak mengatakan banyak) masyarakat yang menjunjung tinggi jawara dan menganggap tindakan jawara adalah benar, tanpa melihat lebih dalam lagi persoalan yang sebenarnya terjadi. Paham sempit mengenai jawara di masyarakat semacam itu, tak pelak membuat satu kepatuhan buta terhadap tanduk para jawara. Inilah kemudian yang menyebabkan Banten masih dalam keterpurukan. Karena para penguasa ternyata menggunakan jawara sebagai tunggangan kekuasaan. Di permukaan, konstelasi politik, peran 'jawara' kekinian ini memang tidak terlalu nampak. Tapi di tataran bawah, ia memiliki peranan penting dalam mem-pressure masyarakat untuk tetap dalam satu komando membela penguasa.

Ini patut disayangkan, sebab jawara dalam pengertian yang sebenarnya tidaklah demikian. Dalam beberapa literatur dan juga beberapa budayawan Banten mengatakan bahwa jawara sebetulnya adalah dia yang tidak hanya mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi,

melainkan juga ilmu agama dan akhlak yang luas. Sehingga segala tindak-tanduknya hanya didasarkan pada kebenaran.

Terus terang kemenangan Andika semakin menegaskan bahwa Banten masih tetap di tangan yang sama walaupun sang ratu masih berada dalam penjara. Politik dinasti di Banten semakin mengekal. Ketika mendengar berita ini, saya masih di Bogor dalam rangka memperbaiki diri sebagai bekal untuk ikut serta memperbaiki Banten lebih baik. Tubuh saya terasa lemas, saya melihat jalan untuk memperbaiki Banten semakin terjal. Saya membayangkan bagaimana hegemoni politik akan berlanjut; para cendekiawan, aktivis, budayawan akan digiring untuk mendukung kekuasaan. Jika tidak, tentu konsekuensinya adalah akan diasingkan. Seperti yang sudah-sudah.

Menuju Banten Bangkit

Walaupun demikian, saya melihat ada geliat generasi baru Banten yang mulai membuat gerakan-gerakan positif untuk mengembalikan Banten pada tradisi yang sebenar-benarnya, meluruskan yang bengkok yang selama ini terus dianggap sebagai kebenaran. Beberapa komunitas penulis di Banten menyuarakan jargon “Sarungkan golokmu, asah penamu”. Ada upaya-upaya mengembalikan pemahaman bahwa tradisi di Banten bukanlah tradisi kekerasan. Sepengalaman saya berjumpa dengan kawan-kawan dari daerah lain, ketika saya mengenalkan diri sebagai orang Banten, maka yang ada dalam benak mereka hanyalah debu, pelet, santet, dan hal-hal lain yang berbau mistis dan klenik. Terus terang dalam hati kecil saya kecewa. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya pengertian tentang Banten berbanding terbalik dengan apa yang mereka pikirkan.

Kita mestinya melihat Banten lebih utuh melalui para pendahulu yang telah membuat garis terang bagaimana seharusnya Wong Banten bersikap; Syeikh Nawawi Tanara, imam besar Masjidilharom yang menulis ratusan kitab kuning dan hingga hari ini masih dijadikan rujukan di pesantren-pesantren bahkan berbagai universitas di dunia. Tidak hanya sebagai penulis, semasa hidupnya di Makkah ia mengorganisir ulama-ulama yang pergi haji untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Begitu juga Kh. Arsyad Thowil, setelah pulang dari Mekah ia melakukan gerakan sosial di Banten. Akibat perlawanannya tersebut ia kemudian dibuang ke Manado. Kh. Brigjen Syam'un, Brigadir Jendral Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan juga residen pertama provinsi Banten peranannya dalam pertahanan nasional tidak bisa diragukan lagi. Selain itu, ia juga merupakan penggagas berdirinya Al-Khairiyah, salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di Indonesia. Syafrudin Prawiranegara, Presiden Darurat Republik Indonesia (PDRI), negarawan

yang memberikan kontribusi besar terhadap pertahanan dan kemajuan republik Indonesia, dan masih banyak lagi. Mereka semua berasal dari Banten. Sekali lagi, mereka berasal dari Banten. Maka, stigma tentang Banten yang *dark magic* harus dicabut dari benak orang-orang Banten.

Oleh sebab itu, sebagai generasi baru Banten, kita tak semestinya lari dari hiruk-pikuk perpolitikan Banten. Yang Banten butuhkan hari ini adalah para pemuda yang siap pasang badan untuk mengawal Banten ke arah yang lebih cerah. Persoalan Banten hari ini; instabilitas politik, kesenjangan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan adalah persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan. Mungkin benar kita tidak punya kebijakan untuk melakukan itu, tapi kita bisa menekan atau bahkan memukul penguasa agar segera menciptakan keseimbangan di Banten. Alat pukul itu adalah ilmu dan wawasan yang luas. Tidak cukup dengan itu, kita juga butuh keberanian, belajar berani-berani belajar. Menjadi jawara tidak harus mengacungkan golok di setiap waktu dan kesempatan. Tapi jawara Banten yang sesungguhnya adalah dia yang mengorbankan segenap hidupnya untuk kepentingan Banten.

Ada filosofi menarik dalam Babad Banten; Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten yang ditulis oleh Hoesein Djajadiningrat yang merupakan kronik jawa tertua dipandang dari sudut historis dan historiografis, yakni ditulis pada paruh kedua abad ke-17, sekitar tahun 1662 atau 1663. Pada pupuh 22 terdapat teks "*gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis*" yang berarti "membangun kota dan benteng pertahanan dari bata dan karang". Kalimat "Gawe kuta baluwarti" tentu bukan sekadar berarti membangun kota dan benteng pertahanan, namun memiliki makna sebagai sebuah kebudayaan (culture) atau peradaban (civilization). Sedangkan "bata kalawan kawis" perlu ditafsir tidak sebatas sebagai bata dan karang dalam artian denotatif. "Bata" adalah majas bagi unsur buatan hasil kreativitas tangan manusia yang melibatkan materi-materi lain beserta berbagai peralatannya. "Kawis" adalah majas bagi unsur asli yang kokoh. Kalimat ini merupakan sebuah nasihat dari para pendiri kerajaan Banten bahwa dalam membangun sebuah peradaban yang gemilang, kita perlu "Bata", kreativitas, kecerdasan, dan keterampilan dan ketelatenan. Namun di sisi lain, kita juga butuh "Kawis" sesuatu yang asli, fundamental, yang harus kita pertahankan betul-betul, "kawis" itu adalah karakter dan prinsip orang Banten yang tidak pernah kompromi pada kedzoliman.

Daftar Pustaka

Dinasti Banten, Penulis Ade Irawan, dkk. Penerbit Intrans Publishing

Wahai Putra-putri Banten, Siapakah dia? Penulis, Jusuf Efendi

Babad Banten, penulis, Hussein Djayadiningrat, penerbit Djambatan Banten Bangkit 2, Toto ST Radik dkk, Penerbit Gong Publishing Majalah Ruang Rekosntruksi Edisi 11 tahun 2013.

F. Kabupaten Bima dalam Bayang-Bayang Otonomi Daerah

[Oleh : Faisyal]

Pemberlakuan otonomi daerah melalui undang-undang No. 22 tahun 1999 sampai dengan perubahannya yang terakhir menjadi undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, membuat mandat besar pembangunan daerah terletak pada pundak pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui dasar hukum ini, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing.

Tulisan ini akan membahas praktik otonomi daerah dengan fokus pada salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Kabupaten Bima. Menyebut daerah ini, ingatan kita mengarah pada simbol kultural yang diasosiasikan dengan 'Kuda Bima', madu, bawang merah hingga susu kuda liar. Sekilas nama 'Bima' merujuk pada sosok legenda 'Sang Bima', semacam icon kosmos Tanah Bima - yang mencerminkan keperkasaan, namun sayangnya realitas kekinian terlanjur mendapat stigma sebagai daerah 'panas', bukan saja karena alamnya yang panas, tapi penghuninya juga punya temperamen tinggi, dan keras. Media menyoroti daerah ini sebagai zona merah, dari konflik komunal hingga suhu politik yang cepat mendidih hingga isu radikalisme.

Ada apa sebenarnya yang terjadi? Sejarah semestinya menjadi acuan, dulu Bima dikenal - apa yang disebut oleh sejarawan barat Peter Carey - sebagai daerah kesultanan Islam yang dikenal kesohor di kawasan Timur Indonesia. Dalam perilaku sosio-kultur pun, masyarakatnya dikenal religius bahkan fanatik. Sekian paradoks melekat pada daerah ini. Suku Bima suka merantau, ulet dan pekerja keras serta menjunjung harga diri yang tinggi.

Di pentas dunia, adalah Syekh Abdul Gani Al-Bimawi yang merupakan guru para ulama nusantara di masjidil haram, diantara muridnya yang kesohor adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Di pentas nasional, tercatat tak sedikit orang Bima yang bergulat di kancah kepemimpinan khusus di ibukota Jakarta, sebut saja Prof. Hamdan Zoelva, (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), Prof. Farouq Muhammad (wakil ketua DPD RI), Prof. Umar Nimran (Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya), Prof. Syamsuddin Haris (pengamat politik LIPI), Rifai (Ilmuwan Nuklir BATAN).

Di era Orde Baru pula populer istilah BABIKUNING (Batak, Bima, Kuningan) yang menunjukkan mobilitas vertikal ketiga etnis itu

dalam jajaran struktur birokrasi DKI Jakarta. Dengan gemilangnya para Putra Daerah di pentas nasional, tapi belum mampu dimanfaatkan ilmunya untuk kepentingan pembangunan daerah. Al-hasil, daerah Kabupaten Bima masih jalan di tempat dari segi gegap gempita pembangunan, terutama di era desentralisasi dan otonomi daerah.

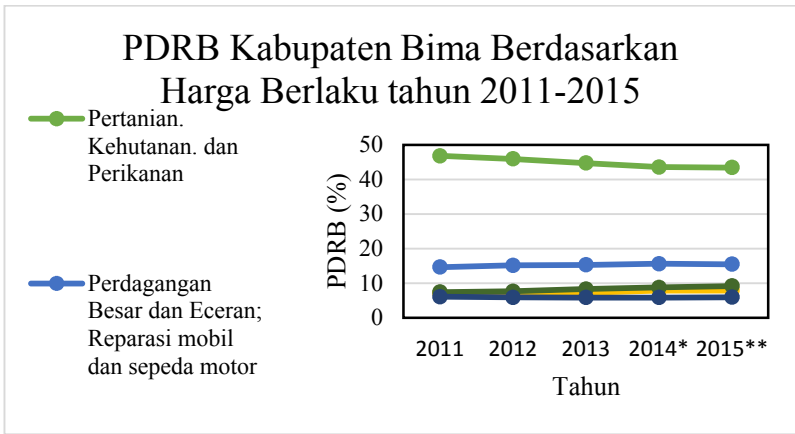
Kabupaten Bima sebagai salah satu daerah otonom, belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan kewenangan yang diberikan oleh otonomi daerah. Kenyataan ini, terlihat dengan adanya perbedaan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima tahun 2011-2031 dengan penerapannya di daerah target. Salah satu contohnya adalah rencana pengembangan wilayah pesisir pantai Desa Soro, Kecamatan Lambu sebagai daerah pelestarian hutan bakau tetapi nyatanya daerah tersebut juga dikembangkan menjadi industri tambak udang dan pariwisata pantai. Selain itu, penetapan Kecamatan Lambu sebagai salah satu daerah petambangan emas sepertinya tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, padahal jelas dalam pasal 71 RTRW kabupaten Bima, masyarakat mempunyai peran dalam proses perencanaan dan penyusunan RTRW. Akibatnya terjadinya penolakan besar-besaran oleh masyarakat lambu yang berujung pada pembakaran kantor bupati pada Februari 2012.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1994). Secara ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1994). Terdapat tiga objek pembangunan secara umum yaitu pembangunan ekonomi, manusia dan infrastruktur daerah. Berdasarkan esensi yang terkandung dalam konsep pembangunan suatu daerah maka sangat perlu untuk melihat dan meninjau seberapa jauh keberhasilan dari pembangunan Kabupaten Bima berdasarkan data-data yang tersedia serta mengkaitkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan daerah sebagai objek pembangunan.

Sektor Usaha Paling Berkontribusi

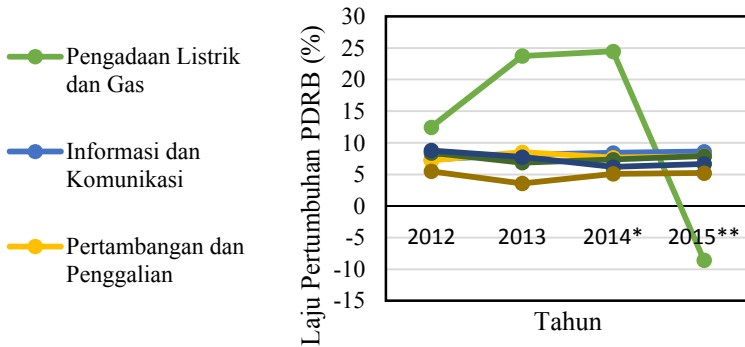
Setiap daerah memiliki potensi daerah masing-masing dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Potensi tersebut yang akan menjadi prioritas utama pembangunan. Tujuan pembangunan Kabupaten Bima tertuang dalam RTRW 2011-2031 yaitu mewujudkan Kabupaten Bima sebagai kawasan pengembangan agrobisnis berbasis pertanian, peternakan, agroindustri berbasis perikanan, dan wisata bahari. Merujuk pada tujuan ini, maka arah pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung seharusnya ditujukan pada 4 sektor tersebut.

Untuk melihat sejauh mana pengaruh pembangunan yang telah dilakukan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Bima yaitu menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat dibedakan menjadi 2 yaitu PDRB berdasarkan harga yang berlaku yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan PDRB berdasarkan harga konstan yang digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, maka PDRB menurut 5 lapangan usaha paling berkontribusi dan memiliki laju pertumbuhan tertinggi (khusus pertanian, kehutanan, dan perikanan pada grafik kedua dimasukkan sebagai perbandingan) ditunjukkan pada gambar 1.



(a) PDRB Kabupaten Bima Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2011-2015

PDRB Kabupaten Bima Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2012-2015



(b) PDRB Kabupaten Bima Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2012-2015

**angka sementara, **angka sangat sementara*

Gambar 1 bagian (a) menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha yang paling berkontribusi dan menjadi pusat penghasil masyarakat Kabupaten Bima dengan angka kontribusi hampir mencapai 50% setiap tahunnya. Namun dari tahun 2011-2015 kontribusi sektor tersebut menunjukkan penurunan 1% setiap tahunnya. Kemudian lapangan usaha lain yang berkontribusi yaitu perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 15% setiap tahunnya dan menunjukkan sedikit kenaikan dari tahun ke tahun. Gambar 1 bagian (b) memperlihatkan bahwa lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah pengadaan listrik dan gas dengan laju pertumbuhan mencapai 24.5% di tahun 2014 tetapi pada tahun 2015 mengalami kontraksi. Kemudian di urutan ke-2 adalah sektor informasi dan komunikasi yang mengalami laju pertumbuhan sebesar 8.5% di tahun 2015. Namun, yang menarik dalam grafik tersebut adalah laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi sektor paling berkontribusi hanya rata-rata 4.85% dan angka ini berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima yaitu 5.70% (Publikasi BPS Kabupten Bima, 2016).

Data-data tersebut menjelaskan bahwa sektor yang menjadi prioritas dalam RTRW Kabupaten Bima 2011-2031 belum menunjukkan laju pertumbuhan yang sesuai dengan arah pembangunan. Bahkan memperlihatkan penurunan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat setiap tahunnya. Kenyataan ini sesuai dengan keluhan dari para petani yang selalu mempertanyakan penurunan harga jual hasil

pertanian pasca panen. Contohnya, harga bawang merah setiap panen selalu menurun diangka ± 1 juta rupiah per 100 Kg tetapi harga bibit mencapai ± 4 juta rupiah per 100 Kg. Kemudian ditambah dengan biaya perawatan yang semakin mahal seperti pestisida, pupuk, dan biaya operasional lainnya. Pemerintah seharusnya bisa mengontrol harga pasar pasca panen apalagi pada saat panen raya yang membuat harga bawang berada pada titik terendah. Selain itu, perlu dipertanyakan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan sektor prioritas yang menjadi tujuan dari RTRW Kabupaten Bima.

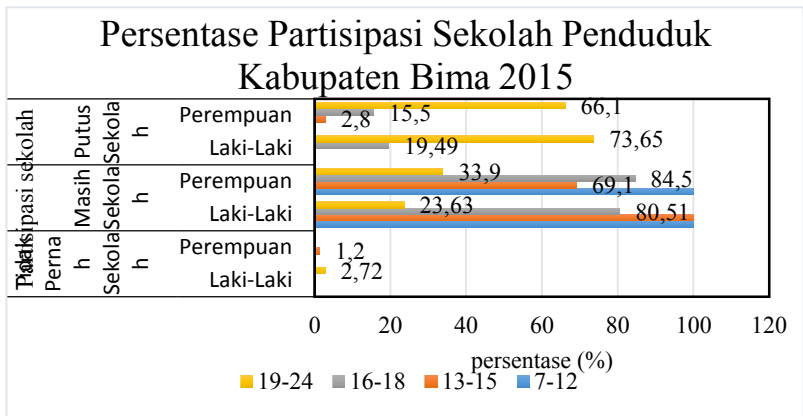
Kriminalitas dan Pendidikan

Pernyataan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH mengenai Bima sebagai daerah yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di Propinsi Nusa Tenggara (Bimakini.com, 2017) patut menjadi perhatian semua masyarakat Bima baik yang sedang berada di luar Bima maupun yang sedang di Bima. Berita mengenai pencurian motor, pengedaran tramadol, pembacokan, pelecehan seksual bahkan tawuran antar kampung sudah tidak asing lagi ditemui di media informasi baik lokal Bima maupun Nasional. Penyelesaian masalah kriminalitas di Bima yang cenderung meningkat menjadi tugas bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Penelitian mengenai konflik antar kampung di Bima sudah beberapa kali dilakukan. Hasil penelitian Mulyadin Permana (2016) menyatakan bahwa konflik menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Bima yang lahir dari kebiasaan dan pengalaman turun temurun. Dengan kata lain, konflik dan tawuran adalah buah dari struktur yang ditransformasikan melalui *life experience* masyarakat Bima. Kesejarahan konflik di Bima berangkat dari semangat perjuangan masyarakat dalam perang melawan penjajah seperti Perang Ngali, Perang Rasa Nggaro, Perang Dena, Perang Donggo dan lain-lain. Sejarah itu menjadi ingatan kolektif bagi masyarakat Bima sebagai dasar keberanian dan superioritas keperkasaan yang melekat pada kampung mereka. Kuatnya identitas kampung tidak hanya terjadi karena kesamaan pola pikir, pengalaman dan rasa persaudaraan sekampung, tetapi identitas itu hadir dan direproduksi ketika mendapatkan ancaman dari identitas kampung lain. Penelitian bersama yang dilakukan oleh kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat dan Universitas Mataram (2010) menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi sering kali karena penanganan pemicu (*trigger*) yang lambat diantisipasi oleh aparat kepolisian karena terpaku oleh mekanisme normatif, tidak adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan TNI. Pemerintah cenderung bertindak seperti pemadam kebakaran namun tidak menyelesaikan akar masalah

dari konflik tersebut, bahkan di beberapa lokasi cenderung ada proses pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah karena masalah politik.

Pada kasus kriminal lain, seperti penggunaan tramadol maupun pencurian motor di Kabupaten Bima didominasi oleh usia muda. Masa di mana para generasi masa depan ini seharusnya mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya. Pergaulan yang kurang sehat dan asupan pendidikan yang kurang berkualitas tentu menjadi faktor penting dalam timbulnya fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat seperti ini. Perubahan jaman dan modernisasi menyebabkan nilai-nilai keagamaan dalam kebiasaan anak-anak Bima yang dulunya berbondong-bondong pergi mengaji sudah tidak lagi terlihat di masa sekarang. Kebiasaan ini berganti dengan kegiatan berkumpul di pinggir jalan desa yang membuat pemuda mudah terpengaruh pergaulan satu sama lain. Selain itu, angka putus sekolah masih cukup tinggi di Kabupaten Bima seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, 2016).



Gambar 3. Persentase Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Bima

Gambar 3 menunjukkan bahwa pada usia 13-15 tahun (masa SMP) sebanyak 2.8% perempuan yang putus sekolah. Persentase ini meningkat pada umur 16-18 tahun (masa SMA), 15.5% perempuan tidak melanjutkan sekolah dan 19.49% laki-laki putus sekolah. Angka tertinggi terjadi pada setelah SMA atau usia 19-24 tahun, 66.1% perempuan tidak melanjutkan sekolah dan 73.65% laki-laki juga tidak melanjutkan sekolah.

Berkaca pada masalah ini, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap para generasi muda Bima supaya mampu mendeteksi akar permasalahan. Pembangunan kualitas pemuda Bima merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan pemerintah. Optimalisasi fungsi konseling di sekolah dan adanya kelompok masyarakat konseling

bisa menjadi solusi dalam penanganan psikologis pemuda untuk mencegah dan mengurangi perilaku menyimpang. Penanaman kembali nilai-nilai kearifan lokal Bima, penanaman kembali program magrib mengaji dan maksimalisasi peran orang tua sebagai pintu pendidikan pertama anak sangat dibutuhkan dalam menjaga pergaulan para pemuda Bima.

Komunitas dan Industri Kreatif

Meningkatnya jumlah tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Kabupaten Bima pada tingkat universitas berpengaruh pada kesadaran dan kepedulian masyarakat kepada sesama manusia, keadaan alam dan pembangunan daerah. Sehingga muncul dan terbentuk banyak komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat *Non Profit Oriented* (NGO) pada bidang-bidang yang berbeda namun mempunyai kesatuan tujuan dalam pembangunan daerah. Salah satu komunitas yang sangat memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan daerah Bima yaitu Komunitas Babuju. Komunitas yang awalnya sebagai penggiat kajian sosial, budaya Bima dan intens dalam analisis serta investigasi, advokasi budaya dan konflik, kini merambah dunia *entrepreneur* dengan mengembangkan berbagai macam produk dari setiap daerah di Kabupaten maupun Kota Bima melalui kelompok tani atau ternak masyarakat.

Usaha yang digagas adalah berbasis masyarakat. Secara tidak langsung kegiatan-kegiatan seperti ini, akan berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Beberapa produk yang sudah dihasilkan adalah *Tambora Redstone Coffee* (TRC) untuk meningkatkan nilai ekonomis dari hasil kopi dilereng gunung Tambora, budidaya Lele dan Itik di kecamatan Monta, budidaya bibit pepaya jenis California bahkan yang terbaru adalah budidaya cabe di Kecamatan Ambalawi. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap sektor industri kreatif sebagai salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan kualitas ekonomi. Memacu masyarakat menghasilkan beberapa produk asli Bima yang mulai dikenal masyarakat luas seperti Susu Kuda Liar yang sudah dikemas dalam botol yang lebih menarik, sarung tenun khas Bima, bahkan industri-industri makanan dan minuman sudah lebih modern dan dikemas dengan menarik.

Tumbuhnya sektor industri kreatif menjadi harapan besar bagi masyarakat Bima untuk peningkatan ekonomi. Sektor prioritas yang menjadi tujuan dari RTRW 2011-2031 yaitu agrobisnis berbasis pertanian, peternakan, agroindustri berbasis perikanan, dan wisata bahari diharapkan cepat dirambah oleh industri kreatif. Dengan begitu, hasil panen dari masyarakat akan bisa dijual lebih tinggi dalam bentuk

barang setengah jadi maupun barang jadi daripada dijual dalam kondisi mentah. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu mendistribusikan dan mempromosikan produk-produk asli daerah sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Mampukah Kabupaten Bima Menjawab Otonomi Daerah ?

Berkaca pada data dan fakta mengenai pembangunan daerah, Kabupaten Bima masih berada dalam bayang-bayang otonomi daerah. Rasanya terlalu berlebihan jika mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bima sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai daerah otonom. Apalagi pada pemerintahan baru yang sudah berjalan selama satu tahun ini masih belum optimal prestasinya, walaupun di sisi lain ada juga gebrakan yang perlu diapresiasi. Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Bima mesti merujuk kembali pada Visi BIMA RAMAH (Religius, Aman, Makmur dan Handal) yang menjadi semangat perjuangan agar diimplementasikan Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. H. Dahlan M. Noer ke dalam agenda konkrit, bukan hanya sekadar wacana. Bima masih mendapat stigma sebagai *zona merah* dengan tindak kriminalitas, terorisme, dan tawuran antar warga yang masih saja terjadi.

Selanjutnya, menjadi tugas bersama antara pemerintah Kabupaten Bima dan masyarakat dalam membangun daerah. Urusan politik praktis dan kepentingan golongan sebaiknya dikesampingkan terlebih dahulu untuk mengoptimalkan kinerja dan mempercepat pencapaian tujuan yang sudah di gagas. Keterlibatan kaum akademisi, profesional, komunitas, pengusaha, dan peneliti sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah serta pendorong terciptanya inovasi dalam meningkatkan mutu dan efisiensi hasil pertanian dan sektor unggulan lainnya. Pemerintah harus lebih terbuka dengan saran dan masukan yang membangun dari semua elemen masyarakat Bima dan tidak menganggap itu sebagai ancaman politik. "*Katada pu rawi ma tedi, katedi pu rawi ma tada*".

Daftar Bacaan

Perda No.9 tahun 2011 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima 2011-2031.*

Kartasmita, Ginanjar. 1994. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang.* Jakarta .PT Gelora Aksara Pratama.

Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro.* Jakarta. Rajawali Pers.

- Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bima Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*.
- Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. 2016. *Kabupaten Bima Dalam Angka 2016*.
- Fauzi, Yuliyanna. 2016. *BPS: Jumlah pengangguran di Indonesia Menciut 530 Ribu Orang*.
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161107152144-92-170923/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-menciut-530-ribu-orang/>. Diakses pada 16 April 2017.
- Bimakini.com. 2017. *Kapolda NTB: Bima Tertinggi Kasus Kriminal*.
<http://www.bimakini.com/2017/02/kapolda-ntb-bima-tertinggi-kasus-kriminal/>. Diakses 16 April 2017.
- Permana, Mulyadin. 2016. *Konflik Sosial Dalam Kekerabatan: Kajian Antropologi Terhadap Tawuran Antar Kampung di Bima Nusa Tenggara Barat*. Thesis Departemen Antropologi, FISIP-UI
- AntaraNTB.com. 2010. *POLDA-UNRAM Umumkan Hasil Penelitian Konflik Komunal*.
<http://www.antarantb.com/berita/10913/polda-unram-umumkan-hasil-penelitian-konflik-komunal>. Diakses 16 April 2017.

G. Saat Indonesia Timur Teriak ‘Merdeka’

[Oleh: Muh. Syainul Arifin Tora]

Merdeka???Iya Merdeka!!!

“Dahulu merdeka adalah teriakan Bangsa Indonesia untuk mengusir para penjajah Negeri ini, dan kini merdeka kembali diteriakkan untuk meminta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Anak Tiri Bangsa

“Saat Indonesia Barat terus berkembang justru Kemiskinan dan ketertinggalan di Indonesia Timur terus terjadi”

Bukan tanpa alasan, Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar negara dan juga hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga dan penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa fakta menunjukkan bahwa implementasi isi Pancasila dan UUD 1945 tidak sesuai harapan bangsa Indonesia khususnya di wilayah timur. Situasi demikian seolah bukan jadi persoalan besar bagi pemerintah sejak kemerdekaan sampai sekarang ini, tanpa disadari bahwa kita telah berdosa terhadap Pancasila dan UUD1945 sebagai dasar negara yang mengikat semua elemen bangsa.

“Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”. Merupakan kutipan naskah Undang-Undang Dasar 1945 (alinea ke-1) yang sampai sekarang ini masih perlu dievaluasi tentang implementasi kepada rakyat Indonesia secara umum. Uraian tersebut adalah naskah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dan menentang penjajahan juga menjelaskan tentang kemerdekaan yang menjadi harga mati untuk diperjuangkan. Alinea ini juga menjelaskan “bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, hal demikian cukup mempertegas bahwa penderitaan bangsa Indonesia tidak boleh lagi terjadi seperti saat sebelum kemerdekaan. Selanjutnya, bagaimana cita-cita bangsa setelah meraih kemerdekaan tahun 1945 ingin melindungi segenap rakyat Indonesia di semua wilayah dari semua aspek agar lagi terjadi kekerasan, diskriminatif, perbudakan seperti dijamin penjajahan.

“Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” berikut juga merupakan kutipan dalam UUD 1945 (alinea ke-2) yang kemudian diartikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dari segala jenis pendindasan, bangsa yang memiliki persatuan untuk kesejahteraan rakyat, bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil dan makmur. Namun tanpa disadari bahwa penindasan terus terjadi untuk beberapa wilayah yang tidak mendapatkan kesejahteraan, keadilan dan

kemakmuran terkhusus di Indonesia bagian timur. Hal di atas merupakan sebagian dari kutipan naskah UUD 1945 yang sekarang ini perlu dilakukan perlakuan secara merata diseluruh wilayah Indonesia untuk menghindari kesenjangan sosial antar daerah demi terwujudnya bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Selanjutnya dalam Pancasila terdapat kutipan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ” merupakan bagian dari bagian ke-4 dari isi Pancasila yang menjelaskan bagaimana bangsa ini selalu dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan. Tidak ada perbedaan perlakuan, dalam pancasila mengharapkan Peminpin yang hikmat dan bijaksana yang bisa membangun negeri dari sabang sampai merauke. Namun saat ini kemiskinan terus terjadi, minimnya fasilitas publik dan tidak adanya aliran listrik di beberapa wilayah timur terus terjadi sejak pasca kemerdekaan sampai sekarang ini. Dimana pemimpin yang hikmat dan bijaksana??? Sekiranya 72 tahun kemerdekaan persoalan – persoalan demikian sudah lama terselesaikan.

Terakhir dalam naskah Pancasila menjelaskan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hal ini memperkuat penjelasan tentang kesetaraan perlakuan kepada setiap warga negara dari sabang sampai merauke, timur sampai kebarat dan selatan sampai ke utara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, kemiskinan dan keteringgalan menjadi alasan utama mengapa sebagian wilayah merasa diperlakukan berbeda. Beberapa wilayah di wilayah barat semakin berkembang sementara di wilayah timur terus menerus merasakan ketertinggalan.

Anak tiri bangsa merupakan spontanitas ungkapan yang diekspresikan dengan melihat kondisi bangsa yang terus terjadi dari masa kemasa, sejak pasca kemerdekaan 1945 sampai detik ini, sebagian besar wilayah Indonesia Timur belum merasakan kemerdekaan, Mengapa??? karena implementasi Pancasila dan UUD 1945 belum sepenuhnya dirasakan ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan Infrastruktur dan angka kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang di hadapi oleh Indonesia secara umum terkhusus di wilayah Indonesia Timur. Marilah kita resapi bersama tentang bagaimana kutipan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang kini menjadi pertanyaan untuk Indonesia!!!

- Sesungguhnya kemerdekaan itu iyalah hak segala bangsa???
- ...Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur...???
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksana...???

- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia???

Dalam kondisi sekarang ini merdeka bukan lagi diartikan lepas dari penjajahan namun diartikan lepas dari masalah hidup yang terus terjadi diseluruh wilayah nusantara. Hal diatas adalah subtansial dari kalimat yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 dan sekarang menjadi pertanyaan besar tentang bagaimana hasil pelaksanaannya, benar bahwa kemerdekaan itu iyalah hak segala bangsa, termaksud Indonesia!!! dan juga bahwa segala jenis penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena bertantangan dengan prikeமானusiaan dan prikeadilan. Seharusnya hal demikian menjadi dasar utama NKRI memperlakukan rakyatnya agar semua merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Selain itu terdapat kutipan “...negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” kalimat ini seharusnya mengetuk hati para pemimpin negeri ini untuk melaksanakan tugas negara dengan sebenar-benarnya sesuai dengan amanah demi “keadilan sosial bagi seluruh Indonesia”. Para proklamator bangsa yang merancang Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara ingin menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita yang sangat mulia namun entah apa yang saat ini terjadi??? masih juga terjadi ketidakadilan di bidang pembangunan yang mengakibatkan besarnya jumlah kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut adalah presentase angka kemiskinan di beberapa provinsi.

Tabel Persentase angka kemiskinan :

| No | Provinsi | Jumlah 2015 (%) | | Jumlah 2016 (%) | | Ket. |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------|
| | | Semester I | Semester II | Semester I | Semester II | |
| 1 | Jawa Barat | | 9,57 | 8,95 | 8,77 | Barat |
| 2 | Jawa Timur | | 12,28 | 12,05 | 11,85 | Barat |
| 3 | Jawa Tengah | | 13,32 | 13,27 | 13,19 | Barat |
| 4 | Maluku | | 19,36 | 19,18 | 19,26 | Timur |
| 5 | Papua | | 28,40 | 28,54 | 28,40 | Timur |
| 6 | Papua Barat | | 25,73 | 25,43 | 24,88 | Timur |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 7 | Gorontalo | | 18,16 | 17,72 | 17,63 | Timur |
| 8 | Sulawesi Tengah | | 14,07 | 14,45 | 14,09 | Timur |

Sumber : Badan Pusat Statistik RI 2017

Di atas terlihat bahwa 3 provinsi di wilayah barat seperti Provinsi Jawa Barat, Tengah dan Timur adalah wilayah yang terendah angka kemiskinannya dan terlihat 5 provinsi di wilayah timur merupakan provinsi-provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi dibanding wilayah barat pada tahun 2015 - 2016, jika wilayah barat angka kemiskinan tertinggi adalah 13 % (jawa tengah) maka angka kemiskinan tertinggi wilayah timur adalah 28,40 % (papua).

Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat adalah 8,77 %, Provinsi Jawa Tengah 11,85 % dan Provinsi Jawa Timur adalah 13,19 %, angka tersebut adalah angka yang sangat kecil di banding beberapa provinsi lain di wilayah timur yang masing-masing diangka 19.26 % (Maluku), 28.40 % (Papua), 24,88 % (Papua Barat), 17.63 % (Gorontalo) dan 14.09 (Sulawesi Tenggara).

Dalam perbandingan angka kemiskinan antara beberapa provinsi di Indonesia Barat dan Timur cukup terlihat bahwa Indonesia masih perlu bekerja keras agar masalah kemiskinan dapat teratasi dan juga perlu dilakukan pembangunan sesuai angka kemiskinan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan berdasarkan angka kemiskinan adalah upaya mengangkat kesejahteraan sosial dan ekonomi di wilayah - wilayah tertinggal demi kesetaraan sosial di semua provinsi. Perbandingan tersebut juga menjelaskan kita tentang wilayah mana saja yang seharusnya menjadi unsur prioritas dalam penyaluran anggaran untuk pembangunan daerah, namun sayangnya??? Semua terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, pengalokasian anggaran negara bukan berdasarkan angka kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan program nasional yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dipergunakan untuk pembangunan dimasing - masing provinsi. Berikut adalah 10 Provinsi penerima dana alokasi umum terbesar pada tahun 2017:

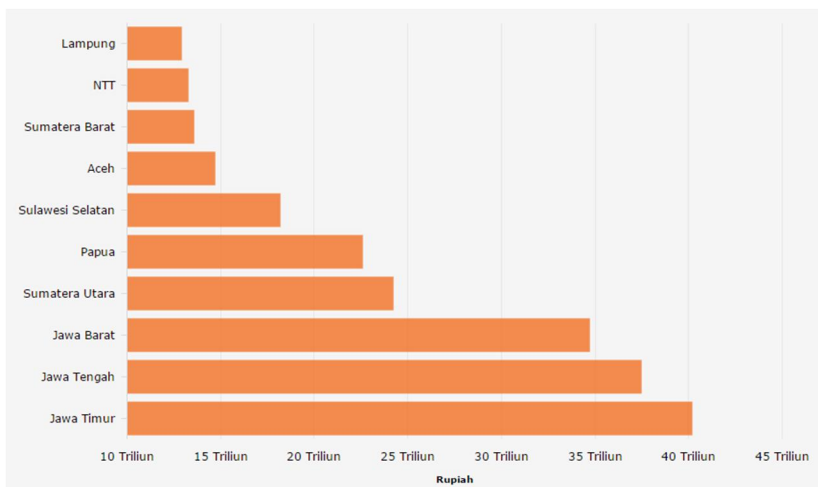


Diagram 10 Provinsi Penerima Dana Alokasi Umum Terbesar 2017 :

Sumber : Departemen Keuangan RI 2017

Menarik untuk dibahas!!! dalam tabel diatas terlihat bagaimana 3 wilayah yang memiliki angka kemiskinan rendah (lihat tabel diatas) yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat menjadi wilayah yang paling besar menerima Dana Alokasi Umum (DAU) di Seluruh Indonesia. Bagaimana dengan nasib wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi??? Bagaimana dengan wilayah seperti Papua, Papua Barat, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dll . Dalam kondisi demikian, Apakah pemerataan pembangunan sudah terjadi??? Apakah kemiskinan bisa teratasi??? Apakah keadilan sosial sudah terjadi??? Tidak!!! ini hanya akan membuat wilayah yang berkembang akan semakin berkembang, yang miskin akan semakin miskin dan keadilan sosial hanya akan menjadi cita – cita bangsa yang tidak akan pernah terwujud. Mungkin saat ini sudah waktunya Indonesia berbenah untuk bertindak melakukan pemerataan pembangunan agar semua wilayah di Indonesia hidup adil dan makmur. Selain itu Penyaluran anggaran pendapatan belanja negara (APBD) sebaiknya berdasarkan angka kemiskinan bukan dari jumlah penduduk demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia Timur “Merdeka”

“Indonesia Timur harus merdeka,,,!!! merdeka dibidang sosial, ekonomi, pendidikan dan pembangunan infrastruktur”

Secara letak geografis wilayah Indonesia Timur terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Tengah, Barat, Utara dan Tenggara, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur dll. Namun dalam tulisan ini tidak dijelaskan keseluruhan wilayah tersebut melainkan mengambil sample Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku. Dalam penulisan juga hanya membandingkan tentang angka kemiskinan antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Beberapa wilayah yang menjadi contoh di wilayah barat yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan representatif wilayah berkembang. Selanjutnya perlu disatukan pandangan bahwa semua provinsi di Indonesia berkedudukan sama sehingga tidak ada perbedaan perlakuan terkecuali DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, DI Aceh.

Jika di Era penjajahan Belanda, merdeka adalah kata yang sangat dinanti-nantikan oleh segenap bangsa Indonesia, berbeda kali ini dimana merdeka adalah kata yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia Timur yang mengharapkan kesetaraan pembangunan dari pemerintah. Kemerdekaan yang dimaksud bukan untuk untuk mengusir penjajah seperti di jaman 1509 – 1945 atau kembali membentuk negara bagian seperti Negara Indonesia Timur (NIT) pada jaman 1947 – 1950 melainkan kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan sosial, ekonomi, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Mengapa? karena Indonesia Timur ingin keluar dan bebas dari angka kemiskinan yang besar, keadaan ekonomi yang rendah, kekurangan SDM dan keterbatasan fasilitas publik. Sungguh miris melihat realita yang terjadi saat ini dimana bangsa sebesar Indonesia yang sudah merdeka selama 72 tahun sebagian wilayahnya masih terjajah oleh bangsanya sendiri. Mengapa??? Karena pembangunan daerah belum dilakukan secara merata.

Ir. Soekarno "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri". Kutipan tersebut merupakan kutipan yang saat ini dirasakan sebagian rakyat yang berjuang melawan bangsanya sendiri untuk mengharapkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia masih belum mendapat saluran listrik, beberapa daerah kesulitan mendapat pasokan air bersih, beberapa daerah masih kekurangan fasilitas publik termasuk jalur transportasi dll. Semua itu dirasakan oleh hampir semua wilayah di Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dll. Apakah mungkin karena letak geografisnya jauh dengan pusat pemerintahan??? Tidak!!! Semua wilayah sama dan juga memiliki hak di perlakukan yang sama seperti Provinsi Jawa Barat, Tengah dan Timur.

Ketertinggalan dan ketidakmerataan pembangunan yang saat ini dirasakan oleh Indonesia Timur dikarenakan pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak dialokasikan berdasarkan angka kemiskinan melainkan berdasarkan jumlah penduduk, (lihat tabel kemiskinan dan diagram penerima DAU) Provinsi Jawa Barat, Tengah dan Timur memiliki angka kemiskinan kecil namun mendapat alokasi DAU terbesar. Olehnya itu wilayah timur yang rata – rata jumlah penduduknya sedikit, selalu mendapatkan anggaran sedikit walaupun angka kemiskinan sangat tinggi, sebaliknya wilayah barat yang memiliki jumlah penduduk besar selalu mendapat alokasi dana besar walaupun angka kemiskinan kecil.

Kebijaksanaan para pemimpin kini menjadi harapan terbesar untuk kami agar negeri ini bisa berkembang secara merata. Saat ini, Sudah saatnya kita sadari bahwa Indonesia Timur sudah mulai bosan dengan ketertinggalan yang ada, jangan biarkan kebosanan itu terus berkelanjutan dimasa – masa yang akan datang. Sekarang Indonesia Timur ingin berkembang, ingin keluar dari ketertinggalan, ingin merdeka dari semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan infrastruktur. Keinginan semua itu semata – mata hanya ingin merasakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Tentunya dimasa mendatang tidak ada yang menginginkan terjadi lagi perpecahan ditubuh NKRI seperti pada tahun 1999 saat Timor – Timor melepaskan diri sebagai negara merdeka.

H. Peran Partai Politik dalam Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia

[Oleh: Andik Suryansyah]

Latar Belakang

Negara Indonesia dilihat dari konstitusi adalah Negara kesatuan, dimana pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”.⁷¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar⁷². Dapat dikatakan bahwa sistem pemerintah di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Dengan Negara Indonesia yang menerapkan doktrin trias politika dalam konsitusinya, maka sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensiil. Berdasarkan landasan tersebut kedudukan yang sejajar terlihat antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem pemerintahan presidensiil hubungan antara presiden dan parlemen dapat saling melakukan control dan berkeseimbangan (*checks and balances*).⁷³ Menurut Jimly Asshiddiqie ciri penting sistem pemerintahan presidensiil adalah;⁷⁴

1. Masa jabatan tertentu, misalnya 4 tahun 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, sehingga presiden dan wakil presiden tidak dapat di berhentikan di tengah masa jabatan karena alasan politik;
2. Presiden dan wakil presiden langsung bertanggung jawab kepada rakyat;
3. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung, atau melalui penerapan tertentu yang bersifat perwakilan permanen tertentu;
4. Presiden tidak tunduk pada parlemen, sekaligus tidak dapat membubarkan palemen;
5. Tidak dibedakan adanya fungsi kepala Negara dan kepala pemerintahan;
6. Tanggung jawab pemerintahan berada di pundak presiden dan oleh karena itu presidenlah yang berwenang bentuk pemerintahan;

⁷¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam Amandemen ke-2 1945. Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006.

⁷² *Ibid.* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁷³ Sularardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Prsidensiil Murni*, diterbitkan setara press, malang, 2012 hal 1

⁷⁴ Jimly asshiddiqie, konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, sekjen kepanitraan mahkamah konsitusi, RI Jakarta, 2006 halaman 205

Dapat disimpulkan jika ciri penting ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia, menganut sistem pemerintahan presidensiil, dan sistem demokrasi menggunakan cara penerapan multi partai, yang dimana partai politik di Indonesia memiliki lebih dari tiga partai politik.⁷⁵ Dengan demikian dalam Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum lebih dari tiga partai politik yang mengikuti. Selain itu, Dapat dilihat melalui dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat (2) berbunyi "*pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan panitia umum.*"⁷⁶ Melalui dasar tersebut Negara Indonesia menunjukkan bahwa dalam melewati pintu gerbang kekuasaan Negara, yakni presiden sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan harus melalui partai politik.

Meskipun Negara Indonesia menggunakan sistem kepartaian multipartai, dwipartai, ataupun tunggal, tidak akan mempengaruhi terhadap peran partai politik itu sendiri, karena partai politik di lihat dari perannya memiliki pengaruh besar terhadap Negara maupun sistem pemerintahan. Dari kewenangan partai politik yang besar dalam ranah pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Pengaruh peran partai politik dalam implementasi di Indonesia langsung dirasakan oleh masyarakat, melalui kebijakan dari pemerintah dan konfigurasi politik di dalam pemerintah. Inilah yang membuat partai politik dalam sistem pemerintahan presidensiil begitu penting. Karena itu, partai politik memiliki peran besar sebagai pemegang kendali pembentukan kadernya Dan sebagai pengusung kader ataupun orang lain yang sepemikiran dengan ideologi partai politik untuk menjadi penjabat dilembaga pemerintahan seperti presiden, legislatif dan lembaga yang melalui aspirasi masyarakat atau politik.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebut sebagai peserta pemilihan umum, disamping perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai peserta pemilihan umum menurut Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁷⁸ Dalam pertarungan politik real dilapangan, implementasi para calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta calon anggota Presiden, melalui partai politik memiliki peran yang sangat besar. Dalam hal ini, menimbulkan dampak demokrasi yang luas di masyarakat seluruh Indonesia.

⁷⁵ Jimly asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, sekjen kepanitran mahkamah konsitusi, RI Jakarta, 2006 hal 368

⁷⁶ Lihat pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia 1945

⁷⁷ Jurnal, jimly asshiddiqie. *Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan*. Di unduh pada tanggal 18 maret 2015 jam 1:01 PM

⁷⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006.

Karenanya partai politik sering mendapat persepsi buruk dari masyarakat karena kewenangan yang begitu besar dan mampu membuat kebudayaan politik berdampak buruk dan negatif dalam tatanan pemerintahan. Dengan sistem Demokrasi multipartai yang digunakan Indonesia agar kondisi pemerintahan tetap kondusif dan implementasi pemerintahan yang baik (*Good govertment*).

Dalam penerapan sistem pemerintahan presidensiil harus ada kekuatan yang besar untuk mengimbangi dalam ranah kebijakan diparlemen atau legislatif sebagai pengawalan kebijakan keputusan parlementer terhadap rancangan eksekutif. Sedangkan pertanggung jawaban partai politik sebagai pengusung presiden dan wakil presiden beserta perlementer telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 6A ayat (2) dan pasal 22E ayat (3). mengenai peran partai politik perlu kajian yang lebih mendalam kehidupan ketatanegaran di Indonesia. Karena tonggak awal dimulai dari partai politik membuat hal tersebut menjadi penting. Tanpa partai politik dengan sistem yang berlauk di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Dari itu "*Bagaimana peran partai politik dalam penguatan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia?*" pertanyaan ini, sangatlah menarik untuk penentu arah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan.

Partai Politik sebagai instrument demokrasi

Partai politik merupakan instrument utama demokrasi. Yang menyebabkan partai politik instrumen utama adalah, terutama, terletak pada kewenangannya dalam hak dipilih, atau mengajukan orang-orang untuk dipilih dalam pemilu, guna menduduki jabatan-jabatan politik di tingkat lokal maupun nasional.⁷⁹ Pada sistem demokrasi, partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*Role*) yang sangat penting. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warganegara.⁸⁰ Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi oleh karena itu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk di perkuat derajat kelambagaanya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Dari pandangan Bagir Manan, menyebutkan unsur-unsur demokrasi dengan menyatakan suatu

⁷⁹ M.alfan alfian dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Martabat*, setara press. 2013. Hal.336-337

⁸⁰ Abdul Muktie Fajar, *Konstitusionalime Demokrasi*, Setara Press. 2008. Hal. 67.

negara dapat disebut demokratis, apabila mampu memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:⁸¹

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjalani anggota perkumpulan;
2. Ada kebebasan menyatakan pendapat;
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5. Ada hak bagi aktivis partai politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
6. Terdapat berbagai sumber informasi; (7) ada pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintahan, harus tergantung pada keinginan rakyat;

Dari unsur-unsur diatas menunjukkan bahwa suatu negara demokrasi sangat penting partai politik, karena sebagai pilar utama demokrasi adalah partai politik. Hingga membuat kewenangan partai politik begitu besar dalam negara demokrasi, dan sangat strategis menentukan arah perjuangan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai pendidikan politik diatur lebih lanjut dalam pasal 31 ayat (1) yakni ⁸² “ Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antar lain”:

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian Negara yang demokratis dan warga Negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik. Jadi dapat dikatakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana

⁸¹ I Dewa Gede Atmadja, demokrasi HAM, dan Konstitusi, Setara Press, Malang, 2011

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 2. Pasal 31 Ayat (1)

untuk menghimpun aspirasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik.

Sistem Pemilihan Umum Serentak dengan Multi Partai sebagai Penguatan Sistem Presidensiil

Setelah keputusan MK Nomor 14/P Undang-Undang-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak yang akan di laksanakan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, mengamanatkan Pemilihan Umum Serentak antara Pemilihan Umum Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Dari hal pemilihan umum dapat mempengaruhi perjalanan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia apalagi demokrasi mengenai konsepsi yang berlaku secara langsung oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perkembangan dalam konteks pembangunan kebebasan sebuah Negara untuk menentukan pemimpin mereka. Karena pemimpin yang baik adalah dambaan dari rakyat Indonesia. Melalui demokrasi yang diwujudkan dari pemilihan umum Negara ini, memberikan masyarakatnya dalam kebebasan memilih wakilnya untuk memimpin dan memperjuangkan aspirasinya, atas nama keterwakilannya masyarakat dalam berbagai kebijakan yang akan di implementasikan oleh Negara. Maka pembangaunan demokrasi sebagai konsep dasar payung agar terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai cita-cita dari idiologi Negara, maka sangatlah penting.

Pembangunan demokrasi Indonesia sudah jelas dari beberapa penjelasan diatas dari sejarah lebih tepat dikatakan menggunakan sistem pemerintahan presidensiil. Ketika bicara konsep presidensiil perlu adanya perhatian lebih kepada kewenangan yang diperoleh dari presiden dalam pengambilan kebijakan strategis yang sudah diatur diundang-undang. Presiden dapat melakukan rancangan formulasi kebijakan di palementer, tetapi tetap saja jika presiden mengajukan formulasi kebijakan harus melalui DPR, apakah program itu layak atau kah tidak, apakah dapat di implementasikan atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak. Secara realitas seperti ini parlementer sangatlah mendominasi segala bentuk formulasi kebijakan presiden.

Saat menganalisa tentang relasi antara peran partai politik, demokrasi yang diwujudkan melalui sistem pemilihan umum serentak dalam penguatan sistem pemerintahan presidensiil. Dalam mengamplikasian putusan MK Nomor 14/P Undang-Undang-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak menjadi satu pintu masuk bersamaan secara demokrasi di Indonesia. Sekaligus putusan

tersebut akan di laksanakan pada pemilihan umum tahun 2019. Akan tetapi secara yuridis keputusan tersebut mengikat dan dijalankan secara konstitusional. Penting diingat bahwa keputusan tersebut sangat mempengaruhi terhadap penguatan Sistem Presidensiil. Disamping itu, meminimalisir adanya politik transaksional yang semakin tidak terkendalikan pada proses pendidikan masyarakat, yang semakin tidak percaya.

Hasil pemilihan umum dengan cara serentak dapat dilihat secara relevan antara anggota legislatif terpilih dengan presiden terpilih terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai kepala Negara dapat melakukan fungsinya terhadap sistem presidensiil secara sistematis korelatif dengan integrasi yang signifikan dalam kerja sama dengan DPR. DPR menjadi satu kesatuan penguat dalam sistem presidensiil terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Presiden dapat melaksanakan wewenang presidensiilnya dengan dukungan yang sangat kuat dari prlemen sebagai penyangga pemerintahan melalui tugas pokok dan fungsinya sebagai legislator. Bentuk bentuk pandangan lain dari aspek sistem kepartaian yang multi partai dalam dIndonesia. Maka peran partai politik memungkinkan di legislatif harus ada tetap koalisi dengan dasar ide penguatan sistem pemerintahan presidensiil. Konsekuensi logis dari pilihan mempertahankan praktik koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam praktik koalisi tersebut. Pada akhirnya, perbaikan tersebut akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara eksekutif dan Legislatif.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, pembentukan koalisi dilakukan melalui serangkaian tahapan negosiasi formal untuk menghindari terjadinya inkoherensi paradigma bernegara, inkoherensi sistem politik dan pemerintahan, dan inkoherensi tingkah laku kekuasaan berdemokrasi antar partai koalisi.⁸³ Tahapan negosiasi formal ini merupakan landasan penting untuk menetapkan komitmen dan konsistensi partai politik dalam rangka menjaga keberlangsungan koalisi. Dalam tahapan ini, partai politik yang akan membentuk koalisi bersama-sama menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Untuk menentukan calon tersebut, dapat didasarkan pada hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon. Dengan demikian, partai politik anggota koalisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas kelangsungan pemerintahan koalisi.

⁸³ Lihat: Arbi Sanit, *Inkoherensi Reformasi Ketatanegaraan* (makalah) disampaikan pada Seminar Nasional dan Mimbar Bebas yang diselenggarakan oleh BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, 1 Juni 2009.

Kedua, pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan pada transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama yang mengakomodasi kepentingan rakyat. Pembentukan platform ini didasari oleh kesamaan ideologi partai politik bersangkutan. Artinya, partai-partai yang mempunyai kesamaan ideologi saja yang dapat menjadi mitra koalisi. Selain itu, platform yang telah disepakati tersebut harus dideklarasikan kepada rakyat secara layak sehingga rakyat turut mengawal jalannya koalisi yang dilakukan oleh partai politik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, koalisi tersebut harus menyampaikan pencapaian-pencapaiannya selama masa pemerintahan.

Ketiga, pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan etika politik untuk menyetatkan situasi psiko-politik di Indonesia. Etika politik tersebut terefleksi dalam perilaku para pelaku politik. Oleh karena itu, diperlukan usaha sungguh-sungguh dari para pelaku politik untuk tidak terjebak dalam pragmatisme yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat dengan meninggalkan nilai-nilai dasar demokrasi dan kemanusiaan, serta tidak melemahkan sistem presidensial yang dilembagakan secara hukum melalui lembaga-lembaga kenegaraan.⁸⁴

Penguatan sistem pemerintahan presidensiil melalui peran partai politik, dapat dilakukan dari penanaman karakter dan peran partai politik pada norma hukum seperti ;

- a. Harus ada suatu keseimbangan dengan menggunakan gagasan *checks and balances* yang dikemukakan Vincent radja, mengenai hubungan antara lembaga negara tinggi dalam pengembangan hukum ketatanegaraan.
- b. Penyerderhanaan partai politik sebagai penguatan sistem pemerintahan presidensiil sangatlah bagus akan tetapi akan mengurangi peran dari rakyat melalui aspirasi dari partai politik.
- c. pembentukan peraturan tentang gabungan partai politik. Karena peraturan mengenai gabungan partai lebih lanjut tidak pernah tersentu walaupun penentu pembentukan kebijakan dari legislatif dan eksekutif ini memiliki peran besar dari bagaimana hubungan antara mekanisme gabungan partai yang di gunakan.

Dengan demikian untuk pengembangan peran partai politik dalam penguatan sistem pemerintahan presidensiil sebagai berikut; pertama, Pembentukan peraturan tentang gabungan partai politik, Karena tidak ada peraturan mengenai gabungan partai politik secara formal. Agar terwujudnya hubungan legislatif dan eksekutif dalam pembentukan

⁸⁴ Susi Dwi Harijanti, “Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Memperkuat Presidensialisme” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, hal. 102.

kebijakan yang baik untuk mengunjang kebijakan pemerintah dalam ketatanegaraan. Peran ini, besar hubungan antara mekanisme gabungan partai yang di gunakan sebagai penguatan kelembagaan partai politik untuk memaksimalkan sistem pemerintahan presidensiil. Kedua, Sistem multipartai dalam penyerderhanaan partai politik sebagai penguatan sistem pemerintahan presidensiil sangatlah baik. Peran partai menentukan di legislatif dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019 dengan konsep pemilihan umum serentak.

I. Aceh Pasca Damai: Riwayatmu Kini

[Oleh: Dedi Muzlahinur]

Carut-Marut Kondisi Aceh Pasca Perdamaian

Usai perundingan damai Aceh-RI di Helsinki, melahirkan beberapa kesepakatan sebagai resolusi bagi Aceh yang sudah puluhan tahun menderita dalam berbagai hal akibat konflik Aceh yang berkepanjangan. Pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap Pemerintah Republik Indonesia (RI) adalah untuk tujuan agar Aceh bisa merdeka dari Indonesia dan mengelola pemerintahan sendiri sebagai sebuah Negara. Tujuan itu semata-mata bukan hanya dipengaruhi oleh sikap kekecewaan Aceh terhadap pemerintahan Indonesia yang telah mengkerdilkan posisi Aceh setelah berbagai kontribusi dan sumbangan modalnya terhadap kemerdekaan Indonesia, melainkan juga untuk mempermudah Aceh membangun daerahnya sendiri dalam berbagai bidang. Terjadinya perundingan di Helsinki menghasilkan berbagai kesepakatan yang dirumuskan dalam dokumen MOU Helsinki dan Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang kekhususan Aceh. Bermula dari ini Aceh memiliki beberapa kewenangan sebagaimana penafsiran kepemilikan Aceh sendiri terhadap status *Self government*. Dimana Aceh mendapatkan Hak mengatur daerahnya sendiri dalam beberapa hal penting (Lihat; Nota Kesepahaman MOU Helsinki) serta *surplus* dana otsus yang sangat besar untuk beberapa tahun dalam rangka memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan di Aceh sehingga dengannya Aceh bisa membangun.

Namun apa yang terjadi dalam proses berbenahnya Aceh hingga sampai sekarang yang hanya baru dicapai tidak lebih kepada tiga hal dalam kondisi yang memprihatinkan, yaitu; Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang tidak detail arah implementasinya, Syariat Islam yang masih sebatas formalitas dan capaian pembangunan bersumber dana otsus yang tidak menunjukkan signifikansi dampaknya terhadap ekonomi, social dan budaya di Aceh. Padahal Struktur Eksekutif dan Legislatif dalam pemerintahan Aceh dari Provinsi hingga daerah dimana dominasi persentasenya merupakan para tokoh-tokoh mantan komatan GAM baik yang tergabung dalam partai local paling berkuasa di Aceh (PA-PNA) maupun secara tidak langsung dalam Partai Nasional. Harusnya dalam kondisi demikian, para elit, tokoh-tokoh serta para ahli yang berwenang lainnya di Aceh dapat memanfaatkan moment penting tersebut guna memikirkan berbagai gagasan dengan lebih strategis untuk pembangunan masa depan Aceh, bukan malah saling merebut kue kekuasaan dan saling menyudutkan.

Dari keseluruhan kesepakatan antara Aceh dan Indonesia, sebagai perwujudan *Self Government* Bagi Aceh, semuanya adalah element-element terpenting bagi bangsa Aceh. Namun diantaranya yang terlebih penting adalah menyoal donasi dimana proses penyelenggaraan dan pencapaian jangka panjang tujuan akan selalu bersumber kesitu. Dan satu-satunya yang memberikan bantuan besar terhadap ini adalah Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan jumlah triliunan rupiah yang hanya tersisa beberapa tahun lagi untuk mengakomodasikan seluruh kepentingan jangka panjang Aceh. Dimana batas waktu tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam mensupport dana otsus tersebut hanya sampai tahun 2027. Namun, dari awal terlihat seperti tidak ada kebijakan dan kewenangan strategis apapun yang mengacu untuk sebuah upaya memaksimalkan target jangka panjang Aceh. Dana Otsus yang harusnya menjadi modal bagi Aceh untuk membangun sumber-sumber vital dan modal pembangunan di masa depan, ternyata habis sia-sia untuk hal-hal yang tidak produktif. Dana itu lebih besar dihabiskan untuk konsumsi belanja pemerintah seperti, gaji pegawai, membeli mobil dinas maupun membuat bangunan-bangunan besar pemerintah dan pemborosan sia-sia lainnya. Secara jelasnya sangat sedikit diplotasikan untuk hal-hal strategis dan produktif sebagai sumber penting keberhasilan dimasa depan.

Secara mendetil dapat diamati bahwa dominasi pemikiran para elit dan tokoh-tokoh Aceh baik yang ada didaerah maupun diluar daerah, secara keseluruhan fikirannya dikuras oleh persoalan-persoalan yang bersifat politis dan intrik-intrik. Baik itu persoalan didalam daerah, maupun persoalan yang berhubungan antara daerah dengan pemerintah pusat. Dan ini jelas sekali terlihat bahwa dari belasan Tahun yang lalu sampai saat ini hampir seluruh elemen rakyat terpaku pada berbagai kesepakatan politis dan konstitusional antara pemerintah Indonesia dengan Aceh. Dan nampaknya tidak ada siasat dari segenap elit dan ahli dari rakyat Aceh yang melakukan pembagian porsi focus untuk berbagai *segment* pembenahan dan strategisasi penciptaan hala-hal penting bagi Aceh. Memang kita akui tidak mudah bagi Aceh untuk serta merta *move on* dari kondisi itu serta bangkit dan maju dengan cepat, namun bukan hal yang tidak mungkin jika disiasati dengan kebijaksanaan dan pemikiran yang lebih cerdas. Harusnya para tokoh dan elit politik Aceh, memikirkan jangka panjang pembangunan Aceh dengan memanfaatkan sumber dana Otsus dan APBD beberapa daerah di Aceh yang tergolong besar untuk membangun sumber-sumber produktif masa depan.

Berbagai polarisasi politik yang bermain semakin membuat para elit, tokoh dan elemen lain bangsa Aceh terlena dan tidur. Ditambah lagi kondisi media yang terus menampilkan wajah riang dan gembira Aceh yang sedang nikmat melakoni teatrikal pertunjukan dan olah-polah

perpolitikan Aceh. Sehingga semua element rakyat Aceh dipaksa terbius untuk menikmati serunya berbagai isu politis di Aceh. Tiap hari bahkan detiknya terus disajikan dengan drama politis yang sangat ter-entertaintasikan. Padahal semua itu hanya akan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditemukan klimaksnya bahkan sangat mungkin memicu penyebab *impotenisasi* kehendak membangun Aceh dimasa depan jika tidak didukung oleh berbagai sumberdaya vital lainnya. Seharusnya hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah benahi sumberdaya vital pembangunan Aceh terlebih dahulu atau adanya pembagian focus berdasarkan keahlian dan tanggung jawab element Aceh. Sehingga dapat menyentuh semua hal penting dan strategis yang kemudian secara bersamaan mampu teraih.

Para elit dan tokoh-tokoh Aceh seakan lupa bahwa sebelum perdamaian ini disepakati, telah banyak dikorbankan oleh seluruh elemen bangsa Aceh dengan kurcun darah, kehilangan harta benda, kehilangan sanak keluarga, kehilangan kebahagiaan, kehilangan banyak generasi emas bangsa serta kehilangan banyak waktu dan kemerdekaan. Belum lagi ditambah dengan bencana dahsyat tsunami yang menimbulkan kerugian besar diberbagai bidang. Sepertinya Aceh berlalu saja dalam kesakitan dan penuh penderitaan yang berkepanjangan akibat konflik, serta ditambah lagi hantaman bencana alam yang dahsyat. Seakan tidak ada kepentingan para elit dan tokoh Aceh untuk memikirkan kalanjutan masa depan Aceh dan seakan mereka lupa bahwa Aceh hari ini berangkat dari mana dan untuk kemana. Tingkah polahnya yang semakin menggerutu, dan sampai kepada mengkulturnya perpecahan antar sesama dan muncul dinding baru sebagai sekat dan batasan yang saling membedakan. Padahal seharusnya masa depan Aceh hanya dapat diwujudkan dengan bersama-sama dan dengan tanggung jawab serius bersama.

Sejauh ini memang, berbagai argument kritis yang disampaikan oleh berbagai pihak dan pakar yang ada di Aceh maupun Nasional seperti belum menemukan titikny. Tidak ketemunya titik penyelesaiannya itu dilihat bukanlah dikarenakan tidak berkualitاسnya kritik dan respon yang diberikan oleh pakar dan ahli tersebut, melainkan pihak elit dan tokoh tersebut mungkin saja tidak pernah mau membuka diri untuk menerimanya atau mungkin memang karena kurangnya kualitas tokoh dan elit tersebut untuk mersponnya atau kalaulah bisa lebih gamblang diterjemahkan mungkin mereka (Baca;Elit/Tokoh) sengaja tidak merespon karena masih ingin terus menikmati posisi dan situasi yang menguntungkan mereka dan kelompoknya.

Rekontruksi *Pattern* politik, Menggeliatkan Pondansi Ekonomi Produktif Menyongsong Kemandirian Aceh di Masa Depan.

Sudah seharusnya, para elit politik Aceh mengurangi intrik-intrik politik antar sesama yang selama ini memicu perpecahan dan berujung pada terbentuknya banyak kelompok yang saling berbeda pendapat. Para elit dan tokoh politik harus kembali bersatu dan menyatukan semua pihak untuk bersama-sama memikirkan jangka panjang pembangunan Aceh. Serta harus mau membuka diri untuk merespon setiap kritikan dan masukan-masukan positif untuk masa depan Aceh. Sudah sangat lama Aceh mati dalam kondisi yang mematikan, bermimpi dalam tidur kepanjangan dan mengigau sesuatu yang jauh dari kesiapan. Semua fikiran sudah tentu harus realistis dan berdasarkan kajian yang mendalam, sehingga apapun yang menjadi tujuan jangka panjang kemajuan Aceh benar-benar berangkat dari sebuah kesimpulan yang detail dan sempurna. Yang dibutuhkan hari ini adalah bukti dari berbagai macam ide dan gagasan kemandirian Aceh, salah satunya adalah kemandirian ekonomi. Jutaan rakyat Aceh masih dilanda kemiskinan, kesempatan berpendidikan yang masih belum merata, dan pengangguran yang semakin besar angkanya. Dari tahun ke tahun persoalan itu kian meningkat dan semakin menambah beban masalah yang harus ditanggulangi menuju kemajuan Aceh.

Pola-pola politis di Aceh yang selama ini terkotak-kotak harus kembali dicairkan, tidak hanya pada saat moment-moment politis saja melainkan setiap saatnya. Sehingga rakyat Aceh kembali mendapat angin segar bahwa para elit, tokoh dan pihak yang berkepentingan untuk kemajuan Aceh benar—benar serius memikirkan masa depan Aceh. Semua golongan di Aceh harus memiliki hak dan kesempatan yang sama terhadap kemajuan Aceh. Aceh bukan milik kelompok tertentu, tidak ada kelompok manapun yang berhak mengklaim kepemilikan Aceh, karena sesungguhnya ketika penderitaan terjadi semua pihak merasakan, apalagi pihak yang berada pada *grass root* di lingkup sosial Aceh. Dan saatnya menghilang khultusan-khultusan kelompok dan berangkatkan semua hal itu berdasarkan kepentingan bersama.

Aceh harus mandiri dalam berbagai bidang. Wujud kemandirian adalah mampu berdiri sendiri pada pijakan sendiri, dan hal paling mendasar menuju ke situ adalah persoalan ekonomi. Kekuatan pondasi ekonomi akan menentukan kemampuan mandiri dan berkemajuannya Aceh. Perekonomian yang baik akan mendukung berbagai bidang pembangunan Aceh, infrastruktur, ketenagakerjaan, kesempatan berpendidikan dan mengurangi berbagai penyakit sosial.

Aceh adalah salah satu diantara daerah lainnya di Indonesia yang telah menunjukkan bentuk respon dan reaksi serius terhadap pemerintah Indonesia. Tentu saja bukanlah sebuah pengalaman yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk kedepannya. ini adalah bentuk kegagalan-kegagalan pemerintahan dulu yang tidak boleh di ulangi dimasa depan,

bukan hanya terhadap Aceh melainkan terhadap seluruh daerah lainnya di Indonesia. Sehingga harapan agar keutuhan Negara Indonesia ini dapat terjaga dan Negara Indonesia yang besar ini semakin kuat. Biarkan seluruh kegagalan pemerintahan dahulu terkubur bersama dosa-dosa dan kecerobohan para pendahulunya. Karena itu murni kebodohan dan kecerobohan dari mereka sendiri dan tentu akan dipertanggung jawabkan oleh mereka masing-masing dalam bentuk penghakiman secara tidak langsung oleh rakyat Indonesia nantinya.

Menyoal berbagai permasalahan daerah, khususnya Provinsi Aceh, masih banyak peran pemerintah Indonesia yang dapat dilakukan terhadap Aceh untuk merawat perdamaian dan hubungan jangka panjang Aceh-Indonesia. Terutama dalam hal membantu terlaksananya butir-butir kesepakatan damai dari hasil perundingan di Helsinki sebagaimana harapan semua pihak di Aceh dan menghindari terjadinya perdebatan panjang yang tidak berkesimpulan. Sebagaimana itu juga sebagai perwujudan kewajiban pemerintah Indonesia untuk bersama-sama ikut menjaga perdamaian dan kestabilan di Aceh. sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi tuduhan dikemudian hari, pemerintah Indonesia sebagai penyebab terjadinya berbagai gejala dan reaksi-reaksi serius khususnya di Aceh. Karena Langkah-langkah diplomasi yang baik jauh lebih penting terhadap Aceh dari pada mengedepankan sikap –sikap kurang berkenan yang malah kembali membentur nilai psikologis dan psikis rakyatnya. Harapan besar adalah agar pemerintah Indonesia (Baca: Pihak Berwenang Indonesia) sekarang dapat lebih legowo dan berusaha untuk terus menjaga hubungan baik terhadap Aceh dan juga daerah lainnya.masa depan Negara Indonesia masih sangat panjang, peradaban Negara yang besar ini harus terus berlanjut dan maju. Tentunya semua itu turut menjadi tanggung jawab bersama generasi selanjutnya dan ditangan pemerintahan selanjutnya.

BAB IV
Cita-Cita Peradaban dan Perdamaian Dunia

DESY PRATIWI IRMA SURYANI

ZAINURI

NURJAYA

RAHMADI M. ALI

SIRAJUDDIN

SABIL MOKODENSEHO

MAWARDIN

A. Membangun Rumah: antara Kebijakan dan Investasi Peradaban *[Oleh : Desy Pratiwi Irma Suryani]*

Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia dalam sebuah tingkatan atau hierarki yang digambarkan pada sebuah bentuk piramida. Terdapat lima tingkat kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan yang paling mendasar sekaligus kebutuhan yang utama pada setiap individu ialah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik (sandang, pangan, papan). Adapun kebutuhan-kebutuhan di tingkat dasar adalah kebutuhan yang harus terpenuhi lebih dahulu agar selanjutnya individu dapat memuaskan kebutuhan di tingkat berikutnya.

Pemenuhan kebutuhan dasar dapat mendorong produktivitas individu, yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam mendukung pembangunan suatu negara, dimana produktivitas tersebut di pengaruhi oleh ketersediaannya tempat tinggal yang kondusif dan nyaman untuk hidup, belajar, dan berinteraksi, sehingga hal tersebut akan memberikan pengaruh positif terhadap *behaviour* dan kualitas kerja. Kenyamanan yang diperoleh individu memiliki efek keberlanjutan lainnya, yakni meningkatnya indeks kebahagiaan. Adapun hal tersebut diyakini dapat mengurangi segala tindak kejahatan dan tindak kekerasan dalam masyarakat. Maka usaha menciptakan keamanan bagi masyarakat adalah hasil dari sebuah investasi yang dimulai dari sebuah usaha kecil namun mampu memberikan efek sistemik/efek domino.

Usaha tersebut kiranya sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang secara implisit temaktub pada undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Peranan strategis tersebut beralasan sebab urgensi tempat tinggal sendiri tidak hanya sebagai sebuah tempat perlindungan yang memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi lebih dari itu sebagai sarana peningkatan kualitas dan pembinaan keluarga, serta pusat pendidikan keluarga.

Permasalahan yang ada saat ini ialah belum terpenuhinya hak warga dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak, khususnya bagi

masyarakat berpenghasilan rendah. Terlebih lagi, luas atau area tanah yang tidak bertambah seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan arus mobilitas manusia yang tinggi, artinya keterbatasan tersebut akan membuat harga tanah tidak terjangkau oleh kalangan tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keberadaan pemerintah adalah aktor utama dalam penyedia perumahan dan permukiman bagi masyarakat. Adapun usaha yang selama ini telah terimplementasi sudah sangat beragam baik melalui program sejuta rumah dari Presiden Joko Widodo, pemberian subsidi rumah, maupun bantuan kredit dengan bunga rendah. *Effort* lebih oleh pemerintah dapat dilakukan melalui *collaboration partnership*, yakni sebuah bentuk sinergisitas ataupun hubungan kemitraan antara beberapa aktor yang saling berkaitan yang memiliki kesamaan tujuan.

Tidak hanya bertujuan mewujudkan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk dari implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan nilai yang lebih substansial bahwa pembangunan perumahan dan permukiman memberikan *multiplier effect* dalam mendukung pembangunan suatu bangsa.

Esensi Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Salah satu kebutuhan diperkotaan yang menjadi sangat penting bagi kualitas kesejahteraan masyarakat adalah kemampuan urban area untuk menciptakan perumahan yang baik dan layak. Hal ini dikarenakan pembangunan perumahan bukanlah sekedar pembangunan fisik yang hanya memiliki nilai ekonomi semata, lebih dari itu membangun perumahan dan permukiman memberikan esensi nilai yang lebih besar kepada peningkatan kualitas manusia Indonesia dan salah satu pendukung pembangunan nasional.

Salah satu amanat pembangunan nasional adalah mengusahakan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat melalui pembangunan perumahan dan permukiman untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan keluarga dan masyarakat serta menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan pembinaan watak anggota keluarga.

Pembinaan watak anggota keluarga tersampaikan dengan baik di tempat tinggal yang kondusif. Orang tua dapat memberikan pendidikan karakter maupun keagamaan kepada anak-anak mereka, lingkungan dan tempat tinggal yang mendukung juga mendorong keinginan keluarga menghabiskan *quality time* dirumah. Hal sederhana tersebut memiliki *multiplier effect* terhadap meningkatnya Indeks kebahagiaan masyarakat dan secara tidak langsung mengurangi angka kemacetan.

Indeks kebahagiaan masyarakat memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam mengurangi tindak kekerasan baik dalam masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga mengurangi tingkat kriminalitas. Sebab pendekatan hukum tidak lagi menjadi pendekatan yang efektif dalam mengurangi tingkat kriminalitas.

Kebijakan *Collaborative partnership*

Berdasarkan data, masih terdapat kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat yakni sekitar 13,5 juta unit *backlog* pada tahun 2015.⁸⁵ Oleh karenanya, undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman setidaknya memuat tiga poin penting. Pertama, kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah wajib dipenuhi/dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Kedua, adanya perlindungan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap pemukiman kumuh. Ketiga, menjamin kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah.

Ada dua bentuk program subsidi perumahan dan permukiman, yaitu hibah modal dan tunjangan perumahan⁸⁶. Pemerintah sendiri telah memberikan beragam bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan perumahan bersubsidi diantaranya ialah Rumah sederhana Tapak (RST), Rumah Sederhana Sehat (RSS), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), subsidi biaya pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) sehingga harga rumah tetap terjangkau oleh masyarakat.

Effort lebih yang dapat di lakukan pemerintah dalam memberikan kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ialah melalui pendekatan *Collaborative partnership*, yakni sebuah pendekatan yang diadopsi dari pola aktor good governance yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan privat sector.

Collaborative partnership ialah kolaborasi dengan menggunakan komunikasi yang baik antara *stakeholder* sebagai pengambil kebijakan,

⁸⁵Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Peranan APBD dalam Mengatasi Backlog Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, 2015.

⁸⁶Carlo Del Ninno dalam H.Katsura and C.Romanik. 2002. "Ensuring Acces to Essential Services : Demand-Side Housing Subsidies". Social Protection Discussion Paper No.0232.Bank Dunia. Washington, DC.

developer sebagai pengelola perumahan dan permukiman, dan masyarakat sebagai konsumen. Secara teknis *Collaborative partnership* menggunakan pola pembangunan perumahan dengan persebaran yang mengikuti kebutuhan masyarakat dan kepadatan penduduk suatu daerah yang masih rendah serta tidak berorientasi pada profit. *Collaborative partnership* memandang aspek lingkungan, sosial dan budaya sebagai hal yang perlu di perhatikan agar tidak memberikan efek negatif urbanisasi seperti banjir dan kemacetan.

Adapun masing-masing aktor memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Pemerintah ialah pembuat kebijaksanaan strategi dan program pengadaan perumahan secara nasional, sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab atas pengadaan perumahan, dan fasilitator untuk memberdayakan masyarakat.

Lebih lanjut model usulan kebijakan yang dapat di gunakan pemerintah dalam penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan *Collaborative partnership* memiliki pola pembagian tugas. Privat sector yang dalam hal ini adalah *developer* harus memiliki itikad baik dalam menjalankan usaha, berorientasi pada kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah serta memiliki komitmen pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pembangunan yang berkelanjutan ialah pembangunan yang mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan ramah lingkungan, sedangkan pembangunan yang berkeadilan ialah pembangunan yang merata, tepat sasaran dan tanpa diskriminasi.

Adapun pemerintah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap program perumahan dan permukiman yang kemudian merumuskan kebijakan tentang program tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan yang paling utama yakni penyaringan secara selektif *developer* sebagai pengelola pembangunan perumahan dan permukiman. Hal ini agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar di peruntukan bagi rakyat. Sama halnya dengan prinsip-prinsip pada good governance, dalam implementasi kebijakan *Collaborative partnership* terdapat pula beberapa prinsip, yakni partisipatif, transparansi, pemerataan dan non diskriminatif.

PENUTUP

Ukuran keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya berpatokan pada perekonomian ataupun jumlah pendapatan perkapita. Faktor lainnya seperti indeks kebahagiaan masyarakat adalah faktor yang mulai dipertimbangkan karena mampu *menstimulate* efek yang positif pada sektor-sektor lainnya. Kebijakan strategis adalah hal utama yang harus di pikirkan dan diputuskan oleh stakeholder yang berkepentingan dalam

menindaklanjuti hal tersebut, yakni melalui pembangunan perumahan dan permukiman yang memiliki efek jangka panjang (*long term investment*), bila harus di komparasikan dengan bantuan pemerintah lainnya seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang sifatnya temporary.

Pembangunan perumahan dan permukiman dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Collaborative partnership* ialah pembangunan yang berusaha mencapai peningkatan kualitas manusia yang bebas dari kecemburuan sosial dan secara positif menciptakan perumahan dan permukiman yang mencerminkan kesetiakawanan serta keakraban sosial.

Perumahan dan permukiman tidak cukup dilihat sebagai sebuah bangunan fisik ataupun sarana kehidupan semata, akan tetapi merupakan proses berfikir dalam menciptakan ruang kehidupan. Dengan demikian rumah dan permukiman mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang pada hakekatnya ialah pembangunan kualitas manusia dan merupakan investasi peradaban.

B. Diaspora untuk Indonesia

[Oleh: Zainuri]

BERDIASPORA KE SINGAPURA

OISAA Singapore 2015

Mengutip sebuah definisi diaspora yang bermakna penyebaran. Dalam konteks pergerakan manusia yang menetap di negara karena berbagai faktor (H.E. Dino Patti Djalal). Hal ini menjelaskan bahwa diaspora juga bisa dikatakan hijrah. Banyak orang melakukan perjalanan keluar negeri diantaranya menjadi TKI, sekedar jalan-jalan, penelitian, pertukaran pemuda antar negara, dan yang tak kalah lagi kuliah di luar negeri.

Sebuah perjalanan keluar negeri atau yang biasa orang sebut *overseas* merupakan pertamakali bagi saya. Perjalanan ini merupakan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan bagi diri saya ketika saya membuat paspor 1 bulan sebelumnya. Singapura menjadi tempat pertama yang saya kunjungi bersamaan dengan perhelatan akbar PPI Dunia dan hari kemerdekaan Singapura. Ada hal yang menarik pada saat perhelatan kemerdekaan Singapura yakni transportasi publik dan jaringan internet yang bebas biaya pada hari itu, sehingga mempermudah mobilitas di Singapura.

Pada Agustus 2015 yang lalu telah dilaksanakan Simposium Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia yang dihadiri 350 pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di 35 dan berasal dari 110 perwakilan PPI, dengan tema Persiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Asia. Pada event ini tidak hanya diikuti mahasiswa yang ada diluar negeri melainkan juga yang berkuliah di Indonesia, ini di karenakan lokasi kegiatan di Singapura, sehingga masih bisa dijangkau dari segi tiket pesawat yang murah. Kegiatan ini dihadiri beberapa tokoh bangsa di antaranya : Jusuf Kalla (wakil presiden RI), Anies Baswedan (MenDikBud), Marie Elka Pangestu (mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif), Eko Prasetyo (Direktur LPDP), Sandiaga Uno (pengusaha ternama), dan masih banyak lagi. Sejatinnya kegiatan tersebut merupakan pemilihan ketua umum PPI Dunia, namun diselingi dengan diskusi. Diaspora kali ini tidak hanya menikmati keindahan Singapura, tetapi lebih menggelorakan diaspora benuansa intelektual, dengan hadirnya beberapa utusan putra-putri terbaik Indonesia yang berkuliah di luar negeri merupakan momen yang tepat untuk berdiskusi mengenai kuliah di Negara masing-masing.

Kegiatan ini merupakan langkah pertama penulis dalam membuka gerbang untuk berdiaspora ke luar negeri sekaligus membuka jaringan berskala internasional. Banyak informasi yang didapat dalam kegiatan tersebut yakni; beasiswa luar negeri dan informasi-informasi

event internasional. Bagi penulis kegiatan tersebut digunakan untuk mempererat silaturahmi dengan berbagai delegasi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk ber-kuliah di luar negeri.

Diplomasi Batu Akik

Seusai opening ceremony pada kegiatan symposium internasional 2015 PPI Dunia di Siangapur yang dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yakni Bapak Anies Baswedan. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau pada saat pembukaan, hingga di akhir sambutan yang disampaikan oleh beliau yakni “anak muda memang sedikit pengalaman, karena ia tak menwarkan masa lalu, tetapi ia menawarkan masa depan”. Logis bagi penulis bahwa anak muda tak perlu takut akan salah dalam melakukan perubahan bagi dirinya maupun untuk sekitarnya.

Bertemu Anies Baswedan merupakan yang kedua kalinya bagi saya ketika pada tahun 2012 di Palangka Raya dalam acara Roadshow Indonesia Mengajar yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat STAIN Palangka Raya. Di Singapura dipertemukan kembali dan sempat berdiskusi kembali. Penulis sempat memberikan satu kenang-kenangan untuk bapak Anies Baswedan berupa “Batu Akik”, maklum karena pada saat tersebut batu akik masih tren, beliau begitu senangnya menerima batu tersebut, karena batu tersebut asli dari Kalimantan Tengah. Sebagai bentuk diplomasi untuk berbincang bersama beliau.

Ada beberapa hal dilakukan oleh penulis yang mungkin tidak dilakukan oleh peserta lainnya, yakni mencegat bapak Anies Baswedan, saya sempat berbincang-bincang dengan beliau beberapa menit selepas beliau memberikan studium general, beliau berpesesan bahwa dengan diaspora kita melihat Indonesia dengan berbagai perspektif negara. Sehingga hal ini memberikan kesan tersendiri untuk melakukan diaspora ke luar negeri selanjutnya.

Diskusi Meja Bundar bersama Dirut LPDP

Ada materi yang membuat penulis bertanya-tanya mengenai LPDP, ternyata ini penyedia beasiswa luar dan dalam negeri dari Indonesia untuk Indonesia, di sinilah pertamakalinya penulis tau apa mengapa anak-anak berprestasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dapat berkuliah di luar negeri, dengan harapan yang besar ketika pulang mampu membawa perubahan bagi Indonesia negeri tercinta ini.

Pada kesempatan berharga ini, materi LPDP disampaikan langsung oleh Direktur LPDP yakni bapak Eko Prasetyo. LPDP yang merupakan penyedia beasiswa dalam dan luar negeri untuk anak-anak

terbaik Indonesia guna mempersiapkan pemimpin masa depan di republik ini. Banyak peserta yang ingin berdiskusi langsung bersama bapak Eko Prasetyo secara langsung namun karena keterbatasan waktu sehingga beliau belum sempat untuk berdiskusi. Namun, itu menjadikan tantangan bagi penulis untuk mencoba melakukan loby kepada asissten beliau, al hasil rombongan Kalimantan Tengah mampu meyakinkan dan dapat berdiskusi langsung bersama LPDP di Meja Bundar ruang VVIP di KBRI Singapura.

Diskusi meja bundar ini hanya ada beberapa orang diantaranya kami yang berasal dari Kalimantan Tengah, beberapa awardee LPDP, dan Direktur LPDP. Dalam diskuksi ini bapak Eko Prasetyo LPDP sebagai beasiswa yang mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda Indonesia selanjutya.

Hal yang begitu berkesan pula yakni ketika bapak Eko Prasetyo (Direktur LPDP) meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama penulis dan kawan-kawan rombongan dari Kalimantan Tengah. Kita berdiskusi agar beasiswa LPDP mampir ke Kal-Teng, alhasil pada september yang lalu diadakannya seminar nasional bersama dirut LPDP yang diselenggarakan di dua kampus yakni IAIN Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Banyak pengalaman yang didapat penulis dalam kegiatan tersebut sehingga penulis berinisiatif untuk berdiaspora kembali di waktu selanjutnya.

BERDIASPORA KE INDIA (Negeri Bollywood)

Perjalanan ke Kerala, India Selatan

Suatu pagi di tanggal 8 Maret 2016, saya (penulis) mendapatkan sebuah pemberitahuan di email, penulis coba untuk melihat pemberitahuan email tersebut ternyata sebuah surat undangan menjadi pembicara pada Cultural Fiesta oleh Ma'din Academy, Kerala, India Selatan dengan tema "Indonesia: A Country of Diversity. Ini merupakan pengalaman yang berharga, karena akan menyampaikan Indonesia pada sebuah acara akbar di kampus tersebut. Perjalan kali ini menempuh waktu yang banyak, 2 jam dari Jakarta ke Malaysia, 4 jam dari Malaysia ke bandara Cochin, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 4 jam.

Sesampainya di sana, banyak hal yang mungkin sangat menarik bagi penulis di antaranya: waiter (pelayan) restoran, dan rumah makan yang semuanya laki-laki (tidak ada perempuan), anak-anak muda yang jarang saya temui di tempat-tempat santai. Tetapi hal yang paling berkesan bagi saya yakni mahasiswa di sana hampir semua menguasai

banyak bahasa internasional : Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Turki, dan Arab. Pada saat seminar pun mereka sangat tenang dan seksama dalam mendengarkan apa yang penulis sampaikan. Mahasiswa di sana mengenal Indonesia hanya dua hal yakni Jakarta dan Bali, Soekarno dan Megawati. Hal ini tentunya sangat menarik dalam hal mengetahui Indonesia sebagai negara yang beragam suku, bahasa, agama, pulau, dan etnis. Maka diaspora kali ini lebih memberikan arti yang sangat besar.

Kegiatan tersebut juga tidak hanya berupa seminar, namun juga sekaligus penandatanganan MoU antara IAIN Palangka Raya dan Ma'din Academy. Dengan demikian harapannya IAIN mampu mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya untuk melakukan short study. Sungguh luar biasa perjalanan kali ini, penulis tidak hanya menjadi narasumber pada kegiatan tersebut, tetapi juga mampu menjadi salah satu inisiator dalam kerjasama antara IAIN Palangka Raya dan Ma'din Academy. Bagi penulis, pemuda ternyata harus melakukan banyak hal tidak hanya skala nasional namun juga internasional, sehingga ini menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya. Dengan demikian kita mampu melihat dan mengetahui banyak hal tentang Indonesia menurut perspektif berbagai negara. Sehingga apa yang kita dapat di diaspora tersebut kita bawa ke Indonesia, untuk melakukan banyak hal.

CILEUNGSI; IELTS dan Future Leaders

Sebuah pemberitahuan di email mengenai kelulusan kursus bahasa Inggris yang dimotori oleh Yayasan Insancita Bangsa (YIB) dan KAHMI yang menjembatani persiapan kapasitas berbahasa Inggris guna *study abroad* yang sebelumnya pada tahun 2016 diadakan di Pare, Kediri, Jawa Timur. Kursus kali ini yang berfokus pada IELTS dilaksanakan 4 bulan di sebuah tempat yang sejuk serta dipenuhi pohon-pohon yang berbuah sehingga menambah cita rasa ber-IELTS walaupun kadang juga terdapat beberapa hal yang tidak nyaman karena berada di area tepat di belakang perusahaan-perusahaan.

Cileungsi, Kabupaten Bogor di mana beberapa orang yang terpilih menjadi peserta kursus kali ini datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia seperti Palangka Raya, Pontianak, Jakarta, Malang, Tulung Agung, Medan, dan masih banyak lagi. Ada 50 orang yang berjuang menggapai asa melalui IELTS walaupun pada akhirnya tersisa 47. IELTS menjadi salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk menepuh program S2 di luar negeri. Semua dengan harapan dan asa yang sama untuk berkuliah di luar negeri.

Hari pertama pada saat pembukaan kegiatan tersebut turut hadir Prof. Laode M kamaluddin, Ketua Umum PB HMI, Prof. Hafid Abbas, dan Kanda Ismet Djafar selaku ketua pelaksana harian dari kegiatan

kursus tersebut. Pada saat pembukaan kegiatan tersebut menceritakan beberapa pengalaman mereka yang pernah berkuliah di luar negeri. Sehingga kegiatan pembukaan ini lebih bagaimana memupuk semangat optimisme kepada peserta untuk berkuliah di luar negeri. Dalam kesempatan ini disampaikan bahwa akan hadir pula narasumber-narasumber inspiratif untuk menginspirasi peserta dalam memacu mimpi bersama YIB.

Selain itu turut hadir beberapa alumni YIB sebelumnya yang kini terpilih dan kompeten mengajarkan IELST kepada peserta kursus. Tutor-tutor yang sama juga mempunyai mimpi yang sama untuk berkuliah di luar negeri membuat mereka juga harus bekerja keras selain mempersiapkan berkas-berkas, kemudian mengajar peserta yang haus akan IELTS. Atmosfir pembelajaran di YIB memang begitu berbeda dengan tempat-tempat kursus seperti biasanya, mengadopsi layaknya sistem perkuliahan di luar negeri dengan *deadline* tugas dan jam belajar yang padat memacu adrenalin.

Sesuai yang disampaikan pada pembukaan YIB, kunjungan pertama yakni datang dari seorang perempuan berkebangsaan Australia. Dia adalah Hetty Cislowski, AusAID advisor for Indonesian and Cooperation, hadir dalam *sharing session* untuk menyampaikan pengalamannya di Indonesia. Serta mengenai beasiswa yang ada di Australia, salah satunya yakni AAS (Australia Awards Scholarship). Selain Catty, juga pernah berkunjung Mr. Juha Christensen yang berasal dari Finlandia dan menetap di Indonesia dan terlibat dalam proses perdamaian di tanah Rencong, Aceh. Beliau juga merupakan Director of Peace Architecture and Conflict Transformation Alliance (PACTA). Banyak hal yang dapat dipelajari dari seorang Juha yakni kerja-kerja kemanusiaan, Juha yang berkebangsaan Finlandia saja mau berkerja demi kemanusiaan dan bahkan di Indonesia yang kita cintai ini, maka sudah sepatutnya kita sebagai penerus bangsa agar selalu menanam dan menebarkan benih-benih perdamaian di bumi Indonesia ini. Kunjungan tak kalah inspiratif oleh Prof. Ismail S W merupakan alumni HMI yang berfokus pada dunia akademisi, dengan jam terbang sudah melalang buana benua Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Beliau merupakan salah satu figur akademisi luar biasa yang menginspirasi banyak kader HMI dan orang banyak di dunia akademisi. Keteladanan ini perlu ditiru oleh seganap kader HMI sebagai Insan Akademis. Pada kunjungan selanjutnya dating seorang rector Universitas Trilogi Jakarta beliau juga merupakan kader terbaik HMI bernama Prof. Asep Saefudin mantan Ketua Umum HMI Cabang Bogor tahun 1979 serta sering diundang memberikan PK di LPDP. Ini merupakan kesempatan emas bagi peserta sharing dan diskusi mengenai LPDP. YIB juga menggagendakan kunjungan ke kediaman RI 2.

Banyak hal yang dilalui pada kegiatan YIB tahun ini, tetapi hal yang terpenting ialah IELTS tidak hanya menjadi persyaratan untuk program jenjang pendidikan di luar negeri, secara tidak langsung belajar IELTS sama dengan mempersiapkan diri untuk menjadi *Future Leaders*.

C. Pergulatan Parpol Islam di Panggung Politik Pulau Dewata

[Oleh: Nurjaya]

Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui ketetapan MPRS No.XXV/1966 dan pembekuan Partindo yang memiliki hubungan erat dengan PKI merupakan lonceng pembuka era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno menyempurnakan proses stagnasi politik terhadap Islam. Jangankan menyuarakan gagasan Islam sebagai dasar negara, menjadikan Islam sebagai asas dan simbol partai pun tidak diperbolehkan. Karenanya pada masa Orde Baru, wacana tentang Ideologi politik Islam relatif sepi dipermukaan. Siapa pun yang ingin menyuarakan gagasan mengenai Islam politik atau Islam Ideologis, yang berbeda dengan arus utama pandangan politik keislaman Orde Baru, harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

Semenjak Pemilu 1971, Orde Baru mulai mengontrol partisipasi dan kegiatan politik. Melalui UU No.3 Tahun 1975 pemerintah menekan pembatasan jumlah peserta Pemilu yang menghasilkan tiga kontestan. Pertama, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan hasil gabungan lima partai politik yang ada sejak masa pemerintahan Soekarno (PNI, IPKI, PARKINDO, Partai Katolik, dan Partai MURBA). Kedua, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gabungan partai-partai berdasarkan Islam. Dan ketiga, Golongan Karya, suatu golongan fungsional yang dikembangkan oleh pemerintah Soeharto.

Partai pemerintah (Golkar), hampir selalu menang mutlak dalam setiap Pemilu di Bali khususnya Denpasar. Usaha-usaha untuk memuaskan pemerintah pusat juga dijalani secara mencolok, dengan menyukseskan program-program pembangunan pemerintah yang dijalankan melalui Golkar. Praktis tidak ada oposisi. Rakyat digerakan melalui kampanye pembangunan, dan terutama industri pariwisata. Ketika rezim Orde Baru runtuh, seketika arus perubahan ini mengubah konfigurasi partai politik di Bali. Strategi politik Orde Baru pada awalnya seakan-akan mengurangi peran politik puri di Bali. Soeharto melalui proyek modernisasi politik justru menempatkan puri sebagai sentral unsur G (Golkar), di samping ABRI dan birokrasi. Partai politik disederhanakan, yang ada dan boleh berkembang hanyalah Golkar, tetapi Golkar juga akhirnya mempergunakan potensi puri yang tergabung dalam kelompok ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Masih tetap menonjolkan puri sebagai unsur Golkar.

Kemunculan Parpol Islam di Tanah Dewata

Pembaharuan politik ala Orde Baru menjangkau jauh hingga ke dalam ranah kampus, tempat di mana benih-benih *aktivisme* dan *intelektualisme* tumbuh dan berkembang pesat. Pasca peristiwa Malari 1974 (Malapetaka Lima Belas Januari), melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sjarif Thayeb, mengeluarkan SK 028/1974 tentang NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang mempersempit ruang gerak mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya. Selain itu gerakan politik umat Islam ditindas selama 32 tahun oleh rezim otoriter tersebut. Dalam lingkungan politik seperti demikian, para pemimpin dan aktivis dari organisasi dan gerakan Islam baik di kampus atau luar kampus, berusaha mencari solusi untuk melawan Kerdzoliman dan memperkuat posisi Islam dalam masyarakat Indonesia khususnya di Bali.

Ketika Orde Baru tumbang, formasi lama berusaha dibentuk lagi. wacana politik aliran muncul lagi. Walau bagaimanapun, Orde Baru hanya berhasil merobohkan formasi politik, sedangkan formasi sosial tidak berubah dan justru memunculkan formasi baru, akar-akar sosial yang mendukung partai pada masa lalu tetap subur. Pasca tumbangnya kekuasaan rezim Orde Baru, melalui aksi jalanan *element* mahasiswa dan komponen masyarakat Indonesia, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, kembali memberikan banyak harapan menuju pintu pentas politik Indonesia yang baru.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki garis yang konsisten dari akar sosial Nahdatul Ulama dan Masyumi. Sementara Partai Keadilan (PK) juga berbasis sosial dari generasi baru yang berhasil mereka bentuk selama masa Orde Baru melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Umumnya PK digawangi oleh anak-anak muda, Mereka bisa berasal dari mana saja yang tersentuh dakwah gerakan *tarbiyah*. Partai-parti dengan asas Islam ini muncul kepermukaan ketika ada penghapusan asas tunggal dan kebebasan untuk berhimpun dan mendirikan partai politik. Seperti halnya di Bali PK didirikan oleh sarjana-sarjana muda yang pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Pemilihan Umum Tahun 1999 merupakan pemilu pertama pasca mundurnya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan. Habibie, selaku pengganti Suharto, melaksanakan pemilu tiga tahun lebih cepat dari waktu yang seharusnya dijadwalkan, yaitu tahun 2002. Percepatan pemilu ini adalah hasil tekanan rakyat pada pemerintahan Habibie karena ia dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang tampuk kekuasaan.

Presiden Habibie dianggap publik sebagai bagian dari Orde Baru yang mestinya turut dilengserkan. Karenanya, hakekat pemilu 1999 pada dasarnya untuk membentuk legitimasi baru atas siapapun yang akan menjadi Presiden pasca mundurnya Suharto. Pemilu ini terselenggara dibawah system politik liberal, artinya jumlah partai peserta pemilu tidak lagi dibatasi seperti pemilu-pemilu di era Orde Baru yang hanya melibatkan tiga partai politik yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Jumlah partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah 141 partai, sementara yang lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu 1999 berjumlah 48. Kemudian Pemilu 1999 diadakan tanggal 7 Juni 1999.

Konstelasi Parpol Islam di Tanah Dewata

Pemilu 1999 merupakan pertarungan awal partai-partai Islam Di Bali. Hasil pemilu 1999 menunjukkan perubahan struktural kekuatan politik di Bali dengan munculnya PDIP sebagai pemenang pemilu secara spektakuler di kabupaten/kota se Bali. Hasil tersebut menunjukkan Ideologi rakyat atas wacana kekuasaan yang dibangun oleh penguasa era Orde Baru. Perlawanan politik dengan menggulingkan partai penguasa sebagai upaya membangun kultur budaya politik baru, dengan memberikan kepercayaan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ketika itu menjadi simbol ketertindasan oleh rezim yang berkuasa bersama PPP.

Kemenangan PDIP pada pemilu 1999 di Indonesia termasuk Kabupaten/kota se Bali telah mengubah konstelasi politik di Bali. PDIP tampil sebagai partai hegemoni, mengalahkan dominasi partai Golkar yang selama 32 tahun selalu mendominasi. Sementara partai-partai Islam tidak mampu berbuat banyak, banyaknya partai Islam yang muncul kepermukaan justru membingungkan masyarakat Islam yang ada di Bali. Hal demikian justru membuat partai-partai Islam terjungkal. Namun bagaimanapun figur Abdurahman Wahid (Gusdur) dan Amin Rais masih begitu kuat dari kalangan NU dan Muhamadiyah di Bali sehingga kedua partai ini lebih banyak meraup suara dibandingkan partai yang memiliki ideology Islam lainnya.

Keperkasaan PDIP di Bali mampu menguasai seluruh jajaran kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dominasi PDIP di Bali mampu menjadikan kader sendiri sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pada pemilihan gubernur Bali tahun 2003 gubernur Bali dimenangkan oleh Dewa Made Bratha sedangkan wakilnya adalah I Gusti Ngurah Kusuma Kelakan. Partai Islam yang tidak punya suara dan perwakilan di legislatif dan eksekutif mereka tidak mampu berbicara banyak dalam panggung politik di Bali pada saat itu.

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2004 memulai babak baru kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama

kalinya rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung, bebas dan terbuka. Sebelumnya pemilihan presiden dilakukan melalui mekanisme yang ada di MPR. Tidak jarang proses ini melalui lobi-lobi politik, padahal proses pengambilan keputusan melalui lobi politik dianggap praktek yang kotor. Hal tersebut terbukti ketika pada pemilu 1999 PDIP memenangkan jumlah perolehan suara dalam pemilu 1999 namun gagal mengantarkan Megawati menjadi presiden. Hal ini juga telah menyadarkan publik akan pentingnya dilakukan pemilihan presiden secara langsung. Hasil proses ini bisa kita lihat dengan adanya perubahan mendasar pemilu 2004 dari pada pemilu sebelumnya, yaitu diberikannya hak rakyat Indonesia untuk menentukan sendiri presiden mereka melalui pemilu secara langsung, bebas, dan terbuka.

Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, jumlah ini lebih sedikit dibanding pemilu 1999 yang mencapai hingga 48 peserta. Hal ini diakibatkan adanya sistem *electoral threshold* yang diterapkan pada pemilu 1999 sehingga banyak partai yang berguguran dan tidak diperkenankan mengikuti pemilu pada periode pemilu 2004 dikarenakan tidak memenuhi ambang batas suara yang telah ditentukan. Bak bunga yang mekar dipagi hari pemilu 2004 merupakan momentum bagi parpol-parpol Islam di Bali untuk menunjukkan eksistensinya dengan beradu gagasan dan janji politik guna memikat hati para umat Islam yang memiliki hak suara agar memilih partai tersebut.

Secara mengejutkan PKS yang tidak lolos *electoral threshold* pada pemilu 1999 dan berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memiliki akselersi yang begitu cepat, PKS mampu masuk lima besar perolehan suara pemilu 2004 di Bali mengalahkan PKB, PAN, dan PPP yang memiliki rekam jejak kepartaian lebih unggul dibanding PKS. Seklipun PKS masuk lima besar tetapi sangat disayangkan PKS tidak mampu memenangkan calon legislative dalam persaingan DPR RI dan DPRD provinsi Bali, PKS hanya memenangkan beberapa calon DPRD kabupaten/kota di Bali saja, itupun hanya beberapa saja. Dan masih sama dengan pemilu 1999 PDIP tetap mendominasi disusul Golkar dan partai Pendatang Demokrat. Faktor utama dari keunggulan PKS sehingga mampu menikung PKB dan PAN adalah karena faktor ketokohan Gusdur dan Amin Rais yang sudah tidak aktif di partai lagi, kemudian karena memang usaha kader partai yang begitu bekerja keras untuk menikam simpatisan dari kalangan masyarakat muslim. Karena memang sasaran pemetaan pemilih mereka adalah masyarakat muslim di Bali.

Setelah menghadapi pemilu 2004 Partai-partai politik dihadapkan dengan hajatan akbar pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di kota Denpasar pada 24 Juni 2005 bersamaan dengan 5 daerah lainnya di Bali yaitu, Badung, Karangasem, Bangli, Tabanan, dan Buleleng. Pilkada langsung ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan

di Denpasar dan lima daerah lainnya di Bali. Awalnya banyak yang meragukan pilkada langsung dapat berjalan dengan lancar, aman dan Demokratis. Kehadiran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai regulator pelaksanaan pilkada langsung 2005 setidaknya mampu mengurangi kecemasan Masyarakat Denpasar pada waktu itu. Pilkada langsung 2005 serupa dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2004 dimana rakyat diberikan haknya untuk kepala daerahnya secara langsung. Namun lagi-lagi parpol Islam secara institusi tidak mampu berbuat banyak. tetapi secara pribadi tokoh-tokoh parpol dan tokoh agama banyak yang bergabung mendukung calon tertentu.

Satu tahun menjelang pemilu 2009, Bali dihadapkan kembali dengan pesta demokrasi pemilihan secara langsung untuk gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2008. Dewa Made Brata yang telah menjabat dua periode harus rela menyerahkan estafet tongkat kepemimpinannya kepada gubernur masa bakti 2008-2013. Partai Islam yang tidak memiliki wakil di DPRD provinsi tidak bisa berkoalisi dengan dengan partai lain untuk mengusung calon. Parpol-parpol Islam hanya menjadi partai pendukung untuk membumbui persaingan pentas politik di Bali. Kemenangan gubernur Mangku Pastika (Purnawirawan polisi) dan wakil gubernur Puspayoga (Kader PDIP), merupakan suatu pergeseran tradisi di era reformasi, Mangku pastiki yang merupakan bukan kader PDIP mampu memenangkan pilkada pertama kalinya yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008 KPU mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004. Kehadiran partai-partai baru dengan warna nasionalisme semakin menenggelamkan partai-partai Islam di Bali. Terbukti dari sekian partai Islam yang ada, hanya PKS yang masuk lima besar. Hal yang sama terjadi seperti pemilu-pemilu sebelumnya PKS hanya meloloskan beberapa caleg ditingkat kabupaten/kota saja. Sedangkan partai Islam lainnya nihil. Begitu pun dalam pemilihan gubernur periode 2013-2018 parpol Islam masih dalam kondisi belum stabil. Mangku Pastike yang berpasangan dengan Sudikerte mampu mengalahkan pasangan yang diusung PDIP. Meskipun PDIP menang dominan di Bali pada pemilu 2009 namun secara menyakitkan harus mengakui keunggulan pasangan yang diusung partai Golkar.

Untuk yang ketiga kalinya rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu 2014 merupakan pemilu teramping sepanjang perjalanan reformasi hal ini karena diikuti oleh 12 peserta pemilu, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang diikuti oleh banyak partai. PKS yang selalu diatas parol Islam semenjak pemilu

2004 begitu mendominasi namun tidak bisa berbicara banyak jika dibanding partai nasionalis yang ada. Meskipun partai-partai Islam pada pemilu 2014 terpental dari lima besar, tapi secara peningkatan volume suara mengalami peningkatan.

Epilog

Meskipun diakui bahwa saat ini partai-partai Islam tengah terpuruk dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan miring yang dapat merusak citra partai-partai Islam, Partai Islam harus tetap solid dalam menghadapi masalah tersebut, dan membuktikan kepada masyarakat bahwa Parpol Islam di Bali adalah partai yang bersih dan benar-benar bekerja dan melayani masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga mampu dijadikan *role model* persatuan parpol Islam diseluruh Indonesia.

Banyaknya partai Islam yang berguguran dalam setiap periode pemilu di Bali diakibatkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antar partai, mereka terlihat egois dengan jalan dan programnya masing-masing. Sehingga pemilih mereka tersebar tapi tidak merata maka tidak heran jika suara umat Islam yang dijadikan sasaran utama justru mengalami pengembosan karena suaranya terbagi dengan partai-partai lain.

Dengan adanya pemukiman penduduk berdasarkan suku dan agama yang tersebar di beberapa daerah di Bali, ini merupakan sasaran yang empuk untuk di garap dan dikembangkan bersama, partai Islam harus kembali ke khitohnya sebagai pembaharu peradaban. Setiap parpol Islam harus serius menggarap daerah yang memang sudah menjadi basis masanya atau daerah baru tapi belum dimaksimalkan oleh partai lain, sedangkan partai Islam lain juga harus berbuat demikian, jadi kedepannya tidak ada saling curiga antar parpol Islam. dan diharapkan kedepannya parpol Islam bisa saling bersinergi agar memunculkan DPRD provinsi dan terus menambah DPRD kabupaten / kota.

D. Perdamaian Aceh ; Pesan Damai dari Bumi Tanah Rencong

[Oleh : Rahmadi M. Ali]

“Bertrand Russel, seorang filosof Inggris berkata bahwa bom tidak pernah menjadi sarana untuk melindungi rakyat, tetapi ia selalu menjadi sarana untuk membinasakan”

Hampir dua belas tahun silam, tepatnya pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Bermula dari sebuah konflik yang berkepanjangan sehingga mewujudkan satu perdamaian yang dipandang penting oleh Dunia Internasional antara pemerintah Pusat RI dengan pimpinan politik GAM pada 15 Agustus 2005 di Vanta Helsinki, Finlandia. Setelah melalui tangisan darah rakyat Aceh dengan pemberlakuan darurat militer sampai dengan darurat sipil serta diakhiri dengan hantaman bencana besar Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 yang menyita perhatian dunia.

Konflik yang terjadi di Aceh bagi sebagian orang bisa dikatakan konflik yang berkepanjangan dan mengingatnya sekarang akan menyayat hati siapapun. Para pengkritisi berlomba-lomba melontarkan argument-argumen dan kritikan pedas terhadap pemerintah maupun terhadap gerakan yang meminta merdeka dari pemerintah pusat, sebagian mereka menyalahkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan sebagian yang lain menyalahkan pemerintah pusat Republik Indonesia.

Tepat pada 26 Desember 2004 silam pada pukul 8.00 WIB, terjadi gempa dengan kekuatan besar yang disusul dengan bencana Tsunami menghancurkan pesisir pantai Aceh dan beberapa daerah lain. Bencana tersebut telah membuat keadaan darurat dan mendesak (*sense of urgency*) yang baru, baik dari pihak pemerintah RI maupun pihak Gerilyawan bersenjata untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan dan memulai rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan Aceh kembali pasca bencana. Saat ini pemerintahan RI dikomandoi oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakilnya Bapak Jusuf Kalla, maka telah ditanamkan sebuah komitmen bersama untuk bersatu padu berdamai dan membangun Aceh menjadi negeri yang aman, tenang dan sejahtera.

Proses kesepakatan penandatanganan perjanjian damai atau Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki juga dilalui melalui tahapan dan negosiasi serius antara kedua belah pihak yang bertikai, akhirnya keadaan saling tawar-menawar di hadapan fasilitator Crisis Management Initiative (CMI) yang saat itu dipimpin oleh Maarti Ahtisaari. Puncak dari perundingan-perundingan ini adalah melahirkan sebuah kesepakatan penandatanganan MoU Helsinki. Hasil kesepakatan

secara umum telah meneguhkan kembali bahwa kedaulatan Indonesia atas Aceh.

Butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam naskah MoU Helsinki telah berhasil diwujudkan dan untuk dijalankan secara bersama-sama, mulai demiliterisasi dan decommissioning, begitu juga dengan beberapa kesepakatan lainnya yang sampai hari ini masih menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan di Aceh walaupun tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dahulu ketika awal perumusannya. Jika melihat implementasi dari kesepakatan ini masih sangat jauh dengan substansi yang diharapkan ketika perjanjian damai ketika itu.

Disaat yang sama, pemerintah pusat juga memberikan hak otonomi secara luas kepada Aceh untuk mengelola sumber dayanya. Kesempatan yang sama juga diberikan kepada partai-partai politik dibentuk dan ikut serta dalam kancan pesta demokrasi di negara ini. Pimpinan GAM menyepakati akan diberlakukannya pelucutan senjata terhadap para pejuang atau anggota GAM, sedangkan pemerintah Indonesia setuju untuk melakukan penarikan pasukan TNI dan Polri dari daerah Serambi Mekkah.

Akhirnya, di Helsinki, Finlandia dengan kondisi dingin pada 2005 silam, pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian damai. Kedua belah pihak menyepakati berdamai dan jangan ada lagi konflik bersenjata di Bumi Tanah Rencong dan bumi para Ulama Allah. Mereka sepakat dan memiliki visi misi yang sama, bahwa Aceh harus kembali dibangun dan direkonstruksi kembali.

Jika dilihat melalui kacamata agama dan sejarah Islam, konflik Aceh dapat diterjemahkan seperti konflik pada masa Raja Thalut dengan Raja Jalut, sebuah kisah pada masa Nabi Daud As, yang seakan-akan kedigdayaannya itu membungkam sesama Raja baik di dalam maupun di luar jazirah. Begitupun dengan konflik Aceh sepanjang sejarah masa lalu yang saling membunuh sesama manusia bahkan yang lebih ironisnya sesama pemeluk agama yang sama yaitu Islam, sebuah agama yang katanya membawa kedamaian diatas permukaan bumi, namun saling menumpahkan darah sesamanya. Itulah konflik masa lalu yang pernah terjadi di bumi para ulama juga dikenal dengan bumi "tanah rencong".

Disadari ataupun tidak disadari, saat ini perdamaian Aceh telah hampir mencapai dua decade perjalanan dan proses perdamaian pasca konflik, tepatnya pada 15 Agustus 2005. Sebuah rentan waktu yang sangat panjang bagi para pecinta dan pekerja perdamaian dalam proses mendamaikan konflik antar sesama manusia.

Merawat Perdamaian Aceh

Jika kita dihadapkan pada pilihan kepada sesame umat manusia dipermukaan bumi ini; Manakah yang lebih baik bagi mereka, peperangan atau perdamaian ? Semuanya tentu akan menjawab bahwa perdamaian yang mereka pilih. Karena apapun motivasi dan alasannya peperangan tidak memiliki efek kebaikan lain untuk masyarakat kecuali hanya kerusakan, kehancuran dan kebinasaan, baik bagi manusia itu sendiri, sumber-sumber penghidupan mereka seperti ternak dan sawah-ladang maupun peradaban dan hasil-hasil kemajuan yang telah mereka capai. Sedangkan perdamaian akan memberikan dampak positif bagi tatanan kehidupan masyarakat seperti kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman, kemakmuran dan kemajuan dari segala bidang pendidikan dan teknologi.

Belajar dari sejarah masa lalu bahwa ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih berperang melawan kebijakan Pemerintah Indonesia mengalami banyak sekali kerugian dari fisik maupun non-fisik, banyak anak menjadi yatim karena kehilangan ayahnya, banyak perempuan menjadi janda karena suaminya meninggal dalam peperangan, banyak rumah dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, banyak tempat pendidikan dibakar sehingga banyak anak-anak tidak dapat belajar dengan tenang. Begitulah sekilas cuplikan luka lama yang pernah dirasakan oleh masyarakat Aceh. Bahkan penulis sendiri pernah menyaksikan langsung bagaimana terjadi baku tembak antar kelompok GAM dan Tentara RI pada waktu itu. Beginilah kerugian yang dirasakan diakibatkan oleh peperangan yang berkepanjangan.

Tidak ada orang arif di bumi, filosof atau reformer yang tidak mencela peperangan dan segala akibatnya yang mengerikan sebagai hasil dari tindakan kekejaman, keganasan dan kebuasan penjahat perang. Kita bisa melihat bagaimana kekejaman perang yang terjadi di Afganistan, Palestina dan Suriah yang telah meluluhlantakan seluruh aspek kehidupan. Begitu pula beberapa waktu lalu yang terjadi di Aceh dengan penerapan operasi militer, kedamaian yang telah lama didambakan pupus sudah dan hanya sebuah impian kosong. Namun bagi pencetus peperangan barangkali ini suatu kehormatan dan dia mendapat piagam kehormatan dari padanya.

Seorang ahli pikir militer abad ke 20, Leddel Hart, mengatakan bahwa dampak psikologis yang ditimbulkan akibat peperangan pada umumnya, terutama perang hidrogen, akan lebih banyak memusnahkan manusia dan lebih hebat daya penghancurannya. Demikian pula Bertrand Russel, seorang filosof Inggris, mengatakan bahwa bom tidak pernah menjadi sarana untuk melindungi rakyat, tetapi ia selalu menjadi sarana untuk membinasakan. "Saya berulang-ulang mengatakan dan akan terus saya ulangi pada setiap kesempatan, bahwa orang yang berbuat kejahatan memusnahkan rakyat dan membinasakan

berjuta-juta manusia lainnya, sama sekali tidak mempunyai hak hidup di tengah umat manusia,” katanya.

Akhirnya Uni Eropa (UE) mendukung secara aktif proses perdamaian tersebut dan upaya rekonstruksi jangka panjang di Aceh. Dalam rangka memantau pelaksanaan perjanjian perdamaian, UE telah mengerahkan Misi Pemantauan Aceh (AMM) yang menjalin kerja sama secara erat dengan lima Negara anggota ASEAN. Sebagai pengamat yang netral, misi UE ini melakukan investigasi terkait keluhan dan dugaan pelanggaran ketentuan MoU. Misi sipil tersebut berhasil memenuhi dan mengakhiri masa tugasnya setelah satu tahun pada saat kedua pihak telah memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. AMM merupakan misi pertama di Asia yang dipimpin oleh UE dan merupakan inisiatif kerja sama pertama dengan ASEAN dalam bidang ini.

Sejak berakhirnya misi pemantauan, UE tetap melanjutkan dukungannya dalam upaya perdamaian di Aceh melalui program-program pengembangan kapasitas jangka panjang, reintegrasi dan pelatihan kepolisian. Termasuk dukungan AMM, langkah-langkah untuk mendukung perdamaian mencapai nilai sekitar 40 juta euro.

Selanjutnya pada 2006, UE mengerahkan misi pengamat pemilihan umum (EOM) untuk memantau proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang pertama di Aceh pascakonflik. Perdamaian telah berhasil dipertahankan selama hampir 12 tahun dan beberapa putaran pilkada. Penyelesaian konflik mengakhiri terkucilnya Aceh dan membuka pintu bagi pembangunan, investasi dan reintegrasi ekonomi dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan dunia. UE juga merupakan salah satu pemberi bantuan terbesar untuk upaya rekonstruksi Indonesia yang berhasil membangun kembali Aceh setelah tsunami. UE memberikan kontribusi sebesar 200 juta euro untuk tanggap darurat tsunami dan merupakan pemberi bantuan terbesar dalam dana multi-donor fund (MDF) untuk pembangunan jangka panjang yang mencapai sekitar 85% dari total dana sebesar 440 juta euro. (Vincent Guérend, 2015).

Otonomi Aceh sangat menentukan keberhasilan kesepakatan perdamaian di Aceh, namun otonomi tersebut juga membawa sejumlah tantangan baru. Untuk memastikan kelangsungan kehidupan masyarakat Aceh, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia dan para pihak berwenang setempat untuk tetap menjalin kerja sama yang erat dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif.

Terkait dengan hukum syariah yang diterapkan di Aceh sebagai bagian dari otonomi khususnya, menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah setempat untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) dan melindungi hak para kaum minoritas, tanpa memandang agama, kelompok etnis atau orientasi seksual.

Pandangan Agama Islam

Dalam perspektif Islam untuk mencegah terjadinya peperangan, Islam melarang tindakan perusakan, penyerangan dan agresi, bahkan sebaliknya Islam memerintahkan umatnya supaya berlaku adil dan baik walau terhadap pihak yang tidak disenangi. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Maidah: 8).

Islam juga berseru kepada umat manusia supaya mewujudkan perdamaian dan memantapkan keamanan serta ketertiban, bahkan dengan tegas menyerukan diakhirinya pertikaian bersengaja. Allah Swt berfirman: “Jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman saling berperang, maka damaikanlah kedua-duanya. Jika salah satu dari dua golongan itu bertindak zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah mereka hingga mereka kembali kepada perintah Allah.” (QS. Al-Hujarat:9).

Merawat dan menjaga damai jauh lebih sulit dari perjuangan untuk mendapatkannya. Tidak diragukan lagi, bahwa dari perspektif agama Islam adalah agama satu-satunya yang mendambakan terwujudnya perdamaian di muka bumi. Sebagaimana banyak disebut dalam Alquran, perdamaian/damai (salam) adalah satu dari sebutan nama-nama agung (asmaul husna) Allah Swt. Dalam Islam, salam juga sebagai sebutan yang diucapkan dalam tasyahud di waktu shalat.

Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari supaya damai tetap terawat bagus, Islam mengajarkan ketika muslim bertemu dengan saudaranya sesama muslim, dua-duanya disunahkan saling mengucapkan assalamu'alaikum (aalam sejahtera bagi kalian). Islam tidak pernah mengenal peperangan kecuali untuk menangkal agresi melawan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kaum yang zalim.

Dalam hal itu peperangan bahkan diwajibkan demi memelihara keselamatan Islam dan penyebarluasan kebenaran Allah di kalangan umat manusia sebagaimana firman-Nya: “Hendaklah kalian berperang di jalan Allah, melawan orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian bertindak melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah: 190) Akan tetapi jika pihak yang melancarkan agresi itu sendiri sungguh-sungguh sudah menghendaki perdamaian, kaum muslimin diharuskan menyetujui adanya perdamaian, sebagaimana firman Allah Swt: “Apabila musuh-musuh menghendaki perdamaian maka kalian hendaklah berdamai dengan mereka.” (QS. Al-Anfal: 61).

Berbagai peperangan yang pada zaman dulu dilakukan oleh kaum muslimin tidak lain adalah peperangan melawan kezaliman, kejahatan, dan kebatilan untuk memenangkan keadilan dan kebenaran. Semua peperangan Islam di masa lampau itu, prinsip kemanusiaan dijaga baik-baik penerapannya dan semua perintah serta larangan Allah dipatuhinya dengan ketat.

Secara fitrah manusia di dunia ini tetap mendambakan kehidupan damai, tentram dan sejahtera selama-lamanya, tak terkecuali di bumi Aceh. Pada prinsipnya masyarakat Aceh sedang berjuang bahu membahu merawat damai dengan cara mencegah perseteruan dan perselisihan. Namun jika tidak, tak ada lagi harapan untuk mencapai kemajuan dan peradaban yang tinggi, bahkan kelestarian dan kedamaian sendiri rasanya akan sukar dipertahankan. Jalan buntu mengerikan yang mengepung kita dewasa ini berupa ancaman terhadap keselamatan dan perdamaian, hanya dapat diterobos dan didobrak oleh persatuan semua anasir positif dan sehat yang dengan mengibarkan panji-panji kemanusiaan, berani melancarkan perjuangan menentang anasir negatif dan destruktif (Munawar A. Djalil, 2013).

Damai Aceh ; kini dan masa depan

Kini, proses pelaksanaan regulasi undang-undang yang dihasilkan dari hasil perjanjian MoU Helsinki terkesan masih jalan ditempat, pasalnya masih terdapat beberapa kendala teknis yang selalu tidak ada titik temu antara pihak pemerintah pusat dan daerah sehingga terkesan seperti ada gelombang demonstrasi, tuntutan dan kritikan yang menjadi sebuah refleksi tersendiri. Banyak yang menganggap bahwa semua ini adalah konflik dan perjanjian damai yang sia-sia. Pada masa yang akan datang dikhawatirkan akan memicu ledakan yang lebih besar lagi kalau suatu masalah tidak benar-benar dituntaskan janji-janji yang pernah disepakati.

Dihinggapi rasa yang sama-sama bersalah dan tidak mau mengalah dengan mengklaim bahwa sudah menyelesaikan kewajiban dan telah diberikan hak, otomatis proses pelaksanaan perdamaian Aceh sangat terancam. Klaim sudah menyelesaikan kewajibannya selalu dimunculkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian tertentu bisa ditamsilkan seperti “senyum palsu”.

Jika pemerintah pusat dan daerah sama-sama memiliki kesungguhan hati dalam merealisasikan isi perjanjian damai sebagaimana dimandatkan, maka potensi konflik yang digambarkan diatas tidak akan bermunculan kembali. Adanya rasa keikhlasan hati merupakan *Basic needs* atau kebutuhan dasar bagi keberlangsungan perdamaian Aceh. Kebutuhan ini mendorong semua unsur masyarakat

untuk berpikir dan bertindak memajukan Aceh dan Indonesia dengan cara dan peran masing-masing. Aceh harus menjadi *role model* bagi perdamaian Indonesia dan perdamaian dunia.

Menciptakan rasa aman dan memajukan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah tugas semua unsur elemen bangsa, termasuk masyarakat Aceh. Akan tetapi jika masih terjadi saling klaim dan tidak saling mempercayai akan menghambat produk regulasi Pemerintah Aceh dengan aturan yang tidak berlandaskan pada aturan maka akan mengakibatkan perdamaian yang menjadi korban ditengah pertingkaian regulasi dan ini juga merupakan cikal bakal terjadinya konflik yang justru akan lebih dahsyat lagi.

Adapun tujuan dari perdamaian dan penghentian konflik bersenjata di Aceh adalah untuk mewujudkan penegekan hukum, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan perdamaian yang dimaksud, tentunya harus diawali dengan jaminan keamanan yang stabil, situasi politik dengan tidak mempolitisasi hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan konflik kembali.

Selanjutnya, mesti diingat bahwa banyak pihak anti damai sedang melancarkan aksi untuk menimbulkan antagonisme di antara kelompok-kelompok sosial melalui provokasi untuk menimbulkan kerusuhan. Dengan demikian ditimbulkan kesan bahwa keamanan terancam dan pendekatan keamanan tetap diperlukan. Kegiatan para provokator tersebut relatif efektif saat ini di Aceh, karena masyarakat sedang berada dalam ketidakpastian politik dan tekanan ekonomi yang amat besar.

Ketidakpastian tersebut membuat orang menjadi tidak aman (insecure) dan labil serta mudah dihasut dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, usia perdamaian Aceh yang pada hari ini telah berusia 8 tahun (15 Agustus 2005 - 15 Agustus 2013), hendaknya terus kita jaga dan kita rawat bersama. Menurut perspektif Islam merawat damai merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat atas keselamatan individu, namun juga sekaligus menjadi tanggung jawab individu atas keselamatan masyarakat.

Perjuangan untuk menyelamatkan manusia dari tindakan biadab dan antidamai, terletak di tangan manusia yang berhati hidup, para pemimpin agama, pemimpin rakyat dan para pemimpin bangsa. Semua kita harus terpanggil untuk merawat dan membumikan damai kepada segenap umat manusia terutama di Aceh, dengan bekerja keras dan jujur serta memastikan bahwa setiap orang harus dapat hidup dengan tertib, aman, makmur dan sejahtera. Allahu a'lam bisshawab.

E. Pro Kontra Penghapusan Peraturan Pendirian Rumah Ibadat *[Oleh: Sirajuddin]*

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.⁸⁷ Manifestasi adanya pluralitas tersebut agar kiranya setiap warga negara bebas menjaga dirinya sendiri, sesuai dengan pencarian dan pilihannya, serta dapat menghargai dan menghormati perbedaan dengan orang lain, misalnya dalam hal pendirian rumah ibadat. Rumah ibadat merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing setiap warga negara, oleh karenanya maka diperlukan suatu regulasi hukum yang tepat. Dalam upaya mengatur prosedur pendirian Rumah Ibadat tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat pada Pasal 14 menyebutkan syarat-syarat pendirian rumah ibadah tersebut yaitu⁸⁸:

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); s
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Pada prinsipnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

⁸⁷ Pimpinan MPR dan tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Bangsa dan Negara*, (jakarta: Sekretariat jenderal MPR RI, 2012). hlm.15

⁸⁸ Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

dan 8 Tahun 2006 bahwa tentang pendirian rumah ibadat adalah untuk melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama bagi pemeluk-perneluknya, dan untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib. Namun sangat disayangkan peraturan yang dibuat ternyata justru banyak menimbulkan polemik atau pro-kontra ditengah masyarakat, sehingga pemerintah harus benar-benar memberikan perhatian terhadap hal tersebut karena ini akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Berangkat dari hal tersebut maka penulis ingin menganalisis lebih dalam dimanakah letak perbedaan sudut pandang serta alasan-alasannya baik dari persektif pro maupun kontra, dan apakah memang regulasi/peraturan tentang Pendirian Rumah Ibadat masih sesuai dengan UUD 1945 sehingga tidak perlu untuk dihapuskan, ataukah sebaliknya bertentangan dengan UUD 1945 sehingga perlu untuk dihapuskan.

Analisis Dari Perspektif PRO Terhadap Penghapusan Peraturan Pendirian Rumah Ibadat.

1. Kajian teoritis –filosofis.

Secara teoritis para ahli hukum⁸⁹ sependapat bahwa salah satu konsepsi negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dan tentu ini juga sejalan konsepsi negara demokrasi dengan menganut prinsip *equal protection before the law* dimana negara dan hukum harus melindungi warga negaranya secara sama, tanpa yang satu dianak emaskan dan yang lain di anaktirikan baik itu suku, budaya, ras dan termasuk agama karena ini adalah bentuk persamaan kedudukan di antara warga negara. Indonesia adalah juga termasuk negara demokrasi dan negara hukum (*democracy and Nomocracy*) sangat menjunjung tinggi tentang HAM sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusi⁹⁰.

⁸⁹ Julius Stahl(Perlindungan terhadap HAM), A.V. Dicey (Equality before the law.), Arief Sidharta, Scheltema (Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity). Dan Jimly Asshiddiqi e(perlindungan terhadap HAM) serta pakar yang lainnya.

⁹⁰ Istilah konstitusi sering digunakan dalam maksud yang sama dalam UUD,meskipun secara teoritis cakupan arti konstitusi lebih luas daripada arti UUD. Lihat pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945(Negara indonesia adalah berkedaulatan rakyat/demokrasi dan negara hukum)

Dalam ilmu hukum kita tidak hanya melihat dari segi sumber hukum formal tetapi juga hukum materil, secara filosofi pancasila adalah sumber hukum dalam arti secara materil yang tidak saja menjiwai, tetapi harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum di Indonesia⁹¹. oleh karena itu hukum di Indonesia haruslah berdasar pada pancasila yang juga merupakan dasar dan ideologi negara sekaligus *Modus vivendi* (kepakatan leluhur) bangsa Indonesia yang sulit atau (mungkin) tidak bisa digantikan⁹².

Sehingga Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV yang juga mengatur tentang Pendirian Rumah Ibadat pada Pasal 14 ayat (1) yang mengatur persyaratan administratif dan ayat (2) persyaratan khusus meliputi daftar KTP pengguna rumah minimal 90 orang dan 60 orang dukungan masyarakat setempat⁹³ secara tidak langsung mengandung unsur diskriminatif, terhadap kaum umat minoritas diwilayah tertentu di Indonesia. Karena Secara filosofis, Tentu hal ini bertentangan dengan pancasila⁹⁴:

Pancasila sila pertama(1) Ketuhanan Yang Maha Esa, pada butir ke-6 yang mengatakan: mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, Sila kedua (2) menagatakan: Mengakauai persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan, suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Tempat beribadah adalah instrumen mutlak bagi setiap warga negara, olehnya negara harus hadir dalam menjamin dan melindungi hak konstitusinal tersebut.

Jika peraturan tersebut diabaikan maka jangan sampai ini akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa sesuai sila ketiga(3) pancasila yaitu persatuan Indonesia karena tidak adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima(5), padahal Soekarno mengatakan bahwa: *pancasila adalah satu alat mempersatu yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke*

⁹¹ Jimly assiddiqie, *pengantar ilmu hukm tata negara*.(Jakarta: PT. RAJAGARFINDO PERASADA,2013). hlm. 159.

⁹² Moh. Mahfud Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*.(Jakarta: PT. RajaGarfindo, cetakan Perasada. Cetakan ke-2, 2011).hlm.5.

⁹³ Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. *Op.cit*.

⁹⁴ Lihat butir-butir pancasila.

*hanyalah dapat bersatu padu diatas dasar pancasila itu*⁹⁵.Oleh karena itu ditinjau dari kajian teoritis-filosofis diatas maka sangat urgen untuk dihapus peraturan pemerintah tentang pendirian rumah ibadat saat ini.

2. Kajian yuridis-normatif

Secara yuridis normatif atau dilihat dari perseptif sumber hukum formal⁹⁶, terkait tentang topik pembahasan kita mengenai penghapusan peraturan tentang pendirian rumah ibadat memiliki keterkaitan secara konstitusional mengenai HAM yang sudah ditegaskan dalam UUD 1945. pasal 28 I ayat (2) Menyatakan: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasr apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Lebih juga disebutkan dalam UUD 1945 pada Pasal 29 ayat(2) yaitu: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.”

Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi(HAM) berbunyi:

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dijelaskan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dan juga dalam bagian II pasal 2 ayat 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenanton Economic, Social And Cultural rights* (Kovenan

⁹⁵ Yudi Latif, *NEGARA PARIPURNA Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas PANCASILA*. (Jakarta: PT.Gramedia, 2011), hlm.1.

⁹⁶Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*.(Jakarta:Djambatan,2001)hlm.23

Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) mengatakan: “Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.”

Dari uraian diatas baik dilihat dari UUD 1945 , Undang-undang Nomor 39 tentang HAM dan juga Undang-Undang No. 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social And Cultural rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), maka sudah jelas bahwa hak untuk beragama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan tersebut termasuk mendirikan rumah ibadah sudah mendapat jaminan secara hukum, Tentunya jaminan tersebut bukan merupakan suatu yang abstrak, tetapi merupakan sesuatu yang absolut, sehingga pada prakteknya perlu untuk ditegaskan.

Oleh karena itu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah, pada Pasal 14 ayat (1) yang mengatur persyaratan administratif dan ayat (2) persyaratan khusus meliputi daftar KTP pengguna rumah minimal 90 orang dan 60 orang dukungan masyarakat setempat, sudah seyoginya untuk dicabut karena dari segi hirarki perundang-undangan⁹⁷ saja tidak termasuk, dan walaupun dipaksakan maka ini bertentangan dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang lainnya. Sehingga peraturan tentang pendirian rumah ibadah saat ini harus dihapuskan.

3. Kajian empiris-sosiologis

Bila kita lihat dewasa ini ternyata fakta dimasyarakat sudah muncul sikap intoleransi dalam beragama, Menurut Komnas HAM⁹⁸, selama tahun 2012 dan 2013 saja , pengaduan tentang peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan begitu tinggi. Pada tahun 2012, tercatat 68 pengaduan dengan perincian: perusakan dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 20 kasus, konflik dan sengketa internal 19 kasus, gangguan dan pelanggaran ibadah 17 kasus dan diskriminasi minoritas serta penghayat kepercayaan 6 kasus. Pada tahun 2013 Komnas HAM menerima 39 berkas pengaduan. Diskriminasi, pengancaman, dan

⁹⁷Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah berturut-turut.

⁹⁸Data dari pelaporan KOMNAS HAM.

kekerasan terhadap pemeluk agama sebanyak 21 berkas, penyegelan, perusakan, atau penghalangan pendirian rumah ibadah sebanyak 9 berkas dan penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah sebanyak 9 berkas.

Menganalisis fakta yang kemudian diperkuat dengan data dari Komnas HAM diatas maka peraturan tentang pendirian rumah ibadat saat ini urgen untuk dihapus dan diganti dengan produk undang-undang supaya pengaturannya harus lebih jelas sehingga setidaknya-tidaknya bisa meminimalisasi sikap atau tindakan diskriminatif ditengah masyarakat.

Analisis Dari Perspektif KONTRA Terhadap Penghapusan Peraturan tentang pendirian rumah ibadat.

1. Kajian teoritis –filosofis.

Secara teoritis dalam konsepsi Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum⁹⁹. tentu ini juga sejalan dengan konsepsi negara demokrasi dengan menganut prinsip *equal protection before the law* dimana negara menyamakan persamaan derajat tanpa membedakan suku, budaya, ras dan Agama.

Dalam ilmu hukum kita mengenal sumber hukum materil dan sumber hukum formal¹⁰⁰, sumber hukum materil salah satunya meliputi dalam arti filsafat yang mengenal hakekat hukum secara filsafat seperti yang dikatakan oleh *Plato* dan *Aristoteles* yang memandang bahwa hukum adalah cinta akan kebijaksanaan dan keadilan¹⁰¹. secara filosofi pancasila adalah sumber hukum dalam arti secara materil yang tidak saja menjiwai, tetapi harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum diindonesia¹⁰².

Jika dilihat dari perspektif Pemerintah, dapat dipahami bahwa mengapa Pemerintah mencoba membuat suatu pengaturan terkait dengan pembangunan Rumah Ibadah melalui PBM pendirian Rumah Ibadah Tahun 2006, yaitu untuk menjaga ketertiban umum, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang plural yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan PBM ini adalah

⁹⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.8.

¹⁰⁰ Waluyadi, op.cit. hlm. 23-25

¹⁰¹ Waluyadi, *ibid.* hlm. 36.

¹⁰² Jimly asshiddiqie, op.cit., hlm. 159.

prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi seyogyanya tidak akan menimbulkan konflik pengaturan tentang izin pembangunan rumah ibadat ini dalam konteks HAM pada dasarnya diperkenankan sepanjang untuk mencegah kekacauan publik¹⁰³. Karena Secara filosofis Tentu hal ini masih sejalan dengan pancasila¹⁰⁴. pancasila sila pertama(1) Ketuhanan yang Maha Esa, pada butir ketiga (3) yang mengatakan: mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan butir ke empat(4) yang mengatakan: Membina kerukunan hidup sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu ditinjau dari kajian teoritis-filosofis diatas maka peraturan pemerintah tentang pendirian rumah ibadat saat ini tidak perlu dihapuskan karena masih sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

2. Kajian yuridis-normatif

Secara yuridis-normatif atau dilihat dari persepektif sumber hukum formal¹⁰⁵, terkait tentang topik pembahasan kita mengenai penghapusan peraturan tentang pendirian rumah ibadat memiliki keterkaitan secara konstitusional yang sudah ditegaskan dalam UUD 1945. pasal 28 J ayat (2) Menyatakan:

Dalam hal menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dan juga disebutkan dalam UUD 1945 pada Pasal 29 ayat(2) yaitu:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.”

Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang HAM (Hak Asasi Manusia) Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi.

¹⁰³Nela Sumika Putri, *Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Izin Pembangunan Rumah Ibadah*, Jurnal, (Sumedang: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012), hlm. 13.

¹⁰⁴Lihat butir-butir pancasila. *Op.cit.*

¹⁰⁵Waluyadi, *op.cit.*, hlm. 23-25

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat justru diharapkan benar-benar akan menjamin kemerdekaan dalam memeluk agama dan menjalankan kepercayaannya itu secara tertib rukun dan damai, Dengan berdasar kepada UUD 1945 dan pancasila, sehingga tercapai hakikat tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga peraturan Tentang Pendirian Rumah Ibadah tidak perlu dihapuskan.

3. *Kajian empiris-sosiologis*

Bila kita lihat dewasa ini ternyata fakta dimasyarakat sudah muncul sikap intoleransi dalam beragama, Menurut Komnas HAM¹⁰⁶, selama tahun 2012 dan 2013 saja, pengaduan tentang peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan begitu tinggi. Pada tahun 2012, tercatat 68 pengaduan dengan rincian: perusakan dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 20 kasus, konflik dan sengketa internal 19 kasus, gangguan dan pelarangan ibadah 17 kasus dan diskriminasi minoritas serta penghayat kepercayaan 6 kasus. Pada tahun 2013 Komnas HAM menerima 39 berkas pengaduan. Diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama sebanyak 21 berkas, penyegelan, perusakan, atau penghalangan pendirian rumah ibadah sebanyak 9 berkas dan penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah sebanyak 9 berkas.

Menganalisis fakta yang kemudian diperkuat dengan data dari Komnas HAM diatas sebenarnya memang datanya sama seperti data dari persektif Pro, namun dari perspektif Kontra melihat dari sudut pandang yang berbeda dan ternyata peraturan tentang pendirian rumah ibadah saat ini tidak perlu untuk dihapuskan, karena sedangkan peraturannya saja sudah ada masih banyak perlakuan atau tindakan yang tidak kita inginkan, apalagi jika peraturan yang ada saat ini dihapuskan justru ini akan membuat dimasyarakat akan tambah kacau, sehingga akan merenggangkan persatuan dan kesatuan bangsa.

¹⁰⁶ Data dari pelaporan KOMNAS HAM. *Op.cit.*

Oleh karena itu, setelah melihat analisis dari persektif pro maupun kontra terhadap persoalan penghapusan peraturan pemerintah pendirian rumah ibadat dengan masing-masing menggunakan pendekatan kajian teoritis-filosofis, kajian yuridis-normatif dan empiris-sosiologis maka polemik pro maupun kontra terkait dengan topik ini ternyata hanya terletak pada sudut pandang yang berbeda dalam menginterpretasikan atau menafsirkan pendekatan yang dipakai baik melalui kajian teoritis-filosofis, kajian yuridis-normatif dan empiris-sosiologis namun pada hakikatnya memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk tidak adanya diskriminatif atau tindakan lain yang tidak diinginkan sehingga tercipta rasa aman, rukun dan damai dalam memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu untuk mengakomodir kedua sudut pandang tersebut saya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut

1. Pembuatan Undang-Undang Tentang Kerukunan Umat Bergama.
Dengan adanya produk hukum yang jelas dalam bentuk undang-undang maka ini akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri dan tentu sejalan dengan aliran dan mazhab seperti: Aliran hukum alam, aliran historical juridispurdence, aliran positivisme hukum, aliran sosiological dan antropogical, aliran utilitarianism dan yang pasti pancasila dan UUD 1945.
2. Penguatan kembali organisasi dan komunitas Kerukunan Umat Beragama. Organisasi atau komunitas ini diharapkan memfokuskan pada pembinaan umat beragama, dengan demikian ini diharapkan akan lebih terciptannya kerukunan, kedamaian dan terciptanya harmonisasi dalam perbedaan agama di Indonesia. Tentu ini akan lebih memperkuat keutuhan bangsa dan negara.

F. Membumikan Semangat Toleransi untuk Indonesia: Potret Kearifan Lokal Toleransi Antar Umat Beragama di Manado

[Oleh: Sabil Mokodenseho]

Manado yang dikenal dengan sebutan kota *Nyiur Melambai* merupakan kota dengan presentase penduduk yang sangat beragam suku, pemeluk agama dan kepercayaannya. Mayoritas penduduk berasal dari suku Minahasa, Bolaang Mongondow, Sangir, dan Gorontalo. Disamping itu ada beberapa suku yang berasal dari luar daerah tersebut, seperti Arab, Tionghoa, Makassar, Jawa, Batak, Maluku, dll. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Mayoritas penduduk kota adalah pemeluk agama Kristen atau Katolik.¹⁰⁷ Hal itu jelas dapat dilihat dari banyaknya gereja di *seantero* kota Manado. Setiap pemeluk agama mempunyai cara serta metode tersendiri dalam menyiarkan agamanya masing-masing khususnya di kota Manado dan Sulawesi utara pada umumnya.

Pada hakikatnya setiap agama mengajarkan kedamaian, ketenangan, keharmonisan, dan tentunya menimbulkan sinergi positif dalam kehidupan beragama. Namun, tak jarang di temui konflik, perselisihan bahkan kekerasan yang muncul karena agama atau mengatasnamakan agama. Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup berdampingan dengan kepercayaan yang berbeda akan melahirkan suatu gesekan yang nanti akan mengantarkan pada pertikaian. Nilai kerukunan yang dijaga dengan baik mulai terkikis, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah mulai luntur dalam pemahaman dan pengamalan masyarakat seperti yang terjadi di berbagai daerah.

Kita lihat konflik menjelang abad ke-21 bangsa Indonesia diguncang oleh konflik yang bernuansa SARA yang terjadi di beberapa daerah, seperti Situbondo (konflik agama dan politik), Pontianak (konflik etnis dan agama), Ambon (konflik agama), Poso (konflik agama), Timika (konflik antar suku), Medan (konflik etnis dan agama), Palembang (konflik etnis), Lampung (konflik etnis dan agama), Sanggau (konflik etnis dan agama), Sampit (konflik etnis dan agama), Tasikmalaya (konflik politik, etnis dan agama), Kebumen, Solo, Kudus (konflik etnis dan agama), Mataram (konflik agama), Sikka (konflik agama), Kupang (konflik agama), Ternate Halmahera (konflik agama),¹⁰⁸ Ketapang, yang bermula dari pertikaian antara preman dan penduduk setempat,

¹⁰⁷Gunawan Muhtar, *Kontribusi Organisosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: P3KS Press, 2010). h.35.

¹⁰⁸Yong Ohoitmur, *Kasih Perekat Persaudaraan dan Pendorong Bagi Kemajuan Sulawesi Utara; Beberapa Gagasan Dari Perspektif Filsafat Moral*, dalam *Kasih Mengubah Dunia*, (Manado: Jajak Sulut, 2002). h. 34-35.

kemudian berlanjut berubah konflik antara etnik Ambon yang beragama Kristen dan etnik Jawa yang beragama Islam, dimulai dengan pelemparan masjid, selanjutnya tindakan balasan berupa pembakaran toko-toko dan tempat ibadah, gereja.¹⁰⁹Semua kasus-kasus antar umat beragama di atas tidak perlu terjadi jika antar umat beragama dapat saling menghargai dan menghormati kebebasan orang lain dan menyadari bahwa perbedaan itu bukan suatu penghalang dalam mewujudkan persaudaraan di antara mereka.

Berbeda dengan masyarakat Manado yang plural, memahami perbedaan agama sebagai suatu rahmat yang diberikan Tuhan untuk kita jaga bersama. Hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Van Paassen yang juga seorang pastor, melihat fenomena kehidupan antar umat beragama di Manado¹¹⁰ menurutnya masyarakat memiliki kesadaran untuk bekerjasama antar umat dan tidak menaruh curiga serta diikat dengan rasa kekeluargaan. Paasen mencontohkan, bagaimana Manado yang dikenal sebagai kantong Kristen menjadi tuan rumah MTQ Nasional Ke-X dan umat secara bersama-sama mendoakan pelaksanaan kegiatan tersebut. Inilah yang menjadi daya tarik kehidupan beragama di Manado yang begitu toleran bagi setiap pemeluk agama. Dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan etika dalam beragama sesuai apa yang diajarkan agamanya masing-masing.

Disamping itu, masyarakat membangun hubungan yang sangat baik antar budaya. Banyak hal yang terjadi sebagai akibat adaptasi kultural dengan nilai budaya lokal. Dalam hal ini, masyarakat menempatkan orang Minahasa yang dominan kuantitas memiliki nilai budaya ideal yang adaptif dan berkembang secara alamiah seiring proses interaksi. Hal ini tidak terlepas dari falsafah hidup yang pernah dicetuskan oleh pahlawan nasional Dr. Sam Ratulagi yaitu *Sitou Timou Tumou Tou* Artinya, "Manusia Hidup Memanusiakan Manusia Lain". Dalam ungkapan bahasa Manado seringkali dikatakan: "Baku Beking Pande", yang secara harafiah berarti "Saling Menambah Pintar Satu Sama Lain)". Di masyarakat Jawa, motto seperti ini dikenal dengan istilah "*Nguwongake Uwong*". Masyarakat umum menilai bahwa falsafah ini dicetuskan sang pahlawan nasional yang tepat adalah, beliau menyimpulkannya dari realitas kehidupan masyarakat Minahasa yang toleran, saling membangun, akrab dengan sesama serta saling menghargai segala bentuk perbedaan yang melewati sekat-sekat perbedaan kronis, dalam hal ini perbedaan agama sebagai penghambat.

¹⁰⁹ Ika Fatmawati Faridah, *Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan*, (KOMUNITAS 5, 1, 2013). h. 14-25.

¹¹⁰ Van Paassen, "Kerjasama Antar Agama dan Prospeknya: Kasus Sulawesi Utara", di dalam Koentjaraningrat (Peny.), *Masalah-masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*, (Jakarta: LP3ES, 1982). h. 371-387.

Dahulu, falsafah ini sangat nampak muncul pada proses adaptasi antara pengungsi “Perang Jawa” (1825-1830) yang beragama Islam dan masyarakat Tondano, Minahasa beragama Kristen. Orang Jawa yang ketika itu dipimpin oleh Kyai Modjo, hingga kini telah hidup dengan harmonis dengan masyarakat setempat. Rasa saling terbuka dan menerima perbedaan membuat masyarakat Jawa yang tinggal dalam pembuangan tersebut, sekalipun beragama Islam melabeli diri mereka dengan sebutan *Niyaku Toudano* (Aku Orang Tondano)¹¹¹. Falsafah hidup *Sitou Timou Tumou Tou* saat ini bukan hanya milik orang Minahasa, sebagai masyarakat tempatan Manado. melainkan semua penduduk kota dari berbagai latar belakang agama. Falsafah ini menjadi daya tarik dan penangkal konflik. Saling menghidupi tanpa melihat perbedaan, saling membantu dalam kehidupan sosial serta mentoleransikan adat dan agama yang berbeda. Berangkat dari falsafah tersebut, ada tiga nilai budaya yang lahir dan harus dipertahankan oleh masyarakat Manado secara keseluruhan yaitu pertama, *Torang Samua Basudara* (Kita Semua Bersaudara) Ditengah masyarakat yang heterogen, terdapat nilai dalam berinteraksi antar anggota masyarakat yang sangat dijunjung tinggi yaitu *Torang Samua Basudara*. Slogan *Torang Samua Basudara* yang sekarang berubah menjadi nilai budaya, pada awalnya dicetuskan oleh Letjen (Purn) E.E. Mangindaan, mantan Gubernur Sulawesi Utara untuk jadi senjata perekat dalam menghindari konflik suku, agama, ras, antar golongan yang meluas di Indonesia bagian Timur (1998-1999), agar rasa persatuan dan kesatuan masyarakat tetap terjaga.

Sejak dicetuskan, slogan ini menjadi ikon hidup masyarakat Manado. Faktanya yang ditemui dalam bidang pendidikan, umat Islam sering sekolah di yayasan pendidikan Kristen dan tetap mampu berinteraksi secara sehat tanpa menghilangkan ciri identitas agamanya. Dalam bidang keagamaan, kita akan sangat terkesima karena kagum, jika mendengar nama Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Yarden Kampung Islam, merupakan kumpulan anggota masyarakat beragama Kristen yang eksistensinya diakui selama bertahun-tahun serta telah mendarah daging di lingkungan dominan agama Islam. Masyarakat kota Manado, menganggap tiap manusia sebagai saudara yang harus diakui keberadaannya serta tetap saling mendukung dalam kegiatan positif. Perbedaan agama dan segala bentuk identitas primordial tidak menjadi penghalang untuk tumbuh berkembangnya slogan ini menjadi kata-kata yang dihidupi masyarakat kota Manado. Nilai inilah yang mendasari

¹¹¹Salmin Djakaria, “Sekelumit Tentang Kampung Jawa Tondano”, di dalam Alex John Ulaen dan Nasrun Sandiah (Ed), *Niyaku Toudano Maulud Tumenggung Sis dan Orang Jaton* (Manado: Kerjasama BKSNT dan Laboratorium Antropologi Fisip Unsrat, 2003). h. 11-24.

sikap hidup toleran, terbuka dan dinamis untuk menjaga kerukunan antar umat agama

Kedua, *Silaturahmi* (Saling Mengunjungi), Nilai budaya yang diimplementasikan lewat *Silaturahmi* menjadi salah satu perekat kerukunan hidup dalam perbedaan. Setiap orang merasa dihargai, dihormati dan diakui keberadaannya sebagai manusia. Selain itu, kebiasaan yang menjadi budaya ini, mematahkan eksklusifitas religius. Tidak hanya berlaku untuk hari besar keagamaan, kebiasaan saling mengunjungi Nampak juga dalam kegiatan adat seperti hari raya Ba'do Ketupat, Imlek, Goan Siau, Tulude, Pengucapan Syukur dll. Gambaran betapa pentingnya komunikasi harus dijalankan dalam kerjasama dan silaturahmi, menunjukkan betapa indahnya hidup rukun dalam kedamaian yang didasari toleransi. Itulah mengapa masyarakat Manado bisa hidup tenang dan damai.

Ketiga, *Mapalus* (kerjasama) dalam masyarakat Minahasa, dilakukan sebagai usaha untuk saling membantu dalam mengerjakan ladang. Saat ini, pemerintah kota Manado menadopsinya terutama ke dalam organisasi Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BAMAG) yang bertugas bekerjasama membangun komunikasi dua arah antara pemimpin agama dengan umat. Kedua organisasi ini dibangun dengan komposisi keterwakilan dari seluruh latar belakang agama yang ada. Dengan begitu, organisasi ini memiliki massa pendukung yang notabene berlainan agama dan tentu saja berlainan etnis.

Organisasi masyarakat yang turut menjadi bagian dari usaha membangun komunikasi¹¹² ini adalah HMI, GP Ansor, PMII, Brigade Manguni, Legium Christum, Paguyuban Kekeluargaan Tionghoa dan sebagainya. Pada akhirnya, semua organisasi tersebut melahirkan persepsi yang sama terhadap pentingnya hidup nyaman dan damai yang dibangun atas dasar toleransi. Aksi simpatik yang sering dilakukan oleh para pemeluk beda agama adalah saling menjaga keamanan dan kelancaran sekaligus membagikan bunga pada saat ibadah Natal di gereja dan pelaksanaan Sholat Ied ketika Idul Fitri. Pemandangan indah tersebut telah berlangsung sejak lama, sebelum konsep tentang multikulturalisme hangat dibicarakan di Indonesia dan kerusuhan yang membawa isu agama pecah di Indonesia. Terlebih, yang paling emosional, terjadi antara tahun 1998-2002, dimana konflik di Kalimantan dan Maluku sementara membara dan banyak warga dari

¹¹²[File:///C:/Users/Acer/Documents/TorangBasudara Nilai Budaya dan Kehidupan Antar Umat Beragama Kota Manado Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara.html](File:///C:/Users/Acer/Documents/TorangBasudara%20Nilai%20Budaya%20dan%20Kehidupan%20Antar%20Umat%20Beragama%20Kota%20Manado%20Balai%20Pelestarian%20Nilai%20Budaya%20Sulawesi%20Utara.html)

daerah konflik tersebut yang mengungsi di Manado serta melaksanakan ibadah hari raya keagamaannya masing-masing di kota Manado.

Salah satu agenda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Namun hambatan yang cukup berat dihadapi untuk mewujudkan kearah kesejahteraan hidup seluruh warga negara adalah masalah kerukunan nasional termasuk didalamnya hubungan antar agama dan kerukunan antar umat beragama, yang salah satu persoalannya adalah persoalan yang menyangkut mengenai kebebasan dalam beragama. Kita ketahui bahwa wacana kerukunan umat beragama di Indonesia telah menyedot banyak energi dan pikiran. Fenomena disharmoni itu ditandai dengan beberapa benturan sosial yang dimanipulasi menjadi pertentangan antar kelompok umat beragama. Kendatipun pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menutupi kondisi objektif dari pertentangan itu, namun indikasi-indikasi yang ditemukan tetap tidak bisa diterjemahkan kecuali menunjukkan adanya disharmonitas dikalangan umat beragama.¹¹³

Ketidakharmonisan antar pemeluk agama dilatarbelakangi oleh banyak faktor, dimana hal tersebut dapat dibedakan kedalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap disebabkan paham keagamaan terhadap ajaran agamanya. seperti adanya kecendrungan pemahaman radikalekstrim dan fundamental subjektif terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor lainnya, seperti sikap bedonitas dan oportunitas dengan mengatasmakan agama sebagai komoditas kepentingan telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Faktor-faktor disharmonitas tersebut perlu ditelaah dalam relevansinya dengan hubungan umat beragama di Indonesia. Hal ini didasari kerangka fikir bahwa salah satu langkah untuk merendam konflik adalah mengetahui sumber-sumber konflik itu sendiri. Selain yang telah disebutkan di atas, kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Umat beragama dan Pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Secara terperinci jaminan kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan dapat

¹¹³Said Agil Husein Al Munawar, *Fikih Hubungan antar Agama*, (Jakarta: Penerbit Ciputat Press). h. xx.

kita simak pada sejumlah kebijakan sebagaimana tersebut di bawah ini:¹¹⁴1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 2. UUD 1945 Pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan melihat fakta-fakta di atas terbukti bahwa Manado telah menampilkan model kerukunan antar umat beragama yang dikemas dalam falsafah hidup yaitu *Sitou Timou Tumou Tou* dengan slogan-slogan kedaerahan yang mampu meredakan konflik serta melahirkan nilai-nilai kearifan lokal seperti kedamaian hidup tanpa memandang suku, agama dan golongan. Lebih dari pada itu, Manado dapat menjadi *Best Practice* dalam mengedepankan etos toleran ditengah realitas multi-religi dan multi-etnik, yang harus dipromosikan bagi ruang ke-Indonesiaan yang lebih luas, terutama sebagai cermin bagi daerah-daerah yang selama ini rawan konflik agar kedepannya bisa membumikan kehidupan umat beragama tanpa ceceran darah.

Daftar Pustaka

Agil, Husein Said., Al Munawar. *Fikih Hubungan antar Agama*, Jakarta: Penerbit Ciputat Press

Asep Mulyana (ed), Chandra Setiawan., 2006. *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM

Djakaria, Salmin., 2003. "Sekelumit Tentang Kampung Jawa Tondano", di dalam Alex John Ulaen dan Nasrun Sandiah (Ed), *Niyaku Toudano Maulud Tumenggung Sis dan Orang Jaton*, Manado: Kerjasama BKSNT dan Laboratorium Antropologi Fisip Unsrat

Ika Fatmawati Faridah.,2013. *Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan*, KOMUNITAS 5, (1).

Muhtar, Gunawan.,2010. *Kontribusi Organisosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: P3KS Press

Ohoitumur, Yong., 2002. *Kasih Perekat Persaudaraan dan Pendorong Bagi Kemajuan Sulawesi Utara; Beberapa Gagasan Dari Perspektif Filsafat Moral*, dalam Kasih Mengubah Dunia, Manado: Jajak Sulut

¹¹⁴Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2006). H. 4-5.

Paassen, Van., 1982. "Kerjasama Antar Agama dan Prospeknya: Kasus Sulawesi Utara", di dalam Koentjaraningrat (Peny.), *Masalah-masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta: LP3ES

File:///C:/Users/Acer/Documents/TorangBasudara Nilai Budaya dan Kehidupan Antar Umat Beragama Kota Manado Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara.html

G. Signifikansi Peran Indonesia dalam Resolusi Konflik Israel-Palestina

[Oleh :Mawardin]

Ibarat satu tubuh, Palestina dan Indonesia seolah tak bisa dipisahkan. Relasi emosional-historis atas *wahdlatul ummah* merekatkan kedua bangsa ini. Manakala Palestina berseteru dengan lawan tanding 'abadi' Israel, maka seketika itu pula darah bangsa Indonesia ikut mendidih. Komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan eksistensi Palestina di panggung global, tak diragukan lagi. Dari era Soekarno hingga Jokowi.

Palestina harus menghirup udara kebebasan paripurna adalah tuntutan utama dari sekian aspirasi yang berkembang di tanah air, dari mimbar-mimbar akademik hingga demonstrasi di jalanan. Seruan bernada keras untuk memboikot produk-produk Israel pun seringkali kita dengar. Jangan ditanya kalau bantuan kemanusiaan dari Bumi Nusantara, sudah mengalir sekian lama ke Bumi Palestina. Belum lagi perjuangan diplomasi dan tekanan-tekanan akar rumput menyiratkan pesan bahwa Palestina adalah kita.

Momentum solidaritas sahabat setia itu kembali bergelora dikala Masjid Al-Aqsa - di Kota Yerusalem (18 Juli 2017) diganggu Pasukan Israel. Bermula dari aksi sepihak Israel memasang *metal detector* di sekitar masjid bersejarah itu, maka pertengkarannya pun tak terhindarkan. Sebuah prosedur keamanan - sebagaimana alasan Pasukan Israel - yang justru menghadirkan ketidakamanan. Lantas, terganggu lah umat muslim di sana, bahkan untuk sekadar shalat pun terpaksa dilakukan di jalan. Kecaman dari segala penjuru arah mata angin kemudian mengarah ke muka Israel.

Syahdan, Yerusalem adalah zona sensitif yang penuh kisah sedih, karena sengketa seakan tanpa tanda titik. Masalah kian ruwet lantaran kental dengan persinggungan agama, yang bersahutan dengan ragam konspirasi politik dan romantisme sejarah, hingga efek samping dari Deklarasi Balfour. Karena itu, pertikaian kedua belah pihak tak mudah diredam sebab level kompleksitasnya berada di stadium berat.

Di kota tua, Yerusalem, bersemayam tiga iman: Yahudi, Kristen, dan Islam. Di sana terdapat bukit candi (*Temple Mount*) yang dianggap Kaum Yahudi sebagai tempat suci. Bersisian dengan itu, ada Tembok Ratanan, tempat umat Yahudi merapal do'a. Kita bisa melacak jejak Yesus Kristus juga di sekitar Yerusalem, Bethlehem, sebagai lokasi kelahiran Yesus Kristus, yang lahir dari rahim perawan suci Bunda Maria. Karena itu, tempat itu menjadi destinasi wisata rohani kaum Kristiani. Bagi kaum Muslim, Yerusalem punya makna spiritual yang magnetis karena

keberadaan Masjid Al-Aqsa. Berdekatan dengan Al-Aqsa, terdapat kubah batu Al-Shakra yang dipercaya umat Islam sebagai titik keberangkatan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj ke langit ketujuh untuk menjemput mandat langit (wahyu). Sebagai salah satu poros spiritual terpenting, maka Al Aqsa sering diziarahi kaum Muslim.

Nuansa religi di Yerusalem menunjukkan bahwa kota suci internasional itu semarak dengan dimensi spiritualitas. Akan tetapi, ceceran darah warga sipil Palestina di kota kharismatik itu membuat air mata kita terus berjatuh, sungguh menyedihkan. Daftar panjang warga Palestina yang jadi korban agresi militer Israel nampaknya tak ada tutup buku. Korban jiwa sudah tak terhitung, apalagi yang terluka, ditambah tekanan psikologis yang berat, khususnya di medan laga konflik, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Warga Palestina selalu dihantui ketakutan. Israel sebagai sebuah entitas negara yang berlumuran darah, riwayat terornya nyata berupa terorisme negara (*state terrorism*) terhadap warga Palestina, tak pelak mengoyak asa damai di bumi para nabi.

Konfrontasi terbuka antara Israel dengan Palestina terkait Masjid Al-Aqsa bukanlah hal baru. Sebut saja kerusuhan terowongan di Masjid Al Aqsa, 1996. Asal muasalnya dipicu pihak Israel yang menyimpang dari kesepakatan Oslo. Kesepakatan Damai Oslo merujuk pada perundingan antara palestina dan Israel yang mempertemukan tokoh *Palestine Liberation Organisation* (PLO) Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, 13 September 1993. Mereka bahkan duduk satu meja membincang kedaulatan, yang mengayunkan harapan agar kedua pihak saling menghormati wilayah masing-masing. Tapi pertikaian api konflik rupanya tak pernah padam.

Repotnya, Israel bukan pemain tunggal. Di belakangnya ada dukungan total “saudara tua” Amerika Serikat (AS) dalam bentuk kucuran dana dan lobi internasional. Negara Paman Sam sangat berkepentingan dengan geostrategis Timur Tengah yang kaya dengan minyak. Sementara di sisi lain, negara-negara “Islam” regional teluk sedang dalam dilema dan galau. Betapa tidak, Qatar kemudian jadi “tumbal” gesekan kepentingan di Timur Tengah, lantas tetiba saja Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Libia, dan Uni Emirat Arab, yang kemudian disusul Yaman dan Maladewa menjatuhkan ‘thalaq’ politik kepada Qatar dalam sengkarut konflik diplomatik.

Qatar dituding mengganggu keamanan kawasan teluk lantaran dianggap pro “kelompok radikal”. Kalau keadaannya begitu, bagaimana mau memperkuat barisan guna menantang Israel? Nah, dalam konteks ini pula relevansi keunikan Indonesia sebagai negara bermayoritas muslim di dunia, yang relatif sangat fleksibel berteman, dan punya akses komunikasi dengan berbagai kelompok strategis.

Lalu, Indonesia harus bagaimana?

Indonesia bisa berperan lebih untuk memainkan peran dalam proses negosiasi dan mediasi politik yang sistematis dan massif untuk menyikapi cuaca kekerasan di Timur Tengah. Terlalu riskan kalau perang terbuka, pendekatan militer. Tak bisa juga sendiri, namun dengan tetap berkolaborasi dengan masyarakat dunia internasional. Untuk mengambil peran optimal dalam resolusi konflik Israel-Palestina, tentu saja diperlukan keseriusan dalam memutar turbin kebijakan agar tepat sasaran dan berimplikasi strategis. Targetnya, kemerdekaan Palestina, hingga perdamaian total Timur Tengah secara umum. Lakon sebagai negosiator tak ada istilah stasiun akhir, kecuali tujuan yang hendak dicapai tertuntaskan.

Dalam kaitan dengan peran politik internasional Indonesia, reputasi yang dimiliki oleh negara berbasis Islam terbesar di dunia itu bisa menjadi modalitas kultural yang berharga. Zamrud khatulistiwa adalah tanah subur tumbuhnya paham keagamaan moderat yang menerima demokrasi dan serba-serbi kemoderenan. Di jagad politik global, Indonesia merupakan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), dan Anggota Dewan HAM PBB. Indonesia seringkali terlibat dalam agenda resolusi konflik dan misi perdamaian di dunia internasional. Paling tidak, di kawasan ASEAN, seperti Vietnam, Kamboja, Rohingya (Myanmar), Sengketa Laut Cina Selatan dan misi perdamaian dunia Indonesia lainnya.

Lebih daripada itu, Indonesia bisa meminta komitmen perdamaian dari kekuatan-kekuatan strategis seperti AS, Rusia, Uni Eropa, PBB dan pihak terkait guna menciptakan terwujudnya solusi dua negara (*two state solution*), Palestina dan Israel. Perkembangan yang menarik adalah inisiatif Cina untuk menengahi benturan Israel-Palestina. Lobi Beijing menunjukkan diplomasi perdamaian di kawasan Timur Tengah melibatkan aktor 'baru' Karena itu, Indonesia bisa bermitra dengan negeri tirai bambu yang menjelma jadi kekuatan ekonomi-politik global saat ini untuk kepentingan resolusi konflik Israel-Palestina. Mereka diharapkan bisa hidup harmonis, berdampingan serta berkedaulatan penuh.

Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan dukungan kepada Palestina lewat forum PBB, sebagai negara pengamat non-anggota (*non-member observer state*), sehingga Palestina berpotensi untuk berpartisipasi dalam agenda global PBB melalui organ-organ yang dinaunginya. Presiden Jokowi beserta jajarannya terus berikhtiar tiada henti bagaimana memperhebat peran internasional Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara Israel dengan Palestina.

Lalu, bagaimana Indonesia bisa berkomunikasi dengan pihak Israel sementara tak ada hubungan diplomatik? Bukankah meleraikan kedua pihak yang bertengkar, kita yang berlakon mediator mesti netral alias membuka pertemanan lintas batas? Maka muncul lah wacana pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel dalam beberapa episode di tanah air, kendati selalu saja berakhir gagal direalisasikan, sebab kerap menuai polemik.

Masyarakat yang menolak jauh lebih banyak daripada yang mendukung kerjasama dengan Israel. Bukan berarti pengarus-utamaan publik itu semata jadi patokan, tapi suara domestik tak mungkin diabaikan dalam proses kebijakan politik luar negeri, sebutuk refleksi dari kepentingan nasional. Bisa saja dilakukan, tapi bersyarat. Indonesia hanya akan membuka hubungan diplomatik jika Israel memenuhi tiga syarat: Pertama, bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya dan berdiri negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem. Kedua, seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel, termasuk Dataran Tinggi Golan dikembalikan. Ketiga, semua tawanan Palestina oleh Israel harus dibebaskan.

Faktanya, Israel belum menunaikan persyaratan itu. Lagi pula komunikasi antar dua negara tak melulu berbasis diplomatik. Contohnya, Indonesia punya saluran komunikasi dengan Taiwan, kendati tak ada hubungan diplomatik. Alasan yang berkembang lagi, adalah mengapa Indonesia tidak membuka kontak resmi dengan Israel sementara beberapa negara Arab yang notabene Islam, sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel - kalau alasannya soal agama - seperti Mesir, Yordania dan sebagainya.

Dalam kasus Mesir dan Yordania, mereka membuka diri dengan Israel terletak pada kedekatan geografisnya, artinya punya kepentingan langsung terkait stabilitas kawasan. Beda halnya dengan Indonesia yang jauh sekali dengan Israel. Kalau soal godaan terhadap teknologi Israel yang canggih dan mantra 'Lobi Yahudi', toh masih banyak negara-negara lain yang punya kecanggihan teknologi, minus resiko politik juga.

Indonesia bisa memakai pihak ketiga sebagai mitra, guna menyelesaikan problem akut yang dihadapi Palestina. Akan tetapi, agenda perjuangan kemerdekaan Palestina mestilah tergambar dengan terang benderang. Kalau semasih remang-remang, maka sangat rawan dipolitisasi untuk mengundang tepuk tangan publik dalam ruang politik domestik di Indonesia. Serupa isu Palestina, pro kontra diskursus pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel pun bisa ditengarai beraroma politis. Bagi politisi cari 'aman', akan jauh lebih diterima publik Indonesia manakala bersikap Pro Palestina, Sahabat Palestina. Terlebih ramai-ramai mengutuk Israel, dijamin publik akan menaruh simpati.

Berharap perjuangan membebaskan Palestina dijalankan secara ikhlas, tanpa imbalan apapun.

Kita menghindari isu Palestina dijadikan sebagai komoditas politik. Tantangan selanjutnya Indonesia sebagai mediator Israel-Palestina adalah mesti terlebih dahulu merangkul faksi-faksi di internal Palestina melalui rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Kita bisa melibatkan aktivis Ormas Islam di Indonesia untuk memahamkan kepada mereka dengan hikmat kebijaksanaan, dalam bingkai *ukhuwah Islamiyah* dan humanisme universal, serta menimbang kalkulasi politik di lapangan secara realistis. Butuh ketabahan revolusioner dalam melakukan negosiasi, maka sebelum tuntas tujuan akhir dari kedua belah pihak, maka akan tetap terus diperjuangkan. Keaktifan internasional Indonesia di PBB yang signifikan, perkembangan demokrasi dan HAM yang membanggakan, *brand image* Islam moderat cinta damai, maka patut dioptimalkan peran serta Indonesia dalam advokasi perdamaian dunia.

BAB V
Cita-Cita Sosial, Budaya dan Pendidikan

SERPIAN

HERA YULITA

ADHA ANGGRAINI

SRI HARDIYANTI

ANAS ABDUL KADIR

SINTA FEBRIA NINGSIH

FATMA FARICHA

A. Merayakan Nasionalisasi Primordialisme; dari Wacana menuju Aksi

[Oleh: Serpian]

Merayakan nasionalisasi primordialisme; dari wacana menuju aksi

Doktrin nasionalisme mencakup keseluruhan aspek kecintaan sekelompok masyarakat terhadap bangsa dan negaranya. Smith mendefinisikan nasionalisme sebagai *an ideological movement for the attainment and maintenance of autonomy, unity and identity on behalf of a population deemed by some of its members to constitute an actual or potential "nation"*.¹¹⁵ Cara kerja paham ini yaitu dengan mengikat semua keragaman regional lalu mengangkat kemiripan nilai-nilai yang ada di dalamnya, kemudian dirajut menjadi satu bentuk identitas yang dimiliki bersama. Identitas tersebutlah yang diaktifkan sebagai penyatu keragaman suku dan budaya dan juga mampu berperan sebagai tameng dalam mempertahankan keutuhan sebuah bangsa dan negara. Pada akhirnya, wujud negara dalam konteks ini bisa dilihat seperti *puzzle* yang membentuk keutuhan dari keragaman suku, ras, agama dan budaya.

Paham ini masih bekerja sampai sekarang, namun nampaknya mengarah pada orientasi yang lebih eksklusif. Nasionalisme cenderung dipahami secara sentralistik, membuat konsep ini terjebak pada anggapan bahwa usaha pembangunan Indonesia hanya ada dipusat-pusat pemerintahan, dalam hal ini adalah kota. Alur pikir tersebut akan menutup mata untuk melihat desa yang berada pada skala lebih kecil. Padahal, meskipun desa berada pada skala kecil, wilayah ini secara kuantitas lebih banyak dan mempunyai potensi yang besar untuk memajukan Indonesia.

Nasionalisme yang eksklusif tersebut terus berkembang dan dianut oleh banyak orang, bahkan banyak mewabah dikalangan pemuda yang sedang mengenyam pendidikan di kota. Pemuda ini menganggap bahwa kota adalah tempat di mana pembangunan harus digalakkan, sehingga mereka lupa kalau ternyata desa lebih membutuhkan gagasan dan kerja keras mereka. Jika fenomena ini terus menggejala, maka pertanyaan paling mendasar adalah mampukah desa bertahan?

Selain kemunduran wacana nasionalisme, dalam prakteknya, wacana primordialisme juga telah lama muncul sebagai momok yang menakutkan. Penganut primordialisme banyak diserang karena memberikan dampak yang buruk pada keharmonisan relasi sosial untuk semua kelompok masyarakat. Penyebabnya adalah perilaku diskriminatif yang sangat kental, sehingga primordialisme selalu diterjemahkan

¹¹⁵ Anthony DSmith, et al. *Asian Nationalism* (Routledge-New York, 2002)

sebagai bentuk fanatisme terhadap hubungan kesukuan atau kedaerahan.

Primordialisme pada fase awal dianggap sebagai fenomena natural dan sebagai konsekuensi logis yang hadir dalam setiap kelompok masyarakat. Terkait Anggapan ini, Esman menjelaskan bahwa *the nation that ethnicity is a natural primordial tie is primised on the assumption that a group identity is an indispensable aspect of one's personality identity*.¹¹⁶ Namun semua berbeda ketika hubungan primordialisme digunakan dalam merebut dominasi. Tindakan tersebut kemudian memberikan sentimen buruk pada primordialisme.

Penganut paham ini sangat jelas muncul di banyak tempat. Mereka menggunakannya sebagai suplemen untuk merawat *status quo*, sebagai upaya membangun dinasti yang kuat dalam sebuah kekuasaan. Fenomena ini tentu bersebrangan dengan kemajuan dan juga tidak mendorong pembangunan, bukan hanya untuk pembangunan fisik tapi juga untuk pembangunan karakter manusia. Masyarakat secara natural akan dididik menjadi masyarakat yang selalu tergantung pada relasi sosialnya tanpa mampu mengandalkan potensi diri.

Pemahaman masyarakat umum terkait primordialisme menjadi semakin mengkhawatirkan, karena konsep ini hanya dilihat pada aspek relasi sosialnya, sehingga menghilangkan variabel “kepentingan wilayah” yang juga sangat berhubungan. Hal ini membuat banyak orang menutup mata dari manfaat primordialisme. Pada akhirnya, kesimpulan yang muncul mengarah pada stigma negatif yang memandang bahwa seutuhnya primordialisme tidak mempunyai sisi yang baik. Anggapan ini tentu tidak adil terhadap primordialisme itu sendiri.

Upaya membangun wacana yang baru dalam primordialisme maka relasi sosial dan wilayah geografis disatupadukan menjadi kekuatan untuk membangun daerah, dengan mendorong masyarakat secara umum dan pemuda secara khusus untuk ikut serta dalam memikirkan kondisi daerah masing-masing. Tulisan ini berusaha untuk mewacanakan bentuk primordialisme yang baru, melalui sinergi konsep nasionalisme yang lebih segar.

Integrasi Nasionalisme dan Primordialisme

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa berbicara tentang nasionalisme akan mengekspresikan kecintaan pada bangsa dan negara, tanpa melihat apakah itu desa atau kota. Namun ternyata itu tidak cukup. Asumsi tersebut terbukti menggiring arus pemikiran pada keyakinan

¹¹⁶Milton J Esman, *An Introduction to ethnic Conflict* (Polity Press, 2004)

bahwa sikap nasionalis adalah berada di kota bukan di desa, sebagaimana telah dijelaskan di awal tulisan ini. Kota kemudian akan lebih superior lalu desa akan menjadi inferior.

Primordialisme pun juga telah lama dipahami negatif oleh masyarakat umum, sehingga membuat paham ini lumpuh dalam memberi sumbangsih untuk kemajuan. Sebagai upaya mengurai nilai positif, sudah selangkahnya lah primordialisme dilihat bukan hanya pada aspek relasi sosial yang dibangun secara sengaja, namun juga harus mempertimbangkan aspek geografisnya. Relasi sosial yang hadir dalam primordialisme harus dibentuk ulang. Relasi sosial tersebut mestinya tidak lagi berpusat pada penguatan solidaritas semu untuk melanggengkan kekuasaan sekelompok orang. Namun, relasi sosial itu sebaiknya membentuk pola solidaritas yang lebih memprioritaskan pembangunan setiap wilayah.

Ikhtiar yang akan dilakukan adalah memantik terjadinya pembaruan dari primordialisme lama menuju primordialisme baru. Primordialisme lama masih sibuk membangun kekuatan pada satu kelompok untuk kepentingan dominasi, namun ini sangat berbeda dengan primordialisme baru. Kebaruan tersebut akan fokus pada pembentukan kekuatan dalam sebuah kelompok yang beridentitas primordialisme sebagai upaya pengoptimalan semangat kerja untuk membangun wilayah, tempat identitas primordialisme tersebut muncul.

Relasi sosial dalam penyegaran primordialisme ini akan bertransformasi menjadi semangat kolektivitas yang memberi efek bukan pada hubungan sektarian antar individu, tapi lebih kepada efek positif untuk setiap wilayah di mana identitas primordialisme itu muncul. Aspek geografis tersebut sebagai objek yang pasif dalam kebaruan ini. Sedangkan relasi sosial tidak lagi menjadi alat politik untuk merebut kuasa, namun berubah menjadi alat politik untuk membangun potensi daerah asal identitas primordialisme tersebut.

Berangkat dari fenomena ini, kita butuh terminologi yang lebih segar, akomodatif dan terintegrasi dari kedua konsep tersebut, nasionalisme dan primordialisme. Terminologi ini akan mengarahkan sikap nasionalisme bekerja sebagaimana fungsinya, dengan cara membuka jalur ke arah yang lebih sosialis untuk banyak kelompok dan wilayah. Disamping itu, pentingnya untuk memperbaharui wacana primordialisme adalah agar mampu memberikan efek positif kepada masyarakat, di desa maupun di kota. Asumsi ini yang kemudian menjadi dasar yang kuat untuk mewacanakan Primordialisasi Nasionalisme.

Wacana tentang nasionalisasi primordialisme rasa-rasanya menjadi penting untuk dibumikan. Tentu wacana ini masih terdengar asing, bahkan kemungkinannya belum ada yang membahas sebelum ini.

Terlebih efek panjang primordialisme pernah membawa dampak buruk pada Indonesia. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mewacanakan konsep ini.

Nasionalisasi primordialisme bekerja untuk mengkonsolidasikan banyak aspek, bukan hanya kecintaan suku, namun juga aspek geografis. Arah konsolidasi tersebut akan bermuara pada keyakinan bahwa membangun daerah sendiri juga merupakan upaya dalam membangun Indonesia secara keseluruhan. Kecintaan terhadap suku kemudian harus melibatkan kecintaan pada pembangunan wilayah, tempat suku tersebut berasal. Aspek ini berperan untuk mengikat seseorang agar tinggal di daerah asalnya dan bekerja untuk membangun daerah tersebut.

Pangkal dari wacana nasionalisasi primordialisme adalah membangun koordinasi pada tiga aspek penting, yaitu potensi manusia, potensi daerah dan agen penggerak yang memainkan peran strategis. Aspek manusia dan agen akan menjadi representasi dari *active resource*, sedangkan aspek sumber daya alam hadir sebagai *passive resource* yang siap digarap oleh *active resource*. Aspek-aspek tersebut maujud sebagai bahan bakar untuk menjadikan tiap-tiap daerah sebagai motor dalam memajukan peradaban sebuah bangsa. Mengolaborasikan ketiga faktor tersebut dalam sebuah ranah kerja yang strategis akan menciptakan kekuatan-kekuatan yang dibutuhkan oleh setiap daerah untuk lebih maju.

Aspek pertama adalah potensi sumberdaya desa. Sumberdaya ini terbagi atas tiga yaitu, pertanian, perkebunan dan peternakan. Semua sumberdaya tersebut menjadi alasan yang sangat rasional bagi pemuda untuk tetap bertahan di daerahnya masing-masing dan mengelola sumberdaya yang ada.

Doktrin nasionalisasi primordialisme mendorong pengelolaan sumberdaya desa secara mandiri oleh masyarakat berdasarkan asas kemanfaatan bersama. Asas ini akan membangun solidaritas warga untuk mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Masyarakat akan secara langsung dapat merasakan dan menerima manfaat dari hasil kerja bersama. Pengelolaan potensi desa juga selalu berdasar pada prinsip *sustainable*, dengan menghindari berbagai macam potensi buruk yang mengancam keberlanjutan pemanfaatan lahan. Setidaknya, dengan pengelolaan mandiri ini akan meminimalisir berbagai eksploitasi alam yang berlebihan.

Prinsip ini akan diperkuat oleh nilai-nilai kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Terkhusus di wilayah pedesaan, banyak masyarakat yang terbukti mampu mengelola sumberdaya alamnya berdasar pada praktek tradisional dan membantu merawat kekayaan alam. Masyarakat

desa mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari alam disekitarnya. Mereka mendapatkan pengetahuan tersebut, hasil dari mengalami masalah-masalah teknis dan sekaligus menyelesaikan permasalahan tersebut. Praktek ini sangat membantu dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam tentu membutuhkan sokongan dari banyak faktor. Salah satunya adalah infrastruktur. Faktor ini tentu sangat membantu dalam mempermudah masyarakat mengakses banyak hal. Hasil produksi dari warga akan lebih mudah dibawa ke tempat lainnya untuk dipertukarkan.

Aspek kedua adalah sumberdaya manusia. Sumberdaya ini merupakan sumberdaya yang aktif, bertindak sebagai aktor yang berpartisipasi dalam mengola potensi desa. Orang-orang ini akan diberdayakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayahnya sendiri, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat desa mestinya dilihat sebagai bentuk taktis dan produktif dalam mencapai pengelolaan mandiri. Tentu pemberdayaan ini sangat relevan dengan wacana nasionalisasi primordialisme sebab akan mendorong terbentuknya kerja tim dikalangan masyarakat.

Sumberdaya manusia menjadi faktor penentu dalam membangun relasi sosial yang bersifat nasionalisasi primordialisme. Wilayah inilah yang menjadi pusat pembentukan doktrin bahwa untuk memulai pembangunan sebuah bangsa harus berangkat dari pembangunan daerah masing-masing. Semua aktivitas yang mendukung tercapainya daerah yang maju akan bermula dari sumberdaya manusia.

Doktrin ini akan memperkuat dasar pembangunan di desa dan juga, melalui peran pemerintah, akan mempererat tali nasionalisme. Peran pemerintah juga harus dihitung sebagai *stake holder* yang cukup berpengaruh, sebab dalam otoritasnya setiap daerah akan terhubung satu dengan yang lainnya. Semangat ini akan menjadi kekuatan yang besar untuk mendorong pembangunan di setiap daerah.

Aspek terakhir adalah agen penggerak. Agen ini berperan sebagai *volunteer* dalam menyambung dan merapikan koordinasi semua sumberdaya yang ada di daerah tersebut. Tentu agen penggerak yang hadir adalah mereka yang telah sampai pada kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Agen ini mempunyai peran yang sangat vital sebab akan mengarahkan kemana sebuah pembangunan daerah akan menuju. Agen penggerak ini dapat disebut sebagai *volunteer* karena berperan sebagai peramu untuk mengoptimalkan semua potensi sumber daya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Tentu konsep agen penggerak dalam wacana ini menolak cara kerja *one man show*, sebab hal tersebut sangat tidak efektif untuk sebuah kemandirian dan keberlanjutan. Agen penggerak ini harus membangun partisipasi setiap orang dalam sebuah daerah, agar supaya mampu bekerja dengan baik dalam menyatukan konsolidasi setiap warga. Namun agen penggerak ini tentu membutuhkan *skill* khusus dan juga modal sosial, untuk mempermudah jalannya dalam melakukan pekerjaan.

Kemampuan umum yang harus dimiliki oleh agen penggerak adalah kemampuan membangun jaringan. Kemampuan ini fokus untuk memperluas wilayah stake holder, di mana ketika jaringan itu dibutuhkan untuk menyukseskan sebuah usaha, maka dapat diberdayakan. Kemampuan ini adalah kemampuan taktis sebab pendampingan masyarakat desa mempunyai dinamika yang tidak mudah untuk diprediksi. Sirimorok menjelaskan bahwa kerja-kerja pengorganisasian pada prinsipnya tidak mengenal waktu. Peristiwa-peristiwa penting di desa bisa datang setiap saat, gagasan-gagasan penting yang perlu penanganan segera bisa muncul kapan saja, tidak hanya dalam pertemuan-pertemuan resmi kelompok.¹¹⁷ Setiap masalah bisa saja datang secara tiba-tiba, dan tentu harus mendapatkan penanganan yang tepat, sebelum masalah tersebut berdampak lebih besar. Penanganan masalah ini juga dapat memberdayakan jaringan yang telah dibangun.

Aspek-aspek tersebut di atas menjadi dasar argumentasi dari pembaruan paham primordialisme dan penyegaran wacana nasionalisme. Membangun paradigma baru dalam melihat konsep nasionalisme dan primordialisme. Selain itu, penyegaran ini akan merajut kesatuan dalam dorongan pembangunan di daerah masing-masing.

Cita-cita Keindonesiaan dan Agenda Mendesak di Desa Kami

Penyegaran wacana primordialisme dan nasionalisme menjadi nasionalisasi primordialisme cenderung pada ajakan dalam memperkuat ikatan sosial dan kesadaran kolektif yang mengedepankan kepentingan pembangunan sebuah wilayah, seperti mendorong partisipasi pemuda untuk bekerja mengabdikan diri di desa. Pada akhirnya, ketersediaan kaum muda dan kaum intelektual di desa akan tercukupi untuk menopang dan menyelesaikan banyak permasalahan sosial. Di samping itu, wacana ini akan menekan besarnya gelombang urbanisasi. Pemuda

¹¹⁷NurhadySirimorok. MERDESA: JATUH-BANGUN MEMBANGUN DESA (INSISTPres- Jogja, 2010)

akan terdorong untuk melihat potensi desa yang sangat besar, lalu mengurangi ketertarikan untuk hijrah ke kota.

Tulisan ini akan menawarkan gagasan aplikatif dengan mengeksplorasi potensi desa Kamburi, salah satu desa yang berada di Sulawesi Selatan, menggunakan pendekatan tiga *resource* penting yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu potensi manusia, potensi daerah dan agen penggerak. Gagasan tersebut akan disajikan dalam bentuk *grand design strategic* yang dapat di terapkan di desa. Pembahasan terkait latar belakang masalah dan apa yang harus dilakukan sebagai warga desa, akan disajikan sebagai berikut.

Warga desa Kamburi Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, dominan dari mereka berprofesi sebagai petani kakao. Telah lama warga ini menekuni profesi di lahan pertanian kakao. Melihat kakao merupakan komoditas yang mendunia, banyak industri besar yang menuai keuntungan hasil dari aktivitas produksi biji kakao menjadi coklat. Tetapi cerahnya bisnis coklat sekarang ini tidak membantu banyak pada kesejahteraan petani kakao terkhusus di Desa Kamburi.

Sekarang ini, banyak petani mulai jenuh bercocok-tanam di perkebunan kakao, dikarenakan tanaman kakao sangat rentan terserang hama dan penyakit. Untuk mencegah serangan hama dan penyakit membutuhkan tenaga dan biaya yang ekstra. Pada dasarnya, perawatan ekstra terhadap tanaman kakao akan memberikan hasil yang cukup menguntungkan, tapi hanya sebagian kecil petani yang mau meluangkan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk memberi perhatian ekstra kepada tanamannya. Lebih mengkhawatirkan lagi jika petani mulai tertarik untuk mengganti jenis tanamannya, sebab pergantian jenis tanaman akan melalui fase readaptasi dengan tanaman baru, berdampak pada pengeluaran biaya ekstra dan kebutuhan akan pengetahuan baru dalam memperlakukan tanaman baru. Tahap tersebut memerlukan waktu yang relatif lama dalam mencapai titik mapan terkait pola pengelolaan tanaman.

Banyak hal yang dapat disematkan atas lahirnya fenomena di atas, namun ada satu faktor yang sangat penting untuk digali lebih dalam, yaitu penyebab tidak tumbuhnya kesadaran petani untuk merawat kebun dengan penanganan yang tepat. Sebenarnya, petani kadang kala menerima sosialisasi atau pelatihan tentang bagaimana mengelola perkebunan kakao. Mereka telah banyak mendapat pengetahuan terkait perawatan tanaman kakao dari sosialisasi dan pelatihan tersebut. Sayangnya, pelatihan itu belum mampu menumbuhkan kesadaran petani untuk mengimplementasikan pengetahuannya.

Aspek krusial kenapa pengetahuan itu belum menyentuh ranah implementasi disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pengalaman petani tentang bagaimana memproduksi kakao menjadi coklat siap konsumsi. Faktor tersebut cukup menentukan, karena tanpa pernah melalui pengalaman memproduksi kakao menjadi coklat siap konsumsi, petani tidak akan pernah benar-benar tahu dan sadar betapa biji kakao yang rusak sangat berdampak buruk pada rasa dan kualitas coklat. Selama ini petani kakao cukup terasing dengan tanamannya sendiri. Mereka hanya menjual mentah hasil perkebunan kakaonya, tanpa tahu bagaimana tahapan pembuatan coklat dari biji kakao.

Hasil perkebunan kakao warga merupakan potensi yang sangat besar ketika dapat diberdayakan. Apabila petani kakao mampu menciptakan usaha berbasis coklat, sudah tentu memberikan keuntungan lebih bagi petani itu sendiri, selain karena ketersediaan bahan baku, petani juga mampu menentukan kualitas coklatnya sendiri mulai dari hulu, yaitu perawatan buah saat berada di pohon, hingga hilir, yaitu pengetahuan tentang pembuatan coklat. Di samping itu, banyak istri petani yang dapat diberdayakan dalam menjalankan usaha ini. Karena fenomena masyarakat setempat, ketika suami yang berprofesi sebagai petani kakao berangkat ke kebun maka istri tinggal di rumah mengurus urusan rumah tangga. Artinya, jika ini mampu terealisasi maka petani tetap bisa menjalankan profesinya dengan menjaga wilayah hulu –yaitu merawat kebun kakao– sedangkan istrinya akan bekerja di wilayah hilir –yaitu mengolah biji kakao menjadi produk olahan coklat dan kemudian menjualnya.

Itikad utamanya yaitu membumikan pengelolaan kakao menjadi produk coklat dikalangan petani. Para petani dilibatkan dalam mengolah kakao menjadi coklat dengan cara yang sangat sederhana. Harapannya adalah petani benar-benar tahu dan sadar tentang bagaimana biji kakao yang berkualitas dan bagaimana efek biji kakao yang rusak terhadap rasa coklat yang dibuatnya. Dengan optimalnya pembudayaan pengelolaan biji kakao menjadi produk coklat, adalah realistis jika kita berharap kelak petani tidak menjual mentah biji kakaonya lagi, namun mereka menjual *dark* coklat hasil olahan dari kebunnya sendiri.

Konsep nasionalisasi primordialisme lahir untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. Semua sumberdaya yang ada di desa akan dikelola menjadi kekuatan yang memandirikan. Konsep ini akan mereduksi egosentris kesukuan, karena relasi sosial dalam konteks ini akan digunakan untuk membangun daerah asal primordialisme. Berkembangnya setiap wilayah akan mendorong pembangunan nasional. Konsep nasionalisme pada akhirnya akan semakin kuat dan terdistribusi dengan merata serta akan dimiliki oleh setiap primordialis.

Menjadikan konsep ini sebagai alternatif dalam gerakan sosial tentu butuh waktu yang lama dan juga tenaga yang besar. Sebagai konsep yang masih sangat mentah, nasionalisasi primordialisme harus melalui kajian mendalam serta membutuhkan masukan dan kritikan. Olehnya itu, tulisan ini bukanlah akhir dari sebuah ide yang baku tetapi membuka sebuah jalan setapak untuk mengantarkan diskursus nasionalisasi primordialisme ke wilayah yang lebih elegan.

B. Semangat Revolusi Mental: Harapan menuju Indonesia yang Terdidik dan Tercerahkan

[Oleh: Hera Yulita]

Revolusi di zaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang melawan kolonialisme, untuk merebut kemerdekaan guna mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, 70 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum selesai. Kita masih harus melakukan revolusi, dalam bentuk yang berbeda, berupa revolusi mental. Bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa. Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan berkepribadian.

Masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, adalah masalah pembangunan dan pembinaan bangsa (*nation and character building*). Sebagai masyarakat majemuk, bangsa Indonesia harus menghadapi realitas sosial menyangkut keberagaman suku bangsa, ras, bahasa, agama, adat-istiadat, lapisan sosial, kesenjangan ekonomi dan masalah-masalah sosial lain yang sangat kompleks. Dalam upaya membentuk dan menjaga keberagaman dan keserasian itu diperlukan berbagai upaya yang dapat membina sikap-sikap positif yang saling menghormati, menghargai, mengakui eksistensi, dan kerjasama di antara berbagai keanekaragaman tersebut (Aman, 2011:1-2).

Seperti yang diungkapkan oleh Baedowi (2012:184) bahwa “Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan bahasa yang sangat banyak dan beragam, sudah selayaknya kita bersyukur dan menjaga dengan sepenuh hati keragaman tersebut. Salah satu cara yang paling kuat dan strategis dalam menjaga kemajemukan ini adalah proses pendidikan yang benar.”

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. La Sulo (2008:56) menyatakan bahwa “Pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberi arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.”

Kembalinya nomenklatur “kebudayaan” ke dalam Kementerian Pendidikan patut disambut baik, dan semoga itu pertanda baik dari strategi pendidikan dan kebudayaan kita ke depan (Baedowi, 2012:161). Terdapat keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan, seperti yang disampaikan oleh Supriyoko dalam makalahnya yang berjudul “Sistem

Pendidikan Nasional dan Peran Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang menyatakan bahwa “Adanya keterkaitan yang erat antara pendidikan dengan kebudayaan berkenaan dengan satu urusan yang sama, dalam hal ini ialah pengembangan nilai.” Lebih lanjut Supriyoko menjelaskan bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas kita bisa memposisikan pendidikan dengan kebudayaan di dalam tata hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal relationship*); atau pendidikan merupakan variabel yang mendorong terjadinya perubahan kebudayaan di dalam tata hubungan asimetris di mana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya (*causal asymmetrical relationship*).

Oleh karena itu tidak mengherankan, jika pemerintah kembali menggalakan satu gerakan bersama yakni Revolusi Mental, dalam rangka mewujudkan sembilan program unggulan yang termaktub dalam rumusan Nawa Cita nya menuju Indonesia yang berdaya saing.

Revolusi Mental

“Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.” Itulah adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

Revolusi mental yang pertama kali digunakan presiden pertama RI tahun 1957 itu, kini kembali dihidupkan oleh Presiden Joko Widodo. Ada tiga alasan mengapa Presiden Joko Widodo membawa semangat revolusi mental itu di tengah-tengah masyarakat saat ini. Pertama, kewibawaan negara yang merosot. Kedua, daya saing bangsa yang rendah. Ketiga, intoleransi dan persoalan persatuan bangsa.

Ada tujuh butir program nasional Gerakan Revolusi Mental Menuju Indonesia Baru.¹¹⁸ (1) Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya memerintah, tetapi juga melindungi dan melayani. (2) Indonesia bukan sekedar negara kaya, tetapi juga serba bisa. Bisa mandiri, dan bisa mencukupi kebutuhan pokoknya sendiri. Dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. (3) Indonesia adalah teladan dalam hal toleransi dan pembauran, karena perbedaan adalah kekayaan bangsa. (4) Indonesia harus bisa menggenggam dunia, pendidikan yang baik menjadi kuncinya. Dan itu harus menjadi tanggung jawab bersama. (5) Indonesia adalah negara yang makmur di atas

¹¹⁸Tabloid Asah-Asuh, Oktober 2015, hlm. 4.

fondasi ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang dikuasai segelintir orang. (6) Indonesia adalah bangsa terhormat dan tidak bersedia menjadi budak orang lain. (7) Indonesia adalah bangsa yang membanggakan dan penuh prestasi, Indonesia bukan bangsa rendah diri.

Melalui revolusi mental diharapkan terjadi gerakan hidup baru yang mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan ke-modernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Basis ideologi revolusi mental adalah Pancasila dengan tiga prinsip dasar Trisaksi: berdaulat secara politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Revolusi Mental dalam bidang pendidikan dan kebudayaan

Dalam agenda Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan¹¹⁹ (RNPK) 2016 dengan tema “Membangun Budaya dan Budaya Membangun” Komisi VI RNPK memaparkan bahwa sudah saatnya mendudukan kembali budaya pada tempatnya, melalui penggarapan sumber pembangunan kualitas manusia Indonesia yang mencerminkan identitas Ke-Indonesiaan, pluralisme dan toleransi. Hal ini sejalan dengan tiga poin penting dalam Tujuh Butir Program Nasional Gerakan Revolusi Mental Menuju Indonesia Baru yang terkait langsung dengan pendidikan dan kebudayaan. Pertama, Indonesia adalah teladan dalam hal toleransi dan pembauran, karena perbedaan adalah kekayaan bangsa. Kedua, Indonesia harus bisa menggenggam dunia, pendidikan yang baik menjadi kuncinya. Ketiga, Indonesia adalah bangsa yang membanggakan dan penuh prestasi, bukan bangsa rendah diri. Kunci utama dari kebanggaan ini adalah peningkatan kualitas SDM, yang bisa diubah melalui pendidikan dan pengembangan kebudayaan.

Generasi Terdidik dan Tercerahkan

“Republik tercinta ini digagas oleh anak-anak muda terdidik dan tercerahkan.” Kalimat itulah yang merupakan petikan awal kata sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2015 lalu. Manusia yang tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Indonesia saat ini memerlukan manusia-manusia yang terdidik dan tercerahkan. Tidak hanya cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga tercerahkan oleh pemahaman, matang dalam pengalaman.

¹¹⁹Makalah Teknik dan Sistematika Penulisan Proposal Penelitian, disampaikan pada Pembekalan Teknis Penulisan Proposal Penelitian.

Generasi terdidik dan tercerahkan, tidak lahir dalam semalam. Perlu proses panjang dan simultan. Terdidik dalam proses pendidikan, tercerahkan dalam kerangka pemahaman kebudayaan. Baedowi (2012:161) mengungkapkan bahwa “Tantangan terbesar pengembangan term kebudayaan ke dalam proses belajar mengajar tentu saja tidaklah mudah. Sangat umum diketahui bahwa para guru di ruang kelas kerap memaknai budaya sebagai sesuatu yang *given* dan *das sein*, sehingga bentuk implementasinya hanya sebatas mengenalkan keragaman budaya sebagai sesuatu yang harus dihargai dan dikonversi, sesuatu yang sakral dan tidak dapat diubah. Pada akhirnya tafsir soal budaya jatuh ke dalam dan hanya sebuah bentuk penghargaan seni dan budaya, apakah itu tari, lagu dan pernak-pernik peninggalan bersejarah lainnya.” Padahal ruang lingkup pemahamannya tidak hanya sebatas itu saja.

Pendidikan memiliki peran yang penting, proses penanaman dan pemahaman yang lebih luas mutlak diupayakan bersama. Seperti yang dipaparkan oleh Baedowi (2012:162) lebih lanjut bahwa “Pemahaman tentang budaya dalam wajahnya yang luas dan hampir tak terbatas akan membawa ke arah pemahaman yang benar tentang wujud perbedaan dalam beragam simpul budaya dan tradisi.” Wajarlah kiranya jika tokoh-tokoh pendidikan terdahulu seperti Ki Hadjar Dewantara, Ahmad Dahlan atau Tjokroaminoto lebih dikenal sebagai “Para Pencerah”.

Dengan demikian implementasi dari semangat revolusi mental hendaknya kita upayakan bersama dalam keseharian. Diperlukan sinergisitas bersama, partisipasi aktif dari semua pihak. Hal ini akan mendongkrak terciptanya generasi yang terdidik dan tercerahkan. Selama ini kita yang merupakan bagian integral dari bangsa ini, seringkali terjebak menyerahkan segala urusan ke pangkuan pemerintah saja, sehingga melupakan peran serta dalam praktik sederhana keseharian, guna mendukung berbagai program besar pemerintah, salah satunya berupa revolusi mental tersebut.

Kesimpulan

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Terdapat keterkaitan yang erat antara pendidikan dengan kebudayaan berkenaan dengan satu urusan yang sama, dalam hal ini ialah pengembangan nilai. Melalui revolusi mental diharapkan terjadi gerakan hidup baru yang mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar yang mandiri dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Daftar Pustaka

Buku

Aman. 2011. *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Baedowi, Ahmad. 2012. *Calak Edu 2 Esai-Esai Pendidikan 2008-2012*. Jakarta: Alfabet.

La Sulo S.L. 2008. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Makalah

Ir. Hendarman, M.Sc. Ph.D, Makalah "*Teknik dan Sistematika Penulisan Proposal Penelitian*" disampaikan pada Pembekalan Teknis Penulisan Proposal Penelitian yang diselenggarakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat di Singkawang, 25-28 Februari 2016.

Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd. Makalah "*Sistem Pendidikan Nasional dan Peran Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan*" disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI di Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.

Tabloid

Tabloid Asah Asuh. Edisi 09. Tahun VI. Oktober 2015, Terbitan KEMENDIKBUD.

C. Urgensi Pendidikan untuk Mewujudkan Cita-cita Bangsa

[Oleh : Adha Anggraini]

Pendahuluan

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”, penggalan kalimat yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi ruh cita-cita luhur bangsa. Besar kemungkinan kita semua pernah membacanya dalam jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, atau sekedar mendengar pada saat pembacaan teks pembukaan UUD 1945 ditengah pelaksanaan upacara bendera pusaka.

Sudah dapat dipastikan Indonesia adalah satu-satunya negara yang dalam deklarasi kemerdekaannya secara tegas menyatakan bahwa salah satu misi penyelenggaraan pemerintah negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Teks ini bukan hanya sekedar susunan kalimat yang berfungsi sebagai entitas kemerdekaan Indonesia sebagai suatu bangsa. Namun lebih dari pada itu dalam penggalan alinea keempat pembukaan UUD 1945 terdapat cita-cita nasional bangsa Indonesia yang meliputi; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berangkat dari cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, penulis berpandangan bahwa pendidikan merupakan pilar terpenting sebagai eskalasi perwujudan tiga pilar lainnya. Pendidikanlah yang seharusnya menjadi bagian penting dalam perwujudan pencerdasan kehidupan bangsa. Setelah menjadi manusia Indonesia yang cerdas tentu akan lebih mudah dalam mewujudkan tiga cita-cita nasional lainnya. Urgensi pendidikan menjadi sesuatu yang vital bagi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya sesuai yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, di usia lebih dari 70 tahun kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia secara keseluruhan belum bisa difigurkan sebagai masyarakat cerdas. Lalu, pertanyaannya apa yang salah dengan sistem pendidikan kita?

Inkonsistensi Sistem Pendidikan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengupayakan penyelenggaraan suatu sistem pengajaran. Hal ini lebih populer dengan istilah Sistem Pendidikan Nasional. Namun, sistem pendidikan nasional masih menjadi jargon semata, secara praktek belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berikut merupakan beberapa sistem yang pernah di adopsi untuk sistem pendidikan Indonesia, di antaranya: Pertama, Sistem Pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan model ini telah lama dipraktekkan di Indonesia dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahkan diperguruan tinggi sekalipun. Orientasi pada sistem ini peserta didik diberi pengajaran kejuruan, tenggang rasa, kedisiplinan, dan tanggungjawab melalui pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kedua, sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berfikir kreatif dan inovatif. Ketiga, sistem pendidikan beragam. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dll. Serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Keempat, sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Di dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), waktu di atur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan karena waktunya terlalu singkat atau sebaliknya. Kelima sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini meliputi, KBK, KTSP, Kurikulum 2013 hingga kembali lagi ke KTSP. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan yang semakin membuat arah pendidikan kita tidak jelas. Pergantian pejabat juga mempengaruhi kurikulum pendidikan yang akan diadopsi, lagi-lagi jauh panggang dari api, pendidikan dipolitisasi. Sistem pendidikan nasional yang kita anut selalu tidak bisa menyelesaikan masalah pendidikan sampai pada akhirnya. Hanya sekedar kebijakan populis yang tidak berbasis persoalan pendidikan.

Salah seorang Bapak Bangsa yang juga dikenal sebagai Pengawal Hati Nurani Rakyat, Bung Hatta, lebih dari separuh abad yang lalu sudah memperbincangkan tentang pentingnya pendidikan. Produk-produk yang dihasilkan dari dunia pendidikan, disamping mempunyai cakapan dan kecerdasan mutlak diperlukan adanya pembentukan watak kepribadian sehingga mampu berguna dalam kehidupan masyarakat. Bagi Bung Hatta, “tanggung jawab seorang akademikus adalah intelektual dan moral. Ini terbawa oleh tabiat ilmu itu sendiri, yang ujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran.”

Dari yang disampaikan Bung Hatta kita tahu bahwa pendidikan akan mengantarkan manusia Indonesia berilmu dan berakhlak yang

merupakan modal dalam membangun suatu bangsa. Pendidikan adalah cita-cita luhur yang ingin dicapai demi terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya.

Kendala pelaksanaan sistem pendidikan nasional terjadi karena kurang optimalnya kerjasama antara peran pemerintah dan masyarakat. Pada faktanya, pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia mengalami beberapa kendala dari eksternal maupun internal. Meski kendala dari eksternal memengaruhi kondisi sistem pendidikan di Indonesia, tetapi kendala internal (hambatan di dalam negeri) lebih banyak memberikan pengaruh terhadap sistem tersebut.

Adapun kendala dari segi internal yaitu kurang optimalnya peran masyarakat dan pemerintah dalam aplikasi program pendidikan nasional. Jika peran masyarakat dikatakan tak sesuai dengan ketentuan pasal 8 UU No. 20/2003, peran pemerintah juga mengalami hal yang sama. Misalnya, dalam pasal 49 UU No. 20/2003 serta pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dijelaskan mengenai aturan pendidikan. Seharusnya pemerintah memberikan aturan tersebut untuk pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yaitu di atas 20%. Namun belum sesuai aturan dan terpisah-pisah pengelolaannya sehingga fokus pengembangan pendidikan terpecah.

Belum adanya optimalisasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional bisa diamati melalui kualitas pendidikan Indonesia hingga saat ini. Kualitas pendidikan dikatakan baik bukan dilihat dari prestasi di taraf internasional saja, tetapi kualitas tersebut seharusnya berorientasi pada kreativitas berkarya serta berpikir masyarakat, utamanya generasi penerus bangsa ini. Sistem pendidikan di Indonesia belum mampu meraih kualitas pendidikan yang seharusnya sesuai standar serta tujuan pendidikan nasional berdasar UUD NRI Tahun 1945. Generasi penerus bangsa dalam sistem pendidikan nasional saat ini hanya bertujuan meraih predikat pintar dilihat dari segi nilai saja. Hal tersebut terjadi sebab pelaksanaan kurikulum di Indonesia belum optimal serta sering diubah pemerintah.

Padahal, kurikulum merupakan salah satu bagian krusial dari pendidikan yang berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Wajar jika kualitas pendidikan Indonesia seperti uraian sebelumnya, sebab kurikulum yang diterapkan di Indonesia mengalami perubahan sesuai kebutuhan pemerintah bukan kebutuhan masyarakat dalam mengikuti perkembangan sistem pendidikan internasional. Sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan kebutuhan manusia semestinya adalah pendidikan yang menjadikan manusia mampu mengembangkan kemampuan akalnya berpikir optimal dalam berkreasi serta berinovasi.

Problematika Pendidikan

Secara umum yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia masih rendah ditentukan oleh beberapa hal. Persoalan pendidikan di Indonesia masih berbicara mengenai disparitas, mahalnya biaya pendidikan serta kualitas pendidikan kita yang tergolong rendah. Sebagaimana kita tahu Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) untuk 2015 adalah 0.689. Ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Nilai IPM meningkat 30,5 persen dari nilai pada tahun 1990. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut.

Mengamati data yang disampaikan oleh United Nation Development Programme (UNDP) IPM tersebut, Indonesia sudah tergolong kategori menengah namun terjadi penurunan yang disebabkan faktor kesenjangan pendidikan dan harapan hidup yang masih relatif tinggi. Hal ini perlu peran serta semua elemen termasuk pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah baik pusat dan daerah bukan hanya menjadi pengadministrasi kegiatan pemerintahan namun turut serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas dan memudahkan akses pendidikan. Dengan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses seluruh bangsa maka akan terbentuk manusia-manusia Indonesia yang berilmu dan berakhlak.

Apabila sistem pendidikan telah baik hal tersebut akan secara signifikan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Namun demikian IPM Indonesia menurun tajam ke 0,563 (turun 18,2 persen) bila kesenjangan diperhitungkan. Kesenjangan pendidikan dan harapan hidup saat lahir di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata di Asia Timur dan Pasifik, namun Indonesia lebih baik dalam hal kesenjangan pendapatan dan gender dibandingkan dengan rata-rata di kawasan ini (id.undp.org)

Disparitas Pendidikan

Saat ini bangsa Indonesia masih mengalami disparitas di bidang pemerataan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan di Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kaum menengah ke atas. Jangkauan wilayah Indonesia yang begitu luas menyebabkan terjadinya disparitas kualitas pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya di perkotaan dengan pedesaan, Pulau Jawa dengan Luar Jawa, lebih spesifik lagi antara Indonesia timur dengan barat. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari ketersediaan sarana prasarana pendidikan, akses pendidikan, ketersediaan guru yang berkualitas dan berbagai persoalan pendidikan lainnya yang tidak pernah selesai dengan tuntas.

Inisiasi penanggulangan persoalan disparitas pada kualitas pendidikan dilakukan oleh kementerian pendidikan pada tahun 2012, dengan meluncurkan program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T), Namun belum genap sewindu program ini dijalankan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyampaikan kabar mengejutkan tentang pemberhentian program tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan Undang Undang (UU) Guru dan Dosen (koran-sindo.com edisi 17/04/2017). Alih-alih melakukan inovasi dari program persebaran tenaga pendidik ke setiap daerah, pemerintah justru kehilangan arah dengan meniadakan program tersebut.

Biaya Pendidikan

Keadaan ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk berdampak pula pada biaya pendidikan di Indonesia. Banyak sekali anak Indonesia yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena biayanya mahal dan tidak terjangkau. Dari permasalahan tersebut, pemerintah mulai mengeluarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang diberikan kepada peserta didik di SD dan SMP. Hal tersebut dilakukan dengan membebaskan biaya SPP atau membuat kebijakan free-school bagi pendidikan dasar. Dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, diharapkan semua pendidikan dapat dirasakan di semua kalangan masyarakat Indonesia.

Akan tetapi solusi yang ditawarkan pemerintah berbanding terbalik dengan fakta adanya industrialisasi di bidang pendidikan. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu perubahan tujuan pendidikan sebagai wahana industri (meraih untung atau rugi dalam pelaksanaannya). Ironisnya, alih-alih menjadikan sistem pendidikan di Indonesia sebagai salah satu wahana buat membentuk pemikiran yang kritis dan inovatif, justru fakta tersebut menyajikan terjadinya komersialisasi di bidang pendidikan. Yang lebih mengejutkan, adanya fakta mutakhir mengenai kondisi sistem pendidikan di Indonesia dengan adanya praktik jual-beli ijazah, jual-beli gelar maupun jual-beli nilai.

Selain itu, fakta lain mengenai aplikasi sistem pendidikan nasional, yaitu kurangnya dukungan pemerintah terhadap kebutuhan ruang belajar yang mengakibatkan munculnya bisnis di bidang pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat dari golongan lemah/tidak mampu semakin terpuruk menghadapi model sistem pendidikan saat ini. Pendidikan terasa hanya diperuntukkan bagi masyarakat dari golongan ekonomi kuat. Bagi masyarakat dari golongan miskin, pendidikan menjadi sebuah mimpi. Itulah fakta yang kita temui dalam sistem pendidikan Indonesia. Tentu kita tidak hanya boleh

mengutuk hal tersebut, harus ada langkah yang tepat untuk mengatasi masalah pelaksanaan pendidikan kita.

Kualitas Pendidikan

Selain kedua masalah tersebut, permasalahan yang paling mendasar adalah masalah mutu pendidikan. Karena sekarang ini pendidikan kita masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tenaga pendidik yang mengajar namun tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu, tingkat kejujuran dan kedisiplinan peserta didik masih rendah. Contohnya: dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan saat mengikuti Ujian Nasional peserta didik cenderung pilih mendapat jawaban secara instan, misalnya dengan membeli jawaban soal UN. Oleh karena itu, mutu pendidikan harus diperbaiki, maka pemerintah membuat kebijakan yang berupa peningkatan mutu pendidik. Yang dilakukan dengan cara mengevaluasi ulang tenaga pendidik agar sesuai dengan syarat untuk menjadi pendidik. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan sarana dan prasarana, misalnya memperbaiki fasilitas gedung, memperbanyak buku.

Bidang pendidikan tak bisa dicermati secara terpisah dengan bidang lain, tetapi bidang ini berkaitan dengan bidang lain termasuk politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Meski kondisi sistem pendidikan nasional dikatakan belum baik hingga saat ini, seharusnya kita sebagai bagian dari masyarakat berupaya untuk ikut serta memberikan saran mengenai sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi bangsa ini. Jadi, harus ada *blue print* (cetak biru) tentang sistem pendidikan nasional kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daerah dan kearifan lokalnya. Dan disepakati untuk secara bersama-sama dengan melibatkan partisipasi aktif semua elemen baik pemerintah dan masyarakat demi kemajuan bangsa, bukan dirubah sesuai perubahan penguasa pemerintahannya

Pendidikan sangat penting pengaruhnya bagi suatu bangsa. Tanpa adanya pendidikan, maka bangsa tersebut akan tertinggal dari bangsa lain. Seperti halnya juga bangsa Indonesia, pendidikan merupakan salah satu upaya yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain khususnya bangsa-bangsa ASEAN. Maka pendidikan Indonesia harus diperbaiki, baik dari segi sistem pendidikan maupun sarana prasarana.

Pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Saat ini pemerintah mulai memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia dengan membuat berbagai kebijakan dan merubah sistemnya. Pendidikan Indonesia saat ini menggunakan sistem nasional yang meliputi sistem terbuka, sistem yang berorientasi pada nilai, sistem pendidikan yang beragam, sistem

pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman dan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk menjalankan sistem tersebut, pemerintah mengeluarkan sistem wajib belajar 9 tahun yang ditujukan untuk peserta didik SD dan SMP, adanya free-school. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan keadaan pendidikan sekarang, memperbaiki sarana-prasarana, mengevaluasi kinerja tenaga pendidik dan lain-lain. Dengan adanya upaya pendidikan di Indonesia dapat lebih baik agar bangsa Indonesia dapat mengimbangi negara lain terutama negara-negara ASEAN.

D. Pendidikan yang Memerdekakan

[Oleh: Sri Hardiyanti]

Bagi bangsa Indonesia, persoalan pendidikan sangatlah kompleks karena berkaitan dengan kebijakan pendidikan nasional. Pergulatan pemikiran sistem pendidikan, dalam hal ini kurikulum mencakup segala bentuk pemberlakuan perubahan-perubahan paradigmatis dan sistematis. Disaat negara-negara lainnya sedang membangun pemerataan fasilitas dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, Indonesia pun pada saat ini masih berkuat pada perubahan-perubahan kurikulum pendidikan yang seolah tidak menemukan titik temu yang tepat. Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak buruk bagi para pelaku pendidikan. Selain itu, perubahan-perubahan tersebut pun menggambarkan tidak terarahnya identitas pendidikan di Indonesia yang kian dikuasai oleh kepentingan belaka.

Identitas Pendidikan di Indonesia

Dapat kita lihat dari masa ke masa, kurikulum yang diberlakukan di negara Indonesia banyak mengalami perubahan. Mulai dari orde lama, orde baru hingga periode reformasi, perubahan dilakukan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dengan kurikulum yang relevan dengan kondisi bangsa. Kurikulum yang diaplikasikan akan menciptakan proses pendidikan yang berkualitas dan tentunya kualitas dari lulusannya. Di dalam kurikulum pendidikan terdapat komponen-komponen pendidikan yaitu: tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum dan metode pembelajaran.

Seperti data yang dirilis dari *brilio.net* dari **kemendikbud.go.id** selama ini Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 11 kali, terhitung sejak Indonesia merdeka yaitu, pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2015¹²⁰. Hal ini menunjukkan proses pemikiran dalam menentukan kurikulum yang relevan bagi pribadi bangsa bukanlah hal yang mudah. Dalam penyusunannya dilibatkanlah campur tangan asing. Jika kita kaji dengan seksama dari seluruh kurikulum yang pernah dicanangkan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Melalui kebijakan perubahan kurikulum ini diharapkan adanya kemajuan serta perubahan nyata sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan bangsa.

Pada masa Anis Baswedan menjabat menteri pendidikan Kurikulum 2013 yang telah berjalan dikembalikan pada kurikulum KTSP 2006. Hal ini berlandaskan himbauan Menteri Kebudayaan dan

¹²⁰Sejak indonesia merdeka, kurikulum pendidikan indonesia sudah mengalami 11 kali pergantian. Reported: Adelin, Fanisa.2015:ww.brilio.net

Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbud Dikdasmen) yang telah menetapkan kebijakan untuk menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 diseluruh Indonesia. Melalui keputusan ini, maka sekolah yang baru menerapkan kurikulum 2013 selama 1 semester akan kembali menggunakan kurikulum 2006. Hal ini dikarenakan pertimbangan akan ketidaksiapan buku, sistem, penilaian, serta pemahaman guru terhadap kurikulum baru tersebut¹²¹. Dampak perubahan pun terutama dirasakan oleh para pelaku pendidikan di sekolah maupun siswa yang mengikuti pengajaran. Perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tidak melibatkan langsung para pelaku pendidikan yang merupakan aktor utama proses pengajaran di kelas. Para kepala sekolah maupun guru harus kembali mengikuti berbagai pelatihan untuk memahami kurikulum-kurikulum yang baru.

Guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya hanya diwajibkan mengikuti model kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah pusat seperti silabus, penyusunan rencana pengajaran, model evaluasi dan penilaian. Namun, nyatanya ada suatu hal yang tidak diperhatikan oleh para pemangku kebijakan kurikulum tersebut, yaitu potensi keanekaragaman dan kearifan lokal bangsa yang tidak menjadi suatu pertimbangan khusus dalam menetapkan kebijakan tersebut. Selain itu, kesesuaian dan kesamarataan yang dijalankan tidak diimbangi dengan kesamarataan akses fasilitas dan pemerataan kualitas guru di sekolah. Kemudian ada pun sistem dan kurikulum yang selalu mengalami perubahan menunjukkan belum ditemukannya suatu identitas pendidikan yang relevan bagi bangsa.

Ada dua jenis prinsip pendidikan yang telah berlaku sejak dahulu, yaitu pendidikan yang menjinakkan dan pendidikan yang memerdekakan¹²². Jika kita amati kembali di sekolah-sekolah maupun dalam lingkup kecil, di kelas-kelas sering kali kita temui adanya aturan-aturan yang diberlakukan untuk mengunci gerak setiap siswa. Hal inilah yang dinamakan pendidikan yang menjinakkan. Adapun pendidikan yang memerdekakan mengacu pada manusia yang hidup bersama dengan orang lain yang juga memiliki hak untuk merdeka. Sehingga, pendidikan yang menjinakan, maupun keseragaman tuntutan peraturan pendidikan yang dicanangkan di negara kita tidak lain akan menjadikan manusia-manusia menjadi robot di bangsanya sendiri.

Pada tahun 1961, Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan di Brazil menggagas sebuah konsep pendidikan yang kontroversial. Salah satu gagasannya yang terkenal adalah :

¹²¹Menteri Anies Baswedan Hentikan Kurikulum 2013. reported by Sugeng Triono (2004: liputan 6.com)

¹²²Mukadimah: Pendidikan yang Memerdekakan. Paat Ph. Jimmy. (2015: 2)

*Dengan demikian, pendidikan mengembalikan jati diri manusia yang merdeka, berhak untuk hidup, tidak ditindas, dan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Pendidikan merupakan malaikat penjaga kebaikan kehidupan manusia dari kejahatan.*¹²³

Pemikiran Paulo Freire ini memiliki prinsip bahwa pendidikan adalah hak semua manusia oleh sebab itu pendidikan sama sekali tidak boleh bersifat diskriminatif. Dalam artian pendidikan haruslah memerdekakan manusia dari segala bentuk ketertindasan. Bagi Paulo, menyerah pada ketertindasan berarti sama saja dengan menghancurkan diri sendiri. Konsep ini memiliki tujuan untuk membangun kesadaran manusia supaya kritis terhadap segala persoalan yang ada disekitarnya, terutama dengan adanya dominasi yang melahirkan masyarakat yang tertindas.

Model pendidikan yang humanistik ini sebenarnya telah dahulu digagas oleh seorang pahlawan kemerdekaan kita, Ki Hajar Dewantara. Kedua pemikiran kritis ini memiliki beberapa perbedaan terkait dengan latar belakang dan prinsip-prinsip pendidikan, namun memiliki tujuan yang sama untuk membebaskan manusia dalam belenggu yang menindas kemanusiaan. Namun, sayangnya di Indonesia sendiri, gagasan Ki Hajar Dewantara yang diangkat sebagai bapak pendidikan Indonesia hanya menjadi bagian kecil dan menjadi slogan dalam dunia pendidikan Indonesia melalui semboyannya *tut wuri handayani*. Sistem pendidikan yang pernah diterapkan di Taman Siswa tersebut pun hanya menjadi sejarah yang tidak ditransformasikan ruhnya kedalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Sehingga, identitas pendidikan Indonesia hanya menjadi kamufase perbaikan dalam setiap perubahan dan konsep Ki Hajar Dewantara hanya menjadi perhiasan yang dipajang dalam bingkai pendidikan bangsa tanpa diaplikasikan seutuhnya.

Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara

Sejak dahulu Indonesia telah mempunyai konsep pendidikan yang diciptakan oleh putera tanah air sendiri, Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang masa kecilnya bernama R.M. Soewardi Surjaningrat ini menamatkan sekolah guru di Lagere Onderwijs. Kemudian, mendirikan Indische Partij (tiga serangkai) bersama dengan Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Melalui tulisan-tulisan kritis tiga serangkai yang terus menghujam pemerintah Belanda dengan kritikan pada saat itu, ketiganya pun dianggap menjadi tokoh-tokoh yang mengancam pemerintah dan diasingkan ke negeri Belanda.

¹²³Moh Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara, hlm, 135

Dalam proses pengasingan tersebut, Ki Hajar Dewantara mulai tertarik dengan permasalahan-permasalahan pendidikan. Perjuangannya dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut membuatnya berfikir banyak mengenai karakter bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah Indonesia mulai mengarahkan sistem pendidikan pada penanaman karakter pada tahun 2010, Ki Hajar Dewantara bahkan telah jauh berfikir bagaimana pendidikan dapat mengasah kecerdasan budi pada saat itu dan lebih dahulu menerapkannya di sekolah yang didirikannya sendiri, Taman Siswa. Keseimbangan akan cipta, rasa dan karsa perlu inti dari proses pendidikan, sehingga sistem pendidikan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta berfokus pada transfer nilai bukan hanya berfokus pada “*transfer of knowledge*” semata.

Yang dimaksudkan dengan kodrat alam bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak terlepas dari kodrat alamnya sementara kemerdekaan dimaksudkan sebagai kemerdekaan sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia, yaitu “hak untuk mengatur dirinya sendiri”. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat “Tripusat Pendidikan”, yaitu (1) Pendidikan di lingkungan keluarga, (2) Pendidikan di lingkungan perguruan dan (3) Pendidikan di lingkungan kemasyarakatan atau alam semula. Tripusat ini mempengaruhi pembentukan karakter seseorang. Sehingga, lingkungan sekolah maupun keluarga harus sejalan sama pentingnya dengan peran pamong sebagai pembimbing yang harus bertindak sebagai *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, dan ing ngarsa sung tuladha*, yaitu mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, berada di tengah memberi semangat, berada di depan menjadi teladan.

Konsep tersebut diterapkan di Taman Siswa dengan metode Among (Asah, Asih, Asuh) yang digali dari kearifan lokal bangsa. Ki Hajar Dewantara mempertimbangkan konsep ini dengan melihat dan mempertimbangkan keanekaragaman bangsa. Setiap anak diberikan kebebasan menentukan minat dan bakatnya sementara guru menjadi jembatan untuk memfasilitasi kebutuhan anak dalam pengembangan potensi tersebut. Pengajaran berdasarkan kasih sayang sehingga dapat mendorong anak untuk menjadi pribadi yang kritis dan mandiri sesuai dengan cita-citanya sendiri.

Jika kita telaah kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, telah terdapat konsep mengenai kemerdekaan itu sendiri. Konsep ini tentunya mengandung pengertian peri kemanusiaan dan perikeadilan yang tentu saja harus menjadi acuan dalam kegiatan pendidikan. Dalam sejarah Indonesia, pendidikan dengan konsep ini lah yang terkandung dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut. Dalam pemikirannya

konsep Ki Hajar Dewantara ini dapat mendefinisikan arti kemerdekaan manusia yang sebenarnya.

Definisi pendidikan yang memerdekakan manusia terdiri dari 3 unsur, pertama, pendidikan yang melahirkan manusia yang bisa secara sadar dan bertanggung jawab menentukan hidupnya sendiri; kedua, manusia yang berdiri tegak karena kekuatan sendiri. dengan kata lain, manusia-manusia yang hidup lahir batinnya tidak bergantung dari orang lain, tetapi bersandarkan pada diri sendiri; dan ketiga manusia yang cakap mengatur dirinya tertib, sehingga tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kemerdekaan orang lain.

Implementasi Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara

Bengkulu merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Di Bengkulu, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan pada tahun 2010-2015 dengan data sebagai berikut : tidak tamat SD berjumlah 23.29 %, tamat SD sebanyak 26.43%, sedangkan tamat SLTP yaitu 19.69 %. selain dari itu penduduk Bengkulu yang tamat SLTA 22.02 %. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah penduduk Bengkulu yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi yang hanya berjumlah 8.58%. Data ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan di Bengkulu masih rendah. Sistem pendidikan di Indonesia dengan perencanaan konsep pendidikan yang segala langkah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu menanamkan kesadaran masyarakat bercita-cita untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, termasuk di Bengkulu.

Sama halnya di seluruh sekolah di Indonesia, siswa di sekolah-sekolah di Bengkulu pun dituntut untuk menguasai berbagai macam mata pelajaran dengan sistem peringkat dan wajib menempuh Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan menuju jenjang pendidikan berikutnya. Semua sistem ini tentunya ditujukan untuk mengukur tingkat pemahaman serta mendorong kualitas peserta didik. Realitanya, sistem sekolah ini justru tidak memberikan solusi bagi siswa yang berkemampuan rendah sehingga tertinggal dalam proses pembelajaran. Siswa yang tidak naik kelas tentunya menjadi malu untuk datang ke sekolah dan kebanyakan dari mereka memilih untuk pindah sekolah menutupi rasa malu tersebut. Namun, apakah hal ini menjadi suatu hal yang solutif bagi pendidikan mereka?

Sistem Ujian Nasional pun tak ubahnya menjadi momok bagi para pelajar dan cenderung mempengaruhi fokus utama di sekolah. Agenda-Agenda pendidikan di kelas hanya membentuk siswa yang mampu menjawab soal-soal di Ujian Nasional, bukan lagi terfokus pada pengembangan manusia yang otentik, berbudi pekerti dan peka terhadap lingkungan sosial. Siswa tidak lagi diberikan kebebasan dalam

menemukan, mengolah dan memilih pengetahuan. Sementara, guru pun tidak mengedepankan perkembangan potensi pribadi siswa melalui dialog-dialog. Hal ini pun cenderung mengesankan pelaksanaan pendidikan yang cenderung dipaksakan.

Pemerintah kabupaten Kaur, kabupaten paling Selatan Provinsi Bengkulu, pernah mengadakan pembangunan pusat pendidikan di pinggir hutan melalui program “Membangun Peradaban” pada 2012 lalu. Program ini berjalan dengan sistem menjemput anak-anak korban konflik tenurial di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) diperbatasan Bengkulu dengan Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan pendidikan gratis. Anak-anak tersebut dijemput dikarenakan tempat tinggal mereka berada kawasan hutan sehingga sulit bagi mereka menjangkau area pendidikan dan juga karena fasilitas pendidikan diharamkan oleh warga wilayah hutan tersebut. Gurulah yang akan datang mengajar ke pemukiman di dalam hutan dengan jarak tempuh dan jalan tanah yang penuh lumpur. Namun, sayangnya program ini tidak berjalan efektif karena kebanyakan guru mengeluhkan jalanan yang ekstrim, dan program ini pun diberhentikan.

Kemudian, untuk menindaklanjuti program tersebut, Dinas Pendidikan mengadakan sekolah kecil kelas jauh untuk menjangkau pendidikan anak di dalam hutan dengan program Pendidikan Khusus Sekolah. Namun, lagi-lagi program pun terhenti karena terkendala oleh anggaran pembangunan gedung belajar. Terakhir, digagaslah sekolah negeri berasrama yang disebut Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) dan menjadi sekolah negeri berasrama pertama di Indonesia. Hingga sekarang, beberapa sekolah negeri berasrama di Kaur sudah memiliki tingkatan pendidikan dari SD hingga SMA. Semua siswa yang masuk ke sekolah pun diajarkan keterampilan dalam mengolah pertanian dan perikanan sesuai dengan latar belakang mata pencarian masyarakat.

SMA 10 Petagon adalah satu-satunya sekolah tingkat SMA negeri asrama di Kaur. Nama Petagon merupakan arti dari lima karakter untuk membangun peradaban, yaitu Iman, Etika, Estetika, Iptek dan Harmoni. Bangunan pun dilengkapi oleh laboratorium komputer, nanoteknologi, energi, bioteknologi dan robotic dengan berbagai pengajar tamu dari Universitas terkemuka. Menariknya, siswa juga dapat memilih dua dari empat program ekstrakurikuler yang disediakan, yaitu nanoteknologi, bioteknologi, energi terbarukan dan robotik. Seluruh biaya pendidikan digratiskan namun siswa tetap harus membayar uang asrama sebesar 1,1 juta perbulan dan memberikan kesempatan beasiswa kuliah keluar negeri bagi dua orang lulusan terbaik ke Inggris, Jerman bahkan Amerika Serikat.

Terobosan pendidikan ini memang menjadi salah satu sekolah percontohan yang mampu menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal di Kaur. Namun, untuk terdaftar di sekolah terbaik, calon peserta didik harus melewati proses kompetisi yang ketat. Sistem ini tentunya menjadi suatu hal yang membatasi kesempatan anak untuk menggapai pendidikan yang diminati sehingga membangun nuansa elit. Pendidikan yang semulanya gratis harus kembali membutuhkan dana yang cukup besar bagi asrama siswa. Hal ini menunjukkan bahwa program yang semula berpihak untuk merangkul anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam mencapai pendidikan justru semakin sulit untuk dicapai oleh mereka.

Pengaplikasian konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memang hampir tidak ditemukan di sekolah negeri, namun salah satunya terdapat di sekolah swasta seperti salah satunya Sekolah Alam Mahira, Bengkulu. Sekolah ini meliputi PAUD, SD hingga SMP. Semua aktifitas anak diisi oleh bermain dengan metode pembelajaran yang berfokus pada pendidikan alam serta pendidikan akhlak. Kurikulum yang didesain pun berbeda dengan sekolah pada umumnya, yaitu dengan mengutamakan pendidikan karakter dan semangat kegembiraan sehingga tidak boleh ada anak yang tertekan ketika belajar. Siswa pun juga dibimbing untuk mandiri dan pembangunan mental untuk terjun di lapangan. Pekerjaan rumah bukan suatu hal yang utama sehingga anak diberikan kebebasan mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Di sekolah Mahira, anak berpakaian bebas, guru-guru mengutamakan potensi siswa dan membangun kepribadian siswa sementara nilai akademik adalah hal yang paling terakhir diperhatikan. Hal ini tentu tampak sangat berbeda dengan sekolah formal yang justru mengesampingkan perkembangan anak meliputi emosional, sosial, potensi, agama yang ditujukan untuk membangun karakter dan kecerdasan anak.

Beranjak dari keperihatinan terhadap kondisi *real* rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di wilayah pesisir kota Bengkulu, kami sebagai sekelompok pemuda membentuk sebuah komunitas Literasi yang bernama Komunitas Rafflesia Membaca. Komunitas ini berusaha menumbuhkan minat membaca melalui kegiatan literasi dan mengajar anak-anak yang putus sekolah untuk membaca. Selain dari itu terkadang kami mengadakan kegiatan-kegiatan *outdoor* dengan diselingi pertunjukkan dongeng, baca puisi ini berhasil membuat anak-anak di kampung nelayan tersebut datang untuk belajar membaca maupun membaca berbagai buku-buku yang telah dibawa oleh relawan literasi. Melalui kegiatan ini, relawan literasi Komunitas Rafflesia Membaca bercita-cita untuk dapat terus mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sehingga anak-anak dapat kritis dan datang

belajar dengan kesadaran serta keinginan belajar yang kuat diselingi oleh semangat berkebangsaan.

Pengimplementasian sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini kian jauh dari konsep pendidikan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tripusat pendidikan tidak lagi tampak dan menjadi prioritas pada lingkungan pembelajaran. Begitupun pola pendidikan metode Among yang diaplikasikan oleh guru-guru pun masih jauh dari pola Asah, Asih dan Asuh yang diidamkan. Sehingga, kodrat alam dan kemerdekaan menjadi suatu wujud yang jauh dari regulasi-regulasi yang diterapkan di sekolah-sekolah.

Lebih dari 30 tahun bangsa ini selalu melibatkan konsultan asing dalam pengelolaan pendidikan yang secara tidak langsung telah mendikte filosofi pendidikan Indonesia. Dalam hal ini bukan berarti kita harus menolak filosofi maupun teori dari barat. Namun, yang perlu kita garisbawahi adalah kita harus mengembalikan ruh pendidikan berdasarkan pada akar kebudayaan dan ideologi bangsa kita sendiri¹²⁴. Dengan demikian maka pendidikan Indonesia akan mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar karena berpijak pada ideologi kebangsaan yang kuat. Secara keseluruhan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memiliki dasar filosofis nasionalisme dan developmentalisme. Pilar inilah yang kemudian akan membentuk generasi bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan dan bermartabat. Konsep Pendidikan ini pun dapat menjadikan pendidikan Indonesia unggul dan memenangkan persaingan antar negara di dunia internasional.

Daftar Pustaka

- Adelin, Fanisa. 2015. *Sejak Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan Indonesia sudah mengalami 11 kali pergantian*. www.brilio.net, 2 September 2016.
- Asip, Suryadi. 2009. *Ajaran Ki Hajar Dewantara: Butiran yang Hilang dalam kolom Serba-Serbi Media*.
- Freire, Paulo. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Pustaka LP3S
- Paat Ph. Jimmy. 2015. *Mukadimah: Pendidikan yang Memerdekakan*. <https://belajarmerdekablog.wordpress.com/2015/10/07/pendidikan-yang-memerdekakan/>, 2 September 2016.

¹²⁴Ajaran Ki Hajar Dewantara: Butiran yang Hilang dalam kolom Serba-Serbi MediK, Suryadi Asip. (2009:57)

- Triono, Sugeng. 2004. *Menteri Anies Baswedan Hentikan Kurikulum 2013*. liputan6.com, 2 September 2016.
- Yamin, Moh. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Jogjakarta: Ar-Russ Media.

E. Menggali Sumber Daya Alam, Mencetak Sumber Daya Manusia

[Oleh: Anas Abdul Kadir]

Penonton di Daerah Sendiri

Udara terasa segar ketika bangun tidur dan membuka pintu rumah. Banyak pohon rindang disamping kiri-kanan rumah. Suara kicauan burung saling bersautan dari pohon satu ke pohon yang lainnya, monyet-monyet berlarian dan bergelantungan di hutan. Namun itu hanya tinggal kenangan dan menjadi cerita secara terus-menerus untuk generasi penerus. Saat ini daerah yang memiliki sumberdaya alam berlimpah dari periode ke periode belum terlihat peningkatan pembangunan daerahnya. Contohnya jalan-jalan masih belum baik, bahkan diperparah dengan di Desa Mengkudu Kecamatan Batu Engau hanya mendapatkan aliran listrik di jam-jam tertentu. Kesejahteraan masyarakat local area eksplorasi tidak dapat belum dapat disebut layak, mereka hanya menanggung akibat dari eksploitasi Sumber Daya alam tersebut, jika dibandingkan antara hasil yang di ambil oleh perusahaan dari bumi Paser dibandingkan dengan penderitaan warga keberadaan kharunia kekayaan alam tersebut justru menjadi bencana.

Tanggung jawab dan kewajiban atas permasalahan tersebut berada di pundak pimpinan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin dan menjadi pemimpin daerahnya, disamping masyarakat juga harus berusaha keras atas perlakuan ketidakadilan tersebut, jangan sampai masyarakat yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk bicara dan bersuara seperti tidak dapat tersampaikan dengan baik "Tikus Mati di Lumbung Padi", sungguh ironi kekayaan alam yang begitu melimpah tetapi rakyatnya masih belum sejahtera.

Dalam konteks ekonomi, kelimpahan sumber daya alam suatu Negara malah menjerumuskan Negara tersebut dalam jurang kemiskinan yang dalam, sehingga muncul istilah *resource curse hypothesis*. Menurut Stiglitz dalam bukunya Amien Rais (2008:42) kutukan sumber daya alam yang harus dihilangkan dari Negara-negara berkembang Yang maksudnya setiap Negara berkembang yang mempunyai kekayaan alam melimpah pasti masyarakatnya hidup dengan kemiskinan, dimana hal itu sudah terjadi hampir diseluruh negara berkembang contohnya saja Indonesia, Subhara Afrika dan lain sebagainya.

Menjamurnya perusahaan tambang berbanding terbalik dengan perkembangan pembangunan infrastruktur dan realitas social belum adanya hasil nyata yang signifikan antara pengerukan hasil alam dengan harapan masyarakat yang dicapai, kemudian antara pemerintah dan kebutuhan masyarakat serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Komitmen para pemimpin untuk bisa membangun dan memajukan daerahnya mestinya beriringan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang paling prioritas seperti halnya infrastruktur. Bukan hanya pada janji manis yang diumbar bak bujang sedang menggoda gadis cantik di dekatnya.

Dalam pengelolaan pertambangan terjadi lemahnya penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan baik di level Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu jika dilihat dari prinsip-prinsip *good governance* pengelolaan sumber daya ekonomi strategis yang ada, maka prinsip-prinsip yang harus ditunjukkan adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keadilan/hukum belum diterapkan dengan benar

Solusi sederhana dalam pemanfaatan hasil tambang misalnya untuk pembangunan *Power station* di desa yang berdekatan dengan area explorasi. Jadi beban kelistrikan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun juga dibebankan pada pemerintah daerah. Memanfaatkan perusahaan tambang untuk dapat menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik merupakan hal yang wajar untuk diterima. Pemberian perusahaan atas hal ini disebabkan masyarakat menerima dampak langsung dari kegiatan tersebut. Pandangan ini merupakan amanah UUD 1945 dalam pasal bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu hasil tambang bukan hanya difungsikan seperti barang komersil dan pemilik layaknya makelar yang hanya mendapatkan *fee* layaknya petugas pajak namun juga harus di nikmati semua warga Negara.

Isu Penguasaan sumber daya alam yang ada di daerah ini sebagian besar dikuasi oleh asing dalam negeri oleh warga asing akhir-akhir ini sangat center di bicarakan mulai dari pangkalan ojek, warung-warung kopi emperan, petani, nelayan, kalangan Mahasiswa, bahkan hingga pemerintah pun dibuat kelimpungan mengatasi permasalahan ini. Pasalnya pemerintah dengan tegas menyatakan keikutsertaan negara Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah ditandatangani presiden Jokowi pada tahun 2014 lalu.

Tidak sampai disitu saja sejak tahun 2015 Indonesia menghadapi badai ekonomi yang sangat luar biasa yang membuat nilai tukar rupiah terkulai lemas. Pemerintahpun tidak diam dalam menghadapi situasi tersebut melalui rapat kabinet presiden menggelar rapat terbatas dengan para menteri-menterinya membuat keputusan dengan membuat berbagai paket kebijakan untuk mendongkrak nilai tukar rupiah. Salah satunya yaitu dibukanya keran Investasi secara bebas dengan berbagai kemudahan dalam proses perizinan sampai pada tahap eksplorasi dan penjualan.

Apa yang menjadi keputusan pemerintah tentunya suatu keharusan yang mesti diikuti oleh tidak biasa di bantah, namun dalam pelaksanaannya pemerintah mestinya telah mempertimbangkan menghitung kemampuan sumber daya yang ada di negeri ini. baik dalam m

Pendidikan ; *Penjajahan gaya baru*

Keberhasilan suatu wilayah dapat diukur dari tingkat Pendidikan dan perekonomian masyarakat yang tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Tidak semua masyarakat berkesempatan atau bahasa lebih mudahnya memiliki rezeki yang sama dengan kawan sebaya maupun para tetangganya untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keinginan serta cita-cita sedari kecil. Kenyataan yang ada ketika hendak pergi menuntut ilmu yang lebih tinggi para orang tua mesti menyiapkan mahar sangat besar meskipun hanya sekedar untuk mendaftar. Belum juga diterima kuliah bayaran mesti masuk dahulu ke rekening kampus, ini kuliah atau mau judi togel kalau beruntung dapat banyak, sebaliknya sial datang uangpun hilang.

Lebih miris lagi jika menemukan orang tua yang dihadapkan dengan anaknya yang bercita-cita jadi dokter tidak tanggung-tanggung biaya yang harus disiapkan untuk mendaftar hingga selesai berkuliah minimal ratusan juta hanya untuk biaya SPP belum kebutuhan hidup dan biaya praktek dan biaya tetek mbengek lainnya. Setelah lulus sekolah menengah Atas (SMA) meskipun seorang siswa memiliki prestasi namun mereka tetap harus berjuang lagi untuk dapat melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi.

Pihak perguruan tinggi pun tidak dapat disalahkan secara penuh mereka melakukan ini didasari adanya kebijakan pemerintah mencabut biaya operasional Perguruan Tinggi dengan dalih untuk kemandirian. Sehingga Perguruan tinggi pun kelimpungan untuk mendapatkan kekurangan belanja wajib mereka. Tidak berlangsung lama para perguruan tinggi secara bersama-sama dengan cepat merespon itu melalui menaikkan biaya SPP agar dapat menutupi kekurangan biaya yang diperlukan secara rutin.

Saat ini pendidikan potential bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 Juta merupakan pangsa pasar yang jelas. Pemanfaatan anak didik sebagai sumber ekonomi adalah bentuk penjajahan ekonomi gaya baru di era globalisasi. Di tengah kekayaan alam yang berlimpah pemerintah masih belum sanggup untuk memanfaatkan Negara yang memiliki sumber daya alam terbatas dapat memberikan pendidikan secara gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi seperti Finlandia.

Biaya pendidikan dijadikan alasan sebagai konsekuensi logis bagi peserta didik sementara pada pembukaan UUD 1945, dalam Ayat 1: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya kemudian di terjemahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, dalam pasal 36 ayat 1, 2 dan 3. Pada ayat 1 yaitu biaya penyelenggaraan pendidikan disatukan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggungjawab pemerintah, ayat 2 penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan dan ayat 3 pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Untuk itu Pemerintah mestinya lebih jeli sektor mana yang seharusnya dihilangkan dalam belanja rutin Negara. Jika hal ini terus dilakukan maka akan banyak anak bangsa tidak dapat melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga nantinya akan merugikan sendiri untuk masa depan bangsa karena Pendidikan merupakan Investasi, yang tidak dapat dirasakan dalam tempo yang singkat untuk kemajuan bangsa.

F. Pendidikan sebagai Investasi menuju SDM Siap Tempur

[Oleh: Sinta Febria Ningsih]

1. Pendahuluan

Hampir diseluruh wilayah Indoneisa yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke, kita melihat tingkat partisipasi terhadap pendidikan meningkat cukup signifikan. Seringkali kita melihat potret tersebut baik dimedia cetak maupun elektronik yang menyuguhkan bagaimana prestasi anak-anak bangsa yang berhasil mengaharumkan nama negeri yang kita cintai ini. Sementara itu, gambaran lainnya seperti bagaimana kerasnya perjuangan seorang anak untuk sampai di lokasi sekolahnya dengan melewati jembatan yang hampir putus bahkan melewati derasny air sungai. Hal tersebut bahkan sempat menajadi viral dikalangan masyarakat, baik dari kalangan menengah atas bahkan menengah kebawah sekalipun turut merespon persoalan ini. Tetapi yang menjadi permasalahan yang krusial adalah tingkat partisipasi pendidikan ini tidak berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang didapat setiap anak. Padahal, penyediaan kualitas pendidikan yang baik merupakan kunci membangun generasi berkualitas yang berdaya saing dalam kompetisi global.

Pemerintah hari ini masih terfokus dengan angka kelulusan dalam mengemban pendidikan. Mutu belum menjadi prioritas yang utama. Sebagaimana kita ketahui bahwa, jika tidak beriringin jalannya tingkat partisipasi untuk belajar dengan penyediaan mutu pendidikan maka tidak akan berdampak banyak pada kualitas individu tersebut. Persoalan ini yang pada akhirnya membuat gap yang lebar pada kualitas pendidikan dimasing-masing wilayah Indonesia. Kita berharap bahwa anak-anak yang bersekolah di wilayah pelosok Indonesia bisa sama atau sekurangnya mendekati sama dengan anak-anak yang belajar di kota-kota besar. Inilah yang menjadi tantangan bagi institusi dibidang pendidikan yang bertanggung jawab penuh secara terstruktur yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Persoalan mutu pendidikan merupakan komitmen kita bersama. Pemerintah dan masyarakat merupakan komponen yang saling mendukung seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun pendidikan bangsa ini. System pendidikan yang dibentuk dan diaplikasi kepada masyarakat merupakan wujud nyata dari kerasnya usaha pemerintah memajukan pendidikan, meskipun Indonesia saat ini masih tertinggal cukup jauh dengan negar-negara dalam lingkup ASEAN. Tetapi, komitmen pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Nawa Cita yakni menyiapkan SDM yang berdaya saing patut kita dukung. Harapan bahwa kelak kita bangsa Indoenesia

tidak lagi jadi generasi pekerja, tapi pembuka lapangan kerja serta berorientasi pada produksi tidak lantas menjadi pelaku konsumsi tertinggi.

Pendidikan memainkan peran penting bagi kemajuan negara. Proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran dan latihan diharapkan kedepannya mampu membangun dan menciptakan "Nation Builders" agar dapat bersaing di kancah global.

Memprioritaskan pendidikan artinya ikut serta dalam mendorong terwujudnya cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya dan menjaga keutuhan bangsa dari campur tangan asing yang mulai menggerogoti tiap lini dari sector-sector negara ini. Penyiapan SDM melalui system pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk kemajuan negeri ini. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari siswa, masyarakat, maupun dari pendidik. Kegagalan dalam pendidikan akan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, keberhasilan pendidikan secara otomatis juga akan memberikan keberhasilan yang holistic pada sebuah bangsa. Pertanyaannya, apakah kita menyiapkan kegagalan atau kah kita benar-benar serius dalam bidang pendidikan ini ?

1. Pembahasan

a) Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang

Masa depan merupakan zaman yang akan datang atau belum terjadi¹²⁵. Menghadapi masa depan yang sudah pasti diisi dengan arus globalisasi dan keterbukaan serta kemajuan dunia informasi dan komunikasi, pendidikan akan semakin dihadapkan terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang lebih rumit dari pada masa sekarang atau sebelumnya. Untuk itu, pembangunan di sektor pendidikan di masa depan perlu dirancang sedini mungkin agar berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat diatasi serta mampu melahirkan generasi atau sumber daya manusia yang memiliki keunggulan pada era globalisasi yang memudahkan kita mengakses segala bentuk informasi dari belahan dunia manapun dengan kemajuan alat komunikasi yang luar biasa saat ini.

Pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan memanusiakan manusia. Selaras dengan pengertian pendidikan itu sendiri yang diungkap oleh Rousseau (1999:2) bahwa pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan

¹²⁵ Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas

tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Dengan demikian, pendidikan berarti *long-term investmen* atau investasi jangka panjang. Bekal ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh jenjang pendidikan yang dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi akan sangat berguna disaat memasuki dunia kompetisi multinasional. Hal yang sangat penting yang perlu dilakukan adalah tidak perlu menunggu instruksi dari atas, pemerintah pusat dan daerah, tetapi atas inisiatif pesonal untuk menggerakkan dinamika perubahan dalam rangka mengkonstruksi SDM yang unggul yang memiliki nilai positif, memiliki sikap positif, dan perilaku positif pula.

Investasi didunia pendidikan mungkin saja belum terlihat dua hingga tiga tahun mendatang, tetapi hasil dari pendidikan ini akan dapat dinikmati lima sampai sepuluh tahun yang akan datang dimana bibit-bibit yang mulai tumbuh akan akan menjadi SDM yang mampu membawa bangsa ini menuju kecemerlangan. *“Education is the most powerful weapon change the world”*, sebagaimana Nelson Mandela menyebutkan bahwa melalui pendidikanlah kita mampu mengubah dunia.

b) SDM siap Tempur

Konstruksi SDM yang berkualitas ditandai oleh orientasi nilai positif yang universal. Dalam konstelasi dunia global saat ini, kita sudah tidak lagi berbicara bagaimana membangun kebermutuan SDM, tetapi bagaimana strategi pertempuran di era modern. Kematangan mental yang didapat melalui pendidikan sangatlah dibutuhkan untuk siap bersaing dengan negara manapun.

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia saat ini sudah memasuki kategori ‘sedang’ menjadi ‘tinggi’ dengan dengan angka sudah menembus 70,18% ditahun 2016. Tetapi persoalannya adalah Indonesia masih mengalami disparitas yang tinggi meskipun secara nasional sudah tinggi, masih ada provinsi yang statusnya rendah, yaitu Papua dengan IPM 58,05%¹²⁶

Kesiapan SDM siap tempur ini tidak serta merta sehari langsung jadi, perlu proses panjang dan tidak mudah tetapi tidak juga sulit. Kita membutuhkan SDM yang bersungguh-sungguh dalam komitmen bertempur secara total dalam era global. Berubahnya status IPM Indonesia tidak lantas menjadikan kita bangsa untuk tidak memperkuat usaha yang jauh lebih keras. Dinamika modernisasi yang penuh misteri, seyogyanya menjadi acuan bagi kita untuk terus banyak mengambil pelajaran dari setiap polemik yang terjadi.

¹²⁶ Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia 2017

Sebagaimana halnya Provinsi Jambi sebuah Provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Kondisi geografis yang cukup strategis dimana di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, ini membuat peran provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari provinsi Jambi.

Selain didukung dengan kondisi geografis yang sangat strategis provinsi Jambi yang memiliki suhu udara berkisar antara 23 °C sampai dengan 34 °C dan luas wilayah 53,435 km² di antaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikannya salah satu kawasan penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 400.168 hektare serta karet mencapai 595.473 hektare. Sementara itu, nilai produksi kelapa sawit sebesar 898,24 ribu ton pertahun. Hasil perkebunan lainnya adalah karet, dengan jumlah produksi 240,146 ribu ton per tahun. Adapun potensi kekayaan alam lainnya yakni minyak bumi, gas bumi, batu bara dan timah putih.

Strategisnya posisi Provinsi Jambi nyatanya belum didukung dengan potensi SDM yang ada. Fakta menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi masih berada diangka 68,69¹²⁷. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup di Provinsi Jambi masih tergolong sedang dan belum menuju tinggi dan ini selaras dengan dengan meningkatnya angka kemiskinan sebesar 8,86%.

Tersedianya sumber daya alam yang kaya akan hasil bumi sudah seharusnya didukung oleh SDM yang berkualitas. Pendidikan merupakan satu-satunya jalan sebagai bekal bagi manusia agar mampu memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Konsen terhadap dunia pendidikan memang membutuhkan waktu yang lama, tetapi memiliki kualitas hasil yang akan mengubah banyak hal dimasa depan. Melalui kemajuan teknologi dan informasi menjadikan kita mudah mengakses dan belajar banyak hal, sehingga sebenarnya tidak alasan bagi kita untuk tidak mampu merebut kembali potensi alam yang pelan namun pasti sudah digerogoti pihak-pihak asing.

Dengan demikian, untuk membangun bangsa yang memiliki SDM yang siap berkompetisi ditingkat nasional maupun internasional

¹²⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2015

tidak serta merta menjadi tugas pokok pemerintah, tetapi kita sebagai individu turut berupaya membangun diri untuk sadar bahwa bekal pendidikan amatlah penting untuk membawa perubahan-perubahan besar dan berarti bagi bangsa ini.

2. Penutup

Pendidikan merupakan upaya pendewasaan seseorang menuju kematangan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah seharusnya dilakukan sedini mungkin, mengingat bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Investasi untuk meningkatkan martabat hidup manusia secara keseluruhan. Melalui pendidikan kita mempersiapkan SDM yang berorientasi pada mental produksi bukan konsumsi, sehingga bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang berkemajuan dan mandiri serta siap dengan segala bentuk tantangan dimasa yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas

Hasrullah.1999 *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Website

<http://bps.go.id>

<http://www.jambi.bps.go.id>

G. Harapan Baru untuk Indonesia Sehat

[Oleh: Fatma Faricha]

Penyakit diabetes bermula ketika seseorang terlalu banyak mengonsumsi gula yang berasal dari berbagai jenis makanan dan minuman yang dengan sadar atau tidak telah masuk ke tubuh, kemudian menjadi penyebab banyak penyakit kronis lainnya. Akan ada gangguan di seluruh tubuh pasca “kebanyakan manis-manis” seperti gangguan jantung, struk, gagal ginjal, gangguan hati, kolesterol, kebutaan hingga gangguan pencernaan. Lihat saja, penderita diabetes semakin hari akan terlihat semakin kurus, ada borok di kakinya, lebih lanjut lagi akan menyebabkan penyumbatan di jantung.

Walau bagaimanapun, menghindari gula adalah hal yang mustahil, sebab hampir setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia selalu mengandung gula, seperti secangkir kopi, teh manis, kentang, sayur sop, bahkan nasi yang menjadi makanan kita sehari-hari mengandung gula. Pada dasarnya gula memang sangat dibutuhkan bagi tubuh untuk proses metabolisme demi menghasilkan tenaga. Bayangkan saja jika tidak ada gula dalam darah, maka tidak akan ada ATP (*Adenosine Triphosphate*) yang dihasilkan dari proses metabolisme, lalu sel-sel dalam setiap jengkal tubuh tidak akan bekerja.

Umumnya masyarakat berpikir bahwa hanya orang yang berasal dari keluarga penderita diabetes yang bisa terjangkit penyakit ini, nyatanya tidak begitu. Ada 2 jenis diabetes yang paling umum diketahui; pertama, diabetes type 1 atau *insulin dependent*. Kedua, diabetes tipe 2 atau *non-insulin dependent*. Diabetes type 1 inilah yang biasanya meurun ke generasi selanjutnya, sedangkan diabetes tipe 2 ini bergantung pada pola hidup. Selain pengukuran gula darah, deteksi penyakit diabetes dapat dilihat dari gejala *polyuria* (banyak kencing), *polydipsia* (haus berlebih), *polyphagia* (mudah lapar), dan kehilangan berat badan secara drastis.

Diabetes dan Ancaman Depopulasi Umat Manusia

Ada beberapa fakta tentang diabetes yang mungkin belum diketahui oleh sebagian besar orang. Diabetes adalah penyakit yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. Di Australia misalnya, diabetes adalah penyebab utama kematian di negeri kanguru ini, lebih dari satu juta penduduk terserang diabetes, dan tiap 10 menit satu orang divonis sebagai penyandang diabetes. Sejak tahun 2014, Indonesia menempati posisi kelima penderita diabetes terbanyak di dunia. Saat ini jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 9,1 juta jiwa dan diperkirakan

angka ini akan terus melonjak naik hingga mencapai 21,3 jiwa pada tahun 2030.

Sementara penanganan terhadap diabetes di Indonesia masih terpaku pada penyuntikan hormone insulin dan penggunaan obat-obatan hiperglikemik oral. Selain harganya yang mahal, penyuntikan hormon insulin secara langsung harus dilakukan setiap hari sebelum makan, hal ini yang menjadi penyebab penderita diabetes tidak dapat bebas beraktifitas. Alternatif lain dalam penanganan diabetes di Indonesia adalah dengan pemberian obat hiperglikemik oral (OHO). Ada dua golongan OHO yang dapat diaplikasikan untuk penderita diabetes bergantung jenis diabetesnya. Golongan biguanid bekerja untuk meningkatkan sensitivitas insulin, OHO golongan ini cocok untuk penderita Diabetes tipe 2. Golongan OHO yang lainnya adalah golongan sulfonylurea, obat ini bekerja untuk meningkatkan sekresi insulin. Sulfonylurea akan baik jika diberikan pada penderita diabetes tipe 1. Akan tetapi, kedua golongan obat ini akan memberikan efek samping yang berarti bagi penderita diabetes. Penggunaan obat-obatan dalam jangka panjang akan memberikan dampak negative seperti hipoglikemia berat (kurang gula darah), mual, rasa tidak enak perut, anoreksia, dan komplikasi jangka panjang yang membahayakan otak.

Diabetes, kondisi hiperglikemia, memproduksi banyak sekali radikal bebas. Radikal bebas ini, sifatnya sangat reaktif dan tidak stabil. Produksi radikal bebas dalam tubuh menyebabkan berbagai perubahan. Perubahan yang terjadi diantaranya kerusakan oksidatif yang terjadi di dalam sel. Kerusakan oksidatif yang ditimbulkan menyebabkan kerusakan biomolekul penyusun sel akibat radikal bebas. Jika saja radikal bebas ini dapat ditangani dan jumlahnya dapat direduksi dengan segera, akan banyak sekali peluang untuk mencegah komplikasi akibat radikal bebas.

Sebagian besar orang telah mengetahui bahwa radikal bebas akan dapat ditangani dengan zat antioksidan. Antioksidan bertindak sebagai *scavenger* (penangkap radikal bebas) dengan cara mendonorkan satu atomnya pada radikal bebas, sehingga radikal bebas ini sifatnya lebih stabil. Ada banyak sumber antioksidan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kafein dalam kopi, flavonoid dalam coklat, dan alkaloid dalam bawang putih. Namun, adakah antioksidan yang tepat untuk penyandang diabetes? Antioksidan ini harus mampu mengurangi radikal bebas, menurunkan kadar gula darah, dan memperbaiki kerusakan sel akibat diabetes.

Indonesia dikenal sebagai negeri maritim karena luasnya lautan, garis pantai terpanjang, dan kekayaan alam bawah laut. Kita kaya dengan indahnya terumbu karang, ikan-ikan hias hingga ikan dengan duri

beracun. Sayangnya, kekayaan itu hanya dieksplorasi sebagai daya tarik wisata, industri kosmetik dan pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan. Ada satu tanaman yang dapat dieksplorasi bukan hanya dalam daya tarik wisata, tanaman ini umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku agar-agar, produksi kosmetik, dan industry lainnya seperti cat rambut, cat tekstil, film, keramik, kertas, dan fotografi. Lebih jauh lagi, tanaman ini bisa dimanfaatkan di bidang farmasi.

Sargassum sp adalah salah satu jenis rumput laut coklat yang banyak dijumpai di berbagai daerah di negeri ini. Rumput laut jenis ini tumbuh di daerah perairan jernih yang memiliki substrat dasar batu karang, karang mati, batuan vulkanik, juga tumbuh di daerah yang memiliki ombak besar dan arus deras. *Sargassum* sp umumnya berbentuk talus yang umumnya silindris atau gepeng, panjang talus mencapai 7 meter, percabangannya rimbun seperti pohon di darat. Bentuk daunnya melebar, lonjong atau menyerupai pedang. *Sargassum* sp mempunyai gelembung udara yang disebut bladder yang umumnya soliter. Gelembung udara ini berguna untuk menopang cabang-cabang talus terapung ke arah permukaan air untuk mendapatkan intensitas cahaya matahari

Belum banyak yang tau bahwa tanaman ini memiliki komponen bioaktif yang dapat bertindak sebagai antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mengurangi dampak terjadinya oksidasi. Antioksidan yang terdapat pada *Sargassum* sp bertindak sebagai scavenger (penangkap radikal bebas) dengan cara menekan produksi radikal bebas sehingga tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut.

Komponen bioaktif yang terdapat pada *Sargassum* sp disebut dengan polifenol. Kandungan polifenol pada *Sargassum* sp memiliki kemampuan dalam mencegah penyakit yang berhubungan dengan stress oksidatif seperti DM. Polifenol *Sargassum* sp diketahui berkemampuan hipoglikemik atau menurunkan kadar gula darah karena bertindak sebagai kelator α glukosidase dan α amylase serta penginduksi sekresi insulin. Kandungan tertinggi senyawa polifenol yang ditemukan dalam *Sargassum* sp, yaitu mencapai 5-15% dari berat keringnya.

Polifenol dalam rumput dikenal sebagai florotanin yang mempunyai sifat yang khas dibandingkan polifenol dalam tumbuhan darat. Keuntungan antioksidan yang terkandung di rumput laut coklat mampu mencegah kerusakan, efektif, aman dan menjadi salah satu alternatif untuk terapi DM. Jika komponen dalam rumput *Sargassum* sp ini dikembangkan akan ada banyak harapan baru bagi penyandang DM.

Untuk mendapatkan kandungan florotanin dalam *Sargassum* sp, harus dilakukan proses ekstraksi menggunakan larutan yang sifat kepolarannya sama, dan menguap pada suhu yang tidak merusak kandungan bioaktif tersebut. Tidak harus kita memisahkan bagian per bagiannya seperti daun, akar, dan batangnya. Semua bagiannya tersebut memiliki kandungan yang sama. Kita hanya harus melakukan ekstraksi bahan aktif dengan cara simplisia *Sargassum* sp dimaserasi menggunakan metanol dengan perbandingan 1:3 (b/v). Maserasi dilakukan selama 12 jam untuk pemisahan senyawa bioaktif yang terdapat dalam rumput laut coklat, kemudian dilakukan penyaringan untuk memisahkan antara filtrat dan residu. Residu yang didapatkan diremaserasi lagi dengan metanol dengan perbandingan 1:3 (b/v). Filtrat yang didapatkan dipekatkan dengan menggunakan *rotary evaporator* suhu 40°C kecepatan 100 rpm selama 2,5 jam. Sisa metanol yang masih terdapat dalam ekstrak *Sargassum* sp diuapkan dengan cara digessing hingga menjadi lebih pekat dan bau metanol berkurang. Tahapan terakhir dilakukan pengeringan menggunakan *freeze dryer* hingga menjadi lebih kering dan memastikan metanol yang digunakan telah hilang.

Hasil dari *freeze dry* ekstrak rumput laut ini kemudian dilarutkan dalam minyak wijen dengan dosis yang berbeda. Dosis yang diberikan sebanyak 200mg/kg BB, 400mg/kg BB, 600mg/kg BB. Penyerapan florotanin ini akan semakin meningkat seiring peningkatan dosis florotanin yang diberikan. Kadar glukosa darah diabetes melitus yang diberikan polifenol semakin menurun seiring peningkatan dosis polifenol yang diberikan. Polifenol rumput laut coklat dapat berperan sebagai antihiperlikemia. Bahwa florotanin yang merupakan polifenol rumput laut coklat, mampu menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan induksi pada sel untuk mensintesis insulin.

Penambahan bahan alami seperti florotanin dari rumput laut coklat lebih dianjurkan karena lebih efektif dan tidak mengandung toksik dibandingkan dengan penambahan bahan kimia. Penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus dapat bersifat toksik dan menjadi radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya inflamasi sehingga mengakibatkan kematian sel (nekrosis). Faktanya, florotanin tidak hanya menurunkan kadar gula darah pada tubuh penyandang DM, florotanin juga mempunyai sifat mampu melindungi sel dari kerusakan. Florotanin pada *Sargassum* sp mampu menghambat lipid peroksidase yang dapat memunculkan radikal bebas. Jika kadar radikal bebas dalam tubuh menurun, maka kerusakan sel dapat berkurang dan terjadi perbaikan jaringan melalui proses regenerasi sel.

Rumput laut coklat *Sargassum* sp banyak tumbuh di perairan Indonesia seluas 9 juta hektar. Rumput laut ini tersebar di perairan Bali,

Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, pulau Sumbawa, pulau Sumba, kepulauan Maluku, dan wilayah perairan lainnya. Sayangnya, produksi rumput laut di negeri ini hanya mengandalkan hasil dari alam. Jika saja rumput laut ini dibudidayakan, akan lebih banyak jumlah florotanin yang dihasilkan dan secara otomatis akan lebih tinggi jumlah penyandang diabetes yang tertolong. Akan lebih sedikit lagi keluarga yang menangis melihat saudaranya menderita akibat komplikasi diabetes, dan akan lebih banyak senyum yang terlukiskan melihat harapan hidup sehat. Harapan baru bagi Indonesia, Indonesiaku bebas diabetes.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihakki, Feliatra, dan Wikanta, T. 2014. *Extraction of Polyphenol from Sargassum sp and Its Entrapment in the Nanochitosan*. Fisheries Product Processing 12: 1-12.
- Bayrak. 2008. *Nigella Sativa Protects Against Ischemia/Reperfusion Injury in Rat Kidney*. Nephrol Dial Transplant 23: 2206 – 2212
- Chernane, H., Mansori, M., Latique, S., dan Kaoua M. E. 2014. *Evaluation of Antioxidant Capacity of Methanol Extract And Its Solvent Fractions Obtained From Four Moroccan Macro Algae Species*. European Scientific Journal 10: 35 – 49
- Firmansyah, MA. 2013. *Tata Laksana Diabetes Melitus saat Puasa Ramadhan*. Continuing Medical Education 50:1-6.
- Heo, S., Park, E., Lee, K., Jeon, Y. 2005. *Antioxidant Activities of Enzymatic Extracts from Brown Seaweed*. Bioresource Technology 96: 1613-1623
- Kendran, AAS., Gelgel, KTP., Pertiwi, NWL., Anthara, MS., Dharmayuda, AAGO. dan Anggraeni, LD. 2013. *Toksistas ekstrak daun sirih merah pada tikus putih penderita diabetes melitus*. Jurnal Veteiner 14: 427-533.
- Koivikko, R., Loponen, J., Honkanen and Jormalainen, V. 2005. *Contents of Soluble, Cell-Wall-Bound and Exuded Phlorotannins in The Brown Alga Fucus vesiculosus, with Implications on Their Ecological Function*. Journal of Chemical Ecology 31: 195-212
- Lee, S Heo., Park, yoo Jin. 2013. *Antioxidant Activities of Enzymatic Extracts from Brown Seaweed*. Journal of Bioresource Technology 14: 1613 – 1623
- Liu, L., Michael, H., Stephen, M. and Symon, A.D. 2012. *Towards a Better Understanding of Medicinal Uses of The Brown Seaweed Sargassum in Traditional Chinese Medicine: A Phytochemical Pharmacological Review*. Journal of Ethnopharmacology 142: 591-619
- Makacova, K., Gokce, N. and Courtois, A. 2014. *Tannins and Their Influence on Health*. Recent Advances in Medicinal Chemistry 1:159-208
- Suleria, H.A.R., Fellow, R.H.D., Glenda, G., Paul, M dan Simone, A.O. 2016. *Marine Bioactive Compound and Health Promoting*

Perspectives; Innovation Pathways for Drug Discovery. Trends in Food Science and Technology 50: 23 – 32

Wijesekara, I., Pangestuti, R., Kim, S.K. 2012. *Biological Activities and Potential Health Benefits of Sulfated Polysaccharides Derived from Marine Algae*. *Carbohydrate Polymerase* 84: 14 – 21

BAB VI
Cita-Cita Teknologi, Lingkungan, dan Media Massa

ABDUL HARIS IBRAHIM

ADHI NURSETO

BIMA FIKRI

MAHMUD HIDAYATUROHMAT

ITA SEPTIYANI

YOKI AL MAHIR

ROBI CANDRA

A. Kesakitan Masyarakat; Kelangkaan Air (Bersih) dan Komodifikasi Banjir: Sebuah Penghianatan Intelektual “Plat Merah”

[Oleh: Abdul Haris Ibrahim]

Kelangkaan air (bersih) bagi seluruh rakyat Indonesia

National Geographic mengungkapkan bahwa 1 dari 10 penduduk di dunia tidak memiliki akses air bersih. Ini juga berlaku kepada Indonesia. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan 2 samudera yakni, Samudera Pasifik dan Hindia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 pulau dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, “The Biggest Archipelago in The World” begitulah dunia mengenalnya. Tetapi, dengan mayoritas wilayah yang dikelilingi oleh air dibandingkan daratan, tentu saja akan sangat mengherankan ketika terjadi masalah kelangkaan sumber daya air (bersih) di Negara pulau ini, apalagi dengan semakin majunya teknologi untuk mengakses dan melakukan “Desalinasi” air laut menjadi air layak minum. Tercatat dalam United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), Indonesia memiliki total luas wilayah laut sebesar 5,9 juta km persegi. Sehingga, ketika air laut dimanfaatkan dengan melakukan Desalinasi air laut secara mandiri sebagaimana yang ada di Arab Saudi, Bahrain dan Kuwait, maka seluruh warga negaranya tentu tidak akan ada lagi yang merasakan kelangkaan air bersih untuk dikonsumsi.

Namun, fakta yang ada justru berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di lapangan. Kondisi geografi Indonesia yang katanya diuntungkan, justru menjadi *boomerang* bagi masyarakatnya sendiri. Alih-alih memanfaatkan lingkungan, ibarat senjata makan tuan, justru masyarakat Indonesia sendirilah yang disulitkan dengan kondisi alam itu sendiri. Laporan yang diterbitkan oleh Unicef pada Tahun 2014 lalu menyatakan bahwa hanya 84 persen orang dengan akses ke air bersih di Indonesia, dengan persentase orang di pedesaan lebih rendah dibandingkan orang yang bermukim di daerah perkotaan. Hal ini membuktikan jika kondisi geografi (lebih kepada akses jalan serta status sosial ekonomi) juga yang menjadikan masyarakat mengalami kelangkaan air bersih di Indonesia. Setelah sejak 1995 ketersediaan air di Jawa dan Bali telah mengalami defisit. Sehingga, pada musim kemarau Jawa dan Bali akan mengalami krisis air bersih.

Dengan adanya kesenjangan yang terjadi pada masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam mengakses air bersih, maka hal ini seolah mengukuhkan akan adanya pertarungan kelas yang terjadi antara “Si Miskin” dan “Si Kaya”. Sebagaimana pertarungan kelas yang terjadi

antara Borjuasi dan Proletariat ala Marxisme, (Bangsawan dan Hamba, Penindas dan Tertindas). Lalu kita pun bertanya, ini salah siapa?.Tentu saja, hal Ini tidak terlepas dari “Dosa Sejak Masa Lalu” pemerintah ketika bertindak sebagai pemegang kebijakan dan menyebabkan hal tersebut dapat terjadi serta berkelanjutan. Apalagi, pembangunan yang terjadi sejak masa “Orde Baru” telah tersentralisasi di wilayah kota dengan menutup mata pada permasalahan sanitasi lingkungan khususnya air di wilayah pedesaan. Padahal, Negara berkembang seperti Indonesia tiap warga negaranya memerlukan air antara 30-60 liter per harinya tanpa memandang wilayah dan status kedudukannya.

Disamping itu, secara jelas dalam UUD 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 2).Hal yang perlu digaris bawahi adalah air merupakan hal yang harus digunakan oleh pemerintah sebagai representatif Negara untuk menyejahterakan rakyat tanpa “embel-embel” kelas, bukan malah bahasa “dikuasai” itu kemudian diterjemahkan menjadi aturan yang berbelit-belit demi merasakan air di bumi dimana mereka berpijak.Ini dibuktikan dengan sulitnya masyarakat kita sekarang untuk mengakses layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.Sehingga, belakangan Presiden akhirnya mengeluarkan “Surat Sakti” Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pugutan Liar) untuk melakukan pemusnahan massal terhadap penyakit yang menjangkit Aparatur Sipil kita hari ini.Layaknya *kanker*, sumber penyakit harus dicabut hingga akar-akarnya.

Pasalnya, kebutuhan air diprediksi akan bertambah sebanyak 40 persen pada tahun 2030 nantinya sebagaimana dirangkum oleh *National Geographic* pada Maret 2016 lalu. Sehingga, jika akses air (bersih) secara terus menerus hanya diprioritaskan pada sebagian kelompok saja, maka Sila ke-5 dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” sebaiknya diganti saja menjadi “Kelangkaan air (bersih) bagi seluruh rakyat Indonesia”.

a. Banjir Sebagai Komoditas

Bukan hanya distribusi air bersih yang tidak merata, Indonesia kini juga sedang dirundung oleh bencana banjir.Muncul dimana-mana bagai “Tuhan”, bukannya malah menebarkan nikmat dan berkahnya, sebaliknya banjir justru menebar teror kepada para korbannya. Kondisi iklim (Musim Kemarau dan Musim Hujan) yang ada di Indonesia sangat mendukung akan terjadinya hal itu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis Data Bencana Alam yang terjadi sepanjang tahun 2016 kemarin, sebanyak 92 persen didominasi oleh Bencana Alam yang dikategorikan *Hidrometeorologi* (Bencana yang dipicu oleh curah hujan lebat) bahkan data ini lebih besar dari tahun sebelumnya dimana hanya berjumlah 1.732 kejadian melambung tinggi ke angka 2.384

kejadian dengan total kejadian banjir sebanyak 775 kali. Lebih parahnya, warga yang menjadi korban dari keganasan dari bencana tersebut adalah mereka dengan status ekonomi menengah ke-bawah yang sebesar 63,7 juta jiwa penduduk Indonesia bermukim di daerah rawan banjir.

Melihat hal ini, seharusnya pemerintah (Intelektual Plat Merah) akan segera sadar dan terbuka untuk melakukan upaya pencegahan terhadap bencana yang sangat meresahkan seluruh tumpah darah Indonesia. Peralunya, tidak ada seorang pun di Indonesia, bahkan diseluruh dunia yang ingin dirundung penderitaan akibat dari kelalaian berbagai pihak dalam menanggulangi bencana yang terjadi. Apalagi sampai mengakibatkan diri dan sanak keluarganya mengalami kerugian baik materil hingga non-materil. Pada hakikatnya, manusia adalah sebaik-baik ciptaan yang senantiasa cenderung kepada kebahagiaan.

Disamping itu, paham *Elitisme* (Minoritas Istimewa) yang merasuk kedalam sendi pemerintahan kita, juga menjadi benalu yang menyebabkan insiden banjir kerap terjadi. Kelompok minoritas (Pemerintah) yang memiliki superioritas ini malah terkesan tidak bersungguh-sungguh (nyaman di posisinya) dalam mengentaskan problematika banjir yang terjadi sejak lama dan berkelanjutan ini..Adanya istilah banjir tahunan seolah memperkokoh bukti bahwa mereka memang tidak siap dan hanya seolah siap dalam menghadapi bencana tersebut. Meskipun terkadang bencana itu digolongkan dalam "Natural Disaster", tetapi banjir juga sering disebabkan oleh "Human Error". Sehingga, tentu saja (Manusia) dalam hal ini pemerintah yang dituntut agar dapat mencegahnya.

Master Plan pembangunan daerah yang tidak mengedepankan upaya *preventif* kesehatan masyarakat dan lingkungan menjadi alasan terjadinya banjir yang sedang merajalela di Indonesia. Dengan mengedepankan pembangunan fisik yang memadati sebuah daerah dan mengakibatkan saluran *drainase* menjadi hal yang langka untuk ditemukan, maka inilah bukti dari pembangunan yang tidak berbasis pencegahan. Niat untuk menyejahterakan, justru malah meresahkan akibat utang budi pada masa kampanye silam. Imbasnya kemudian adalah melancarkan proyek yang tidak pro lingkungan, lalu menyalahkan alam sebagai penyebabnya ketika banjir terjadi. Begitulah mental yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita yang bersembunyi dibalik "ketiak" alam atas kesalahan-kesalahan mereka.

Bukan hanya itu, banjir acap kali dijadikan sebagai komoditas bagi para pengusaha dan politikus di negeri tercinta kita ini. Metode yang digunakan pun berbeda-beda tergantung kepentingannya. Bahkan, secara ekstrim bencana banjir akan tetap "dirawat" ketika masih memberikan keuntungan kepada mereka dalam melancarkan niatnya. Jika kita perhatikan yang terjadi Indonesia, efek dari bencana banjir kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha di bidang properti

untuk melariskan dagangannya hanya dengan dibumbui kata-kata “Bebas Banjir”.Upaya menggandeng media lokal hingga multi nasional pun dilakukan agar dapat mempromosikan usaha mereka.Tidak sampai disitu saja, Media Massa pun sering kali menjadikan banjir sebagai komoditi jualannya untuk menarik pelanggan agar mengkonsumsi berita yang mereka sajikan.Bahkan terkadang para awak media mengulang-ulang pemberitaan tersebut dan membuatnya seolah-olah terkesan sangat dramatis untuk meningkatkan rating mereka sendiri.

Komodifikasi banjir ala politikus sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh pengusaha dan media massa. Dengan satu tujuan yang sama “Menarik Perhatian” namun memiliki metode yang relatif berbeda. Politikus handal yang bertopeng justru menjual banjir kepada masyarakat untuk mendapatkan simpati mereka. Kalimat sakti yang keluar dari mulut mereka seperti “Kota Bebas Banjir” dan sebagainya akan sering kita dengarkan pada masa kampanye yang sedang berlangsung, ketika sedang berlangsung periode pemilihan. Selain itu, ketidakmampuan lawan politik dalam menyelesaikan permasalahan banjir (menjawab pertanyaan soal banjir) akan mereka jadikan bom dalam menghatam lawan-lawannya.

Banyaknya daerah di Indonesia yang telah berganti Bupati maupun Gubernur, namun belum juga terbebas dari masalah banjir seakan menyadarkan kita tentang komodifikasi banjir, sebut saja Jakarta, Bojongsoang di Kabupaten Bandung, Nunukan, Tanjung selor, Malinau di Kalimantan Utara, Kecamatan Manggala di Makasar dan masih banyak lagi. Ini seakan meneguhkan kita bahwa isu banjir memang teramat seksi untuk dijadikan sebagai komoditas jualan politik di indonesia.

Lebih lanjut, banjir yang dijadikan sebagai barang dagangan oleh beberapa kelompok juga akan sangat berdampak kepada jutaan warga yang bertempat tinggal di lokasi rawan banjir tersebut. Bayangkan saja, ketika banjir telah menjadi sebuah komoditas yang tidak ingin dihilangkan, maka setiap tahunnya warga yang berada disana akan mendapatkan imbasnya. Disamping distribusi air yang tidak merata, banjir yang dijadikan komoditas akan mempengaruhi suplai air bersih yang akan dinikmati warga.

UNESCO mengungkapakan jika dampak yang ditimbulkan oleh banjir dibagi menjadi 4 kategori yakni, fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara sederhana ke 4 elemen tersebut telah ditemukan pada kasus banjir yang terjadi di Garut dan tempat lain di Indonesia beberapa waktu yang lalu, dimana banyaknya fisik bangunan yang rusak, masalah sosial yang mencakup masalah kesehatan, trauma mental dan terganggunya kegiatan pendidikan. Secara ekonomi, kehilangan harta benda, kegiatan transportasi komoditas juga ikut terganggu, dan secara lingkungan akan menyebabkan pencemaran air dan tumbuhan.

Ini menjadi alamat bahwa warga Indonesia kedepannya akan menghadapi masalah yang sangat besar. Peralunya, Banjir akan menyebabkan rusaknya sanitasi lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, tercemarnya sarana sumber air bersih, meluapnya air dari got-got dan sungai-sungai, menyebarnya sampah dan limbah serta tidak berfungsinya jamban dan meluapnya *septic tank* sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), diare, penyakit kulit, gastritis dan leptospirosis (Depkes, 2007).

b. Kesakitan Masyarakat Yang Berkelanjutan

Sebelumnya telah kami jelaskan akan problematika sosial hingga menyerempet jauh kepada Kesehatan Masyarakat dan lingkungan. Kelangkaan air bersih dan komodifikasi bencana banjir yang disebabkan oleh kelompok elit tentunya merupakan sebuah bentuk penghinaan intelektual terhadap Pancasila dan UUD 1945. Setelah bulir-bulir dari Pancasila yang penuh akan nilai-nilai kemanusiaan dicekoki dengan kepentingan oleh para “Bangsawan”, selain itu dasar hukum Negara pun dengan gampangny disalah tafsirkan demi mencapai tujuan mereka.

Dampak yang ditimbulkan kemudian akan berpengaruh pada wilayah kesehatan komunal di masyarakat dan pencapaian target nasionalnya. Sehingga akan membentuk siklus yang kokoh dan tak tergoyahkan, dalam bahasa Paulo Freire, siklus itu bagaikan sebuah mata rantai penindasan, dimana mental penindas dan tertindas akan selalu muncul antara penguasa dan yang dikuasai. Jika hal ini terus dibiarkan, maka kedepannya Indonesia hanya akan menjadi Negara yang dicap “gagal” untuk mencapai target global yang kini dikenal dengan istilah SDGs (Sustainable Development Goals).

Terang saja, program lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) ini memuat serangkaian capaian global yang akan ditarik pada kebijakan nasional. Sebelumnya, pada era MDGs pada sektor kesehatan ada 4 *goals*, 8 target dan 31 indikator yang harus dicapai oleh pihak pemerintah. Kini capaian yang harus dicapai ada 4 *goals*, 21 target dan 18 indikator pada tahun 2030, dimana salah satu capaiannya sangat bergantung pada ketersediaan air dan sanitasi lingkungan yang telah menjadi momok dalam kehidupan berbangsa dan ber-Negara kita.

Goals itu kemudian termuat pada posisi ke-6 dengan tujuan menjamin ketersediaan dan pengolahan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Dimana hal ini memiliki dua target yakni, mencapai akses air minum aman yang universal dan merata serta mencapai akses sanitasi dan hygiene yang cukup dan merata bagi semua orang serta mengakhiri *defekasi* (Buang Air Besar) terbuka, memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan wanita serta orang-orng yang berada pada situasi rentan.

Namun, hingga saat ini kelangkaan air di pelosok daerah belum juga memunculkan tanda-tanda akan diselesaikan. Di wilayah pesisir Kalimantan Utara contohnya, tepatnya di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan hingga kini masih merasakan sulitnya mengakses air bersih. Bahkan beberapa wilayah di kecamatan itu masih mengandalkan air hujan untuk dikonsumsi oleh warganya. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia ini ketika dibandingkan dengan Tawau sangatlah memiliki *gap* yang sangat lebar diantara keduanya. Hal ini tercermin dengan gemerlapnya wilayah tersebut di malam hari dibandingkan Negara kita ketika anda duduk santai di pinggir jembatan Sei Pancang di Kecamatan Sebatik Utara.

Selain Sebatik, sebuah daerah yang berada di Kota Makassar juga mengalami hal yang sama. Kelangkaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang berantakan kerap juga dialami oleh mereka. Daerah tersebut adalah Lakkang dan Tamangapa. Bahkan salah satu daerah di Kelurahan Tamangapa merupakan daerah rawan banjir yang memiliki risiko sangat tinggi dari segi kesehatan lingkungannya. Secara kebetulan untuk mengakses kedua daerah itu diperlukan waktu 20 menit dari pusat kota. Padahal daerah itu juga bagian dari Kota Makassar, tetapi tidak menggambarkan keadaan kota di pikiran kita. Itu hanya segelintir contoh yang terjadi di Indonesia. Dimana beberapa tempat lain yang memiliki akses jalan buruk dan status kemiskinan yang tinggi akan mengalami hal yang sama pula, sebut saja wilayah timur Indonesia.

Tujuan negara untuk menciptakan masyarakat adil secara sosial khususnya pada wilayah kesehatan sangatlah jauh untuk direalisasikan. Disamping sistem kesehatan komunal yang didominasi oleh aktor kesehatan individual, akses air bersih yang diperuntukkan untuk warga hanya bisa mereka rasakan ketika memiliki "Kertas Sakti". Komodifikasi bencana banjir juga merupakan hal yang masih menjadi penyakit yang agak sulit untuk dihilangkan, bahkan ini seperti "Panu" yang membuat orang jengkel ketika mulai digaruk.

Penghianatan terbesar bagi kaum intelektual "Plat Merah" adalah dengan membiarkan hal ini berlangsung disaat mereka masih bernafas lega di bumi nusantara. Diamnya para ahli kesehatan inilah yang mengakibatkan "Hama" itu akan senantiasa berkembang biak dan menyebarkan penyakit yang dia bawa sebagai seorang dalam istilah kesehatan adalah "reservoir". Sehingga, tujuan nasional untuk menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan sama halnya dengan kata "Rindu" tanpa pertemuan. Sekarang yang nyata dan mengancam dihadapan masyarakat hanyalah "Kesakitan yang Berkelanjutan".

Untuk itu, perkataan dari Avram Noam Chomsky yang merupakan salah seorang filsuf modern dari Amerika sangatlah cocok untuk menutup tulisan ini. "The responsibility of intellectuals to speak the truth and to expose lies", *He said*.

B. Sampah: Dari Warga, Oleh Warga, dan Untuk Warga

[Oleh: Adi Nurseto]

Kesadaran Sampah

Jika kita berbicara tentang sampah, maka yang menjadi asosiasi dari hal tersebut adalah masalah. Beragam pernyataan tentang sampah, seperti: Sampah telah menjadi masalah hidup kita, sampah adalah masalah yang harus segera diatasi, sampah telah merusak lingkungan hidup kita, sampah telah merusak kelestarian alam kita, serta beragam pernyataan lain. Tanpa kita sadar, kita sedang membicarakan masalah yang sebenarnya kita sendiri adalah subyek dari masalah tersebut.

Masalah sampah tak akan selesai hanya sebatas bicara, walau sampai berbusapun sampah di TPA bantargebang akan tetap menggunung. Kita mesti sadar bahwa sampah bukan keajaiban yang muncul hanya semalam, seperti munculnya candi prambanan dalam dongeng legenda Roro Jonggrang. Juga bukan kutukan yang bisa diubah hanya dengan doa dan jampi-jampi. Karena pada hakikatnya sampah adalah akibat dari sebuah proses berkehidupan dimana manusia adalah subyeknya. Sampah muncul dari ragam aktifitas manusia yang tak dikendalikan. Oleh karena manusia adalah penyebabnya, maka hanya manusia yang bisa mengatasinya, bukan Kyai, Pastur, Nabi, atau bahkan Malaikat.

Jika Malaikat saja tak mampu mengatasi problem sampah di Dunia, khususnya di negara kita, bagaimana dengan Bupati, Camat, atau bahkan Lurah yang notabene adalah sama-sama manusia biasa. Berharap pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah sampah dalam waktu sekejap seperti mengharap hujan di musim panas. Maka daripada mengharap hujan, bukankah lebih baik segera mandi untuk menyegarkan badan kita di musim panas? Sepele memang, tapi begitulah manusia, lebih suka berkeluh kesah. Apalagi berkeluh kesah soal sampah.

Beragam teori dan metode telah banyak diketahui untuk mereduksi jumlah sampah yang semakin hari semakin menggunung, dan semakin sulit dikendalikan. Namun, kita perlu menyederhanakan kompleksitas teori dan metode tersebut dalam sebuah fondasi berfikir yang sederhana sebelum memulai aksi nyata. Jika manusia adalah produsen sampah, maka kita harus berfikir bagaimana menjadikan manusia tak sekedar produsen sampah, namun juga sebagai konsumen dari sampah. Sederhananya adalah Manusia yang memulai, maka manusia pula yang harus mengakhiri. Siapapun itu, pejabat, politisi, pengusaha, warga kota, warga desa, juga warga penghuni kolong jembatan harus menjadi konsumen sampah.

Menjadikan sampah sebagai sesuatu yang layak dikonsumsi oleh manusia bukan soal mudah, butuh sebuah proses rekayasa untuk mentransformasikan sampah sehingga bukan lagi menjadi masalah, atau bahkan musibah, namun menjadikannya sebagai sesuatu yang berkah, yang memiliki nilai kemaslahatan untuk masyarakat. Kesadaran seperti inilah yang disebut sebagai kesadaran sampah.

Pengorganisasian sampah

Mengatasi sampah memang tak semudah membalik telapak tangan, apalagi dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah. Berdasarkan data Kemendagri jumlah populasi penduduk Indonesia di tahun 2016 kisaran 257.912.349 jiwa, setiap orang memproduksi minimal 2,5 Kilogram sampah tiap harinya (Iqbal.D: Mongabay.co.id). maka silahkan dikalkulasikan berapa volume sampah di Negeri ini tiap harinya. Lantas bagaimana pemerintah mengatasi volume sampah yang begitu besar?

Menyoal tentang sampah bukanlah semata-mata tanggungjawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh manusia yang hidup, karena setiap manusia adalah produsen sampah. Sungguh tak pantas mengabaikan persoalan sampah, karena ketidakpedulian terhadap permasalahan sampah justru berimbas pada terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya akan banyak penyakit yang timbul karena sampah, dan semakin banyak kerugian yang kita tanggung akibat ulah kita sendiri.

Karena sebegitu kompleksnya permasalahan sampah, dan begitu besar masalah yang ditimbulkannya, maka sudah saatnya seluruh manusia yang masih bernafas untuk merapatkan barisan. Seluruh elemen masyarakat dari babu hingga tuan, kecil-besar, laki-laki-perempuan, tua-muda, pengusaha maupun pekerja, juga lurah hingga presiden mesti bersatu serta mengorganisasikan diri dalam menyelesaikan misi suci yaitu mengorganisir sampah.

Menurut Stoner dan Walker (1986) Pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Certo (1997) : Fokus pertama pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian sampah bisa dilakukan apabila sampah ditempatkan sebagai suatu sumberdaya yang apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan sebuah keuntungan.

Pengorganisasian sampah pertama dilakukan dari sekup yang paling kecil, yaitu rumah tangga. Rumah tangga adalah salah satu kontributor sekaligus sumber timbunan sampah yang tidak bisa diabaikan. Melalui konsep *reduce, reuse, dan recycle* atau yang biasa disebut sebagai 3R produksi sampah bisa meminimalisir dari hulu atau sumbernya. Hal ini bisa terlaksana apabila keluarga mampu membangun kesadaran kolektif di dalam rumah tangganya untuk meminimalisir produksi sampah. Selanjutnya masing-masing rumah tangga setidaknya memiliki 2 tempat sampah, yaitu untuk sampah organik dan sampah anorganik.

Pengorganisasian sampah dilanjutkan dalam sekup RT maupun RW. Pengorganisasian ini adalah tindak lanjut dari pengorganisasian sampah di dalam rumah tangga. Sampah dari rumah tangga yang sudah dipilah dan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan konsep 3R akan dikelola dalam sebuah organisasi atau wadah ditingkat RT maupun RW. Pengelolaan sampah ditingkat RT maupun RW dibagi kedalam dua bagian. Pertama adalah pengelolaan sampah organik dan kedua adalah pengelolaan sampah anorganik.

Pengelolaan sampah organik dan anorganik kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan sampah. Seperti halnya dalam proses pengelolaan, pengolahan sampah juga dilakukan secara terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik jika diolah dapat menghasilkan pupuk kompos ataupun pakan ternak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengolahan sampah anorganik dapat menghasilkan kerajinan tangan hasil modifikasi sampah yang dapat dijual kembali dan memberi keuntungan bagi masyarakat.

Pemanfaatan Sampah

Pengorganisasian sampah akan sia-sia apabila sampah yang telah dipilah dan dikelola dari rumah tangga hingga lingkup RT maupun RW tidak dapat dimanfaatkan serta tidak menguntungkan bagi masyarakat. Proses pemanfaatan sampah dilakukan oleh masyarakat melalui wadah maupun organisasi di tingkat RT maupun RW. Sampah yang telah dipilah (organik & anorganik) akan diolah dengan proses yang berbeda.

Sebenarnya sudah banyak yang mengetahui bahwa sampah organik seperti sayur-sayuran dan daun-daunan dapat dijadikan kompos maupun pakan ternak. Tapi tidak banyak orang maupun organisasi yang berani mengolahnya menjadi kompos dan campuran pakan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian serta peternakan. Proses pembuatan kompos dan pakan ternak ini adalah proses sederhana yang tidak terlalu memakan biaya. Proses ini hanya membutuhkan bahan campuran berupa kotoran ternak serta beberapa bahan yang lain seperti cairan tebu, air perasan beras, dan EM4 kemudian dicampur melalui

proses anaerobik. Proses ini sebenarnya juga tidak membutuhkan banyak lahan, hanya membutuhkan plastik atau terpal kedap udara untuk memproses campuran sampah secara anaerobik

Sayangnya, tidak banyak orang yang mau memanfaatkan sampah menjadi kompos dan bahan ternak. Banyak orang yang ragu dan takut kompos dari sampah akan menurunkan produktifitas hasil pertanian. Berdasarkan observasi dan pengalaman saat mendampingi masyarakat dalam pengolahan sampah, penggunaan kompos dalam pertanian memang akan menurunkan produktifitas pertanian selama beberapa saat. Hal ini terjadi karena petani telah terbiasa menggunakan pupuk kimia untuk pertanian, sehingga tanah yang terbiasa dengan pupuk kimia memerlukan waktu untuk beradaptasi dari pupuk kimia ke pupuk kompos. Selain dimanfaatkan sendiri oleh warga, pupuk kompos juga bisa dijual kepada petani yang membutuhkan sebagai pengganti pupuk kimia. Pupuk kompos dengan kualitas baik dapat dijual dengan harga 25.000-40.000 per 50 kilogram.

Jika sampah organik dominan pada penduduk desa, maka sampah anorganik adalah sampah yang dominan diproduksi oleh penduduk dipertanian. Dalam proses pemanfaatan sampah anorganik, saat ini banyak bermunculan bank-bank sampah di beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang, dan kota-kota lain. Sampah yang dikumpulkan di bank sampah dapat dijual kembali kepada pengepul sampah maupun diolah menjadi produk kerajinan tangan yang memiliki nilai guna serta keuntungan materiil.

Saat ini mulai bermunculan kerajinan tangan dari bahan sampah seperti tas, taplak meja, sapu, topi serta aneka kerajinan tangan dari sampah. Bahkan di beberapa kota mulai muncul distro-distro sampah, yaitu toko yang menjual kerajinan tangan hasil olahan sampah. Jika dikelola dengan baik maka kerajinan hasil olahan sampah dapat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Apabila masyarakat sudah berdaya dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, lantas apa tugas pemerintah?

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung program pemanfaatan sampah ini. Selain memiliki anggaran yang dapat dialokasikan untuk mendukung program pemanfaatan sampah, di beberapa daerah aparat pemerintah memiliki pengaruh yang kuat dan disegani oleh masyarakat. Oleh karena itu aparat pemerintah mampu mempromosikan produk olahan sampah kepada masyarakat, sehingga masyarakat mau menggunakan produk olahan tersebut.

Jika proses pengolahan sampah dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah harus mendukung gerakan tersebut dengan mengalokasikan anggaran untuk mendirikan distro maupun toko yang

menjual produk olahan sampah. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mempromosikan produk olahan sampah melalui program kerja pemerintah.

Produk-produk olahan sampah baik sampah organik dan anorganik apabila didukung pemerintah, baik tingkat kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, serta pusat maka akan menjadi trendsetter di masyarakat. Walhasil petani mulai berani menggunakan pupuk kompos, serta masyarakat tidak malu menggunakan bahan olahan sampah. Jika berjalan dengan baik pastinya gerakan ini akan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat, juga membantu pemerintah dalam mengatasi problematika sampah.

Sampah menjadi berkah, bukan mustahil apabila seluruh komponen masyarakat memandang sampah bukan menjadi masalah, namun sumberdaya yang dapat menghasilkan keuntungan, selain itu seluruh komponen ikut serta bahu-membahu mendukung gerakan pemanfaatan sampah. Maka bukan pemerintah, juga bukan organisasi lingkungan yang dapat mengatasi masalah sampah, namun seluruh manusia yang masih bernafaslah yang dapat mengatasi soal sampah melalui gerakan pemanfaatan sampah yang dapat menguntungkan masyarakat. Dengan demikian sampah yang diproduksi oleh warga dan dari warga akhirnya dapat menghasilkan keuntungan yang dipetik oleh warga.

C. Teknologi Usaha Tani Konservasi Terpadu pada Lahan Marginal di Indonesia

[Oleh: Bima Fikri]

Di Indonesia, pertumbuhan penduduk di Indonesia tentu saja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertambahan jumlah penduduk akan mempunyai implikasi terhadap kebutuhan sumberdaya lahan, baik untuk pemukiman, pendidikan, tempat berusaha, atau untuk kepentingan lainnya. Padahal sumberdaya lahan sangat terbatas, membuka hutan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan berarti bencana, apalagi sejak adanya moratorium oleh IFM, maka membuka lahan baru untuk kepentingan non-kehutanan tertutup kemungkinannya. Karena itulah untuk mencukupi kebutuhan akan pangan maka petani mengusahakan lahan pada kawasan perbukitan akan tetapi hal tersebut dapat mendatangkan resiko yang tidak kecil, karena apabila tidak disertai usaha konservasi tanah maka dapat berakibat erosi dan kerusakan lahan dan erosi.

Jika hanya tergantung pada lahan subur untuk budidaya pertanian dapat di pastikan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu pilihan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dengan perluasan lahan pertanian pada lahan marginal seperti lahan gambut, lahan kering, lahan pinggiran sungai dan lahan tanah kapur. Hal seperti ini sangat bisa diterapkan di Indonesia, beberapa wilayah lahan marginal dapat di ubah menjadi lahan pertanian. Di Indonesia luas lahan marginal ± 100 juta hektar, hal ini menunjukkan besarnya potensi lahan marginal. Produksi pertanian pada lahan marginal untuk tanaman pangan (padi, jagung, sorgum, ubu-ubian) dan hortikultura (kacang, kedelai, dst) sangat menjanjikan dan telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kebutuhan pangan nasional.

Faktor pembatas pada lahan marginal dapat diatasi dengan masukan, atau biaya yang harus dikeluarkan. Tanpa biaya/masukan budidaya pertanian dilahan tidak akan memberikan keuntungan. Ketertinggalan pembangunan pertanian di daerah marginal hampir di jumpai di semua sektor sistem pertanian (biofisik, infrastruktur, kelembagaan usaha tani maupun akses informasi untuk petani miskin yang masih kurang mendapatkan perhatian. Pengelolaan lahan marginal untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional harus dilaksanakan dengan memperhatikan banyak aspek (lingkungan bioti, abiotik dan ekosistem) karena permasalahan lahan marginal yang sebegitu rumitnya. Kendala lahan marginal di Indonesia mencakup banyak aspek, yaitu : sifat biologi tanah, bahan organik, ph tanah, c organik, kapasitas tukar kation (KTK), bahan-bahan yang beracun untuk tanaman dan sistem penataan

irigrasi dan drainase yang memerlukan perhatian khusus. Lahan marginal sangat sekali mudah berubah kondisinya, bila dalam pengelolanya terjadi kesalahan dan tidak memperhatikan aspek disekitarnya akan berdampak besar pada kerusakan lingkungan.

Strategi Penggunaan Perencanaan Penggunaan Lahan

a. Pertanian Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan memiliki kerangka segitiga pembangunan berkelanjutan ekonomi, ekologi dan sosial. Pengelolaan lahan marginal dengan sistem pertanian yang berkelanjutan di harapkan mampu mengatasi masalah pada lahan marginal dan berkelanjutan. Pengelolaan lahan marginal harus berdasarkan prinsip-prinsip seperti :

1. Penggunaan sistem yang efisien dari input luar dan mengurangi penggunaan input kimiawi,
2. Penggunaan sistem konservasi sumberdaya alam yang di gunakan pada sistem produksi,
3. Memperhatikan kearifan lokal dan banyak melibatkan petani setempat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertanian,
4. Mempertahankan produktivitas lahan dengan tenaga kerja yang cukup
5. Mampu bertahan dan mengatasi gagal panen akibat beberapa kendala (musim tidak cocok, hama penyakit, virus dan gulma)
6. Tidak memberikan efek negatif pada lingkungan (misal tidak meninggalkan senyawa kimia yang mengancam ekosistem)

b. Zonasi Lahan dan evaluasi kesesuaian lahan

Zona lahan menurut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi zona lahan, pemberian batasan, dan penyajian secara spasial atas zona lahan tersebut. Untuk kawasan lahan marginal di indonesia langkah pertama dengan cara zonasi lahan dengan mempertimbangkan : 1) kesesuaian lahan sebagai daya dukung dan melestarikan produktivitas, 2) kebijakan nasional ataupun daerah tentang hak atas tanah dan prioritas untuk pelestarian dan pengembanganya, 3) Pola penggunaan lahan sekarang (alokasi penggunaan lahan sudah resmi ataupun masih terikat dengan kearifan lokal setempat), 4) komponen agroekologi tentang informasi iklim (faktor yang paling sulit dimodifikasi dan peubah yang paling dominan dan sangat erat kaitanya dengan keragaan tanah yaitu suhu dan kelengasan). Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka lahan-lahan marginal di indonesia dapat dikelompokkan lahan-lahan yang memiliki keterbatasan yang berbeda dan dapat menentukan

langkah untuk memperbaiki kualitas lahan untuk budidaya pertanian dan mengoptimalkan jenis penggunaan lahan seperti apa yang dapat memberikan keuntungan secara optimal dengan input yang di berikan.

Setelah selesai zonasi lahan untuk langkah berikutnya dengan mengevaluasi lahan dengan acuan zonasi lahan. Perencanaan yang matang penggunaan lahan dan disesuaikan dengan zona lahan akan memberikan hasil yang optimal dan meminimalisir kerusakan lingkungan akibat pilihan penggunaan lahan. Berikut kualitas lahan marginal di indonesia

Pertanian pada lahan kering

Lahan marginal tipe kering dapat dilakukan dengan efisiensi usaha tani untuk lahan bagian bawah ataupun menggunakan lahan bagian atas yang tidak terlalu diminati. Pertanian harus mampu menciptakan prospek yang baik untuk perusahaan lahan marginal. Untuk menciptakan hal tersebut perlu dilakukan teknologi khusus pada lahan kering. Dapat di gunakan tiga point utama

1. Memadukan kemampuan lahan dalam penggunaan unsur-unsur yang dapat digunakan (c organik, ph tanah dan unsur hara tanah),
2. Penggunaan rekayasa genetik ataupun pemuliaan konvensional untuk menciptakan varietas tanaman dengan tahan terhadap beberapa faktor,
3. Membangun lembaga yang dapat mendukung usaha tan dan mampu memasarkan hasil panen.

Usaha konservasi lahan terkait erat dengan usahatani pada lahan kering, karena pada umumnya usahatani lahan kering diusahakan pada lahan bertopografi miring, sedang irigasinya tergantung jatuhnya air hujan. Teras bangku dipandang sebagai teknik konservasi lahan yang paling efektif dalam pengendalian erosi, terutama untuk tanah-tanah yang mempunyai solum cukup tebal dan bertekstur baik. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas bangunan teras, dan menanam lereng teras dengan tanaman penguat teras.

Pada gambar 1. Pembuatan teras bangku dan sepanjang teras di tanami tanaman hijauan yang juga bisa di manfaatkan untuk makanan ternak. Adapun hijauan makanan ternak atau tanaman penguat teras yang dicobakan antara lain : rumput (gajahan, setaria, star grass dan mexico) sedang jenis legume : lamtoro dan gamal (clirecidae). Dari tanaman tersebut yang dapat berkembang dan bertahan hanya rumput gajah, setaria, clirecidae.



Gambar 1. Pembuatan teras bangku pada lahan marginal tipe kering

Dalam pengeloaan lahan marginal salah satu metode yang paling baik adalah organik dengan memanfaatkan input yang ramah lingkungan. Selain itu pengelolaan air juga harus diperhatikan, lahan marginal di indonesia banyak kehilangan air hujan untuk itu air hujan harus di tranformasikan terlebih dahulu menjadi lengas tanah agar dapat dimanfaatkan atau diserap tanaman. Konservasi lengas tanah berarti menahan air lebih lama dengan cara menekan evaporasi dan perkolasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti penggunaan mulsa dan melancarkan infiltrasi.

Budidaya organik merupakan pengendalian yang dapat mengatasi komplektifitas permasalahan lahan marginal di indonesia. Diperlukan upaya ganda, misal dilahan ultisol yang memiliki kendala tanah yang masam. Budidaya organik menjadi metode yang tepat untuk di kembangkan di tanah marginal seperti ini. Budidaya organik dapat digunakan dengan mendaur ulang lingkungan ekologi secara hayati ada tiga ragam yang diminati petani indonesia, yaitu (1) pendahuruan hara dalam usaha tani dengan sumber-sumber yang berasal dari luar usaha tani, (2) pendahuruan hara di dalam usaha dengan sumber-sumber yang berasal dari usaha tani sendiri berupa sisa pertanaman, dan (3) pendaوران hara didalam petak pertanaman.

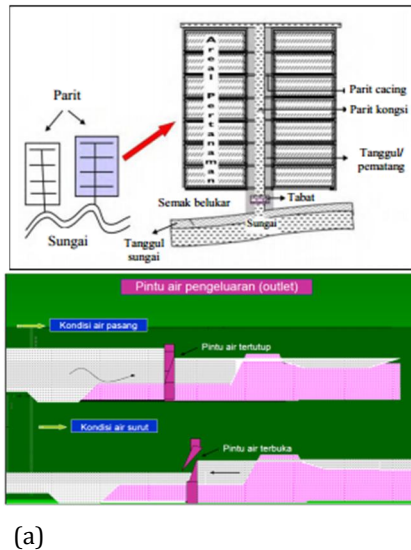
Tabel 1. Lahan gambut dan lahan gambut yang layak buat pertanian

| Pulau/Provinsi | Luasan Total (ha) | Layak pertanian (ha) |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| Sumatera | 6.244.101 | 2.253.7 |
| - Riau | 4.043.600 | 33 |
| - Jambi | 716.839 | 774.946 |
| - Sumatera selatan | 1.483.662 | 333.936 |
| Kalimantan | 5.072.249 | 51 |
| - Kalimantan Tengah | 3.010.640 | 1.144.8 |
| - Kalimantan Barat | 1.729.980 | 56 |
| - Kalimantan Selatan | 331.629 | 672.723 |
| Total | 18.317.589 | 694.714 |
| | | 162.819 |
| | | 49 |
| | | 6.057.1 |

Catatan : ha= hektar

Dengan luas lahan gambut dengan 6.057.149 layak digunakan untuk lahan pertanian sangat besar sekali potensinya untuk di tanami tanaman pangan.Lahan gambut memiliki kandungan bahan orrganik yang tinggi.S1emakin gelap lahan gambut tingkat kematanganya semakin tinggi.Permasalahan pertama pada lahan gambut adalah kandungan air yang tinggi berkisar antara 100-1300% dari berat berat keringnya (Mutalib *et al.*, 1991).Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan cara pembuatan drainase yang baik dan apabila lahan gambut sudah mencapai kadar air tertentu dan siap di dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Pembuatan irigrasi dan beberapa penampungan air juga perlu dilakukan seperti dam, hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau.Untuk pengaturan sistem pengairan secara makro bisa di terapkan beberapa metode, salah satunya adalah sistem handil. Pengelolaan sistem handil bisa diterapkan utamanya pada lahan gambut daerah kalimantan dan daerah sumatera. Pada gambar2 dan 3 merupakan sistem handil, Handil dibuat tegak lurus dengan sungai selebar 5-7m dan semakin menyempit kearah hulu.Panjang handil berkisar 1 meter dan pada kanan-kiri bisa ditanami

tanaman buah-buahan untuk menahan erosi selain itu pada kanan kiri untuk menahan erosi.



Gambar 3 . Sistem irigrasi dan drainase handil (Najiyati *et al.*, 2005)

Untuk tatanan air mikro dapat dilakukan dengan tersier serta pembangunan beberapa saluran yang lebih kecil. Saluran drainase di buat berseling dan irigrasi dibuat dengan beberapa petak-petak kecil untuk memudahkan.

Tanah gambut memiliki kandungan asam tanah yang tinggi ($ph < 5,5$). Tidak seperti tanah mineral lahan gambut hanya di tingkatkan sampai 5,5 untuk tanaman pangan. Hal ini karena gambut memiliki potensi Al yang beracun dan apabila dinaikkan lebih dari 5,5 akan memperlambat dekomposisi gambut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut setelah pembukaan lahan gambut ditambahkan bahan-bahan amelioran yang banyak mengandung kation polivalen seperti lumpur pada sungai. Pemberian tanah mineral kadar besi tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Untuk menaikkan ph di gunakan pengapuran sampai batas tertentu.

Harapan saya untuk kedepanya dengan melihat peluang yang sangat besar dari lahan marginal di Indonesia adalah penggunaan lahan marginal dengan menggunakan teknologi seperti diatas dan bersifat berkelanjutan. Hal ini guna untuk menjadi lahan pertanian tanaman

pangan di Indonesia(padi) dan mampu menunjang produktifitas secara optimum dan mampu meberikan hasil yang konstan setiap tahunnya. Dengan bertambahnya lahan pertanian di Indonesia dapat menaikkan hasil panen guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dan menuju kemandirian pangan.

D. Pemanfaatan Teknologi Kelautan Wujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim

[Oleh: Mahmud Hidayaturohmat]

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar dua pertiga luas wilayahnya adalah lautan. Berdasarkan luasnya cakupan wilayah lautan tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang diakui secara internasional yang ditetapkan pada UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982. Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Jauh sebelum adanya deklarasi tersebut atau bahkan sebelum Indonesia merdeka bangsa ini sudah memiliki semangat maritim yang menggelora. Bumi nusantara ini pernah mengenal motto atau seruan "Jalesveva Jayamahe" yang memiliki makna "Di Lautan Kita Jaya". Ungkapan ini telah ada sejak zaman Majapahit dan kini digunakan sebagai semboyan TNI Angkatan Laut. Selain itu ada juga sebuah lagu berjudul "Nenek Moyangku Seorang Pelaut" yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Hal ini membuktikan bahwa memang bangsa ini pernah jaya dengan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan.

Paradigma tentang laut oleh para pendahulu negeri ini sayangnya telah bergeser. Hal ini dikarenakan pada masa penjajahan kolonial Belanda pola hidup bangsa ini yang berorientasi pada wilayah maritim 'dilencengkan' menjadi berorientasi pada bidang agraris (darat). Sehingga lautan kemudian dipandang sebagai pemisah antar daratan dan menjadi penghambat aktivitas masyarakat baik pada sektor ekonomi, sosial, budaya maupun sektor-sektor lainnya.

Pergeseran pola pikir tersebut membuat miris kondisi bangsa ini. Misalnya saja garam yang bahan baku pembuatannya berasal dari lautan, namun saat ini negara kita harus mengimpornya dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 yang dikutip dalam laman finance.detik.com, impor garam Indonesia senilai US\$11,4 juta dengan jumlah garam seberat 276.299 ton. Yang sangat disayangkan adalah salah satu negara pengimpor garam ke negeri ini adalah Singapura. Padahal luas wilayah Singapura tidak lebih besar dari provinsi yang memiliki luas wilayah terkecil di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut maka sudah saatnya kita menyadarkan bangsa ini bahwa laut sejatinya adalah sumber kehidupan manusia. Banyak hal yang dapat kita eksplorasi dari lautan, seperti banyaknya hasil pertambangan yang tersimpan di lautan, hasil-hasil laut

berupa tumbuhan dan hewannya dapat dijadikan sebagai sumber makanan dan obat-obatan, kita juga dapat menjadikan lautan sebagai objek wisata yang sangat indah, bahkan dalam konteks bernegara lautan kita merupakan garda terdepan yang perlu kita pertahankan keamanannya demi berdaulatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

a. Pengertian dan Konsep Negara Maritim

Alfred Tayer Mahan (ahli strategi maritim) mengartikan negara maritim adalah suatu negara yang memanfaatkan kekayaan lautnya dalam mencapai kesejahteraan dan kejayaannya. Selain itu, didukung dengan visi maritim yaitu pandangan hidup yang memonitor upaya mencapai kesejahteraan dan kejayaan melalui pemanfaatan kekayaan laut.

Selanjutnya Mahan berpendapat bahwa, terdapat enam syarat utama sebuah negara disebut sebagai negara maritim, yaitu :

1. Lokasi geografis,
2. Kondisi wilayah,
3. Luas wilayah teritorial,
4. Jumlah penduduk,
5. Karakter penduduk, dan
6. Pemerintahan

Dari keenam syarat utama diatas, Indonesia sudah masuk sebagai kategori negara maritim. Namun, jika dilihat pada definisi yang sebelumnya telah dijelaskan Mahan bahwa negara maritim itu memanfaatkan kekayaan lautnya dalam mencapai kesejahteraan dan kejayaan, maka sebenarnya predikat Indonesia sebagai negara maritim masih perlu untuk dipertanyakan. Bagaimana tidak, seperti data yang telah dipaparkan diatas, garam yang bahan bakunya bersumber dari lautan saja negeri ini masih harus mengimpor dari berbagai negara. Maka jelas kemaritiman Indonesia masih sangat perlu dipertanyakan.

Kita patut bersyukur saat ini Pemerintah Indonesia sudah mulai memperhatikan masalah laut dan kemaritiman. Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini hadir dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” memberikan harapan dan mengembalikan semangat untuk membangun maritim dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam kelautan. Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut diturunkan misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkeperibadian dalam kebudayaan.

Tiga dari tujuh misi tersebut berhubungan dengan kemaritiman dan menekankan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, sedikitnya terdapat 10 pilar yang perlu dibangun untuk jadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, bermartabat dan bedaya saing tinggi. Pilar-pilar tersebut, antara lain (Rupini, 2015):

1. Penyusunan Tata Kelola Laut dalam Kerangka Negara Maritim. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dan pemanfaatan laut bisa terintegrasi satu sektor dengan lainnya yang dipayungi masing-masing kebijakan yang tidak saling tumpang tindih seperti sekarang ini;
2. Pengembangan Sumber Daya manusia serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim. Sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam bidang maritim adalah sebuah keniscayaan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, serta ditunjang dengan ilmu dan teknologi yang mumpuni terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan laut.
3. Penguatan Infrastruktur Maritim. Infrastruktur adalah tulang punggung ekonomi sebuah bangsa sehingga Indonesia sebagai negara kepulauan, infrastruktur maritim adalah hal yang mutlak dibangun.
4. Pemerataan Ekonomi dan Industri Maritim di Seluruh Wilayah NKRI. Cara pandang terhadap NKRI sebagai negara kepulauan tidak bisa parsial, keterpaduan pembangunan di satu pulau dengan pulau lainnya harus seimbang agar pertumbuhan ekonomi bisa merata serta sistem logistik seimbang dan akan berdampak pada ekonomi biaya murah. Saat ini ketimpangan ekonomi dan logistik sangat terasa karena pembangunan ekonomi dan industry terpusat di Jawa dan Sumatera.
5. Membangun Sistem Transportasi Laut yang Sinkron dengan Sistem Logistik. Untuk sebuah negara maritim, sistem

transportasi laut dan sistem logistik harus sinkron serta keterkaitan dengan infrastruktur pendukung lainnya yang ada di darat, sehingga efisiesi dan distribusi bisa merata hingga ke pelosok negeri.

6. Membangun Sistem Pertahanan dan Keamanan Maritim yang Handal. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lautan yang sangat luas dan posisi geografis yang strategis membutuhkan sebuah sistem pertahanan dan keamanan maritim yang kuat. Tanpa itu, tentu NKRI akan mudah diacak-acak oleh negara lain.
7. Membangun Perikanan Laut yang Bedaya Saing. Perikanan laut adalah salah satu potensi laut Indonesia yang besar, sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang holistik dan terintegrasi agar bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi bangsa dan mampu bersaing dengan negara lain.
8. Pengelolaan Migas dan Mineral Berwawasan Lingkungan. Potensi migas dan mineral di laut Indonesia sangat besar, bahkan 90 persen potensinya ada di lautan. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan dan strategi yang mumpuni untuk mengelola dan memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
9. Membangun Pariwisata Bahari. Ribuan pulau kecil di Indonesia yang memiliki keindahan yang eksotis dan sangat potensial untuk pengembangan pariwisata bahari, disamping luasnya lautan yang juga memiliki potensi untuk sebuah pelayaran wisata.
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. Pembangunan industri dan tata kota tentu memiliki implikasi terhadap kelestarian lingkungan maritim, sehingga perlu di tata dengan baik agar dampak kerusakan lingkungan laut bisa diminimalisir. Selain itu, keberadaan Indonesia di *Ring of Fire* tentu memiliki potensi bencana alam yang besar baik itu gempa dan tsunami, sehingga diperlukan sistem mitigasi bencana yang kemungkinan besar datangnya dari lautan.

Selanjutnya pada tulisan ini penulis hanya membahas pada pemanfaatan teknologi di bidang kelautan bagi negara maritim.

b. Pemanfaatan Teknologi di Bidang Kelautan

Pada era globalisasi ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. Hal ini dikarenakan teknologi sangat diperlukan untuk membantu kehidupan manusia dan meningkatkan kualitas serta taraf hidupnya. Jika kita mampu memanfaatkan teknologi dengan baik maka sudah pasti segala sektor kehidupan ini akan kita kuasai yang kemudian akan berimplikasi pada terwujudnya masyarakat sejahtera yang adil dan makmur.

Sejatinya alat-alat teknologi yang canggih tidak selalu menimbulkan dampak positif bagi keberlangsungan hidup manusia. Hampir semua hasil peralatan teknologi itu akan memiliki efek negatif. Sebagai contoh hasil pembuangan dari pembakaran mesin-mesin teknologi dapat membuat polusi udara, bahkan beberapa alat teknologi tersebut menimbulkan radiasi yang cukup berbahaya bagi kesehatan manusia. Untuk itu kita perlu cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir efek yang akan ditimbulkan setelahnya.

Dalam pemanfaatan teknologi di bidang maritim, kita perlu melihat dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan teknologi tersebut, karena tidak semua alat teknologi yang digunakan akan memberikan dampak positif bagi ekosistem di perairan. Sebagai contoh, jika zaman dahulu manusia hanya menangkap ikan menggunakan tombak, alat pancing atau jaring yang hanya mendapatkan ikan dalam jumlah sedikit dengan waktu yang relatif lama, namun dengan bantuan teknologi saat ini manusia dapat lebih mudah dalam menangkap ikan, bahkan akan mendapatkan banyak ikan dengan rentang waktu yang relatif cepat. Namun sayangnya, sebagian teknologi modern tersebut memiliki dampak negatif bagi ekosistem di laut. Misalnya jika seorang nelayan modern menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Penggunaan alat peledak tersebut selain akan menghasilkan dampak buruk bagi kesehatan manusia akibat polusi yang dihasilkan.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah sudah mulai perhatian terhadap kondisi laut dan tergugah untuk memanfaatkan sumber daya laut tersebut dalam jangka panjang. Berbagai program penyadaran masyarakat dan sosialisasi akan pentingnya laut bagi kehidupan manusia telah dilakukan. Selain itu komitmen Pemerintah juga telah dibuktikan dengan disahkannya sebuah regulasi yang mengatur masalah kelautan dengan sangat apik. Regulasi ini dibuat agar sumber daya laut dapat dikelola secara benar dan tepat dengan memperhatikan segala aspek demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga kebutuhan akan laut untuk masa sekarang dan yang akan datang dapat terpenuhi. Poin penting dalam penyelenggaraan kelautan tersebut dilaksanakan berdasarkan 11 asas yang termaktub dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pada Bab 2 Pasal 2 yaitu:

1. Keberlanjutan;
2. Konsistensi;
3. Keterpaduan;
4. Kepastian hukum;
5. Kemitraan;
6. Pemerataan;

7. Peran serta masyarakat;
8. Keterbukaan;
9. Desentralisasi;
10. Akuntabilitas; dan
11. Keadilan.

Dengan demikian penyelenggaraan kelautan yang termasuk didalam pada pemanfaatan alat-alat teknologi harus memperhatikan 11 asas ini. Segala bentuk penggunaan alat teknologi modern yang dapat merusak ekosistem laut tidak diperbolehkan karena akan merusak ekosistem dan mengakibatkan laut berkurang fungsinya. Keberlangsungan laut sangat perlu diperhatikan guna menjamin ekosistem laut dapat terjaga dengan baik, dengan demikian ketersediaan sumber daya laut untuk generasi penerus kita akan terpenuhi.

Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Maritim

Saat ini Indonesia belum mampu dan layak disebut sebagai negara maritim. Hal ini dikarenakan Indonesia belum mampu mengelola sumber daya laut secara optimal dan masalah keamanan laut Indonesia pun masih belum dijaga secara maksimal. Buktinya adalah kekayaan laut nusantara yang begitu melimpah ruah ini belum mampu membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Selain itu masalah keamanan wilayah laut kita juga masih lemah terutama pada wilayah laut yang berbatasan laut dengan negara tetangga. Belum jelasnya batas wilayah laut serta sering terjadinya sengketa batas negara, membuat Indonesia harus bekerja lebih keras untuk menjadikan nusantara ini sebagai negara maritim secara utuh dan berdaulat.

Jika kita menilik fakta sejarah, seharusnya saat ini Indonesia telah menjadi negara maritim yang kuat. Terlebih sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang poin pertamanya menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini berarti proses mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim telah lama dikonsepsikan oleh para pendahulu kita. Bahkan pada tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid telah mencanangkan hari nusantara yang jatuh setiap 13 Desember sebagai peringatan Deklarasi Djuanda ini. Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Megawati untuk mempertegas peringatan hari nusantara tersebut diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga pada tanggal tersebut resmi sebagai hari perayaan nasional tidak libur.

Selain itu Indonesia juga mendapatkan peluang besar pada pengelolaan wilayah laut sejak Konvensi Hukum Laut PBB atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS ketiga pada tahun 1982. Karena sejak konvensi ini eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan bukan hanya

diakui secara lokal pada Deklarasi Djuanda, namun juga telah diakui dunia internasional. Bahkan selanjutnya Pemerintah kembali mempertegas dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Untuk mewujudkan negara maritim yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang mumpuni, UNCLOS memberikan satu bab khusus tentang pengembangan dan alih teknologi kelautan. Dalam Pasal 266 ditekankan tentang penggalakan pengembangan dan alih teknologi kelautan. Poin-poin pada pasal ini menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan kelautan dan kemampuan teknologi kelautan disetiap negara-negara. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara berkembang termasuk negara-negara tak berpantai dan letak geografisnya yang tidak beruntung dengan melakukan eksplorasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, riset ilmu pengetahuan kelautan dan kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan laut sesuai dengan Konvensi ini.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim selain penekanan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang maritim, Indonesia perlu memiliki *ocean policy* yang secara diskriptif, sebagai berikut; (i) dapat mengakomodasikan berbagai keunikan yang intrinsik, (ii) dialog yang kritis antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan, (iii) berdaya jangkau kedepan, (iv) bertujuan untuk membangun Negara maritim yang kuat (Dewan Kelautan Indonesia, 2011).

Sampai saat ini bangsa ini terjebak pada *land-based-oriented*-nya, padahal Alfred Thayer Mahan (1660-1783) mengatakan “Barang siapa yang menguasai laut akan menguasai dunia”. Namun sayangnya saat ini kita baru mampu membuat slogan-slogan yang menyebutkan negara ini sebagai negara kepulauan atau sebagai negara maritim. Sudah saatnya kita menuju masyarakat prograssif pada bidang kelautan sehingga motto kejayaan bumi nusantara yang diperkenalkan sejak zaman Majapahit dapat kembali benar-benar terbukti, bukan hanya menjadi slogan, namun menjadi kenyataan.

"Jalesveva Jayamahe"

"Di Lautan Kita Jaya"

Daftar Pustaka

- _____, _____. *BAB II Pembahasan Teknologi Maritim*,
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44296030/PEMBAHASAN_MARITIM.docx?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWY YGZ2Y53UL3A&Expires=1492399769&Signature=3%2FZKnPCwmXjqqu2jBlq%2F8KSiDo%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DBAB_II_PEMBAHASAN_teknologi_maritim.docx, 17 April 2017
- _____, _____. *Terjemahan UNCLOS 1982*,
<http://www.maritim.co/terjemahan-unclos-1982/>, 17 April 2017
- Ambarwati, R., 2014, *Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*, <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>, 16 April 2017
- Dewan Kelautan Indonesia, 2011, *Satukan NKRI Dengan Mewujudkan Negara Maritim Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Jefriando, M., 2016, *RI Belum Berhenti Impor Garam, Ini Datanya*, <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3212025/ri-belum-berhenti-impor-garam-ini-datanya>, 16 April 2017
- Mahan, A., T., Dalam *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783*
- Republik Indonesia, 2014, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*, Sekretariat Negara
- Rupini, R., N., 2015, *Negara Maritim atau Negara Kepulauan Bagi Negara Indonesia*
<http://rarinirwestirupini.blogspot.co.id/2015/08/negara-maritim-atau-negara-kepulauan.html>, 17 April 2017
- Wikipedia, 2016, *Deklarasi Djuanda*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda, 16 April 2017

E. *New Media dan Social Movement*

[Oleh: Ita Septiyani]

“Hadirnya New media sebagai tanda lahirnya modernitas dan masa keemasan dari sebuah bangsa yang besar”.

New Media

Pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih memiliki pengaruh terhadap media. New media merupakan salah satu bukti bahwa perkembangan zaman semakin pesat, teknologi dengan cepatnya bermetamorfosis. Masyarakat semakin cerdas dan memiliki efisien waktu untuk mendapatkan segala informasi bahkan seringkali new media dianggap sebagai “dewa” penyelamat. New media memberikan ruang terhadap individu untuk berbagi ide, pendapat, pengetahuan, dan lain-lain untuk membentuk sebuah komunitas virtual. Melalui new media para pengguna bisa berbagi ketertarikan yang sama akan satu forum tanpa memiliki batas ruang dan waktu. Melalui new media, social media diperkenalkan dan menjadi media yang dianggap penting karena kehadirannya membuat perubahan besar dalam penyampaian pesan. Komunikasi yang sering dilakukan saat ini lebih sering dilakukan menggunakan internet dari pada tatap muka secara langsung.

Ciri-ciri new media

- a. *Computing and information technology*
Informasi akan dengan mudah diakses baik melalui *sites* atau jejaring sosial, informasi akan dengan mudah tersebar sampai dibelahan dunia manapun tanpa repot dan membutuhkan biaya yang besar. Kebebasan informasi publik menjadi tak terkendala dan mengalir ke penikmat media.
- b. *Communication network*
Memper memudahkan untuk para pengguna media (social media, website, dll) untuk berinteraksi dan menjalin komunikasi layaknya berkomunikasi secara langsung, baik di dalam negeri maupun luar negeri secara cepat akan mudah dalam mengakses. Tidak jarang banyak orang yang lama tak bertemu dan karena keterbatasan ruang dan waktu kini bisa berinteraksi kembali, suatu sisi positif yang ditimbulkan oleh new media.
- c. *Digitized media and information content*
Berbeda dengan media cetak, digital media ini bisa dikatakan lebih fullgar dalam menyaring setiap informasi yang masuk, segala macam informasi aka diteruskan kepada penikmat media. Bisa dikatakan isi yang tersebar bukan lagi persoalan, dan ini yang akhirnya akan merugikan masyarakat jika tidak pandai-pandai dalam memilah mana yang penting dan mana hanya akan merusak.

Selain itu ada beberapa karakteristik new media:

a. Individualisasi

Mengacu pada adanya peluang yang lebih tinggi bagi pengguna internet dalam mengontrol arus informasi, dimana pengguna menjadi terdemaskifikasi ke dalam segmen yang lebih spesifik. Demaskifikasi ini berarti kontrol komunikasi telah berubah yang tadinya dikendalikan oleh pembuat pesan menjadi dikendalikan oleh si penerima pesan atau konsumen media

b. Interaktivitas

Diartikan sebagai kemampuan dari sistem komunikasi untuk berbicara balik (talk-back) dengan pengguna. Hampir seperti individu yang terlibat dalam percakapan tatap muka. (Everest M. Rogers: 1986)

Cirinya adalah individu yang terlibat bisa leluasa berinteraksi, adanya umpan balik bersifat positif/negatif, penyampaian pesan dilakukan secara verbal/gambar, dan menggunakan media interaktif. (Ana Nadhya Abrar: 2003)

Bebasnya akses informasi yang diterima publik, maka masyarakat harus jeli dan memilah informasi yang tersiar. Efek negatif dan positif tentu ada tergantung bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut. Efek positif diantaranya pertama, masyarakat akan dengan mudahnya mengakses informasi dan berinteraksi dengan sesama dibelahan dunia manapun dengan cost murah. Kedua, masyarakat akan dengan mudahnya mengkritisi pemerintahan ketika ada sesuatu yang tidak wajar disekitar contoh saja soal pungutan liar yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah agar masyarakat melapor jika hal itu terjadi, di sini masyarakat sangat diuntungkan akan keberadaan new media, yang dulunya jika ingin berinteraksi dengan pemerintah harus ada lidah penyambung namun sekarang masyarakat dan pemerintah bisa saling mengawasi. Efek negatif diantaranya pertama, akses informasi yang terbuka tentunya ada tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab untuk merusak moral bangsa, konten-konten negatif seperti situs porno marak beredar dan sangat mudah diakses oleh anak-anak dibawah umur. Kedua, maraknya oknum yang menyalahgunakan media sebagai tempat untuk mencari keuntungannya sendiri dengan berbagai kasus penipuan dan sebagainya.

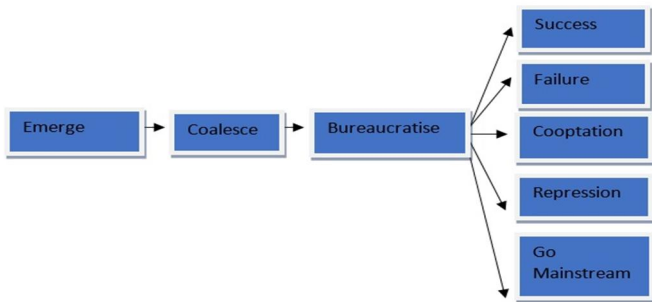
Masyarakat dituntut untuk cerdas dalam memilah informasi yang masuk, perlu adanya filter yang ada di diri setiap individu, jangan sampai media yang seharusnya memberikan kita kemudahan tetapi karena keteledoran dan tidak adanya benteng diri justru akan

berdampak buruk terhadap diri kita sendiri bahkan berdampak juga terhadap generasi penerus bangsa.

Social Movement

Anthony Giddens menyatakan bahwa social movement merupakan upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Gerakan sosial hadir karena dampak dari suatu efek atau masalah yang timbul di area publik dan dianggap mengganggu suatu kesatuan. Bisa dikatakan bahwa gerakan sosial merupakan gerakan bersama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam memperjuangkan suatu hak yang seharusnya diperoleh melalui new media seperti twitter, facebook, blog, website, dan digital media yang lain. gerakan tersebut tidak serta-merta hanya dilakukan dalam media tetapi mengandung aksi nyata yang dapat menimbulkan perubahan, sistem dan peraturan. New media sebagai penggerak perubahan sosial melahirkan banyak gerakan sosial yang semakin berkembang setiap muncul isu tertentu yang menarik perhatian publik. New media mempunyai nilai strategis untuk melakukan komunikasi persuasif tetapi suatu perubahan baru bisa terwujud bila pengguna media menggagas sebuah tindakan.

Stages of social movement



Dari perspektif Giddens sudah cukup untuk memahami bahwa new media memiliki peranan penting dalam social movement karena efektif dan lebih cepat untuk direspon publik. Bermula dari munculnya kasus dipermukaan yang diterima oleh publik yang selanjutnya diolah publik dengan respon (positif atau negatif) hingga mendapat respon balik dari

pembuat kebijakan yang akhirnya adalah pesan tersebut dapat mencapai tujuannya, karena kekompakan dari para loyalis dalam mengefektifkan peran new media dalam kehidupan mereka.

New Media dan Masa Depan Indonesia

Hadirnya new media dan social movement dari masyarakat memberikan dampak yang besar untuk Indonesia. Sangat mudah untuk merubah suatu kebijakan, hanya dalam genggamannya sebuah digital media maka masyarakat dan para loyalis membuat sebuah kelompok dunia virtual untuk memperjuangkan hak dan menyuarakan aspirasinya. Dahulu sebagian orang berfikir bahwa media hanyalah sebuah wadah untuk menunjukkan eksistensi, tak jarang untuk pencitraan dalam komunikasi politik. Perkembangan sosial media seperti twitter, facebook, path, dan instagram adalah yang paling populer dikalangan semua generasi. Jika ditelisik dengan detil, new media memiliki peranan penting dalam membangun peradaban masyarakat Indonesia, khususnya membangun rasa nasionalisme terhadap bangsa, rasa kebersamaan yang awalnya hanya tertanam dalam gerakan sosial dunia maya berubah menjadi aksi nyata.

Media adalah sarana yang paling efektif dalam menyampaikan pesan serta cepat pula untuk mendapatkan respon dari masyarakat. Jika kita melihat realitas sekarang ini bahwa mayoritas pemuda di Indonesia bahkan seluruh dunia menggunakan media untuk mengekspresikan setiap kejadian, bukan tidak mungkin bahwa hal tersebut memberikan dampak yang luar biasa bagi penggunanya. Tentunya kita masih ingat dengan beberapa kasus yang terjadi di negeri ini. Pertama, bom sarinah yang membuat gempar kota Jakarta, banyak orang berspekulasi bahwa bom tersebut diletuskan karena hanya untuk mengalihkan isu, tetapi entah benar-atau tidaknya masyarakat hanya bisa memohon agar negaranya tetap aman. Kasus tersebut menimbulkan dampak yang buruk khususnya untuk bangsa Indonesia, sebagai contohnya adalah investor akan batal untuk berinvestasi karena dianggap Indonesia masuk zona tidak aman (sarang teroris) dan jika terjadi terus menerus akan merugikan perusahaan-perusahaan besar yang berotasi di Indonesia. Turis dari mancanegara pun akan tidak respect lagi untuk berkunjung ke Indonesia, padahal turis mancanegara adalah salah satu penyumbang devisa terbesar.

Kedua, masih teringat dengan jelas kasus Prita Mulyasari terkait kritik terhadap salah satu rumah sakit yang berkelas internasional dalam konteks mutu dan kualitas. Pro dan kontra serta konflik antara keduanya mengundang publik untuk ikut mengeluarkan opininya dalam kasus tersebut. New media sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi dinilai efektif, bahkan masyarakat awam banyak menyalurkan dukungannya

terhadap Prita Mulyasari dengan membuat hashtag (#) di twitter sebagai wujud dukungan masyarakat terhadapnya. Peristiwa tersebut tak lantas hanya berhenti dalam dunia virtual, hal tersebut masih berlanjut dalam aksi turun ke jalan yaitu “koin untuk Prita”, ini adalah puncak dari pembelaan atau dukungan masyarakat agar kebijakan atau vonis yang ditujukan kepada Prita bisa ditanggihkan.

Ketiga, beredarnya berita hoax di kalangan masyarakat, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), situasi menjadi semakin memanas karena berita yang tersiar semata-mata hanya untuk mengelabui masyarakat dalam kampanye hitam. Puncak dari maraknya berita hoax adalah ketika pemilihan presiden tahun 2015, banyak berita-berita atau kampanye hitam yang ditujukan untuk calon kandidat tertentu. Masyarakat dibuat bingung dan susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang hanya sebuah serangan. Pada akhirnya timbulah suatu gerakan dari pengguna media sosial untuk meminimalisir maraknya *bias report*. Salah satu gerakannya adalah mengkampanyekan di media sosial seperti twitter dengan membuat hashtag #AntiBeritaHoax, dalam setiap jamnya terhitung ada 3000 tweet yang menggunakan hashtag tersebut. Begitu juga facebook, kelompok masyarakat dunia virtual mencoba mereduksi berita-berita hoax dengan membuat status dan hashtag di akun media sosial. Tidak berhenti disitu saja, gerakan masyarakat yang awalnya hanya disatukan melalui media sosial menjadi sebuah aksi nyata di jalan menuntut agar berita-berita hoax tidak lagi beredar di kalangan masyarakat.

Keempat, kasus yang sempat dan menjadi perhatian dunia terkait kudeta Presiden Turki (Erdogan) oleh pasukan militer. Kasus tersebut mengundang geram masyarakat Turki begitu pula negara tetangga karena dinilai sangat merugikan khususnya dalam bidang perekonomian menjadi tidak stabil, kerjasama bilateral, dan lain-lain. Respon cepat masyarakat serta peran new media adalah salah satu strategi untuk “mendinginkan” suasana, aksi para loyalis Erdogan di media memberikan efek yang signifikan bagi perpolitikan Turki pada masa itu. Salah satu caranya adalah memanfaatkan kekuatan new media, yang fungsinya membentuk jaringan sosial yang luas yang tersebar hingga ke beberapa daerah tanpa batasan ruang dan waktu. Desakan serta seruan untuk turun ke jalan yang di kumandangkan di media sosial mendapat respon baik dari sebagian besar masyarakat Turki. Hanya dalam beberapa jam saja masyarakat berbondong-bondong melakukan pembelaan dan meredam perpolitikan yang kian memanas, yang pada akhirnya pasukan militer gagal untuk melakukan kudeta terhadap Erdogan. Itu adalah salah satu bukti bahwa kekuatan new media bisa dengan cepat mempengaruhi publik serta menyiarkan akses informasi penting.

Berkaca dari berbagai kejadian yang menimpa dalam negeri serta dunia, bisa dilihat bahwa begitu dahsyatnya peran new media dalam “meracuni” publik untuk secepat kilat mengambil bagian dalam menyelesaikan problema yang terjadi. Interaktifitas, konektifitas, serta kecepatan dalam akses informasi dapat dimanfaatkan masyarakat begitu juga pemerintah. Sebagai salah satu rekomendasinya adalah mengefektifkan dunia virtual untuk hal-hal positif, salah satu contohnya adalah untuk pengawasan dari kelompok dunia maya kepada birokrat. Melihat realitas yang terjadi di Indonesia terhadap kasus-kasus korupsi yang menjerat tokoh-tokoh publik, hal yang sangat memalukan dunia karena berkeliarannya para koruptor di negeri ini. Lembaga sebesar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan cukup untuk memberantas kasus korupsi hingga ke pelosok daerah, karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas dalam siaran informasi. Hal krusial selain memberantas korupsi adalah bagaimana budaya korupsi yang dilakukan oleh para birokrat tidak ditiru oleh generasi penerus bangsa khususnya adalah pemuda. Pengguna new media sebagian besar di dominasi oleh pemuda, twitter, facebook, website, path, instagram, skype, dan lain-lain. Kampanye anti korupsi akan lebih masif menggunakan new media, karena hampir setiap harinya mereka menggunakan *social media* untuk kepentingan komersial, komunikasi, atau hanya untuk sekedar eksistensi. Social movement yang hadir di media terkait *tranding topic* hari inintentya akan berpengaruh terhadap sikap pemuda, dalam hal ini diambil contoh hashtag #NoKorupsi dapat memberikan edukasi terhadap kaum muda tentang pentingnya kejujuran dan imbas dari korupsi. Hasilnya adalah kaum muda berperan aktif dan turut andil dalam mengawasi kinerja pemerintah dan meminimalisir tindak kasus korupsi, menggemakan jargon KPK dan di implementasikan dalam dunia nyata.

F. Menuju Ketahanan Energi Di Tahun Emas Indonesia

[Oleh: Yoki Al Mahri]

Pendahuluan

Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang cenderung meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini. Permasalahan tersebut menjadi perhatian bagi hampir semua negara negara produsen minyak maupun negara konsumen. Dalam konteks itu, sekarang posisi Indonesia masih sebagai negara pengekspor energi (*net energy exporter*), khususnya eksportir batu bara terbesar di dunia dan eksportir terbesar di tingkat regional untuk gas bumi dan bahan bakar nabati. Selain minyak dan produk minyak, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemandirian energi. Pengembangan produksi batubara, gas bumi, minyak sawit dan biomassa, serta peningkatan yang sangat substansial dalam eksploitasi potensi energi terbarukan, telah sangat membantu dalam keberhasilan ini. Meskipun demikian, semakin berkurangnya cadangan dan pasokan energi terkhususnya minyak dan gas bumi Indonesia, sehingga menuntut Indonesia semakin bergantung dengan pasokan minyak impor bahkan saat ini Indonesia menjadi negara importir minyak terbesar kedua di tingkat regional.

Indonesia memiliki nilai subsidi BBM yang sangat besar, yang selalu menjadi masalah sejak Indonesia masih menjadi *net oil exporter*. Meningkatnya konsumsi energi Indonesia yang disebabkan meningkatnya standar kehidupan, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang demikian cepat berdampak menjadi faktor berubahnya pola konsumsi masyarakat Indonesia, sedangkan pasokan dan cadangan energi Indonesia tidak mampu memenuhi hal itu. Memenuhi pertumbuhan kebutuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan dari pasokan energi menjadi pilar utama dari kebijakan dan strategi ekonomi Indonesia. Kesenambungan keberhasilan ekonomi, politik dan sosial sangat bergantung pada kemampuan Indonesia dalam memastikan ketahanan energi dan kemampuan untuk memenuhi permintaan energi yang terus berkembang.

Ketahanan Energi

Secara umum, ketahanan energi diartikan sebagai suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat luas akan energi dapat dipenuhi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ketersediaan, keterjangkauan, dan akseptabilitas. Ketahanan energi berhubungan dengan mengamankan energi masa depan suatu bangsa dengan cara

mendapatkan sumber daya energi yang stabil dan berkecukupan dengan harga terjangkau.

Ketahanan energi bukan hanya diartikan hanya sekedar tersedianya pasokan energi dimasa depan, tapi harus digambarkan dalam empat indikator, yaitu bagaimana ketersediaan fisiknya (*availability*), kemudahan memperolehnya (*accessibility*), keterjangkauan harganya (*affordability*), dan kualitas yang diterima (*acceptability*).¹²⁸ Empat faktor ini harus dipenuhi untuk dikatakan suatu negara mencapai ketahanan energi, sebagaimana dengan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi energinya, Indonesia menghadapi menghadapi berbagai tantangan/permasalahan ketahanan energi, yang tampak pada ke semua empat indikator tersebut.

Kondisi Indonesia Hari ini dan Akan Datang

A. Kondisi Demografi

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk Indonesia hasil sensus terakhir pada 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di perkotaan 118.320.256 jiwa (49,79%) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%), dan laju pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, maka Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang pada tahun emas Indonesia, di 2035 sebanyak 305 juta jiwa atau meningkat 28,6% dari tahun 2010 dengan demikian Indonesia akan berada di posisi ke lima jumlah penduduk terbesar di dunia, setelah China, India, Amerika dan Nigeria.¹²⁹

B. Kondisi Pasokan Energi

Kondisi energi saat ini Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari tercapainya ketahanan energi. Pada tahun 2000 Indonesia merupakan produsen minyak terbesar di ASEAN. Namun pada perkembangan selanjutnya terjadi penurunan produksi. Konsumsi energi primer telah meningkat lebih dari 50% sejak tahun 2000 hingga 2015, sedangkan produksi minyak, yang masih mendukung sebagian besar kebutuhan energi, semakin menurun dari puncak produksi sejumlah 1,6

¹²⁸ BAPPENAS, 2015. Makalah Kebijakan mengenai Ketahanan Energi

¹²⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, Hasil sensus penduduk Indonesia di 2010

juta barel per hari menjadi hanya 861.000 barel per hari di tahun 2012. Hal ini kemudian juga diikuti dengan cadangan minyak yang ikut menurun lebih dari 1,9 miliar barel sejak 1992, fakta diatas merupakan penurunan paling tajam pernah terjadi di Asia.¹³⁰

Permintaan energi di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Pada 2013, energi fosil menyumbang 94,3 persen dari total kebutuhan energi (1.357 juta barel setara minyak). Sisanya, 5,7 persen dipenuhi dari EBT. Dari jumlah tersebut, minyak menyumbang 49,7 persen, gas alam 20,1 persen, dan batubara 24,5 persen. Separuh dari minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri harus diimpor, baik dalam bentuk minyak mentah (*crude oil*) maupun produk minyak. Dengan kondisi tersebut, ketahanan energi Indonesia tentu menjadi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi di pasar global.

Untuk memenuhi kekurangan pasokan di dalam negeri, minyak mentah harus diimpor. Impor minyak mentah selama ini berasal dari Arab Saudi, kawasan Mediterania, Afrika Barat, Asia Pasifik, dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Dari data BPS, impor minyak mentah pada Februari 2014 sebanyak 1,2 juta ton dengan nilai US\$ 1,06 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang hanya sebesar 1,05 juta ton dengan nilai US\$ 902,36 ribu.¹³¹

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah ruah terutama, seperti minerba (mineral dan batu bara), minyak bumi, gas bumi, panas bumi, air, dan sebagainya. Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung beberapa dekade, pertumbuhan penduduk (termasuk migrasi dari desa-desa ke kota), serta perubahan gaya hidup yang semakin *energy-intensive*, permintaan terhadap energi terus tumbuh di Indonesia. Dalam tiga tahun mendatang (2019), permintaan energi di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan laju sebesar 5-6% untuk energi primer, dan 7-8% per tahun untuk energi final.¹³² Seiring dengan pertumbuhan konsumsinya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan/permasalahan ketahanan energi. Seiring dengan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, maka jumlah kebutuhan energi akan berbanding lurus dengan kebutuhan jumlah energi masyarakat, sedangkan pasokan dan cadangan

¹³⁰ Eberhard, Ronald, 2011. *Peran Diplomasi Indonesia untuk Ketahanan Energi Nasional*, Jurnal Diplomasi Edisi Ketahanan Pangan dan Energi, hal.66

¹³¹ Muhammad As Hikam, 2014. *Ketahanan Energi Indonesia 2015-2025: Tantangan dan Harapan*. Jakarta: Rumah Buku. hal. 204

¹³² BAPPENAS, 2014. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, Draft

energi Indonesia semakin berkurang, sehingga menjadi problem serius di masa depan.

Berdasarkan konsumsi energi Indonesia masih di bawah rata-rata dunia dengan besaran 0,85 setara ton minyak (STM) per kapita, atau hanya 50% dari rata-rata konsumsi energi per kapita dunia.¹³³ Bahkan Indonesia di antara negara ASEAN masih jauh tertinggal. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat di masa depan. Pada tahun 2010, berdasarkan jumlah penduduk kebutuhan energi Indonesia sebanyak 198,46 juta STM dan diprediksi pada 2025, 2035 mencapai secara berurutan 464,47 juta STM, 575,79 juta STM dan akan tetap meningkat setiap tahunnya.¹³⁴

Potensi Energi Indonesia

1. Minyak Bumi, LPG

Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak bumi di dunia. Cadangan minyak bumi tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Cadangan paling besar berada pada wilayah Sumatera Bagian Tengah, Kalimantan Bagian Timur dan Jawa bagian Timur. Pada tahun 2013 cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.549,81 *million stocks tank barrels* (MMSTB), terdiri dari cadangan terbukti 48,9% dan cadangan potensial 51,1%. Cadangan terbukti merupakan cadangan yang memiliki tingkat kepastian paling tinggi, informasi bawah permukaannya lebih lengkap jika dibandingkan cadangan potensial. Cadangan terbukti terbagi menjadi 2, yaitu cadangan terbukti yang sudah dikembangkan dan cadangan terbukti yang belum dikembangkan. Cadangan terbukti Indonesia sebesar 3.692,50 MMSTB sedangkan cadangan potensial jumlahnya lebih tinggi 3.857,31 MMSTB¹³⁵.

Indonesia memiliki 10 kilang dengan kapasitas pengolahan minyak sekitar 1.169,1 thousand barrels of oil per calendar day (MBCD), 8 kilang dioperasikan oleh Pertamina (90% dari total kapasitas kilang) dan 2 lainnya dioperasikan oleh perusahaan swasta yaitu Trans Pacifik Petrochemical Indotama (TPPI) dan Tri Wahana Universal (TWU). Kilang yang dimiliki Pertamina yaitu kilang Dumai (127 MBCD), Sungai Pakning (50 MBCD), Plaju (127,3 MBCD), Cilacap (348 MBCD), Balongan (125 MBCD), Cepu (3,8 MBCD), Balikpapan (260 MBCD) dan Kasim (10 MBCD) (Gambar 2.5). Sedangkan kapasitas kilang TPPI Tuban sebesar 100 MBCD dan TWU sebesar 18 MBCD. Terdapat rencana pembangunan/upgrade kilang di Bontang dan Cilacap dengan total kapasitas 362 MBCD.

¹³³ _____, 2012. Asumsi Konsumsi Energi Indonesia

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Pertamina, 2013. Statistik Minyak dan Gas Pertamina

Produksi BBM dari kilang dalam negeri tahun 2013 sebesar 237.505 kb menurun 1,18% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 240.330 kb. Produksi LPG dari kilang dalam negeri juga mengalami penurunan sebesar 8,66% dari 2.201.539 ton tahun 2012 menjadi 2.010.990 ton di tahun 2013. Walaupun produksi BBM dari kilang dalam negeri mengalami penurunan tetapi konsumsi BBM meningkat 0,21% dari 398.430 ton tahun 2012 menjadi 399.259 ton tahun 2013. Konsumsi LPG mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 11,47% dari 42.883 ribu BOE tahun 2012 menjadi 47.801 ribu BOE tahun 2013. Peningkatan konsumsi LPG dipengaruhi program konversi minyak tanah ke LPG yang dilakukan hampir diseluruh wilayah Indonesia.¹³⁶

Pada tahun 2013 produksi kilang dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan BBM dan LPG. Untuk jenis premium produksi dalam negeri 37,7%, solar 64,9% dan avtur 77,2%, sedangkan minyak tanah dipenuhi 100% dari produksi dalam negeri. Program konversi minyak tanah ke LPG berpengaruh besar terhadap penurunan konsumsi minyak tanah. Meskipun produksi kilang dalam negeri tidak mencukupi, tetapi kapasitas kilang tidak bisa langsung digunakan secara maksimum. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: karena umur kilang yang sudah tua, tidak semua jenis minyak mentah produksi dalam negeri dapat diolah pada kilang dalam negeri dan perbaikan atau revitalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada tahun 2013 berdasarkan hasil pengolahan kilang, rata-rata dioperasikan 81,8% dari total kapasitas kilang.

2. Gas Bumi

Indonesia adalah salah satu produsen gas bumi yang diperhitungkan di wilayah ASEAN. Indonesia memiliki cadangan gas bumi mencapai 150,39 trilionstandard cubic feet (TSCF), terdiri dari cadangan terbukti 67,5% dan cadangan potensial 32,5%. Cadangan terbukti Indonesia sebesar 101,54 TSCF, jauh lebih tinggi dibandingkan cadangan potensial yang jumlahnya sebesar 48,85 TSCF. Cadangan gas bumi tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia, sebagian besar berada pada lepas pantai (offshore). Cadangan gas bumi paling besar berada pada wilayah perairan Natuna, Papua Barat, Sumatera bagian selatan dan perairan Maluku.

Pada tahun 2013, cadangan terbukti gas bumi yang dimiliki oleh Indonesia sebesar 101,5 TSCF mengalami penurunan 6,4% dari 108,4 TSCF pada tahun 2010. Dengan tingkat produksi sebesar 2,96 TSCF pada

¹³⁶ *Ibid.*

tahun 2013, dapat diperkirakan bahwa cadangan gas bumi Indonesia akan habis dalam waktu 34 tahun ke depan. Indonesia pada tahun 2013 memproduksi gas bumi sebesar 8.130 million *standard cubic feed per day* (MMSCFD), mengalami peningkatan sebesar 4,24% dari 7.800 MMSCFD pada tahun 2001. Pemerintah Indonesia memproyeksikan bahwa produksi gas Indonesia pada tahun 2017 menjadi sebesar 7.966 MMSCFD, dan akan mengalami penurunan menjadi sebesar 3.339 MMSCFD di tahun 2030.¹³⁷

¹³⁷ *Ibid.*

G. Menengok Energi Terpendam dari Ranah Minang

[Oleh: Robi Candra]

Energi adalah potensi yang dimiliki suatu benda ataupun kandungan dari suatu unsur yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk proses perubahan. Energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan melainkan energi dapat ditransformasikan dari bentuk awal ke bentuk energi yang lain. Secara teknologi kebutuhan utama yang diperlukan untuk menciptakan maupun mengoperasikan teknologi itu sendiri adalah energi.

Berdasarkan klasifikasinya, energi terdiri dari dua jenis yaitu energi fosil (energi tak terbarukan) dan energi terbarukan. Singkatnya, energi fosil ialah energi yang tidak ramah lingkungan sedangkan energi terbarukan adalah energi yang ramah lingkungan. Sejak jaman penjajahan hingga era reformasi Indonesia khususnya di Sumatera Barat masih cenderung menggunakan energi fosil yang mana energi ini menghasilkan emisi CO₂ yang persentasenya cukup besar. Emisi CO₂ yang berlebihan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun siklus kehidupan masyarakat. Maka, alternatif akan kebutuhan energi diperlukan energi terbarukan (*renewable energy*) untuk menunjang dan bisa mengganti kebutuhan energi yang tak terbarukan.

Energi terbarukan merupakan energi yang tak terbatas atau berkelanjutan sehingga menjadikan energi ini ramah lingkungan. Energi ini hampir tidak menghasilkan CO₂ karena energi yang sudah digunakan langsung kembali ke alam (wujud aslinya) dan bersirkulasi secara berkesinambungan yang ditransformasi ke dalam bentuk energi lain. Salah satunya energi panas bumi dialternasikan menjadi energi listrik. Beberapa bentuk energi terbarukan lainnya yaitu energi surya, energi angin, energi air, energi gelombang laut dan bioenergi. Energi-energi ini merupakan bentuk dari energi primer (bersumber langsung dari alam) sedangkan energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ialah energi sekunder. Maksudnya, energi sekunder ialah bentuk transformasi dari energi primer.

Kebutuhan energi sangat berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi penggunaan energi khususnya, energi bahan bakar dan energi listrik. Kebutuhan energi bisa dikatakan berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Faktanya, ketersediaan energi tidak sebanding dengan populasi penduduk. Hal ini dibuktikan dengan hampir setiap tahun terutama pada waktu-waktu konsumtif mengalami penurunan stok bahan bakar.

Selain itu, pemadaman listrik juga menunjukkan bahwa kekurangan energi listrik itu masih sering terjadi. Baik untuk masyarakat

umum maupun fasilitas publik. Jika ditelusuri di berbagai pelosok daerah masih banyak daerah yang kekurangan pasokan listrik bahkan belum mendapatkan sama sekali. Maka, solusi untuk memenuhi kekurangan dan peningkatan kebutuhan energi ialah energi terbarukan. Seperti Negara-negara maju di Eropa, Asia, Timur tengah, Australia dan Amerika sudah jauh lebih awal mengembangkan dan menggunakan energi terbarukan. Sedangkan di Negara Indonesia masih sangat sedikit penggunaannya ada yang masih dalam tahap pembangunan dan perencanaan. Maka, dengan sumber daya energi yang kita miliki harus mampu memanfaatkan energi tersebut demi ketahanan dan kemandirian energi.

Dalam pengembangan sumber daya energi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi guna menyamakan persepsi untuk eksploitasi sumber daya energi yang dimiliki agar terealisasikan. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang memiliki banyak potensi energi dan energi terbarukan diantaranya energi panas bumi, minyak, gas bumi dan energi hidro. Selain energi hidro, energi-energi tersebut sudah dieksplorasi dan diketahui ketersediaannya yang cukup besar karena belum pernah digarap sama sekali.

Sumber energi yang dimiliki Sumatera Barat saat ini telah menjadi incaran para investor untuk berinvestasi, karena potensi energinya yang cukup besar. Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno mengatakan ada beberapa perusahaan sudah berminat untuk berinvestasi di sektor energi dan sumber daya mineral. Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi minyak dan gas bumi, dimana daerah ini sudah dieksplorasi oleh PT. Radiant Bukit Barisan E&P yang diperkirakan memproduksi minyak dan gas di tahun ini. Perusahaan ini juga sudah mengucurkan dana sebesar Rp 3,8 Triliun sejak empat tahun yang lalu untuk menggali potensi energi di daerah tersebut. Pada tahap awal perusahaan membangun 4 sumur di daerah ini dan untuk jangka panjang akan dibuat 12 sumur.¹³⁸

Selain minyak dan gas bumi, Sumatera Barat juga memiliki sumber energi terbarukan yaitu energi geothermal atau panas bumi karena, secara geografis Sumatera Barat berada di kawasan gunung berapi atau daerah lingkaran api (*ring of fire*), beberapa gunung tersebut ialah gunung Kerinci yang berada di kabupaten Solok Selatan, gunung Talang di kabupaten Solok, gunung Marapi di kabupaten Tanah Datar, gunung Tandikek di Padang Panjang, gunung Talamau dan gunung Pasaman di kabupaten Pasaman Barat.

¹³⁸ Heri Faisal, Kabar24.com

Salah satu daerah yang memiliki potensi energi panas bumi yaitu kabupaten Solok Selatan karena daerah ini berada tepat di kaki gunung Kerinci. Sumber energi ini telah dieksplorasi sejak tahun 2008 oleh PT Supreme Energy Muaro Labuh (SEML) yang mana energi ini dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Dalam pengoperasiannya pembangkit ini menggunakan uap panas sebagai sumber penggerak utama untuk menggerakkan turbin uap yang dikopel langsung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Direktur Utama PT. SEML, Supramu Santosa mengatakan pihaknya telah mengeluarkan biaya Rp2 Triliun lebih dengan jumlah investasi mencapai Rp7,5 Triliun. Dimana pada tahap eksplorasi perusahaan ini menggunakan biaya sendiri, sedangkan untuk tahap eksploitasi perusahaan mendapatkan pinjaman dari beberapa Bank di luar negeri.

Saat ini perusahaan tersebut sedang mengeksploitasi dan dalam tahap pembangunan sistem pembangkit. Pembangkit ini akan dibangun dengan kapasitas turbin 1×110 Mega Watt (MW) di Liki Pinangawan Muaro Labuh, untuk tahap awal perusahaan menargetkan mampu memproduksi energi listrik sebesar 86 MW dengan membangun 13 sumur bor yang terdiri dari (8 sumur produksi, 3 sumur injeksi dan 2 sumur cadangan). Produksi energi listriknya ditargetkan akan rampung pada Agustus 2019. Pada tahap kedua, pembangunan akan dilanjutkan untuk memenuhi kapasitas 2×110 MW setelah tahap awal selesai. Produksi listrik ini kemudian akan dialirkan ke sistem interkoneksi se-Sumatera. Listrik yang akan dihasilkan nantinya akan dijual ke pembeli tunggal yaitu PT. PLN. Namun, tidak seluruh energi yang diproduksi akan dijual, ada sekitar 6 MW yang digunakan untuk *power plant* tersebut. Pemerintah Sumatera Barat juga mencanangkan pada PT. SEML untuk berkontribusi dalam pencapaian target 7.000 MW energi terbarukan di tahun 2025.¹³⁹ Meskipun ramah lingkungan, untuk mencapai pada tahap produksi pembangunan pembangkit ini membutuhkan waktu yang cukup lama dengan biaya cukup besar.

Kemudian, selain Solok Selatan, kabupaten lain juga memiliki potensi energi panas bumi yaitu Pasaman. Bupati Pasaman, Benny Utama menyebutkan daerahnya memiliki 5 titik potensi panas bumi dengan kapasitas sekitar 800 MW, di antaranya daerah Rimbo Panti, Bonjol, Duo Koto, Rao Cubadak dan Lubuk Sikaping.¹⁴⁰ Setelah panas bumi, potensi energi yang dimiliki Sumatera barat ialah energi hidro. Topografi yang rapat membuat daerah di provinsi ini banyak memiliki sumber energi hidro yang bisa dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Heri Martinus mengatakan

¹³⁹ Prabawati Srinigrum, akurat.co

¹⁴⁰ Infopublik.id

bahwa potensi energi hidro yang dimiliki Sumatera Barat mencapai sekitar 1100 MW. Saat ini baru 63 titik Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang baru dikerjakan dengan kapasitas 351 MW dan masih ada 749 MW yang belum di garap. Beberapa daerah yang terdapat titik PLTMH yang telah beroperasi dengan kapasitas 11,7 MW di tiga titik masing-masingnya Lubuk Gadang di kabupaten Solok Selatan, Manggani kabupaten Limapuluh kota dan Lubuk Sao II di kabupaten Agam.

Kemudian ada empat titik lagi sedang dalam pembangunan dengan kapasitas total 25 MW, diantaranya, Guntung kabupaten Agam, Induring kabupaten Pesisir Selatan dan Sangir Hulu di kabupaten Solok Selatan. Sedangkan titik PLTMH lainnya tersebar di daerah kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Solok, kabupaten Pasaman, kabupaten Pasaman Barat, kabupaten Tanah Datar dan kabupaten Solok Selatan. Sembilan titik dalam proses menunggu pendanaan dengan kapasitas 43 MW dan sembilan titik lagi dalam persetujuan kontrak dengan kapasitas 44 MW serta 38 lainnya sudah memiliki izin dengan kapasitas daya 226 MW.¹⁴¹ Sumatera Barat adalah lumbung energinya ranah minang. Selain minyak dan gas bumi jika ditotalkan masing-masing sumber energi listrik yang dimiliki mencapai 8.900 MW.

Sumatera Barat yang dikenal dengan sebutan Ranah Minang, selain memiliki potensi sumber energi yang banyak, salah satu provinsi di pulau Sumatera ini juga terkenal dengan kuliner, pariwisata, dan khazanah budaya. Berkaitan dengan kuliner Sumatera Barat memiliki kuliner halal terbaik di dunia salah satunya yaitu Randang dan baru-baru ini ranah minang dinobatkan sebagai destinasi wisata halal di Indonesia dan terbaik di dunia pada 2016 lalu.

Selain itu, Sumatera Barat juga memiliki banyak wisata alam yang mengagumkan. Hampir disetiap daerah terdapat lokasi wisata yang mempesona mulai dari pulau, pantai, ombak (olahraga *Surfing*), lembah (tebing), air terjun, danau, gunung hingga udara (olahraga Paralayang). Beberapa keindahan alamnya yang terkenal seperti Lembah Harau di kota Payakumbuh, Ngarai Siaonok dan Goa Jepang di kota Bukittinggi, Puncak Lawang dan danau Maninjau di kabupaten Agam, Istano Pagaruyung di Batusangkar, danau singkarak dan danau Maninjau di Solok, Puncak Gado-gado di Padang kemudian di kabupaten Pesisir Selatan ada pantai Carocok, pulau Cubadak dan Puncak Mandeh (Raja Ampatnya Sumatera), serta di kabupaten Kepulauan Mentawai yang dikenal memiliki salah satu ombak terbaik di dunia. Dari prestasi yang dimiliki, Sumatera barat dibanjiri wisatawan lokal maupun mancanegara terutama asal negara muslim. Melihat sumber daya energi yang

¹⁴¹ Miko Elfisha, www.antarasumbar.com

berlimpah ruah di Indonesia khususnya Sumatera Barat, maka kita sudah saatnya kita optimalkan demi kepentingan bangsa dan negara.

BIODATA PENULIS

1. **ABDUL HARIS IBRAHIM**

Abdul Haris Ibrahim lahir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, 7 Februari 1994. Menyelesaikan studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar. Pria berdarah Bugis ini pernah sebagai aktivis HMI Cabang Makassar Timur. Ia juga adalah Pendiri SKOLAKITA 2015, advokator lingkungan, dan jurnalis.

2. **ADHA ANGGRAINI**

Adha Anggraini, pemerhati pedidikan dan perempuan yang merupakan alumnus Psikologi Pendidikan dan bimbingan, program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Surabaya. Ia adalah jebolan HMI Cabang Surabaya, komisariat Lidah Wetan Unesa.

3. **ADHI NURSETO**

Adhi Nurseto. Penikmat Kopi hitam kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 31 januari 1991. Meraih gelar kesarjanaaan di bidang Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pernah menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Sukoharjo. Terobsesi dengan lingkungan yang bersih, sehat dan lestari.

4. **ADI PRAKOSO**

Adhi Prakoso adalah pegiat hukum lulusan Fakultas Hukum Universtas Trunojoyo, Madura. Ia punya impian sebagai penegak hukum dan keadilan. Saat ini, dia sangat tertarik untuk mengkaji hukum keangkasaan.

5. **AHMAD JAZULI**

Ahmad Jazuli adalah pemuda kelahiran Indramayu – Jawa Barat. Ia adalah pemerhati sekalaigus analis kebijakan fiskal yang juga aktif di pusat kajian ekonomi dan kebijakan publik. Pria tampan ini adalah almunus program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang, dan pernah aktif di lingkungan HMI Cabang Malang.

6. AKHMAD YUSUF

Akhmad Yusuf, lahir di Jakarta, 18 Maret 1990. Menyelesaikan studi sarjana (S1) jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, dengan skripsi berjudul *“Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat Arab “Kajian Atas : Jaringan Perdagangan Masyarakat Arab di Batavia Tahun 1990-1942”*. Ketika kuliah aktif sebagai aktivis HMI Cabang Ciputat, dan pernah menjadi ketua Senat Mahasiswa UIN. Saat ini ia aktif sebagai peneliti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta menjadi pengurus jurnal di Fakultas Adab dan Humaniora (*Bulletin Al-Turas*). Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai reporter olahraga di MNC Media selama kurang lebih satu tahun.

7. AMYLIA KARUNIA AR

Amylia Karunia Arrakhman, Gresik-Jawa Timur adalah tanah kelahirannya. Alumnus Fakultas Ushuluddin konsentrasi Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini dikenal sebagai penggiat sosial, antara lain mengajar anak-anak jalanan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Kini ia sedang fokus merintis komunitas yang dibinanya *“Generasi Anak Negeri”*. Jika ingin bersilaturahmi bisa melalui email: amel.karunia@gmail.com atau bisa di No. HP: 085608903557.

8. ANAS ABDUL KADIR

Anas Abdul Kadir adalah fungsionaris PB HMI yang berminat dengan ekonomi dan bisnis. Bercita-cita jadi pengusaha.

9. ANDIK SURYANSYAH

Andik Suryansyah lahir di Samboja, 3 Juni 1993. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Konsentrasi Pemerintahan, lulus 2015. Di pentas organisasi aktif di HMI Komisariat Hukum. Tahun 2013-2014 sebagai sekretaris Umum, tahun 2014-2015 menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Cabang Bangkalan. Untuk silaturahmi, bisa melalui HP: 085258850255/085856561507 dan Email : andik9suryansyah@gmail.com.

10. AZIZURROCHIM

Azizurrochim yang sering disapa Aziz, lahir di Kediri-Jawa Timur, 13 Oktober 1993. Ia lulus tahun 2016 dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Baginya belajar itu bukan hanya di satu tempat, tetapi ada banyak tempat yang bisa dijadikan sebagai lapangan belajar. Ia sekarang tinggal di Desa Kedawung Rt. 02/04 Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Jawa Timur, Email: azizroh2@gmail.com, Hp: 085735320773.

11. BIMA FIKRI

Bima Fikri adalah alumnus Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. Pernah belajar di HMI Cabang Malang, dan berharap suatu saat ingin jadi ilmuwan pertanian.

12. DEDY MUZLAHINUR

Dedi Muzlahinur, adalah seorang organisator, aktivis serta intruktur training kepemimpinan tingkat regional dan nasional. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Aceh ini telah malang melintang dalam pergerakan. Sejak demisioner dari Sekretaris Umum HMI Cabang Blangpidie dan pengurus DPD KNPI Aceh Barat Daya, ia lebih dikenal sebagai pengamat dan peneliti di bidang sosial, politik, kebijakan publik dan ekonomi di Aceh Research and Consulting (ARC).

13. DESY PRATIWI IRMA SURYANI

Desy Pratiwi Irma Suryani, lahir di Lampisi, Kota Jambi, 12 Desember 1994. Ia adalah alumnus Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Ilmu Pemerintahan. Tertarik dengan dunia politik, pemerintahan, kebijakan publik dan pariwisata. Skripsinya berjudul "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif". Sebagai orang yang terbuka dan senang berteman, sangat tidak dibatasi sekali untuk menjalin silaturahmi baik dalam keperluan diskusi, curhat, bisnis, dan hal lainnya dapat langsung dihubungi melalui No. HP: 085266658494, atau email: irmadesypratiwi@gmail.com

14. DORA ELIA KASIH

Dora Elia kasih, lahir di Jeranglah-Bengkulu, 10 Oktober 1993. Ia adalah lulusan FISIP Universitas Bengkulu, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pernah bekerja sebagai bankir di HSBC Jakarta, sebagai salah satu *Head Office* (HO). Ia terobsesi dengan reformasi birokrasi di Indonesia agar berjalan sebagaimana mestinya guna memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.

15. **FAISYAL**
Faisyal lahir di Desa Lanta Barat, Kec. Lambu, Kab. Bima, NTB, 26 Maret 1994. Alumnus Statistika Universitas Brawijaya, Malang, 2016. Pernah aktif di lingkungan HMI Cabang Malang. Beraktivitas sebagai analis data, konsultan statistik dan menjabat sebagai direktur riset dan konsultasi Lembaga Riset Demokrasi dan Perdamaian NTB.
16. **FAIZ ZAWAHIR MUNTAHA**
Faiz Zawahir Muntaha adalah aktivis kelahiran Garut yang terjun dalam berbagai kelompok diskusi, kegiatan dakwah dan kemasyarakatan. Alumnus UIN Sunan Gunung Jati Bandung jurusan tarbiyah ini menjabat sebagai pengurus HMI BADKO JABAR. Menulis di jurnal, media massa dan aktif menjadi pembicara seminar dan training kemahasiswaan dan kepemudaan, serta sebagai mubaligh.
17. **FATIMAH TUZOHRA**
Siti Fatimah Tuzahro lahir di Indramayu-Jawa Barat, 11 Desember 1992. Menyelesaikan studi SI jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Saat ini beraktivitas sebagai admin KPA Kab. Cirebon, dan finance PKBI Cirebon.
18. **FATMA FARICHA**
Fatma adalah alumnus Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, dan HMI Cabang Malang.
19. **FERDIAN ANANTA**
Ferdian Ananta, lahir di Banten 24 tahun silam. Alumnus UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, jurusan hukum tata negara. Aktif dalam berbagai kegiatan literasi dan kemasyarakatan. Pernah menjadi wartawan majalah kebudayaan Ruang Rekonstruksi (2013-2015), bahkan sempat menjabat sebagai pimpinan pada tahun terakhir. Hingga kini masih tercatat sebagai presiden Rumah Baca Damar26 dan *founder* komunitas Bunga Padi. Menulis Sajak, Prosa, dan Esai di beberapa media massa di Banten. Buku terbaru (on going) "Membaca Arah Angin" (kumpulan esai dan reportase investigasi), dan "Sajak Para Petarung (GAKSA INTERPRISE)".
20. **FREDY HANDOKO**
Fredy Handoko lahir di Senujuh, Sambas, Kalimantan Barat, 22 Desember 1992. Alumnus Universitas Tanjung Pura, jurusan pendidikan ekonomi. Aktivis HMI yang kerap "dituduh" tentara lantaran ketampanannya ini ternyata seorang guru.

21. NURJAYA

Pria yang diakrab Jaya, lahir di Indramayu, hari jumat, 21 Agustus 1992. Semasa kuliah ia aktif di beberapa lembaga survei nasional dan berhasil menamatkan gelar sarjananya pada program studi Ilmu Sejarah Universitas Udayana, Bali. Sembari menyiapkan program S2, kini ia masih aktif di kepengurusan HMI Cabang Denpasar dan memiliki aktivitas sampingan sebagai tentor di Emermous Bali. Ia dapat dihubungi via email nurjayahistory@gmail.com atau No HP: 089678160511.

22. HAIKAL

Haikal. Pria berdarah Bugis Luwu ini pernah menjadi Presiden Mahasiswa di STIE YPUP Makassar. Saat ini stay di Jakarta dan aktif di Bakornas LEMI PB HMI (Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam). Di waktu luang ia sempatkan bergelut di *Jasa Design Graphic*. Silaturahmi bisa via email: haikalhalik@gmail.com, HP: [+62 82344707838](tel:+6282344707838).

23. HERA YULITA

Hera Yulita lahir di Ketapang, Kabupaten paling selatan di Kalimantan Barat pada 27 Juli. Menyelesaikan studi di IKIP-PGRI Pontianak jurusan Pendidikan Sejarah, 2016. Pecinta buku, penikmat kopi, peminat sastra dan humaniora. Tertarik dengan studi sejarah lisan. Sekarang sedang aktif sebagai Manager Media dan Promosi dari Komunitas Wisata Sejarah (KUWAS) Pontianak dan baru saja melahirkan buku "*Kumpulan Cerita Rakyat Kalimantan Barat anak Umang dan Kunang-Kunang*" bersama komunitasnya Satu Paragraf (SAPA) Pontianak pada Juni 2017. Beberapa tulisannya bisa diakses di Blog: heraheran.blogspot.com. Ia bisa menerima interaksi via Email: herayulita@gmail.com.

24. ITA SEPTIYANI

Ita Septiyani, lulusan dari program studi Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seorang perempuan yang tertarik sebagai analis media dengan fokus penelitian terkait isu-isu di media massa. Sebelumnya, perempuan yang memiliki hobi seni musik dan tari ini pernah aktif sebagai seorang jurnalis dan *public relation*. Kota pelajar menjadi saksi bisu betapa tak mudahnya memperjuangkan cita-cita tapi *nothing impossible*. Jika ingin bersilaturahmi atau sharing soal media, seni musik, dan seni tari bisa contact via E-mail itaseptiyani07@gmail.com atau HP: 085742245724.

25. KHOIRUL UMAM H

Khoirul Umam H, berprofesi sebagai *Lecturer*, dan *Director of Kantor Jasa Akuntansi KUH* (SK Menteri Keuangan Republik Indonesia: 103/KM.1PPPK/2015). Ia dibesarkan di lingkungan NU Jombang. Pria berdarah Madura ini, menempuh studi program S1 jurusan ekonomi akuntansi di Universitas Brawijaya, dan menyelesaikan program pascasarjana S2 di jurusan dan kampus yang sama. Semasa kuliah ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat Ekonomi HMI Cabang Malang.

26. MAHMUD HIDAYATUROHMAT

Mahmud, lahir di Tanjungpinang, 15 November 1993. Ia menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), 2016. Pernah menjadi asisten dosen mata kuliah Pemrograman Website tahun 2016, juga aktif di berbagai organisasi antara lain Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HMTI) (2013-2014), Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Fakultas Teknik (2015-2016). Di HMI, sempat diamanahkan sebagai Ketua Umum Komisariat (2015-2016), lalu Bendahara Umum HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan (2016-2017). Saat ini beraktivitas sebagai spesialis IT pada beberapa media masa *online* lokal di provinsi Kepulauan Riau.

27. MAWARDIN

Mawardin adalah peneliti yang meminati kajian keamanan internasional, ekonomi politik global, dan komunikasi politik. Ia adalah lulusan FISIP Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar. Pernah aktif di HMI Cabang Makassar Timur. Kini Putra Bima itu sedang 'bertapa' di beberapa lembaga/yayasan/komunitas sembari membidik 'jodoh'.

28. MOHAMMAD ANIS SUMADI

Mohammad Anis Sumadi, lahir di Pamekasan, Madura, 26 November 1989. Menyelesaikan S1 Perbankan Syari'ah di STAIN Pamekasan. Di intra kampus pernah menjadi Presiden BEM STAIN Pamekasan 2014-2015, saat ini menjadi Pengurus BPL PB HMI periode 2016-2018. Pri ini memiliki Motto : Sekali Hidup, Hiduplah Yang Berarti.

29. MUH. SYAINUL ARIFIN TORA

Pria yang akrab disapa Syainul, lahir di Latoma, Sulawesi Tenggara, 8 Oktober 1993. Alamat: Jln. Mali No. 148 Kel. Latoma, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara. Alumnus Universitas Lakidende, Sulawesi Tenggara ini adalah aktivis HMI Cabang Konawe yang juga pernah menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Lakidende 2014-2016. Pri satu ini ingin membangun negeri mulai dari desa menuju Indonesia Sejahtera. Dia yakin bahwa kesejahteraan harus dimulai dari sistem yang paling rendah.

30. NASRULLOH ALI MUNIF

Nasrulloh Ali Munif atau yang lebih sering disapa Munif, lahir di Kota Marmer Tulungagung, Jawa Timur, 3 Desember 1992. Ia lulus tahun 2016 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Tulungagung. Baginya hakikat hidup adalah cinta dan hakikat cinta adalah tidak berharap sepeserpun darinya. Ia sekarang tinggal di sebuah desa terpencil yang asri nan indah. Jika berkenan singgah bisa kontak via Email: alimunib363@gmail.com, Phone: 085 707 427 775.

31. RAHMAT SYARIF

Rahmat Syarif, hangat disapa Mamet, adalah koordinator publikasi di Rumah Baca Philosophia yang juga berminat dengan diskursus dan praxis bisnis sosial. Pernah mengaji di HMI Cabang Makassar Timur, dan menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar. Di tahun 2018 akan menempu pendidikan *Master Degree* di Australia, dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia Melalui LPDP.

32. RAHMADI M. ALI

Rahmadi M. Ali, adalah alumnus Teknik Informatika Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Pegiat di Komunitas Panteu Menulis Pasee dan spesialis IT. Pernah jadi ketua HMI Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara. Alumni Pesantren Terpadu Misbahul Ulum Paloh ini juga adalah anggota Komunitas Demokrasi Aceh Utara.

33. RIANDA RIDHO

Rianda Ridho adalah alumnus HMI Cabang Makassar Timur, dan Sarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.

34. ROBI CANDRA

Robi Candra adalah alumnus HMI Cabang Padang. Pria berdarah Minang ini adalah lulusan teknik di sebuah PTS di Padang.

35. SABIL MOKODENSEHO

Sabil Mokodenseho, lahir di Desa Ambang II, 27 Maret 1992, merupakan putera asli Daerah Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Pemuda yang dikenal meminati kajian-kajian Toleransi Antar Umat Beragama ini, menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2016. Ia dikenal ramah dan toleran dengan selaras dengan slogan kedaerahan Sulawesi Utara, **“Torang Samua Basudara”** yang artinya “Kita Semua Bersaudara”. Bagi yang ingin bersilaturahmi, bisa melalui email: sabil.mokodenseho@gmail.com. & No. Hp: 082192363571.

36. SERPIAN

Serpian, akrab disapa Fian, adalah pustakawan di Rumah Baca Philosophia dan penggiat bisnis sosial di Makassar. Pernah digembleng di HMI Cabang Makassar Timur. Lelaki baik ini pernah belajar di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP), Universitas Brawijaya (UB). Kini ia menetap di Makassar untuk menekuni bisnis coklat yang bernuansa *social enterprise* dengan harapan kelak dapat mendorong petani kakao untuk mampu mengelola pasca panennya. Ia bisa dihubungi melalui email: serpian.fian@yahoo.co.id.

37. SINTA FEBRIA NINGSIH

Gadis cantik ini viral di masyarakat Sinta Tanjung, seorang gadis keturunan Minang yang menerima takdir terlahir di Tanah Jambi tepatnya 24 tahun silam. Alumnus STKIP Bangko, Kab. Merangin, Jambi jurusan pendidikan Bahasa Inggris. Kini masih aktif berorganisasi sebagai staf salah satu departemen bidang di Kepengurusan Kohati PB HMI Periode 2016-2018. Punya mimpi suatu saat kelak memiliki usaha sendiri yang mampu memperkerjakan orang banyak.

38. SIRAJUDDIN

Sirajuddin, hangat disapa Daeng Raju adalah lulusan fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Pria kelahiran Takalar-Sulawesi Selatan ini adalah aktivis jebolan HMI Cabang Manado yang aktif dalam advokasi hukum untuk kaum tertindas. Selain ber HMI, dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum, Badan Perwakilan Mahasiswa [BPM FH UNSRAT 2014-2015]. Pria pendiri “Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi” [LDHK FH UNSRAT] saat ini, bersama rekan-rekan pemuda di desanya memberdayakan anak-anak pesisir Takalar dengan mendirikan *“Sekolah Alam”* dan mengaktifkan Karang Taruna, serta membentuk Aliansi Masyarakat Pesisir [AMP] untuk mengawal kebijakan pemerintah setempat.

39. SRI HARDIYANTI

Sri Hardiyanti, lahir di Bengkulu, 2 September 1994. Alumni pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu. Ia hobi membaca, menulis puisi, sketsa, dan berorganisasi sejak SMA. Terbukti, ia menjadi ketua Seroja Bengkulu dan terpilih sebagai Duta Anak Provinsi Bengkulu yang menyuarakan suara anak di Kongres Anak Indonesia ke-IX di Bangka Belitung 2010. Di bangku kuliah, mantan jurnalis muda koran harian Rakyat Bengkulu 2010 ini terus aktif di organisasi. Kabid eksternal KOHATI HMI BADKO SUMBAGSEL ini konsen juga dengan dunia anak sampai bergerilya mendirikan Panggung Anak Bangsa, mengajak anak-anak membudayakan literasi di sepanjang pesisir Bengkulu, juga menjadi koordinator pustaka bergerak Rafflesia Membaca.

40. SYAIFUL ALAMSYAH

Syariful alamsyah, tinggal di blang ado buloh blang ara, Kec. Kutamakmur, Kab. Aceh Utara. Ia adalah lulusan STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, jurusan pendidikan Bahasa Inggris. Ia juga adalah lulusan Sekolah Demokrasi Aceh Utara. Ia sangat tertarik dengan kajian Islam, politik, dan kebijakan publik.

41. SYAMSUL ADNAN

Syamsul Adnan, lahir di Gelonto, Lombok Tengah-NTB, 31 Desember 1990. Ia adalah lulusan IKIP Mataram, jurusan pendidikan Bahasa Inggris. Pernah bekerja sebagai Guru SMK Pariwisata Anak Bangsa di Lombok, Chef di Ombak Sunset, Room Boy di Sudamala Suit & Villas Hotel. Di lingkungan HMI Cabang Mataram, pernah menjabat sebagai Ketua Umum BPL. Ia sangat tertarik dengan dunia pendidikan, pariwisata dan pemberdayaan komunitas literasi.

42. TRI LESTARI PUSPITANINGRUM

Tri Lestari Puspitaningrum, hangat disapa Ningrum. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga sederhana di Brebes, Jawa Tengah. Ia adalah anggota Keluarga Alumni Gajah Mada (KAGAMA) sejak 2013, dimana ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana pada Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada dengan skripsi berjudul “Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Pantura: Studi terhadap Relasi Sosial Ekonomi antar Aktor”. Saat kuliah, ia menjadi aktivis HMI Cabang Bulaksumur-Sleman, Pramuka UGM, dan Koperasi Mahasiswa, juga aktif pada kepanitiaan yang diselenggarakan oleh Direktorat di Kampus UGM.

43. ZAINURI

Zainuri, lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 10 Februari 1993. Saat ini berdomisili di Kota Palangka Raya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Ia adalah lulusan pendidikan Strata-1 di IAIN Palangka Raya, konsentrasi pada Pendidikan Bahasa Inggris. Semasa kuliahnya diisi dengan mengikuti kegiatan dan organisasi. Pernah menjadi delegasi pada *International Symposium by OISAA at Singapore* 2015, dan diundang menjadi salah satu pembicara Internasional Seminar Cultural Fiesta di Kerala, India di kampus berbasis Islam *Ma'din Academy*, sekaligus menjadi bagian dari inisiator kerjasama IAIN Palangka Raya dan *Ma'din Academy* dalam kelas internasional.

44. YOKI AL MAHIR

Yoki adalah alumnus Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU), Medan. Menjabat sebagai sekretaris umum HMI Cabang Medan. Bercita-cita ingin jadi “Pengusaha Minyak dari Medan”.